

PEREKONOMIAN INDONESIA



KUSUMANTORO
KEMAL BUDI MULYONO

PEREKONOMIAN INDONESIA

Penulis:

Dr. Kusumantoro, M.Si

Kemal Budi Mulyono, S.Pd., M.Pd.

Penyunting Naskah:

M. Fathur Rahman, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul:

Raihan Zen A

Habib Amar

Diterbitkan oleh:

LPPM UNNES

Gedung Prof. Retno Sriningsih Satmoko Kampus Sekaran Gunungpati Semarang

Kode Pos: 50229, Telp: (024) 8508089 Fax: (024)8508089

Email: lppm@mail.unnes.ac.id

ISBN:

Cetakan Pertama, Juni 2022

Hak Cipta © pada penulis dan dilindungi Undang-Undang Penerbitan Hak

Penerbitan pada LPPM UNNES



❖ Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Tak lupa juga mengucapkan salawat serta salamsemoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

Kami ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku ajar ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua kami, rekan-rekan kami, penerbit, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Adapun, buku kami yang berjudul ‘Perekonomian Indonesia’ ini telah selesai kami buat secara semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana perekonomian Indonesia.

Dalam buku ini terdiri dari 15 bab yang membahas mendetail mengenai perekonomian yang ada di Indonesia dari sistem ekonomi sampai kedalam *outlook* perekonomian yang ada di Indonesia.

Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai perekonomian Indonesia serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih.

Semarang. Juni 2022

Penulis

❖ Daftar Isi

BAB I SISTEM EKONOMI.....	1
A. PENGERTIAN TENTANG APA ITU SISTEM EKONOMI.....	1
B. PENDEKATAN MELALUI SISTEM EKONOMI.....	3
C. JENIS-JENIS DARI SOSTEM EKONOMI.....	5
BAB II PERTUMBUHAN EKONOMI	12
A. KONSEP PERTUMBUHAN EKONOMI.....	12
B. CIRI-CIRI DARI PERTUMBUHAN EKONOMI	13
C. TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI	13
D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI.....	16
E. METODE PENGUKURAN PERTUMBUHAN EKONOMI.....	18
BAB III STRUKTUR EKONOMI DI INDONESIA.....	20
A. KONSEP STRUKTUR EKONOMI.....	20
B. KLASIFIKASI STRUKTUR EKONOMI.....	20
C. JENIS STRUKTUR EKONOMI	21
D. SUDUT PANDANG STRUKTUR EKONOMI.....	22
E. PERTUMBUHAN STRUKTUR EKONOMI	22
F. STRUKTUR EKONOMI INDONESIA DI MASA ORDE LAMA.....	27
G. STRUKTUR EKONOMI INDONESIA DI MASA ORDE BARU	32
H. STRUKTUR EKONOMI INDONESIA DI MASA REFORMASI	35
BAB IV DISTRIBUSI PENDAPATAN.....	40
A. PENGERTIAN DISTRIBUSI PENDAPATAN.....	40
B. TOLAK UKUR DISTRIBUSI PENDAPATAN	41
C. KETIDAKMERATAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN.....	45
D. USAHA PEMERATAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN	46
BAB V PEMERATAAN PEMBANGUNAN	50
A. PENGERTIAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN	50
B. KETIMPANGAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN	52
C. FAKTOR-FAKTOR KETIMPANGAN PEMBANGUNAN	53
D. UPAYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA	56
E. TANTANGAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN	61
BAB VI KONSUMSI, INVESTASI, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH.....	65

A.	KONSUMSI	65
B.	INVESTASI.....	85
C.	PENGELUARAN PEMERINTAH	91
BAB VII	JENIS USAHA DI INDONESIA	104
A.	PERUSAHAAN PERSEORANGAN.....	104
B.	PERSEKUTUAN	109
C.	BADAN USAHA MILIK NEGARA	114
D.	PERUSAHAAN DAERAH	119
E.	KOPERASI.....	124
BAB VIII	EKONOMI KERAKYATAN PEREKONOMIAN INDONESIA.....	132
A.	KONSEP DAN PENGERTIAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN.....	132
B.	EKONOMI KERAKYATAN DALAM PRESPEKTIF AGAMA	135
C.	KOPERASI SEBAGAI WUJUD EKONOMI KERAKYATAN	138
D.	BADAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA YANG MENGIMPLEMENTASIKAN EKONOMI KERAKYATAN	141
E.	KEBIJAKAN BANK INDOENSIA DALAM MENDORONG EKONOMI KERAKYATAAN.....	146
F.	PERAN NEGARA DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN.....	152
G.	UMKM TERSENTUH OLEH PEMERINTAH	157
H.	UMKM YANG BELUM TERSENTUH OLEH PEMERINTAH.....	159
BAB IX	PEMBANGUNAN DAERAH.....	162
B.	PENGERTIAN PEMBANGUNAN	162
C.	MANAJEMEN PEMBANGUNAN	168
D.	PEMBANGUNAN INDONESIA.....	174
A.	INDIKATOR PEMBANGUNAN	181
BAB X	PENDAPATAN NASIONAL	191
A.	PENDAPATAN NASIONAL	191
E.	PENDAPATAN PERKAPITA.....	199
BAB XI	PERDAGANGAN INTERNASIONAL.....	207
A.	PERDAGANGAN INTERNASIONAL	207
B.	KONSEP DASAR PERDANGANAN INTERNASIONAL	207
C.	PENGERTIAN DAN MANFAAT PERDANGAN INTERNASIONAL	207
D.	FAKTOR-FAKTOR PENDORONG DARI PERDAGANGAN INTERNASIOANL.....	209
E.	FAKTOR PENGHAMBAT PERDANGAN INTERNASIONAL	209
F.	TEORI PERDANGAN INTERNASIONAL	210

G.	DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DARI PERDAGANGAN INTERNASIONAL	210
H.	KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DARI PERDAGANGAN INTERNASIONAL	212
I.	PERAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PEREKONOMIAN NEGARA 213	
J.	PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL.....	213
K.	JENIS-JENIS PERDAGANGAN INTERNASIONAL.....	215
L.	PEMBERITAHIAN PABEAN, BEA MASUK DAN BEA KELUAR.....	217
BAB XII PEMBAYARAN INTERNASIONAL		220
A.	PENGERTIAN SISTEM TRANSAKSI.....	220
B.	CARA DAN ALAT TRANSAKSI INTERNASIONAL.....	220
BAB XIII KEBIJAKAN FISKAL		224
A.	PENGERTIAN KEBIJAKAN FISKAL	224
B.	TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL.....	227
C.	PERAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENGATASI RESESI EKONOMI DI INDONESIA.....	228
D.	KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP DUNIA BISNIS DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENEGAH(UMKM)	230
E.	JENIS-JENIS KEBIJAKAN FISKAL.....	230
F.	MACAM-MACAM KEBIJAKAN FISKAL	234
G.	INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL.....	236
BAB XIV KEBIJAKAN MONETER.....		238
A.	PENGERTIAN KEBIJAKAN MONETER.....	238
B.	TUJUAN KEBIJAKAN MONETER	239
C.	JENIS-JENIS KEBIJAKAN MONETER.....	243
D.	INSTRUMEN-INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER.....	249
E.	KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA	253
F.	KELEBIHAN DAN KEKURANGAN DARI KEBIJAKAN MONETER.....	254
G.	KELEBIHAN DAN KEKURANGAN DARI KEBIJAKAN FISKAL	255
BAB XV <i>OUTLOOK</i> PEREKONOMIAN INDONESIA.....		256
A.	PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA.....	256
B.	PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA.....	256
C.	TANTANGAN DAN PELUANG	270
E.	PROYEKSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2022	286
F.	PROGRAM STRATEGIS DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL	286
G.	SINERGI MENJAGA PEMULIHAN EKONOMI BEKELANJUTAN	291

BAB I

SISTEM EKONOMI

A. PENGERTIAN TENTANG APA ITU SISTEM EKONOMI

Merupakan sebuah sistem di mana biasanya dapat dimanfaatkan oleh suatu pemerintahan atau negara yang berguna sebagai alat pengalokasian semua macam sumber daya dan kekayaan alam yang terdapat dan dimiliki oleh suatu negara itu sendiri yang terdiri meliputi individunya maupun organisasinya yang berdiri di negara tersebut. Adapun pengertian dan penjelasan mengenai apa itu sistem ekonomi menurut pendapat para ahli meliputi :

a. M. Hatta

Sistem ekonomi merupakan suatu alat atau sistem yang berfungsi guna untuk kepentingan pengatur jalannya kegiatan perekonomian guna nantinya dapat berguna sehingga akan dapat diterapkan pada negara serta mengharuskan semua kegiatan ekonomi tersebut berjalan berdasarkan asas dan sistem kekeluargaan.

b. Gilarso (1992:486)

Sistem ekonomi merupakan suatu alat atau yang sangat bermanfaat sebagai alat guna mengkoordinir macam-macam perilaku dan tingkah laku orang banyak atau masyarakat dengan cakupan yang luas khususnya pada semua kegiatan yang berhubungan dengan berjalannya proses kegiatan ekonomi, sehingga nantinya dapat untuk dijadikan satu-kesatuan yang bersifat teratur serta dinamis supaya dapat menghindari dari adanya potensi terjadinya kekacauan sehingga dapat dihindari secepat mungkin sebelum adanya faktor penyebab yang semakin menambah.

Dumairy (1966)

Menurut Dumairy sistem ekonomi merupakan sebuah alat yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan sebagai alat yang berfungsi mengatur jalinan hubungan dalam perekonomian antara semua individu, serta untuk dapat membentuk dan menciptakan suatu kelembagaan pada suatu negara. Jadi, sistem ekonomi tidak wajib untuk harus berdiri secara mandiri atau sendiri, akan tetapi bisa juga berkaitan dengan hal dan berbagai

macam pandangan, serta filsafat setiap individu yang berada di negara tersebut.

c. Mc. Eachren

Menurut beliau, sistem ekonomi adalah suatu mekanisme serta institusi yang digunakan sebagai alat yang berguna menjawab semua pertanyaan mengenai what, how, dan for whom barang serta jasa yang akan dimanfaatkan hasilnya
Kemudian Untuk Fungsi Sistem Ekonomi yaitu :

1) Untuk penyedia dorongan melakukan produksi

Dengan adanya sistem ekonomi pada suatu negara otomatis jalannya kegiatan ekonomi suatu negara akan lebih terarah dan juga lebih teratur. Sehingga bagi para produsen yang hendak akan melakukan kegiatan produksi juga akan lebih terdorong dengan adanya sistem ekonomi yang nantinya digunakan sebagai pijakan dalam kegiatan perekonomiannya. Sehingga kegiatan perekonomian di negara tersebut akan lebih terarah.

2) Sebagai pengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian

Kegiatan perekonomian dan individu maupun masyarakat tentunya diperlukan suatu sistem agar tidak berantakan dan mudah dikoordinir. Dengan adanya kegiatan pengkoordiniran ini maka nantinya semua kegiatan baik itu bersifat individu dalam perekonomian akan dapat terlaksana secara teratur, tertib dan terkoordinir. Sehingga nantinya akan terhindar dari kemungkinan terjadinya kekacauan dalam kegiatan ekonomi. Maka sistem ekonomi ini akan berperan sebagai tindak dari pencegahan dini terjadinya kekacauan dalam kegiatan ekonomi baik itu individu maupun kolektif.

3) Sebagai alat untuk mengatur semua hal yang berkaitan dengan pembagian dan pendistribusian hasil produksi khususnya kepada semua masyarakat.

Hasil produksi yang telah dihasilkan oleh para produsen tentunya harus bisa didistribusikan secara merata dan menyeluruh. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya peranan dari sistem ekonomi agar dibuatkan suatu kebijakan yang menekankan bahwa pendistribusian hasil produksi tidak boleh hanya bertumpuk pada suatu titik saja, melainkan

harus tersebar secara luas dan menyeluruh agar tidak terjadinya ketidak seimbangan dalam kegiatan ekonomi yang terjadi.

- 4) Berguna menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan manfaat atau dampak pada proses pendistribusian barang serta jasa supaya dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Selain itu juga sangat berperan terhadap kelancaran dari jalannya kegiatan ekonomi. dengan adanya sistem ekonomi, nantinya akan ada suatu mekanisme yang tercipta yang pastinya akan berdampak positif bagi jalannya lalu lintas kegiatan ekonomi. hal itu akan memberikan dampak yang tentunya sangat baik bagi proses kegiatan ekonomi yang sedang berjalan dan berlangsung di suatu negara.

B. PENDEKATAN MELALUI SISTEM EKONOMI

Di bawah ini adalah pendekatan-pendekatan yang dapat dan biasa digunakan dalam ilmu ekonomi.

1. Ruang Lingkup

penggunaan dan pengertian dari kata suatu sistem yang disesuaikan dengan ruang lingkup permasalahannya, sebagai berikut :

- a. Suatu sistem yang biasanya dipergunakan dalam cakupan arti yaitu sebagai metode atau dengan kata lain yaitu tata cara untuk dapat memahami suatu proses percobaan. Misalnya: suatu sistem yang dapat mengetik dengan sepuluh jari.

Suatu sistem yang digunakan untuk menunjukkan adanya suatu perkumpulan ide yang biasanya di dalamnya mengandung berbagai macam prinsip, doktrin, serta hukum-hukum yang sudah tersusun sebagai satu kesatuan. Misalnya : Sistem demokrasi liberal.

2. Kelebihan Adanya Pendekatan Sistem Ekonomi

Biasanya dengan adanya pendekatan ekonomi akan memperlihatkan persoalan mengenai ekonomi secara utuh. Jadi nantinya semua hal yang berkaitan dengan ekonomi yang biasanya dihadapi akan dapat dilihat secara luas dan menyeluruh. Jadi, akan bermunculan fakta-fakta dan akan terungkap tentunya secara bertahap dan lengkap

3. Karakteristik dari Sistem Ekonomi Indonesia

Pada semua kegiatan yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi yang diselenggarakan merupakan bagian dari kegiatan yang dijalankan secara

bersama maupun gotong royong sehingga lebih berfokus pada ikatan kekeluargaan.

Di dalamnya terdapat berbagai macam komponen dari sistem ekonomi campuran yang pastinya diterapkan pada pelaksanaan ekonomi Pancasila.

Seluruh kegiatan dan proses yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi baik itu dilaksanakan pemerintah atau negara ataupun kalangan masyarakat mengharuskan bersifat berkelanjutan serta bersifat ramah terhadap lingkungan. Negara berhak untuk menguasai berbagai macam dan cabang kegiatan produksi yang bersifat strategis dan vital atau penting bagi banyak orang atau masyarakat. Berperan sebagai alasan bagi negara menyelenggarakan dan menguasai beberapa jenis cabang kegiatan produksi yang sifatnya strategis di wilayah tanah air kita yakni Indonesia merupakan semata-mata demi kemakmuran hajat orang banyak yaitu masyarakat.

Tentunya pemerintah juga berperan untuk mengawasi semua kegiatan baik itu yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pihak non pemerintah atau swasta, dengan tujuan agar terhindarnya dari adanya perencanaan dan praktik penipuan, mafia perdagangan serta monopoli perdagangan. Tentunya yaitu bertujuan demi menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi orang banyak atau masyarakat.

Contoh nyata dari adanya penerapan sistem ekonomi yang ada di Indonesia adalah salah satunya dengan adanya program dari Badan Usaha Koperasi guna untuk mensejahterakan masyarakat.

Kemudian untuk perihal mengenai produksi-produksi barang yang dianggap penting bagi keutuhan dan kemakmuran negara serta paling dibutuhkan bagi masyarakat banyak tentu tidak diperbolehkan untuk dikelola oleh pihak swasta, melainkan diutamakan dan harus dikelola oleh negara, misalnya seperti BUMN. Negara sangat perlu untuk menciptakan beberapa peraturan dan kebijakan yang sifatnya mengatur, mengurus, mengelola serta mengawasi produksi produk tersebut. Negara tidak boleh untuk menyerahkan kekayaan begitu saja kepada pihak sembarangan karena akan mengancam kemakmuran banyak orang dan masyarakat. Meskipun demikian, sesuai yang kita ketahui bahwa sistem ekonomi Indonesia khususnya sistem ekonomi Pancasila masih selalu mengutamakan peran dari berbagai pihak seperti

pemerintah dan swasta (non pemerintah). Sesuai yang kita ketahui dengan adanya keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan adanya Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Intinya baik itu pihak swasta maupun pemerintah tidak boleh melakukan pengeksploitasian yang secara liar atau berlebihan, hal itu dikarenakan guna agar pada generasi selanjutnya tidak akan kekurangan dan tentunya dapat memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan alam agar kedepannya lingkungan dapat terus terjaga dan berjalan dengan seimbang.

C. JENIS-JENIS DARI SOSTEM EKONOMI

1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ini merupakan suatu alat atau sistem yang dikenal paling konvensional dimana didalamnya terdapat dua elemen penting dan utama antara lain meliputi penghargaan tinggi atau sangat menghargai sebuah tradisi dan juga di dalamnya sangat minim mengenai sampah atau limbah yang dihasilkan. Sistem tradisional ini sangatlah identik dengan latar penerapannya berada pada lingkungan masyarakat pedesaan dan dikenal dengan hasil dari kegiatan ekonominya berupa hasil pertanian. Dalam sistem tradisional ini, pemerintah tidak berperan dan terlibat secara langsung melainkan hanya berperan untuk menjaga ketertiban kegiatan ekonomi yang berjalan.

Aktivitas transaksi pada sistem tradisional biasanya dilakukan dengan cara bertukar dengan barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal itu dikarenakan karena tujuan dari sistem tradisional adalah guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tujuan utamanya bukanlah untuk mencari keuntungan. Biasanya aktivitas ekonominya juga berhubungan erat dengan tradisi yang ada, serta untuk proses dan cara produksinya biasanya menggunakan cara-cara yang sangat sederhana dan juga tidak menggunakan struktur kerja yang jelas serta tidak menggunakan berbagai macam teknologi karena menggunakan cara yang sederhana dan tidak neko-neko.

Berikut ini adalah ciri-ciri dari sistem tradisional :

- a. Alat-alat yang dipergunakan khususnya dalam proses kegiatan produksi sangat sederhana
- b. Bergantung pada sumber daya alam
- c. Proses transaksi jual beli berdasarkan pada perilaku masyarakat sederhana

- d. Paling sering dijumpai penerapannya di lingkungan masyarakat pedesaan
- e. Sistem ekonomi tradisional tujuan utamanya adalah untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari bukan untuk mencari keuntungan. Biasanya kental dengan sifat kekeluargaan. Kekeluargaan disini adalah maksudnya fenomena utang piutang.
- f. Jarang dijumpai kecurangan dalam transaksi jual beli dan dalam kegiatan produksi dikarenakan erat kaitannya dengan sifat kekeluargaan.
- g. Minimnya kemunculan persaingan yang tidak sehat. Persaingan tidak sehat sangat jarang dijumpai pada sistem ekonomi tradisional.
- h. Jarang munculnya fenomena kesenjangan ekonomi dikarenakan biasanya diketahui bahwa pendapatan antar individu tidak jauh berbeda dan relatif sama serta merta.
- i. Pemerintah tidak ikut campur tangan karena hanya berperan mengawasi saja dan tidak melakukan monopoli.

Kekurangan Dari Sistem Tradisional antara lain :

- a. Sulit untuk memprediksi kualitas serta kuantitas dari proses produksi karena pada dasarnya semuanya tergantung pada hasil alam.
- b. Pertumbuhan ekonominya biasanya berjalan dengan lambat karena tidak adanya kemajuan yang signifikan.
- c. Efektivitas kerjanya bersifat rendah karena tidak menggunakan atau tidak berdasarkan struktur kerja dalam proses kegiatannya.

2. Sistem Ekonomi Komando

Sistem ini adalah sistem yang sebagian sistemnya akan dikendalikan oleh negara atau pemerintah yang terlibat dalam proses kegiatannya. Pada sistem ini dikenal mempunyai sistem yang bersifat terpusat serta terdominasi

Ciri-Ciri Sistem ekonomi Komando

- a. Mengenai hal-hal yang mengatur seperti peraturan dan kebijakan ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Sebagian besar semua jenis kegiatan ekonomi ada dibawah kendali negara atau pemerintah.
- c. Penentuan harga dari suatu produk juga yang menentukan adalah dari pihak negara atau pemerintah.

3. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ini dikenal dengan gabungan dari sistem ekonomi pasar yang dikombinasikan dengan sistem ekonomi komando. Pasalnya, pemerintah atau negara bekerjasama dengan pasar dalam hal pengelolaan sumber daya yang tersedia. Pemerintah atau negara mengakui mengenai hak kepemilikan perorangan akan tetapi yang dianggap tidak merugikan kepentingan banyak orang.

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi campuran :

- a. Seluruh kekayaan alam serta sumber daya yang bersifat sangat vital atau berpotensi berada pada aturan dan diawasi oleh negara atau pemerintah.
- b. Pihak swasta diperbolehkan ikut berperan hanya pada bidang ekonomi yang umum atau seimbang.
- c. Pemerintah atau negara berperan untuk membuat peraturan dan kebijakan guna menciptakan sebuah persaingan ekonomi yang bersifat sehat dan adil.

4. Sistem Ekonomi Pasar

Sistem ekonomi pasar biasanya diketahui sangat erat kaitannya dan identic dengan pasar bebas. Pada sistem ini biasanya yang menentukan bagaimana jalannya proses perekonomian akan ditentukan oleh organisasi yang dijalankan oleh kalangan masyarakat. Berdasarkan fakta, bahwa tidak ada negara secara penuh yang menerapkan sistem ini.

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pasar

- a. Seluruh kegiatan transaksi ekonomi pelakunya adalah dari masyarakat maupun pihak swasta.
- b. Peran yang memegang cukup penting adalah modal usaha.
- c. Tidak adanya intervensi dari pemerintah.
- d. Semua individu memiliki kebebasan untuk membeli barang apa saja yang diinginkan.
- e. Usaha yang diutamakan untuk dibangun adalah jenis usaha yang dikhususkan untuk memperoleh keuntungan atau laba.

5. Sistem Kapitalis/Liberal

Sistem Kapitalis merupakan suatu sistem yang sudah ada sejak periode ke Sembilan belas. Hal mendasar dan yang paling penting dari karakteristik sistem kapitalis adalah pada praktek dasar pada pasar bebas serta mengenai hak kepemilikan property individunya. Pada sistem ini, seluruh orang berhak

atau bebas untuk memanfaatkan atau menggunakan berbagai macam sumber daya alam yang tersedia dengan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Kapitalis/Liberal

- a. Terdapat pengakuan yang bersifat luas mengenai atau dari hak-hak pribadi
- b. Semua hal yang mengenai kepemilikan dari alat-alat produksi berada pada tangan individu
- c. Semua orang berhak dan bebas untuk memilih pekerjaan atau usaha apa yang nantinya akan dipilih oleh individu itu sendiri.
- d. Semua kegiatan yang bersangkutan dengan ekonomi diatur mekanisme pasarnya.
- e. Pemberi sinyal konsumen adalah dari adanya “Pasar”. Hal ini adalah sinyal yang diberikan oleh produsen kepada konsumen melalui pasar dalam bentuk harga.
- f. Tidak ada campur tangan dari pemerintah. Karena pemerintah disini perannya bersifat seminimal mungkin atau biasa dikenal dengan sebutan “The Invisible Hand” dimana gunanya untuk mengatur jalannya kegiatan ekonomi agar berjalan dengan lancar dan efisien.
- g. Memiliki motif yang bersifat mendorong perekonomian untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan bagi berbagai pihak atau pelaku ekonomi.

Keuntungan Sistem Ekonomi Kapitalis/Liberal

- a. Bersifat lebih efisien khususnya dalam hal kegiatan memanfaatkan sumber daya, kekayaan negara dan pendistribusian barang produksi.
- b. Kreativitas khususnya di kalangan masyarakat menjadi lebih tinggi dikarenakan adanya kebebasan untuk mengadakan dan melakukan berbagai kegiatan dan hal hal yang telah dianggap baik dan dipilih oleh individu untuk dirinya sendiri.
- c. Dalam hal pengawasan sosial dan politik bersifat minimal atau sedikit. Hal itu dikarenakan untuk waktu kerja serta berbagai biaya yang diperlukan bersifat lebih kecil.
- d. Terlihat bahwa tidak adanya persaingan sempurna. Didalamnya tidak terdeteksi adanya persaingan monopolistic dan persaingan sempurna.
- e. Pada sistem harga biasanya akan gagal dalam hal pengalokasian sumber daya secara optimal dan efisien. Hal ini dikarenakan berbagai macam

faktor seperti faktor eksternal yaitu tidak dapat memperhitungkan biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain secara efektif dan efisien.

6. Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ini merupakan suatu sistem yang dikenal sebagai penyedia dan memberikan suatu kebebasan bersifat cukup khususnya bagi seluruh kalangan guna untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian, namun tentunya dengan memperhatikan intervensi dari pemerintah. Peran dari pemerintah didalamnya adalah guna untuk mengatur berbagai macam hal dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan bagi banyak orang yang diketahui bahwa tujuan utamanya adalah air, listrik, energy, telekomunikasi, sumber pertanian dan industri berat. Sedangkan peran pihak swasta disini adalah hanya sebatas untuk mengontrol.

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Sosialis

- a. Dipersatukan
- b. Peran pemerintah didalamnya bersifat aktif, artinya pemerintah berperan aktif dalam mengawasi berjalannya kegiatan perekonomian.
- c. Perilaku dan sifat individu dipengaruhi berdasarkan pola produksi

Keuntungan dari Sistem Ekonomi Sosialis

- a. Penyedia untuk berbagai kebutuhan dasar adalah dari pemerintah
- b. Kegiatan perekonomian negara adalah berdasarkan perencanaan basis.
- c. Semua produksi dikelola oleh pemerintah atau negara

Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialis

- a. Transaksinya secara umum bersifat sulit.
- b. Dalam penerapannya pada kegiatan ekonomi bersifat membatasi kebebasan pelaku kegiatan ekonomi
- c. Bersifat mengabaikan pendidikan moral.

7. Sistem Ekonomi Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus tahun 1945. Adanya dasar negara ini, menjadi suatu aturan tersendiri bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehari-hari, baik itu dalam hal beribadah, aktivitas sosial, maupun aktivitas ekonominya. Munculnya sistem ekonomi pancasila ini dilatarbelakangi oleh adanya keberagaman dari masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih

tergolong masyarakat tradisional. Pada saat itu, ekonomi masih terpacu pada tenaga masyarakat, belum adanya mesin canggih dan masih menggunakan teknologi yang tergolong sederhana. Selain itu, masyarakat juga sangat berpegang teguh pada demokrasi yang diatur oleh UUD 1945 dan kerukunan sosial masyarakat dalam sila Pancasila, namun pada saat itu ekonomi Indonesia masih tergolong lemah dan perlu adanya campur tangan oleh pihak pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi pancasila adalah suatu sistem yang diatur oleh sila-sila Pancasila sebagai dasar negara dan masih mengandalkan tenaga masyarakat dan dikendalikan oleh pemerintah.

Sistem ekonomi pancasila tidak terlepas dari seorang tokoh yang bernama Mubyarto pada tahun 1980 dan Emil Salim (orang pertama yang memperkenalkan sistem ekonomi pancasila) (Pratama, 2018).

Lima Ciri Sistem Ekonomi Pancasila yang di Kemukakan Oleh Tokok Mubyarto :

- a. Perputaran aktivitas ekonomi selalu digerakan dengan rangsangan kebutuhan ekonomi, sifat sosial, dan moral masyarakat.
- b. Aktivitas ekonomi sesuai dengan asas kemanusiaan dan lebih mengarah pada pemerataan sosial masyarakat.
- c. Menciptakan perekonomian yang tangguh sebagai prioritas utama di tingkat nasional sesuai dengan kebijakan yang ada.
- d. Koperasi adalah tiang utama dalam perekonomian.
- e. Keseimbangan yang jelas antara rencana dan kekuasaan dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan sila ke lima.

Menurut (Clarisa Tiara, 2022), ada beberapa tujuan dari dibentuknya sistem ekonomi pancasila yang dimana tujuan itu diharapkan dapat tercapai oleh ekonomi Indonesia, tujuan tersebut diantaranya:

- a. Perekonomian di Indonesia diharapkan mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dan berdampak pada kehidupan rakyat yang lebih makmur dan sejahtera.
- b. Perekonomian menjadi lebih stabil dan luas sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam kegiatan ekonomi.
- c. Tindakan yang dilakukan diharapkan selalu mempertimbangkan kepentingan yang ada, baik itu kepentingan sekarang maupun kepentingan yang akan datang serta kepentingan yang bersifat pribadi maupun umum.

- d. Memeratakan pendapatan berbagai golongan lapisan masyarakat dan tetap mempertimbangkan kekuasaan antara golongan atas dan golongan bawah tetapi masih mengedepankan nilai Hak Asasi Manusia, sosial, solidaritas dan nilai lainnya sesuai dengan sila Pancasila.

Fungsi dari sistem ekonomi pancasila itu sendiri adalah sebagai dorongan untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, hal ini berkaitan dengan apa, dimana, cara mendapatkan, siapa yang menghasilkan, distribusinya, dan produksi dari sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan dalam aktivitas perekonomian (Lenggono et al., 2016). Pengkoordinasian tersebut diharapkan dapat mengantisipasi adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan bahan aktivitas produksi dengan sumber daya yang ada. Dalam melakukan aktivitas ekonomiperlu memperhatikan keseimbangan masa kini dan masa lampau dalam aktivitas ekonomi. Ada beberapa contoh penerapannya sistem ekonomi pancasila, diantaranya:

- a. Koperasi, salah satu usaha yang sangat sangat kuat kekeluargaannya dan bisa menjadikan perekonomian semakin meningkat. Koperasi dikendalikan langsung oleh para anggota nya sehingga di dalamnya tidak terdapat kesenjangan antar anggota satu dengan anggota yang lainnya. Namun sangat disayangkan, semakin kesini koperasi banyak yang hanya meninggalkan nama atau hanya bentuk koperasinya saja tanpa ada kegiatannya.
- b. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menunjukkan peranannya terhadap perekonomian negara Indonesia dari bidang manapun. Ketika BUMN mengalami pemindahan kepemilikan dari nasional menjadi pribadi atau swasta, itu tandanya kurang adanya peran negara dalam mengelolanya.
- c. Serikat buruh, suatu gerakan kelas kerja yang dilakukan untuk meminimalisir adanya perlakuan yang sewenang-wenang antar pekerja dengan para investor. Gerakan ini juga digunakan untuk mengurangi atau mencegah adanya kesenjangan pendapatan sehingga antara kaum elit maupun kelas pekerja mempunyai pendapatan yang merata.

BAB II

PERTUMBUHAN EKONOMI

A. KONSEP PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi ialah tolok ukur untuk kemajuan suatu pertumbuhan atau pembangunan ekonomi di negara. Pertumbuhan ekonomi selalu identik dengan proses naiknya penghasilan total dan per kapita dengan mengamati penduduk yang bertambah disertai dengan perubahan-perubahan fundamental dalam ekonomi di suatu negara yang semakin lama semakin baik. (Anonim, 2013) mengatakan bahwasannya pertumbuhan ekonomi adalah naiknya kapasitas negara dengan menyediakan banyak macam barang yang menyangkut ekonomi kepada semua penduduknya dalam jangka yang panjang. Pertumbuhan ekonomi selalu disandingkan dengan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Ada berbagai macam cara untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi, bisa kita lihat atau hitung dengan laju permintaan dan laju penawarannya (Lincoln arsyad et al., 2017). Jika kita lihat dari laju permintaannya, maka kita perlu menghitung dari faktor makro ekonominya, yaitu sisi konsumsi, investasinya, serta sisi ekspor dan impornya. Sedangkan jika kita lihat dari laju penawarannya, maka kita perlu menghitung dari nilai tambah dari setiap produksi nasionalnya. Laju pertumbuhan ekonomi biasanya dihitung dengan ukuran berkembangnya PDB (Produk Domestik Bruto) dan PNB (Produk Nasional Bruto) dari masa ke masa.

Dalam proses pertumbuhan ekonomi, ada 3 bagian yang diperlukan, diantaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat berdasarkan persediaan barang-barang yang selalu meningkat.
2. Kemajuan teknologi juga menjadi faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dengan menentukan gradasi pertumbuhan kemampuan menyediakan aneka macam barang-barang kepada penduduknya.
3. Teknologi yang digunakan semakin meluas dan efisien sangat diperlukan adanya sebuah penyesuaian dalam bidang kelembagaan dan juga bidang ideologi, jadi inovasi yang berhasil diciptakan oleh IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang dibuat oleh manusia dapat dimanfaatkan juga oleh manusia (masyarakat) secara cepat dan juga tepat serta efektif dan efisien dalam kesehariannya.

B. CIRI-CIRI DARI PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Terdapat percepatan pertumbuhan penduduk dan juga produk per kapita yang sama-sama cepat.
2. Kapasitas dari masyarakat semakin meningkat.
3. Pertumbuhan tingkat skematis yang sangat cepat.
4. Urbanisasi semakin meningkat setiap tahunnya.
5. Adanya perluasan atau pengembangan pada negara maju.
6. Terjadinya arus barang serta modal dan juga manusia di banyak negara.

C. TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini muncul di awal abad ke-20 yang identik dengan ahli ilmu ekonomi klasik yaitu Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, dan John Stuart Mill (Dr. Vladimir, 1967). Mereka para ahli ekonomi klasik mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Adam Smith memandang bahwasanya pembangunan ekonomi akan semakin maju atau terdorong oleh adanya perkembangan penduduk setempat dan proses pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut apabila pembangunan ekonomi telah terjadi.

Berbeda dengan Smith, Richardo dan Mill memandang bahwasanya suatu saat entah itu dalam jangka panjang atau jangka pendek, perekonomian tidak terjadi sama sekali. Ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap adanya pertumbuhan ekonomi, diantaranya ada banyaknya penduduk, persediaan barang, lahan, Sumber daya dan kemajuan teknologi. Dari para ahli ekonomi klasik tersebut, mereka mempunyai pendapat yang sama bahwasanya penduduk yang bertambah akan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dikatakan bahwa yang namanya pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara terus-menerus, melainkan masih tergantung pada pertambahan penduduk. Jadi, jika jumlah penduduk yang bertambah dan disertai dengan pertumbuhan penduduk yang bertambah lebih banyak daribertambahnya penduduk, maka akan menurunkan aktivitas ekonomi karena tenaga produksi yang bertambah negatif sehingga pertumbuhan ekonomi akan menjadi rendah dan akan berdampak pada kemakmuran hidup masyarakat.

2. Teori Investasi

Investasi adalah kegiatan membeli, baik itu membeli aktiva berupa fisik maupun aktiva yang bersifat finansial. Negara maju seperti amerika memberikan sebuah bukti bahwasanya faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah besarnya atau banyaknya investasi yang diperlukan baik itu berupa fisik (sumber daya manusia) maupun non fisik (barang modal).

Investasi sangat erat kaitannya dengan PDB, banyaknya investasi yang ada akan mengakibatkan proses produksi yang meningkat, sehingga konsumsi masyarakat juga akan lebih meningkat. Ada tiga sumber modal yang dapat dipakai untuk investasi, diantaranya:

- a. Tabungan yang diperoleh dari pemerintah berupa APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan secara rutin seperti biaya untuk belanja negara.
- b. Dana pelengkap dari investasi luar negeri dalam bentuk modal yang ditnana oleh pihak asing.
- c. Tabungan masyarakat, entah itu tabungan individu ataupun badan dan juga termasuk kedalam pendapatan yang tidak dipergunakan untuk biaya konsumsi.

3. Teopri Harrod-Domar

Teori ini memandang bahwasannya pertumbuhan ekonomi diperoleh atau terjadi bisa kita analisis dari permintaannya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar terjadi pertumbuhan ekonomi, diantaranya:

- a. Terpenuhinya barang modal.
- b. Tabungan yang seimbang dengan pendapatan nasional.
- c. Modal produksi yang mempunyai nilai tetap.
- d. Terdiri dari perekonomian dua sector.

4. Teori Non_Klasik

Teori ini dikenalkan oleh tokoh yang bernama Solow pada tahun 1956. Teori ini dikenal dengan sebutan model pertumbuhan solow. Model solow ini memandang bahwasanya teknologi yang berkembang adalah seperti oksigen, yang tidak ada habisnya. Ada beberapa anggapan penting dalam model ini, yaitu pada tingkat depresiasi dianggap pasti, tidak terdapat perdagangan dari

luar negeri, sektor pemerintah, tingkat penambahan daya kerja yang tetap sehingga antara jumlah penduduk dan jumlah pekerja sama.

Bentuk secara umum untuk menggambarkan model solow ini ialah:

$$Y(t) = F(K(t), L(t)) \quad (1.1)$$

$$Y(t) = F(K(t), A(t)L(t)) \quad (1.2)$$

$$Y(t) = F(A(t)K(t), L(t)) \quad (1.3)$$

$$Y(t) = A(t)F(K(t), L(t)) \quad (1.4)$$

Keterangan:

Y = sebagai Output

K = sebagai Modal

L = sebagai Tenaga kerja

A = sebagai Tingkat teknologi

„t = waktu berlangsungnya

Dari persamaan diatas dapat kita ketahui bahwasannya output akan berubah jika input berubah dalam kurun waktu tertentu. Dan dengan anggapan bahwa teknologi adalah konstan maka fungsi produksi adalah *constant return to scale*.

5. Teori Keynes

Teori ini dikenal oleh seorang ahli ilmuwan yang bernama John Maynard Keynes. Dalam bukunya ditulis bahwasanya yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah suatu pengeluaran agregat yang dimana pengeluaran itu berupa belanja oleh masyarakat sekitar atas barang atau jasa yang di produksi. Hal ini berarti, konsumsi masyarakat sendiri akan menjadi pendapatan bagi orang lain.

Teori ini dikenal dengan kebijakan makro ekonomi yang dimana perekonomian melibatkan pengeluaran konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah, yang dinyatakan sebagai:

$$Z = C + I + G$$

Dengan keterangan:

Z = sebagai Pendapatan nasional

C = sebagai Konsumsi rumah tangga

I = sebagai Investasi

G = sebagai Belanja pemerintah

D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUIHI PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam merupakan kekayaan yang tersedia di sekitar manusia bukan dibuat manusia, dan yang tersedia di permukaan bumi, baik di darat, laut atau air dan di udara, yang penggunaannya dapat langsung digunakan guna memenuhi keperluan manusia, dan organisme lain. (Bonaraja et al., 2020)

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Sumber Daya Alam adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh alam meliputi:

- a. Kondisi tanah yang subur.
- b. Letak geografis dan susunannya.
- c. Kekayaan yang terkandung di dalam alam.
- d. Kandungan mineral.
- e. Iklim alam.
- f. Sumber mata air dan
- g. kekayaan yang meliputi laut.

Karena itu, dengan adanya ketersediaan kekayaan Sumber Daya Alam yang berlimpah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menunjang pembangunan suatu Negara. Meskipun demikian, kemampuan sumber daya manusia dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam.

2. Sumber Daya Manusia

Faktor kedua yang utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia dapat diartikan manusia yang berperan produktif untuk menggerakkan organisasi atau kumpulan guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Sumber Daya Manusia merupakan komponen utama dalam organisasi, walaupun banyak kegiatan dilakukan menggunakan teknologi, tetapi peran manusia tetap utama karena sebagai penggerak komponen lainnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola faktor pendukung pertumbuhan ekonomi lainnya. Adapun upaya dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul (Putri et al., 2017), antara lain:

- a. Kualitas hidup manusia yang baik (rohani, jasmani, dll)
- b. Penyebaran Sumber Daya Manusia yang produktif

- c. Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam mengelola IPTEK
 - d. Kualitas lembaga (pendidikan, kesehatan, dll)
3. Akumulasi Modal
- Akumulasi modal diartikan sebagai siklus mendapatkan pertambahan tambahan modal yang nantinya digunakan di dalam proses produksi. Akumulasi modal juga dapat dijadikan sebagai nilai investasi bagi perusahaan. Akumulasi modal dapat diartikan pula sebagai proses penambahan modal berupa alat produksi, mesin atau teknologi. Akumulasi modal sangat penting dibutuhkan oleh manusia untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan dalam meningkatkan kualitas produksi.
4. Tenaga Manajerial dan Organisasasi Produksi
- Dalam proses memproduksi suatu produk, dibutuhkan organisasi produksi yang terarah dan dipimpin agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Maka dari itu, dalam organisasi produksi dibutuhkan tenaga manajerial yang kompeten, karena hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan berkembangnya zaman, perkembangan IPTEK yang pesat dapat mendorong proses percepatan dalam pembangunan ekonomi. Yang dulunya proses produksi dilakukan oleh tenaga manusia sekarang dapat digantikan oleh tenaga mesin yang canggih. Dampak positifnya adalah pada efisiensi proses produksi yang dapat mengelola bahan baku menjadi barang jadi secara cepat. Adapun peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam bidang ekonomi (Utami, 2021), antara lain:
- a. Produksi yaitu proses kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa yang bertujuan memperoleh nilai guna.
 - b. Distribusi, dengan adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi proses penyaluran barang dengan konsumen dapat secara efektif dan efisien
 - c. Konsumsi, kegiatan memakai, menggunakan dan menghabiskan barang
6. Faktor Administrasi Daerah Politik
- Faktor Administrasi dan Politik merupakan sisi non ekonomi tetapi dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika politik dan administrasi

suatu Negara tingkatnya lemah maka dapat menghambat proses pembangunan ekonomi.

7. Sosial budaya

Social budaya dapat menjadi faktor dalam pertumbuhan ekonomi, terutama social budaya di lingkungan masyarakat, meliputi:

- a. Sikap individu.
- b. Tingkah laku individu.
- c. Pandangan masyarakat.
- d. Motivasi kerja.
- e. Lembaga masyarakat.

sebagai contoh dalam budaya barat dapat membuka pandangan masyarakat untuk menanamkan motivasi kerja dan dapat membuka usaha baru.

E. METODE PENGUKURAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Suatu kesuksesan Negara dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu Negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi hendaknya menjadi perhatian yang harus difokuskan guna memperoleh kesuksesan pembangunan Negara. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik maka menjadi ukuran dalam keberhasilan pemerintah mengelola Negara dan dapat menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakatnya.

Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu Negara, dapat dilakukan dengan membandingkan indikator yang mewakili kondisi ekonomi suatu Negara di masa sekarang dengan kondisi ekonomi suatu Negara di masa lampau, maka akan diperoleh hasil pengukuran pertumbuhan ekonomi Negara tersebut.

Adapun indikator yang dapat mengukur pertumbuhan ekonomi suatu Negara, antara lain:

1. Produk Nasional Bruto (Gross National Product)

Produk Nasional Bruto (PNB) adalah jumlah nilai dari produk dan jasa yang sudah dihasilkan oleh suatu perusahaan atau masyarakat di suatu Negara. Produk Nasional Bruto (PNB) merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah atau Negara dalam kurun waktu satu tahun.

Produk Nasional Bruto diperuntukkan untuk masyarakat dalam negeri dan masyarakat dalam negeri yang bekerja di Negara asing yang memiliki

pendapatan. Tetapi untuk warga asing yang memiliki pendapatan di dalam negeri tidak termasuk dalam perhitungan Produk Nasional Bruto (PNB).

Produk Nasional Bruto (PNB) mempunyai peran penting sebagai alat ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu Negara, kualitas hidup dan pendapatan suatu Negara.

Jika ingin menghitung pertumbuhan ekonomi suatu Negara di tahun 2018, maka terlebih dahulu kita mengetahui jumlah Produk Nasional Bruto tahun 2017 dan Produk Nasional Bruto di tahun 2016.

Adapun rumus perhitungan Produk Nasional Bruto:

PNB tahun dasar - PNB tahun sebelumnya/ PNB tahun sebelumnya x 100%

2. Product Domestic Bruto (Gross Domestic Product)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai dari barang dan jasa di suatu Negara yang produksinya diperoleh berdasarkan faktor milik warga Negara asli dan warga Negara asing. Produk Domestik Bruto atas harga berlaku dapat digunakan sebagai alat pergeseran dan struktur ekonomi suatu Negara.

Berbeda dengan Produk Nasional Bruto, Produk Domestik Bruto memperhitungkan hasil dari pendapatan seseorang yang bekerja di Indonesia, baik orang asing atau penduduk asli Indonesia.

Jika ingin menghitung persentase pertumbuhan ekonomi Negara di tahun 2018, maka kita harus mengetahui jumlah Produk Domestik Bruto Negara di tahun 2017 dan Produk Domestik Bruto di tahun 2016.

Adapun rumus perhitungan Produksi Domestik Bruto :

PDB tahun dasar - PDB tahun sebelumnya/ PDB tahun sebelumnya x 100%

Oleh karena itu, investor cenderung memfokuskan pada Produk Domestik Bruto dibandingkan dengan Produk Nasional Bruto, karena lebih menggambarkan kondisi yang nyata tentang kondisi ekonomi suatu Negara, seperti inflasi, tingkat pengangguran, suku bunga dll.

BAB III

STRUKTUR EKONOMI DI INDONESIA

A. KONSEP STRUKTUR EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan suatu kondisi Negara yang berkesinambungan guna menuju kondisi yang baik selama kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat pula didefinisikan sebagai proses untuk menaikkan jumlah produksi di suatu perekonomian yang diwujudkan sebagai bentuk kenaikan pendapatan nasional suatu Negara. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka menjadikan sebagai alat pengukuran keberhasilan Negara dalam pembangunan ekonomi (Kusuma, 2016).

(Kusuma, 2016) Struktur Perekonomian merupakan susunan elemen-elemen yang ada di dalam Negara yang berguna sebagai pengatur rumah tangga Negara yang terdiri dari :

1. Sistem perekonomian Negara.
2. Rumah tangga Negara
3. Perusahaan
4. Pemerintah
5. Pasar input dan pasar output.

Komponen tersebut mempunyai kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Adapun komponen yang saling berhubungan satu dengan lainnya yang merupakan satu kesatuan, yaitu:

1. Faktor produksi.
2. Barang dan jasa.
3. Rumah tangga.
4. Perusahaan.
5. Pemerintah.
6. System ekonomi.

B. KLASIFIKASI STRUKTUR EKONOMI

1. Sektor Primer

Sektor ini mencakup berbagai kegiatan ekonomi, yang utama dari sektor ini adalah ekstraksi bahan baku. Terkadang sektor ini juga disebut sebagai sektor ekstraktif. Contoh dari sektor ini adalah pertanian, perikanan, dan

pertambangan. Umumnya ekonomi tradisional bertumpu pada sektor primer. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, perekonomian suatu negara bergerak menuju industrialisasi. Seperti saat ini, berbagai perusahaan manufaktur mulai berkembang dengan menggunakan mesin canggih.

2. Sektor Sekunder

Dalam sektor ini mencakup kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Sektor sekunder biasanya mengacu pada kegiatan berbagai perusahaan manufaktur, seperti pengolahan makanan, minuman, tekstil dan pakaian, produksi besi dan baja, industri konstruksi, dan sebagainya.

Industri manufaktur pada awalnya berkembang dari bisnis rumahan padat karya. Seiring berkembangnya teknologi, industri manufaktur berkembang menjadi padat modal dengan mengandalkan mesin canggih. Transisi ini memungkinkan produsen untuk mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi. Selain itu, mereka mampu mengurangi biaya produksinya dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

3. Sektor Tersier

Sektor ini mencakup sektor-sektor yang memberikan pelayanan atau jasa kepada konsumen dan usaha lainnya. Contohnya adalah ritel, pariwisata, transportasi, perbankan, asuransi, dan pendidikan.

C. JENIS STRUKTUR EKONOMI

1. Struktur Agraris

Struktur agraris merupakan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk di suatu negara. Secara umum, negara-negara berkembang seperti Indonesia disebut sebagai negara agraris. Sementara, negara terbelakang yang pertaniannya masih sangat tradisional dikategorikan sebagai negara agraris tradisional. Sedangkan negara-negara yang termasuk negara belum berkembang pertaniannya masih sangat tradisional.

2. Industri

Struktur industri merupakan struktur ekonomi yang umumnya didominasi oleh sektor industri. Sebagian besar produk dalam negeri dibawa masuk dan sisa laju

pertumbuhan ekonomi disediakan oleh sektor industri. Misalnya saja negara Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Perancis, dan Jepang termasuk negara-negara industri maju. Sementara negara-negara Eropa dan negara lainnya termasuk negara industri.

D. SUDUT PANDANG STRUKTUR EKONOMI

1. Tinjauan Makro-Sektoral

Jika dilihat dari tinjauan makro-sektoral dalam bentuk produk domestik bruto, struktur perekonomian Indonesia saat ini sudah berstruktur industri dan niaga, dengan munculnya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan industri.

2. Tinjauan Keruangan

Dalam tinjauan ini termasuk jenis tinjauan ekonomi murni. Secara keruangan, dapat dikatakan bahwa perekonomian ini memiliki struktur pedesaan/tradisional menjadi struktur perkotaan/modern.

3. Tinjauan Penyelenggaraan Kenegaraan

Dari sudut pandang penyelenggaraan kenegaraan, struktur ekonomi dapat dibedakan menjadi struktur etis, egaliter, atau borjuis. Predikat tersebut tergantung pada kelompok mana yang memainkan peran utama dalam perekonomian yang bersangkutan, misalnya pemerintah negara atau kalangan pemodal.

4. Tinjauan Birokrasi Pengambilan Keputusan

Dari tinjauan birokrasi pengambilan keputusan dijelaskan bahwa terdapat perbedaan berdasarkan struktur ekonomi terpusat atau sentralistis dan desentralistis. Selain itu, tinjauan ini juga dapat dikaitkan dengan struktur perekonomian Indonesia, di mana selama pembangunan jangka panjang tahap yang pertama dilakukan adalah sentralis. Dalam tahap sentralis ini pengambilan keputusannya lebih banyak ditetapkan atas pemerintahan.

E. PERTUMBUHAN STRUKTUR EKONOMI

Dewasa ini, Indonesia masih menjadi negara agraris dunia, dengan produksi dari sektor pertanian yang masih mendominasi dalam proses perdagangan dan import. Sebagai akibat atas hal tersebut, menjadikan struktur ekonomi Indonesia masih berada pada tahap early industrial (pra condition to grown) dalam proses transformasi struktur ekonomi. Menurut Todaro (1999),

proses nyata dalam perubahan struktural perekonomian ditandai dengan: (1) berkurangnya aktivitas pasar dan pangsa perdagangan sektor primer (pertanian), (2) semakin bertumbuhnya sektor sekunder (industri), dan (3) diikuti oleh tumbuh dan meningkatnya sektor tersier dalam lingkup suatu negara yang sejalan dengan adanya pertumbuhan perekonomian. Struktur ekonomi tradisional yang terfokus pada lini sektor pertanian menjadi kiblat besar dalam mendongkrak ekonomi Indonesia. Bahkan di masa industry 4.0, sektor tersebut tidak menunjukkan penurunan yang signifikan dibanding sektor ekonomi tradisional lainnya. Menguat atau melemahnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, memang menjadi pokok masalah penting dalam proses transformasi struktur ekonomi negara tersebut. Ditambah dengan ketergantungan Indonesia dalam melakukan ekspor komoditas atau produk mentah, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan produksi manufaktur dalam negeri. Upaya peningkatan produksi sektor industri ini sejatinya telah mendapat dukungan dari pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, hal ini tidak serta merta mampu meningkatkan stimulus masyarakat dalam mendukung dan bekerja sama untuk melakukan peningkatan produksi pada kegiatan industri, khususnya industri manufaktur. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan dan keyakinan pihak swasta yang masih merasa ragu untuk berinvestasi terhadap sektor industri dalam negeri.

Dimensi pokok atau dasar atas terjadi proses pembangunan ekonomi yaitu: (1) Pertumbuhan, (2) Pengentasan masalah kemiskinan, (3) Transformasi struktural perekonomian, dan (4) pergeseran pembangunan masyarakat, dari masyarakat primer berupa agraris (pertanian) menjadi masyarakat sekunder (industri). Dari empat dasar atau dimensi pokok tersebut, terdapat salah satu yang menjadi pokok penting dalam proses pertumbuhan ekonomi, yaitu transformasi struktural perekonomian (Todaro, 1999). Melalui transformasi struktural perekonomian (perubahan struktur ekonomi), maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang lebih berkembang dengan berbagai penguasaan sektor pengolahan dalam negeri. Amerika Serikat dan Jepang menjadi contoh negara yang telah menduduki piramida struktur ekonomi dunia, yaitu menjadi post industrial (high mass. consumption) dan menjadi contoh penting terhadap Indonesia bahwa peralihan ke sektor ekonomi industri tidak selalu membutuhkan sumber daya yang melimpah, tetapi terdapat pada kesadaran setiap lini masyarakat

untuk bergerak dan terfokus pada sektor industri pengolahan. Transformasi struktur perekonomian dari primer (pertanian) ke arah sekunder (industry) secara umum dapat didefinisikan sebagai proses perubahan dalam lingkup ekonomi yang berkaitan dengan instrumen lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja, perdagangan, dan instrumen-instrumen lain yang diperlukan dan dibutuhkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan setiap individu dengan meningkatkan pendapatan perkapita. (Chenery 1986).

Transformasi struktur perekonomian (perubahan struktur ekonomi) juga memiliki langkah atau tahapan sebagai layaknya suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahap tersebut diantaranya:

1. Proses akumulasi, merupakan proses atau tahapan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada guna meningkatkan kapasitas produksi suatu negara.
2. Proses alokasi, merupakan proses atau tahapan alokasi sumber daya ke berbagai kegiatan ekonomi dalam upaya menunjang berjalannya transformasi struktural perekonomian.
3. Proses demografi, merupakan proses atau tahapan perkembangan kependudukan yang sejalan dengan meningkatkan pendapatan perkapita setiap perusahaan.
4. Proses distribusi, merupakan proses atau tahapan dalam meratakan pendapatan dalam proses peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Akumulasi ekonomi, dimana terjadi proses akumulasi sumber daya yang nantinya digunakan dan diperlukan untuk mendorong kapasitas produksi perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita suatu negara. Proses akumulasi ini dapat ditandai dengan adanya peningkatan pada beberapa instrumen perekonomian, diantaranya yaitu:

1. Kapasitas Produksi Fisik
 - a. Ditandai dengan meningkatkan nilai atau proporsi investasi (PMTDB dan perubahan inventory) terhadap GDP.
 - b. Indikator nilai atau proporsi investasi pada GDP dan nilai atau proporsi saving terhadap naiknya GDP.
 - c. Hasil atas hal ini yaitu peningkatan pada fasilitas sarana dan prasarana, serta pelayanan publik
2. Kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia)
 - a. Ditandai dengan peningkatan pendidikan dan Kesehatan individu

- b. Indikator School Enrollment Ratio dan persentase pengeluaran untuk pendidikan serta Kesehatan yang meningkat
 - c. Hasil atas hal ini yaitu peningkatan pada penguasaan teknologi, kemampuan Sumber Daya Manusia, dan sesuai dengan teori HOS terkait keunggulan komparatif yang akan berubah.
3. Pendapatan Pemerintah (Government Revenue)
- a. Peningkatan jumlah dan kapasitas produksi, normalnya membutuhkan pendanaan lebih dari pemerintah.
 - b. Bertambahnya pendapatan pemerintah, ditandai dengan pendapatan pajak yang semakin bertambah.
 - c. Hasil dari hal ini yaitu dengan ketersediaan dan kesiapan pemerintah dalam menghadirkan barang-barang kebutuhan public

Alokasi ekonomi, adalah interaksi dan hubungan antara proses akumulasi dan pergeseran pola konsumsi masyarakat seiring dengan bertambahnya peningkatan per kapita. Proses alokasi ditandai dengan perubahan kebiasaan masyarakat dalam melakukan proses produksi dan kegiatan jual beli atas proses produksi tersebut. Dengan peningkatan pendapatan per kapita, membawa masyarakat kearah proses perubahan dari pertanian menuju industri pengolahan, dan pada akhirnya akan mencapai kegiatan ekonomi dalam sektor jasa yang seiring dengan bertambahnya pendapatan per kapita. Jadi semakin tinggi pendapatan per kapita, makamasyarakat akan semakin jauh pada proses atau struktur ekonomi tradisional, ekonomitradisional yang dimaksud adalah pertanian (primer). Dalam proses alokasi ini, ditandai dengan beberapa hal, yaitu:

1. Permintaan Domestik
 - a. Pendapatan per kapita naik.
 - b. Dana investasi dalam negeri naik.
 - c. Konsumsi produk makanan dan olahan turunan suatu komoditas berkurang.
 - d. Konsumsi non makanan naik.
 - e. Perhitungan: $C + I + G$
2. Perdagangan Internasional
 - a. Pendapatan per kapita naik.
 - b. Kegiatan impor bertambah.
 - c. Ekspor primer atau barang pertanian akan turun.
 - d. Ekspor produk non pertanian akan naik

e. Perhitungan: $X - M$.

3. Indikator Produksi

- a. Pendapatan per kapita naik.
- b. Produksi sektor jasa naik
- c. Produksi primer atau barang pertanian akan turun
- d. Produksi sektor manufaktur dan pengolahan atau industri akan naik.

Dalam proses demografi ekonomi, dapat ditandai juga dengan perubahan di sektor lapangan usaha, status pekerjaan, dan jenis pekerjaan individu. Perubahan tersebut terdapat pada: (1) Tenaga primer turun, tenaga kerja industri meningkat, (2) Pekerja informal turun, pekerja formal meningkat, dan (3) Blue collar turun, white collar bertambah. Demografi dalam proses perubahan struktur ekonomi juga ditandai dengan meningkatnya kegiatan urbanisasi, seperti yang kita tahu bahwa urbanisasi dapat terjadi karena dua faktor, yaitu berubahnya status pedesaan menjadi kota (aglomerasi atau industrialisasi) dan proses peralihan penduduk dari pedesaan ke perkotaan (push and pull factor) yang menjadikan kesinambungan antara perubahan struktur ekonomi dan demografi suatu negara. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga menjadi instrumen penting dalam proses perubahan struktur ekonomi suatu negara, ditandai dengan fertilitas (kenaikan angka kelahiran) dan mortality (kenaikan jumlah kematian), berubahnya komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, serta berubahnya angkaketergantungan (dependency ratio).

No	Kemiskinan Berkurang	Kerentanan Tinggi	Kesenjangan meningkat
1	Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan cenderung berkurang	Sebagian yang berada di atas garis kemiskinan, memiliki kemungkinan untuk jatuh miskin (di bawah GK)	Ditandai dengan Rasio Gini, sebagai contoh Rasio Gini 0.41 di tahun 2011

2	Semakin rendah tingkat kemiskinan, akan semakin sulit dalam penanggulangannya	Menjadi kelompok embrio kelas menengah di Indonesia	Didorong dengan peningkatan atau pertumbuhan ekonomi yang condong kepada kelompok menengah ke atas
---	---	---	--

F. STRUKTUR EKONOMI INDONESIA DI MASA ORDE LAMA

Masa Orde Lama berlangsung dari tahun 1945-1968, dengan penerapan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando secara bergantian. Dengan terbentuknya sebuah negara yang merdeka, memang menjadi fokus penting dalam Menyusun program terkait perekonomian, tetapi hamper setiap rancangan program tersebut harus runtuh sebelum mampu direalisasikan, sebab atas terjadinya hal ini yaitu:

1. Mandiri dalam ekonomi nasional menjadi program yang tidak diinginkan oleh segelintir pihak, khususnya kelompok-kelompok paham kanan seperti Masyumi, PSI dan TNI AD. Hal ini menjadikan banyaknya tindakan sabotase dan berbagai manuver dalam upaya menggulingkan program tersebut.
2. Tidak tegasnya kebijakan yang dibuat oleh Ir. Soekarno dan kabinetnya, menjadi salah satu penyebab kesuksesan program tersebut yang tidak terealisasi. Ketidakteguhan tersebut diakibatkan oleh banyaknya perseteruan antar elit politik di pemerintahan nasional.
3. Upaya menjadikan kaum pribumi (dalam negeri) sebagai kaum borjuis yang memiliki banyak alat produksi dan melimpahnya sumber daya yang ada, justru runtuh dengan sangat cepat sebagai akibat dari kurangnya dasar perilaku borjuis yang Tangguh.

Sebagai dampak dari kurang suksesnya program yang dijalankan oleh Ir. Soekarno, maka tercetuslah propaganda tentang Trisakti yaitu: (1) Berdikari dalam ekonomi, (2) Berdaulat dalam berpolitik, dan (3) Kepribadian berkebudayaan. Propaganda tersebut dijalankan selama masa orde lama berlangsung, dandiharapkan mampu memberikan hasil dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Upaya yang dilakukan pertama kali yaitu dengan mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri, yaitu dengan menekan adanya impor barang yang selama ini dilakukan pemerintah. Penekanan atas impor ini didukung oleh perubahan struktur perekonomian sistem kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Dengan tetap fokus pada pembuatan produk secara mandiri dan mengacu pada upaya menjadikan kaum pribumi sebagai pemilik alat produksi dan sumber daya produksi. Upaya tersebut terus berjalan hingga pada akhir tahun 1955, muncul rancangan berupa Kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun pada 1961. Berangkat dari kebijakan tersebut, dimulailah upaya pembangunan pada proyek-proyek besar pemerintah, diikuti dengan beberapa proyek kecil yang juga dijalankan. Namun nyatanya kebijakan ini tidak mendulang hasil baik bagi masyarakat dan negara. Sama seperti program-program Ir. Soekarno sebelum munculnya Propaganda Trisakti, program pemerintah terkait Kebijakan Pembangunan Semesta Delapan Tahun juga mangkrak yang diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu terkait kurangnya devisa yang dimiliki dan lemahnya penguasaan teknologi. Hal ini menjadi penambah rekam jejak hitam atas pemerintahan Ir. Soekarno dan kabinetnya pada masa penerapan sistem Demokrasi Terpimpin.

Tidak luput dari itu, kebijakan terkait sistem moneter juga diperhatikan oleh Ir. Soekarno dan kabinetnya pada masa itu. Namun hal ini tidak dapat dirasakan secara penuh oleh setiap lini masyarakat, dibukti pada aktivitas perbankan yang berjalan secara wajar saat setelah Ir. Soekarno menyampaikan Propaganda Trisakti nya. Hal eksklusif yang dimiliki oleh bank sentral tetap dapat dijalankan, yaitu berupa kebebasan dalam melakukan printing money dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengatur stabilitas ekonomi nasional. Namun, harapan atas kemerdekaan yang menjadi penguat ekonomi, justru menjadi bumerang dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami stagflasi, dimana pengeluaran dan pendapatan pemerintah ditunjukkan dalam nominal yang

seimbang. Tentunya untuk menjadikan ekonomi suatu negara bertumbuh, stagflasi bukan merupakan pilihan yang tepat. Dibutuhkan suatu stimulus dalam meningkatkan kegiatan ekonomi negara, salah satunya dengan injeksi likuiditas atau quantitative easing. Masih berputar pada penguatan dan pelemahan nilai mata uang Indonesia dengan dollar, pada masa tersebut juga terjadi hiperinflasi yang ditandai dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga 650%. Hal ini tentunya menjadi pengaruh buruk terhadap perekonomian Indonesia, dan semakin diperburuk atas fakta bahwa Indonesia dan pemerintahan Ir. Soekarno yang mulai diasingkan oleh negara barat dan lebih memilih menjalin kedekatan dengan negara komunis. Dengan pengaruh Stalin yang masih kuat pada saat itu, doktrin kiri (komunis) memang bukan menjadi ideologi yang seharusnya dipilih oleh bangsa yang baru berumur jagung seperti Indonesia.

Berikut merupakan kondisi perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama memimpin:

1. Masa Setelah Kemerdekaan (1945-1950)

- a. Mata uang dan jumlah uang yang beredar tergolong banyak. Terdapat beberapa mata uang yang beredar di masa itu, yaitu mata uang dari De Javasche Bank, mata uang Hindia-Belanda, mata uang kedudukan bangsa Jepang, dan mata uang NICA yang dapat digunakan oleh daerah yang dikuasai sekutu. Ditambah dengan kebijakan atas dikeluarkannya mata uang baru milik Indonesia, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) yang juga menjadikan keberagaman mata uang di Indonesia semakin bertambah. Keberagaman mata uang dan banyaknya jumlah uang yang beredar, menjadi penyebab terjadinya hiperinflasi di Indonesia pada masa itu.
- b. Pelarangan perdagangan yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia pada bulan November 1945 yang menjadikan melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia melakukan upaya dengan diplomasi kebutuhan primer, yaitu beras terhadap perusahaan swasta di Amerika, serta menebus upaya penutupan Belanda dengan tidak mengirimkan barang ke Pulau Sumatera, tetapi berpindah tujuan menjadi Singapura dan Malaysia.
- c. Memang terkait pendanaan masih menjadi persoalan penting bagi negara yang baru saja merdeka, dibuktikan dengan kekosongan kas

negara pada masa tersebut. Upaya yang dilakukan Ir. Surahman, Menteri keuangan pada masa itu, dengan melakukan pinjaman nasional pada bulan Juni 1946.

- d. Tindakan sewenang-wenang, ancaman, dan eksploitasi dari Belanda masih terus ada walaupun Indonesia telah menyatakan bahwa dirinya merdeka. Terdapat banyak sektor ekonomi yang menjadi persoalan atas hal tersebut, tetapi upaya yang dilakukan Indonesia tentunya dapat mengeluarkannya dari belenggu eksploitasi yang dilakukan Belanda. Upaya tersebut diantaranya Konferensi Ekonomi tahun 1946, pembentukan Planning Board (Badan Perencanaan Ekonomi) tahun 1947, dan Kasimo Plan untuk mengatur swasembada pangan dengan mengikuti Mazhab Fisiokrat (sektor pertanian menjadi sumber kekayaan terbaik).

2. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Pada masa ini, permasalahan kenegaraan dan perekonomian masih sama, menandakan permasalahan pada era sebelumnya memang belum sepenuhnya terselesaikan. Upaya yang dilakukan negara untuk mengatasi hal ini yaitu:

- a. Gagalnya program untuk menumbuhkan pengusaha dan kaum borjuis pribudi, program tersebut yaitu Program Benteng, di masa jabatan Kabinet Natsir. Dimana upaya yang dilakukan adalah dengan mengajak importir lokal untuk membuka pasar internasional dan bersaing dengan produk asing, ditambah dengan gelontoran dana kredit besar-besaran yang diharapkan mampu mendukung proses produksi atas produk-produk tersebut. Namun upaya ini gagal karena sifat pengusaha atau wiraswasta pribumi yang cenderung konsumtif dengan membelanjakan gelontoran dana kredit untuk keperluan lain, diluar kepentingan usaha atau produksi manufaktur mereka.
- b. Melalui UU No. 24 tahun 1951, Nasionalisasi De Javasche Bank dilakukan, dan mengharuskan bank tersebut berubah nama menjadi Bank Indonesia hingga sekarang. Maksud atas dilakukannya hal ini yaitu untuk upaya Indonesia sebagai negara merdeka yang diharuskan memiliki bank sentral dan bank sirkulasi untuk mengatur stabilitas nasional.

- c. Terobosan pada masa kepemimpinan Kabinet Ali Sastroamijoyo I, dengan dikeluarkannya Kebijakan Sistem Ekonomi Ali. Sistem ini menjanjikan adanya kerja sama antara kaum pribumi dan pengusaha China. Diharapkan kaum non-pribumi mampu memberikan pelatihan terhadap kaum pribumi, serta ditambah beberapa fasilitas penunjanglain seperti lisensi bagi usaha swasta nasional dan penyediaan dana kredit sebagai modal. Namun harapan tersebut harus pupus, saat setelah diketahui bahwa kaum non-pribumi tidak melakukan perjanjian sebagaimana mestinya dan menjadikan kaum pribumi sebagai fasilitator untuk mendapatkan dana bantuan kredit dari pemerintah.
- d. Pembubaran Uni Indonesia-Belanda sebagai akibat atas pembatalan sepihak atas hasil dari Konferensi Meja Bundar. Hal ini dikarenakan pihak Belanda yang memilih untuk menjual perusahaannya tetapi tidak diikuti kemampuan kaum pribumi Indonesia dalam membeli perusahaan tersebut.

3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Dengan banyaknya program pemerintah terkait perekonomian yang ternyata gagal dan tidak sejalan dengan harapan yang telah dibentuk, serta sebagai akibat turunan atas munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, menjadikan sistem perekonomian di Indonesia berubah menjadi Etatisme (segala bentuk aturan ditetapkan dan diatur oleh pemerintah), yang biasa disebut sebagai Sistem Ekonomi Terpimpin. Harapan dilakukannya hal ini yaitu untuk menjaga stabilitas dan mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, serta mewujudkan pemerataan status. sosial dan politik masyarakat. Di Balik cerahnya tujuan atas dibentuknya sistem ekonomi tersebut, ternyata masih ada beberapa program pemerintah yang juga gagal dalam realisasinya, diantaranya adalah:

- a. Kebijakan Devaluasi mata uang, dilakukan mulai tanggal 25 Agustus 1959 dengan mengurangi nominal (bukan nilainya) pada uang yang beredar. Sebagai contoh Rp200 menjadi Rp20, dan Rp2000 menjadi Rp200, serta melakukan pembekuan terhadap seluruh tabungan yang melebihi Rp25.000.

- b. Terjadinya stagflasi di Indonesia sebagai akibat dari Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang dilakukan pemerintah. Hal ini menjadikan harga barang naik hingga 400%.
- c. Perbedaan perspektif dan pemahaman masyarakat atas dilakukannya kebijakan Devaluasi Rupiah pada tanggal 13 Desember 1965, dengan menyederhanakan nominal mata uang Rp1000 menjadi Rp1 dan dihargai 1.000 kali lipat dari rupiah lama, tetapi oleh masyarakat hanya dihargai sebesar 10 kali lipat. Hal ini malah menjadi bumerang dengan menyebabkan kenaikan angka inflasi yang semakin tidak teratur.

G. STRUKTUR EKONOMI INDONESIA DI MASA ORDE BARU

Orde baru berjalan dari tahun 1968-1998, dengan berbagai kemajuan dan prospek yang menjanjikan untuk kelangsungan Negara Indonesia, salah satunya pada sektor ekonomi. Pembangunan yang berjalan lancar sebagai akibat dari keputusan Indonesia untuk kembali bergabung ke lembaga-lembaga pendanaan internasional, yaitu Dana Moneter Internasional (IMF) dan keberpihakan Indonesia untuk masuk dan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta pembentukan Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) yang dilakukan oleh ADB, menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk terus melakukan pembinaan terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Pemerintahan pada Orde baru beranggapan bahwa banyak peninggalan kebijakan dan keputusan ekonomi yang dilakukan pada Orde Lama menjadi masalah serius yang harus dihadapi. Permasalahan tersebut meliputi hiperinflasi, paceklik pangan, tidak Bergeraknya produksi nasional, infrastruktur yang tidak memadai, cadangan devisa negara yang terkuras, meningkatnya utang telat bayar luar negeri, hingga defisit pada APBN dan krisis dalam neraca pembayaran. Dengan begitu, pemerintahan Orde Baru akan mengedepankan untuk memecahkan masalah atas peninggalan kebijakan yang dilakukan pada pemerintahan Orde Lama, sebelum fokus pada pembangunan ekonomi nasional. Usaha pertama yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan kebijakan baru pada pertengahan tahun 1968, terkait stabilitas dan rehabilitasi ekonomi. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengendalian atas harga kebutuhan bahan pokok, dan mampu memberikan solusi atas hiperinflasi yang sebelumnya terjadi. Hingga kebijakan tersebut berjalan, inflasi turun dari 635% di tahun 1966, menjadi 8,9% di tahun 1970, menjadi permulaan yang cukup menjanjikan

dalam proses pertumbuhan ekonomi di masa itu. Mengingat berbagai kemunduran yang terjadi pada masa awal Orde Baru, seperti yang dipaparkan oleh Sadli (1987) terkait empat permasalahan utama yang menjadikan masa Orde Baru mengalami kemunduran ekonomi, yaitu: (1) Stabilitas politik yang tidak dijalankan, (2) Pemerintah yang terlalu mengedepankan orientasi dan prioritas atas tujuan untuk mengejar kepentingan politik dan ideologi, (3) Dipandang memiliki perbedaan ideologis dengan barat karena renggangnya hubungan dengan bangsa-bangsa barat dan lebih mendekati diri ke pihak timur, dan (4) Keikutsertaan pemerintah dalam melakukan stabilitas ekonomi dengan sistem Terpimpin yang terlalu luas terhadap penetapan harga barang, serta terkait produksi dan lisensi produk import, menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum memasuki perubahan struktur ekonomi dan pembangunan.

Dalam proses pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi suatu negara, negara yang maju adalah negara yang mengedepankan sektor industri dan pengolahan dari pada sektor primer seperti pertanian. Hal ini pun dilakukan oleh pemerintah pada masa itu, dengan memfokuskan pertumbuhan ekonomi di sektor industri, dengan maksud untuk membuka kemungkinan pertumbuhan di sektor lainnya. Dibuktikan pada tahun 1973, terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian pada PDB dari 10% menjadi 30%. Penurunan dominasi ini menjadi hasil yang menjanjikan terhadap program dan kebijakan pemerintah yang sebelumnya dilakukan. Devaluasi dilakukan pemerintah Indonesia saat setelah mengetahui penghasilan migas negara bagian ekspor mencapai 80%. Devaluasi dilakukan guna meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Dimulai tahun 1971 dengan penyesuaian dari Rp378/dollar menjadi Rp 415/dollar. Hingga tahun 1978, penetapan devaluasi menjadikan penguatan rupiah mencapai Rp 625/dollar US.

Prospek atas kebijakan pemerintah terus berjalan hingga pada tahun 1970- 1979, PDB Indonesia mengalami peningkatan, penurunan atas jumlah penduduk miskin, dan meningkatnya rasio gini penduduk. Persentase pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa itu diperkirakan sebesar 6%, dengan rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang mencapai Rp 78.000 per tahun (Hill, 1996). Terjadi peningkatan PDB negara yang cukup signifikan, dimulai pada tahun 1970 dengan PDB 3.340 miliar menjadi 32.025 miliar di tahun 1979. Hal ini dibuktikan dengan penurunan jumlah penduduk miskin, dengan persentase 60%, menjadi 33% di tahun 1978.

Dalam pertumbuhan ekonomi dan restrukturisasi sistem perekonomian negara, terdapat peran dari beberapa kelompok atau golongan yang juga ikut mempengaruhi hal tersebut. Diantaranya adalah kelompok nasionalis/merkantil, kelompok patrimonial, dan kelompok teknokrat. Jangka tahun kelompok tersebut lahir dan perannya dalam perekonomian Indonesia menjadi pembeda atas penetapan nama-nama setiap generasinya.

1. Generasi Teknokrat (1968-1974)

Menjadi pelopor dalam proses awal terbentuknya Orde Baru, dengan berkontribusi terhadap penyelesaian masalah dan pekerjaan rumah peninggalan orde sebelumnya. Dimana fokus kelompok atau generasi ini ada pada peralihan sektor ekonomi, yaitu dari fokus mereka di sektor ekonomi primer (pertanian) menjadi sektor ekonomi industri atau pengolahan. Ahmad E.Y. (2007) mengatakan bahwa, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan dengan melihat kebijakan-kebijakan baru yang ada guna menuntaskan rumitnya permasalahan ekonomi yang diwariskan Orde Lama, yaitu (1) Perspektif yang begitu penting terkait infrastruktur ekonomi yang menjadi dasar sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi negara, dan (2) Usaha dilakukannya proses pendekatan dengan bangsa asing atau pihak luar negeri guna memperoleh dana segar dalam bentuk pinjaman atau investasi asing. Berangkat dari dua perspektif tersebut, dibuktikan dengan penetapan kebijakan baru yaitu PMS (Penanaman Modal Asing) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967. Kemudian didukung juga dengan keputusan pemerintah untuk tidak terlarut ikut campur dalam kegiatan ekonomi melalui penetapan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Kebijakan tersebut diantaranya adalah kebebasan dalam ekspor dan impor, tidak adanya pembatasan hak kepemilikan, harga yang dibentuk dari kesepakatan antara penjual dan pembeli melalui proses penawaran dan permintaan pasar, serta memperhatikan struktur pasar bekerja dengan menjauhkan dari sifat dan mekanisme pasar monopoli. Pemerintah hanya mengatur beberapa hal terkait kebijakan yang mencakup hajat hidup orang banyak, serta beberapa instrumen investasi, seperti sektor primer atau pertanian.

2. Generasi Nasionalis-Patrimonial (1974-1997)

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Generasi Teknokrat, menjadikan adanya beberapa demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan Sebagian

masyarakat intelektual yang menganggap tingginya intervensi asing, dan menyampaikan beberapa kebijakan baru yang lebih memihak rakyat kecil. Kebijakan tersebut diantaranya adalah: (1) Kebijakan terkait investasi asing yang mengharuskan penyetoran dana dalam bentuk joint venture, (2) Penggelontoran dana kredit guna meningkatkan kinerja dan produksi wirausaha pribumi yang didanai dari APBN, sebagai contoh dikeluarkannya Kredit Mini pada tahun 1974, Kredit Candak Kulak (KCK), dan Inpres Pasardi tahun 1978, dan (3) Melalui Proyek Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil (BPIK), diharapkan pemerintah mampu melakukan proteksi terhadap sektor industri kecil yang dimulai pada tahun 1975 (Zaidi, 1998). Mas'ood (1989) mengatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh seharusnya mampu melindungi pengusaha pribumi dengan harapan mampu tumbuh lebih kuat dan otonom, serta menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Memang kritik tersebut berangkat dari perspektif masyarakat yang menganggap bahwa keuntungan yang didapatkan hanya pada sektor ekonomi industri modern saja, tetapi untuk beberapa sektor industri ekonomi yang tergolong tradisional, akan ditekan dan mulai tergerus seiring berjalannya waktu.

3. Generasi Nasionalis – Merkantilisme (1974 - 1997)

Pada generasi ini, mulai muncul pemikiran untuk mengembangkan sektor industri dengan penguasaan teknologi yang tinggi. Pemikiran tersebut muncul dari kebijakan industrialisasi pemerintahan Kelompok Teknokrat yang terfokus pada keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang ternyata tidak memadai untuk dijalankan dalam proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kelompok Nasionalis – Merkantilisme lebih mengedepankan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dengan pendapatan per kapita yang diharapkan mampu meningkat dengan cepat. Dari hal tersebut, terbentuk industri-industri yang mengedepankan teknologi, serta dikuasai secara penuh oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

H. STRUKTUR EKONOMI INDONESIA DI MASA REFORMASI

Masa reformasi berjalan mulai tahun 1997 hingga sekarang, dengan berbagai perubahan pemimpin dan kebijakannya, menjadikan struktur perekonomian berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Namun, restrukturisasi

dan bentuk struktur ekonomi Indonesia yang paling menonjol yaitu saat periode awal pemulihan krisis, periode pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintahan Presiden Megawati, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dimulai pada saat setelah terjadinya krisis 1998, yang menjadikan kontraksi pada perekonomian Indonesia sebesar 13%, diikuti dengan terjadinya depresiasi massif pada nilai tukar rupiah. Berangkat dari masalah tersebut, pemerintah berencana untuk mengajukan pinjaman kepada International Monetary Fund (IMF), hingga dikeluarkannya kebijakan atas kesepakatan Letter of Intent (LOI) di tahun 1997-2003. Reformasi yang dilakukan pemerintah cenderung kecil, hal ini diakibatkan karena penandatanganan Perjanjian LOI oleh IMF yang memberikan berbagai keleluasaan IMF dalam mengatur kebijakan negara. Beberapa hal yang dilakukan IMF sebagai upaya melakukan restrukturisasi dan mewujudkan stabilitas ekonomi Indonesia yaitu dengan melakukan penghapusan monopoli terhadap komoditas cengkeh dan menekan adanya subsidi pemerintah di sektor industri yang dianggap tidak layak secara ekonomi, sebagai contoh yaitu Industri Mobil Timor dan pesawat terbang.

Saat setelah lengsernya Presiden Soeharto, program bantuan IMF yang sebelumnya disetujui baru dapat dilakukan pada bulan Juli 1998. Presiden Habibie melibatkan berbagai instrumen dalam strategi perubahan struktur perekonomian Indonesia secara lebih luas. Namun, program bantuan IMF tersebut sempat terhenti pada September 1999 sebagai akibat dari penolakan penyampaian secara publik atas audit Bank Bali. Hal ini menjadi perhatian penting pemerintahan pada masa itu, dengan mengharuskan terfokusnya kebijakan pada lini perekonomian yang lebih dominan. Hal yang dilakukan pemerintah diantaranya dengan melakukan penataan ulang terhadap sistem kepailitan negara, dan membentuk Pengadilan Niaga sebagai acuan dalam menjamin hukum dan regulasi yang kuat. Dilanjutkan dengan keluarnya UU Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada tahun 1999. Kemudian muncul kebijakan baru mengenai status independent Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Pada periode presiden selanjutnya yaitu saat setelah Presiden Habibie turun, digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dengan fokusnya terhadap perlindungan tingkat harga dan melakukan berbagai program pemulihan ekonomi.

Menurut Boediono (2002), pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid diharapkan oleh dua masalah besar sebagai bentuk implementasi program reformasi, yaitu: (1) Program yang dijalankan mencakup berbagai isu yang muncul dari syarat atas adanya reformasi struktural, (2) Munculnya konflik dan permasalahan internal yang meliputi Menteri-menteri ekonomi dengan Bank Indonesia yang baru saja mendapatkan kebijakan terkait independensi. Ditambah dengan berbagai kebijakan birokrasi yang tidak terstruktur dan transparan yang menjadikan tidak adanya tujuan pasti dalam pembentukan kebijakan, serta hubungan pemerintahan yang tidak terjalin baik di dalam parlemen yang menjadikan reformasi perekonomian di periode ini semakin buruk. Upaya untuk melakukan pemulihan ekonomi yaitu dengan restrukturisasi utang pemerintah dengan membentuk Institusi Krisis yang dilakukan oleh BUMN. Namun, hal ini terbentur dengan lemahnya koordinasi antar institusi tersebut dan hanya bersifat ad-hoc. Hingga pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid digantikan oleh Megawati Soekarnoputri.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, terdapat berbagai kebijakan baru dengan harapan mampu menyelesaikan warisan persoalan penting di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Memperbaiki hubungan Kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan IMF merupakan langkah pertama yang diambil oleh Presiden Megawati. Hal ini menghasilkan adanya stabilitas ekonomi dan politik yang mulai kembali terbentuk di Indonesia. Namun, masyarakat menganggap bahwa Indonesia tidak seharusnya selalu tergantung terhadap kucuran dana dari IMF, dan tindak lanjut atas hal tersebut dengan melakukan pemberhentian program bantuan IMF yang dilakukan pemerintah di tahun 2003. Dalam mempersiapkan perjalanan restrukturisasi perekonomian Indonesia tanpa adanya bantuan dana dari IMF, maka pemerintah berinisiatif menerbitkan Paket Kebijakan Pra- dan Pasca-IMF yang dapat dikenal sebagai White Paper. Menurut Soesastro (2004), peranan umum atas kebijakan tersebut yaitu untuk mewujudkan kepastian kebijakan reformasi pada masa periode pemilu. Hal ini membentuk perasaan atas kepemilikan yang semakin tinggi oleh pemerintah dan masyarakat, karena memang setiap kebijakan dan keputusan yang diambil tidak lagi mengacu pada dikte yang dilakukan oleh IMF. Namun persoalan yang sama terjadi pada masa pemerintahan Presiden Megawati, yaitu mengenai masalah investasi pada periode 2004. Iklim investasi semakin

diperburuk dengan munculnya beberapa keputusan, salah satunya mengenai pembatalan UU kelistrikan oleh MK pada tahun 2003 karena MK menganggap UU tersebut bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Namun opini public tetap terbentuk dengan beranggapan bahwa masa pemerintahan Presiden Megawati, mampu menjaga stabilitas makro ekonomi yang dijalankan dalam sistem perekonomian di masa itu.

Kemudian berlanjut pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terfokus pada pembangunan infrastruktur negara. Hal ini didasari bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur terhadap proses restrukturisasi perekonomian di Indonesia. Pada bulan Januari 2005, pemerintah memutuskan untuk menjalankan kebijakan Infrastructure Summit dengan harapan mampu menyelenggarakan reformasi dan memberikan kebijakan untuk memperbaiki rusaknya iklim investasi infrastruktur yang terjadi saat masa kepemimpinan Megawati (Soesastro & Atje, 2005). Sebagai upaya dalam melakukan langkah reformasi ekonomi secara lebih sistematis, pemerintah mengeluarkan paket reformasi pada tahun 2006. Dengan meliputi 85 usaha reformasi, dengan cakupan beberapa undang-undang, diantaranya UU Penanaman Modal, UU Perpajakan, dan amandemen UU Bea Cukai, serta revisi atas UU Ketenagakerjaan, dan penyelesaian atas seluruh paket reformasi tersebut dilakukan pada akhir tahun 2006 (Hill, 2006). Namun terdapat masalah dalam implementasi kebijakan reformasi tersebut, yaitu mengenai kapasitas dan koordinasi antar kementerian, ditambah dengan lambatnya perkembangan di DPR. Dengan keuntungan berupa kenaikan harga komoditas dunia dan likuiditas global, Presiden SBY dirasa mampu menjaga stabilitas makroekonomi negara, terkecuali isu mengenai subsidi BBM. Namun, tidak dengan reformasi perekonomian yang lain, seperti iklim investasi yang rusak, pembangunan infrastruktur yang mandek, dan beberapa permasalahan atas program yang sebelumnya telah dibentuk.

Berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tantangan dalam pemerintahan ini dapat terbilang cukup kompleks, baik dari sisi internal maupun eksternal. Diantara masalah tersebut yaitu mengenai menurunnya stimulus pergerakan ekonomi nasional, ditambah dengan adanya perlambatan ekonomi internasional, serta keringnya likuiditas global. Menjadi pekerjaan rumah yang harus terselesaikan saat sebelum dijalkannya berbagai kebijakan baru untuk mengatasi warisan masalah pada periode pemerintahan sebelumnya. Upaya paling

radikal yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi yaitu mengenai upaya dalam pemotongan beban fiskal dengan mengurangi subsidi BBM. Dampak atas hal tersebut yaitu naiknya harga minyak nasional, yaitu BBM Bersubsidi (premium) dan Solar Bersubsidi. Saat setelah mendapat kepercayaan masyarakat mengenai upaya pemerintah dalam keseriusannya untuk melakukan reformasi ekonomi, nyatanya hal itu tidak berjalan lama. Masyarakat menganggap pemerintahan Jokowi gagal dalam mengatasi masalah penting pemerintah yaitu mengenai iklim investasi dan pembangunan infrastruktur yang semakin lambat. Munculnya masalah baru, tetapi tidak selesainya masalah yang sebelumnya telah ada, menjadikan Presiden Jokowi berkeputusan untuk meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi pada tahun 2005. Paket Kebijakan Ekonomi tersebut diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan fokus terhadap berbagai masalah yang telah dan sedang ada di masa pemerintahan saat itu. Terbilang cukup banyak peraturan baru yang disetujui pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, hal ini ditunjukkan dengan fakta adanya 203 regulasi baru, yang terdiri dari 154 Peraturan Menteri dan 49 Peraturan Presiden. Hingga pada tahun 2016, regulasi tersebut dapat terselesaikan hingga 98%. Dengan adanya masalah ini, memang pemerintahan Jokowi tidak lagi harus mengedepankan pasar internasional dalam penjualan produk-produk dalam negeri, hal ini dikarenakan lesunya transaksi penjualan pada pasar internasional. Belanja pemerintah yang seharusnya mampu menggerakkan perekonomian dan mendatangkan berbagai infrastruktur baru, nyatanya kurang mendapat pendanaan sebagai akibat dari menurunnya pendapatan pajak yang diterima negara.

BAB IV

DISTRIBUSI PENDAPATAN

A. PENGERTIAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribution* yang memiliki arti penyaluran, pengiriman atau pembagian barang terhadap sejumlah orang atau tempat. Sedangkan pendapatan merupakan penghasilan yang timbul karena aktivitas entitas normal dan dikenal sebagai hasil penjualan barang maupun jasa, bunga, deviden, royalti, dan sewa. Untuk mengukur kesejahteraan suatu negara, aspek pendapatan begitu sangat penting karena adanya ketidakmerataan pendapatan merupakan cerminan pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan keadaan kekacauan yang ada pada suatu negara.

Distribusi Pendapatan merupakan konsep yang diperuntukkan sebagai pengukur merata atau tidaknya pembagian pendapatan suatu negara kepada seluruh penduduknya. Menurut Sukirno (2006), pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Distribusi pendapatan dikatakan efektif dan efisien apabila terciptanya pemerataan ekonomi yang diharapkan mampu menaikkan kebutuhan negara seperti sektor pendidikan, kesehatan, serta dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan rakyat. Terdapat dua konsep utama untuk mengukur distribusi pendapatan yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Konsep ketimpangan absolut berarti pengukuran distribusi pendapatan diukur dengan menggunakan parameter nilai absolut. Sedangkan konsep ketimpangan relatif berarti di sisi lainnya yaitu ukuran distribusi pendapatan dilihat dari membandingkan tingkat pendapatan individu atau kelompok orang dengan pendapatan seluruh masyarakat.

Para ekonom menjelaskan dua konsep utama dalam distribusi pendapatan, yaitu :

1. Distribusi Ukuran

Distribusi Ukuran atau sering disebut dengan distribusi individu (*personal*). Distribusi pendapatan ini paling banyak dipakai oleh pelaku ekonomi karena dalam distribusi ukuran yang berkaitan didalamnya adalah tiap-tiap orang atau rumah tangga serta pendapatan yang diterima. Distribusi ukuran tidak mempermasalahkan pendapatan yang diperoleh masing-masing orang yang bersumber dari pekerjaan mereka maupun dari sumber lain. Selain itu cara

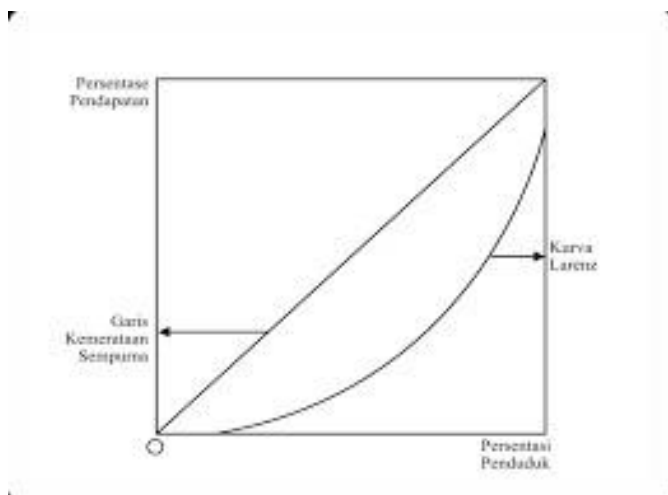
perolehan pendapatan tersebut tidak dipermasalahkan. Oleh karena itu para pelaku ekonomi lebih sering mengumpulkan semua individu dengan mengambil ukuran pendapatan per kapita serta membagi total populasi kedalam kelompok yang berbeda berdasarkan kategori masing-masing individu.

2. Distribusi Fungsional

Distribusi fungsional atau sering disebut juga dengan distribusi pendapatan per faktor produksi yang membahas perolehan pendapatan melalui tingkatpersenan pendapatan secara menyeluruh dari tenaga kerja dan membandingkan dengan tingkat persen total yang didistribusikan dalam bentuk pendapatan sewa, pendapatan bunga serta laba lain-lain. Sehingga dapat diperoleh hasil bahwa distribusi fungsional ini terpaku pada bagian dari jumlah pendapatan nasional yang diterima oleh setiap faktor produksi seperti tanah, modal, dan tenaga kerja.

B. TOLAK UKUR DISTRIBUSI PENDAPATAN

1. Kurva Lorenz



Sumber : eprints.undip.ac.id

Cara yang dapat dijadikan patokan untuk pengukuran tingkat merata atau tidaknya pendapatan suatu negara yaitu dengan Kurva Lorenz. Kurva Lorenz asal mulanya diperkenalkan oleh Conrad Lorenz, seorang ahli statistik asal Amerika Serikat. Ia telah menggabungkan antara kelompok penduduk dan kelompok pendapatan pada tahun 1905.

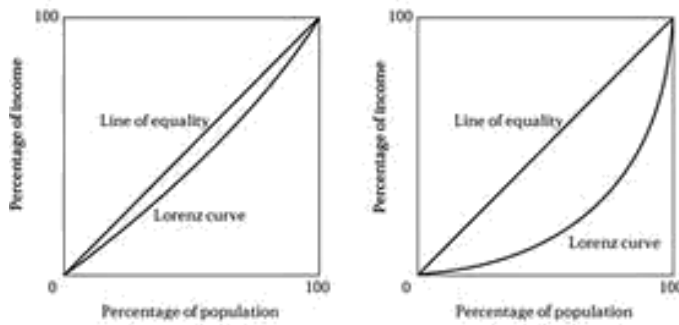
Cara yang dapat dijadikan patokan untuk pengukuran tingkat merata atau tidaknya pendapatan suatu negara yaitu dengan Kurva Lorenz. Kurva Lorenz asal mulanya diperkenalkan oleh Conrad Lorenz, seorang ahli statistik asal Amerika

Serikat. Ia telah menggabungkan antara kelompok penduduk dan kelompok pendapatan pada tahun 1905.

Sumbu vertikal pada kurva tersebut menunjukkan kelompok pendapatan yang diterima oleh tiap-tiap persen penduduk. Jumlah ini mencapai kumulatif 100% sehingga kedua garis sama panjangnya dan membentuk seengah lingkaran. Kemudian sebuah diagonal ditarik dari titik asal ke sudut kanan atas setengah lingkaran. Setiap titik diagonal menunjukkan bahwa persentase pendapatan yang diterima sama dengan persentase penerima pendapatan tersebut. Contoh di sini adalah 50% dari pendapatan yang diterima oleh 50% dari penerima pendapatan. Derajat pemerataan yang ditunjukkan pada kurva Lorenz ketika jauh dari kerataan diagonal atau sempurna.

2. Indeks Gini

Teori yang digunakan untuk mengukur merata atau tidaknya suatu pendapatan nasional pada masyarakatnya yaitu menggunakan Kurva Lorenz atau Indeks Gini. Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan yang nilainya terletak antara 0% - 1%. Jika nilainya mendekati angka 0% maka artinya suatu negara tersebut memiliki tingkat pemerataan sempurna. Sedangkan jika suatu negara tersebut nilainya mencapai angka 1% maka ketidakmerataan sempurna telah dicapai. Dalam suatu negara tingkat persentase ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat diperoleh dengan menghitung antara luas daerah garis diagonal (pemerataan sempurna) dengan daerah Lorenz jika dibandingkan dengan luas total dari setengah bujur sangkar dimana terdapat kurva Lorenz tersebut. Koefisien Gini merupakan suatu ukuran statistik yang digunakan sebagai tolak ukur ketimpangan yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita suatu daerah. Jika Koefisien Gini bernilai nol (0) artinya suatu daerah tersebut memiliki tingkat pemerataan sempurna. Sedangkan jika Koefisien Gini bernilai satu (1) maka suatu daerah tersebut memiliki tingkat ketidakmerataan sempurna. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai Koefisien Gini maka semakin tinggi tingkat ketidakmerataan pendapatan daerah tersebut.

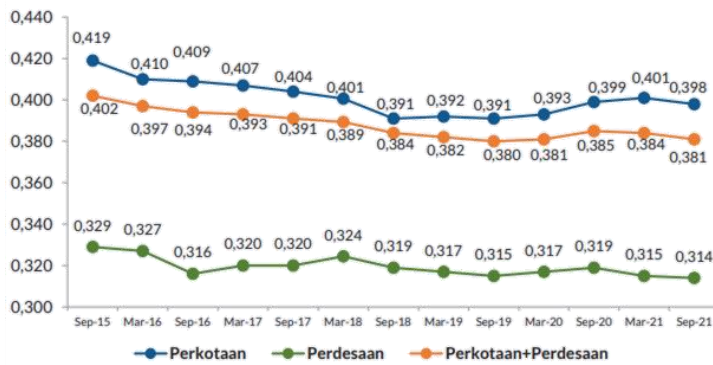


Sumber : digilibfeb.ub.ac.id

Rumus Koefisien

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} x (Fc_i + Fc_{i-1})$$

Koefisien Gini yang sering digunakan oleh negara lain yaitu Koefisien Gini dengan interval 0 sampai dengan 1. Adapun negara-negara yang mengalami ketidakmerataan kategori tinggi terdapat pada angka 0,50-0,70; kategori sedang antara 0,36-0,49; dan kategori ketidakmerataan rendah berada di angka kisaran 0,20-0,35. Jika nilai Koefisien Gini mendekati angka 0 berarti suatu negara tersebut memiliki tingkat perekonomian dengan tingkat ketidakmerataan semakin rendah atau dapat dikatakan negara tersebut tingkat perekonomiannya semakin merata. Sedangkan nilai Koefisien Gini yang semakin mendekati angka 1 berarti suatu negara tersebut memiliki tingkat ketidakmerataan perekonomian semakin tinggi atau dapat dikatakan bahwa negara tersebut semakin tidak merata. Pada negara - negara di dunia apabila koefisien Gini menembus angka 0,4 lebih maka secara tidak langsung dikatakan sebagai negara yang memiliki tingkat ketidakmerataan perekonomian. Hal tersebut berpotensi membahayakan karenaakan munculnya rasa kecemburuan sosial pada masyarakat sehingga dapat mengancam stabilitas nasional.



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Data diatas merupakan data perkembangan Rasio Gini pada September 2015-September 2021. Sejak awal september 2015 tingkat rasio gini mulai mengalami penurunan sampai dengan september 2019. Posisi ini memperlihatkan bahwa selama periode tersebut telah terjadi pemulihan pemerataan pendapatan di Indonesia. Namun bencana wabah Covid-19 yang telah menyerang negara Indonesia bahkan dunia, menjadi penyebab kenaikan rasio gini pada Maret 2020 dan September 2020. Kemudian setelah adanya upaya pemulihan ekonomi, pada Maret 2021 mulai mengalami penurunan secara perlahan hingga September 2021. Data rasio gini ini dibedakan menurut wilayah tempat tinggal. Wilayah perkotaan pada September 2021 menunjukkan angka sebesar 0,398 dan untuk wilayah pedesaan menunjukkan angka 0,314. Secara keseluruhan pada September 2021, tingkat ketimpangan penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Rasio Gini adalah sebesar 0,381. Angka ini menurun 0,003 poin jika dibandingkan dengan Rasio Gini pada bulan Maret 2021 yang mencapai angka 0,384. Hal ini dapat diartikan bahwa ketimpangan penduduk di Indonesia berada pada kategori ketimpangan rendah (BPS, September 2021).

3. Bank Dunia

Pengukuran merata atau tidak meratanya distribusi pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu 40% penduduk dengan jumlah pendapatan rendah, 40% penduduk dengan jumlah pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan jumlah pendapatan tinggi dari total jumlah penduduk. Tabel berikut ini menunjukkan pengukuran distribusi pendapatan menurut Kriteria Bank Dunia :

Distribusi Pendapatan suatu Negara	Tingkat Ketidakmerataan
Pengeluarannya <12%	Tinggi

dari keseluruhan pengeluaran	
Pengeluarannya 12%-17% dari keseluruhan pengeluaran	Sedang
Pengeluarannya >17% dari keseluruhan pengeluaran	Rendah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021, distribusi pendapatan yang diukur menggunakan ukuran ketimpangan Bank Dunia pada 40 persen kelompok terbawah saat ini berada pada angka 17,97%. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk pada September 2021 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika diperlihatkan dari wilayah, daerah perkotaan mencapai angka 17,00 % yang menjelaskan bahwa kelompok perkotaan tersebut termasuk pada golongan kategori ketimpangan sedang. Sementara daerah pedesaan menunjukkan angka 20,83% berarti termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.

C. KETIDAKMERATAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Distribusi pendapatan dapat terwujud pemerataan maupun ketidakmerataan yang mewakili tingkat distribusi pendapatan dan diperoleh melalui berbagai kegiatan ekonomi dari kegiatan kewirausahaan di antara penduduk. Meskipun distribusi pendapatan ini didasarkan pada kepemilikan faktor-faktor produksi yang berkaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan pendapatan sosial berdasarkan kepemilikan faktor-faktor produksi dapat dibagi menjadi dua jenis :

1. Pendapatan yang bersumber dari hasil pekerjaan, dapat berupa upah atau gaji dan besarnya tergantung produktivitas masing-masing.
2. Pendapatan dari sumber lain seperti sewa, laba, bunga, hadiah, dll.

Masalah ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah berbeda-beda seperti daerah perkotaan yang memiliki tingkat pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Hal ini tentu saja menjadi penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan antar daerah semakin melebar. Pertumbuhan terjadi karena adanya proses transfer sumber-sumber ekonomi dari sektor yang masih bersifat tradisional ke modern dan ketidakmerataan pendapatan dalam proses pertumbuhan terjadi

karena adanya perubahan struktur yang lambat dari dualisme ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap ketidakmerataan pendapatan yang ada di masyarakat. Selain itu pendapatan perkapita suatu wilayah juga akan berpengaruh, tenaga kerja, kesehatan dan tingkat pendidikan.

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor ketidakmerataan pendapatan. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk menjadi pemicu sulitnya pencarian lapangan pekerjaan yang semakin ke tahun semakin menurun. Pertumbuhan penduduk ini juga menjadi pokok masalah utamanya kepada masyarakat pedesaan yang secara kasap mata dipandang sebagai masyarakat miskin. Pendapatan yang diperoleh dari wilayah desa juga dibawah rata-rata sehingga memunculkan angka kemiskinan yang tidak seimbang dengan wilayah perkotaan.

Di Indonesia ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan dapat dilihat dari kekayaan yang dimiliki oleh beberapa individu . Dalam perlakuan pajak pun dibedakan bagi yang memiliki penghasilan tinggi maka akan semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan sedangkan masyarakat dengan penghasilan rendah berpotensi tidak membayar pajak dengan adanya skema pendapatan tidak kena pajak. Terdapat delapan indikator yang menjadi penyebab adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara berkembang seperti Indonesia, yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk yang tidak diikuti dengan penambahan pendapatan per kapita.
2. Inflasi yang tidak diikuti dengan penambahan produksi barang secara proporsional.
3. Kesenjangan pembangunan tiap daerah
4. Minimnya mobilitas sosial.
5. Kebijakan industri substitusi impor .
6. Turunnya nilai tukar.
7. Hilangnya industri local.

D. USAHA PEMERATAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Usaha yang dapat dilakukan untuk pemerataan pendapatan di Indonesia yaitudengan cara :

1. Transfer Uang Tunai

Transfer uang tunai adalah bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat yang masuk dalam golongan masyarakat penghasilan rendah dengan berupa uang tunai. Model transfer uang tunai dibedakan menjadi 3 model, yaitu :

a. Model Pajak Pendapatan Negatif

Pada model ini pemerintah memberikan bantuan kepada penduduknya yang dianggap tidak mampu dengan persyaratan keluarga tersebut merupakan keluarga dengan penghasilan dibawah pas-pasan dan nilai subsidi yang dihasilkan adalah selisih penghasilan pas-pasan dengan penghasilan riil keluarga tersebut.

b. Model Demogran

Pada model ini pemerintah memberikan bantuan uang tunai kepada semua masyarakat kelompok demografi tanpa membedakan tingkat pendapatan mereka. Dalam artian subsidi yang diberikan dengan jumlah yang sama. Masyarakat yang berhak memperoleh subsidi ini adalah masyarakat yang berpenghasilan standar.

c. Model Subsidi Upah

Pada model ini subsidi uang tunai diberikan kepada pekerja yang bekerja harian dan penghasilannya berada di bawah upah standar.

2. Transfer Barang

Bentuk distribusi bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya dapat berupa transfer barang. Transfer barang muncul karena adanya penyalahgunaan sebagian aparat negara dalam proses pendistribusian uangtunai. Oleh karenanya agar bantuan yang diberikan dapat diterima secara langsung oleh masyarakatnya, maka transfer barang dapat diberikan melalui cara pemberian pajak pendapatan progresif secara langsung dan pemberian langsung barang kebutuhan sehari-hari kepada orang yang mengalami perekonomian lemah. Di Indonesia sendiri pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) juga terdapat jenis bantuan yang disalurkan dalam bentuk barang kebutuhan makan, seperti beras, telur, minyak, mie instan, dan daging

3. Program Kesempatan Kerja (PEP)

Distribusi pendapatan juga dapat disalurkan melalui lapangan kesempatan kerja. Di negara lain banyak yang sudah menerapkan program kesempatan kerja ini kepada warganya untuk membantu peningkatan perekonomian

negara. Cukup efisien karena perluasan lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan dan dapat mengurangi angka pengangguran di negara tersebut. Di Indonesia sendiri, program kesempatan kerja ini sudah mulai diterapkan dengan nama program Kartu Pra Kerja. Program ini diperuntukkan kepada calon pekerja yang sedang mencari atau melamar pekerjaan. Mereka mendapatkan uang pembinaan untuk meningkatkan skill serta keterampilan mereka selama proses pencarian kerja.

BAB V

PEMERATAAN PEMBANGUNAN

A. PENGERTIAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan yang dimana pulau sebagai penghubung antar wilayah bukan sebagai pemisah. Setiap daerah memiliki kondisi geologis yang berbeda dan menjadi PR bagi pemerintah daerah sebagai proses pembangunan yang dilaksanakan sebagai pemenuhan akses yang mempermudah masyarakat wilayah. Dengan kondisi geologis yang berbeda setiap pulau tentunya memiliki aspek yang tidak sama dengan daerah lain sehingga menjadi penghambat dalam proses pembangunan. Pembangunan yang tidak merata akan menyebabkan kesenjangan di masyarakat dan kemiskinan akan terus bertambah. Pemerintah memiliki pengendali utama dalam pembangunan sehingga adanya pemerataan pembangunan sebagai bentuk proses ke arah perbaikan dengan memenuhi pembangunan baik dari infrastruktur maupun pembangunan manusianya itu sendiri. Untuk itu lebih jelasnya pemerataan pembangunan dijabarkan sebagai berikut.

Pemerataan menurut KBBI, adalah proses perbuatan memeratakan. Pemerataan berasal dari kata dasar rata, maksudnya seimbang antara semua bagian, misalnya barang yang dibagi kepada semua anggota dengan rata, yakni semua anggota mendapat bagian barang dengan jumlah yang sama. Kata pemerataan ini sering kali digunakan dalam beberapa konteks kalimat terutama dalam bidang ekonomi, diantaranya pemerataan pembangunan, pemerataan pendapatan, pemerataan ekonomi, pemerataan wilayah dan masih banyak yang lainnya.

Dalam hal pembangunan perekonomian suatu negara tentunya harus memperhatikan pemerataan wilayahnya, yakni dari mulai pemerataan ekonomi, pemerataan pendapatan hingga pemerataan pembangunan di setiap bagian wilayah di suatu negara tersebut. Dengan adanya pemerataan-pemerataan tersebut di suatu negara ini tentunya akan berdampak dengan majunya pembangunan wilayah di suatu negara, dan suatu negara membutuhkan seorang yang hebat untuk dapat meratakan pembangunan di dari semua wilayah di sebuah negara tersebut.

Pembangunan adalah suatu perubahan sosial yang mengarah kepada suatu hal yang lebih baik yang mencakup beberapa sistem, diantaranya politik, ekonomi,

infrastruktur, pendidikan dan masih banyak lagi. Untuk kemajuan suatu negara atau wilayah tentunya harus terjadi suatu pembangunan baik dalam segi ekonomi, pendidikan maupun infrastrukturnya.

Adapun pengertian pembangunan menurut beberapa ahli, diantaranya :

1. Menurut Siagian (1994)

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu negara, dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa “nation building”.

Maksudnya pembangunan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk tercapainya pertumbuhan dan perubahan sesuai dengan rencana yang telah di rancang oleh suatu negara tersebut menuju pembangunan bangsa di era modern.

2. Menurut Alexander (1994)

Pembangunan “development” adalah proses perubahan yang mencakupseluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, Pertahanan, pendidikan dan tekhnologi, kelembagaan dan budaya. Maksudnya suatu negaradapat dikatakan mengalami sebuah pembangunan apabila terjadi perubahan yang maju dalam sistem sosial negara tersebut, seperti halnya dalam bidang politik, bidang ekonomi, infrastruktur yang dimiliki negara, pertahanan, pendidikan yang maju dengan kualitas yang baik dan dan melek teknologi, kelembagaan dan budaya yang diterapkan di negara tersebut.

Itulah beberapa pengertian pembangunan menurut para ahli, setelah mengetahui pengertian pemerataan dan pembangunan kita dapat mengetahui maksud dari pemerataan pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang dilakukan oleh suatu negara atau wilayah yang mencakupseluruh sistem sosial didalam negara tersebut (bidang politik, bidang ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan lainnya yang memiliki peran penting dalam negara) secara adil dan merata di seluruh wilayah negara sehingga tidak ada wilayah yang tertinggal akan pembangunan negara tersebut. Karena apabila di suatu negara ada sebagian kecil wilayah yang tertinggal baik dalam segi ekonomi dan pendidikannya, suatu negara tersebut dapat dikatakan belum bisa menerapkan pemerataan pembangunan.

B. KETIMPANGAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

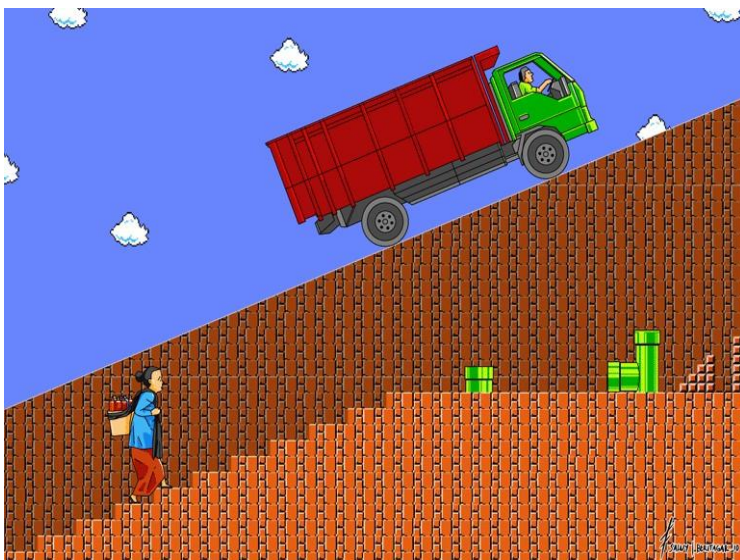
Ketimpangan merupakan dua kondisi yang kontras dan berbeda terlalujauh, ketimpangan ini bisa terjadi di berbagai hal. Namun yang di maksud kali ini adalah ketimpangan dalam pemerataan pembangunan jadi suatu negara dapat dikatakan terjadi suatu ketimpangan apabila di dalam negara tersebut terdapat tingkat pembangunan yang terjadi antara wilayah maju dan wilayah terbelakang, dan juga bisa saja di wilayah maju tersebut terdapat penduduk dengan tingkat perekonomiannya rendah (miskin). Adapun hal itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : anugrah awal yang berbeda (rezeki dari awalnya), kandungan sumber daya alam, kualitas sumberdaya manusia, dan juga perbedaan kondisidemografi di beberapa wilayah tersebut. Maka dari itu pembangunan suatu wilayah tersebut memiliki progress yang berbeda.

Ketimpangan pemerataan pembangunan antar wilayah ini lah yang menjadikan perbedaan kesejahteraan yang cukup signifikan antara masyarakat yang tinggal di wilayah maju dan wilayah terbelakang. Namun tidak menutup kemungkinan masalah ketimpangan ini dapat terselesaikan di tangan pemimpin hebat dan masyarakat yang cerdas dan semangat yang tinggi. Jadi kebijakan pemimpin suatu negara sangat berdampak terhadap pembangunan suatu negara, misalnya dalam permasalahan ketimpangan pemerataan pembangunan ini pemimpin harus dapat mengambil kebijakan dan langkah guna menyamaratakan pembangunan di suatu negara tersebut sehingga tidak ada lagi wilayah maju dan wilayah terbelakang, misalnya beliau memberikan perhatian lebih terhadap wilayah terbelakang dengan membangun tatanan wilayahnya baik dalam pembukaan lapangan kerja di wilayah tersebut, memberikan infrastruktur yang baik dan meningkatkan pendidikan dengan menempatkan guru profesi di sekolah- sekolah wilayah terbelakang tersebut sehingga dapat dapat meningkatkan kualitas dari wilayah terbelakang.

Dan di negara-negara di dunia masih banyak yang mengalami ketimpangan pemerataan pembangunan sehingga terjadi perbedaan yang signifikan antara wilayah maju dan wilayah terbelakang. Khususnya di negara Indonesia ini masih ada beberapa wilayah yang terbelakang salah satunya Pulau Sumatera, yang disebabkan oleh rendahnya sumber daya yang berdampak dengan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di kota-kota di sumatera, rendahnya akses masyarakat terhadap kesehatan masyarakat yang tidak terjamin dan kualitas

pendidikan rendah yang menghambat lahirnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berpotensi di bidangnya. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan ketimpangan wilayah di Sumatera dibandingkan wilayah yang maju. Maka dari itu perlulah perhatian yang lebih oleh pemerintah terhadap pembangunan wilayah terbelakang seperti di pulau Sumatera dan wilayah lainnya di Indonesia.

C. FAKTOR-FAKTOR KETIMPANGAN PEMBANGUNAN



Sumber : beritatagar.id

Seperti dilihat pada gambar di atas adanya perbedaan dalam aspek pembangunan di akses mobilitas. Pembangunan memiliki peranan yang dapat memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Pembangunan tidak mengacu pada bentuk fisik yang dibuat oleh pemerintah saja tetapi dapat dilihat dari manusia sebagai pelaku dalam pembangunan. Pemerintah selalu mengencarkan pembangunan yang harapannya agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan akses yang mudah dengan efisiensi waktu yang tidak cukup banyak. Seperti halnya contoh di atas pembangunan pada mobilitas yang disediakan dengan akses memadai maka percepatan proses distribusi produk barang dan jasa kepada konsumen selain itu dapat menghemat waktu dan tenaga. Sebaliknya jika melihat perbandingan gambar di bawahnya yaitu seorang penjual jamu yang masih berjalan kaki dikarenakan akses jalan yang belum merata dalam proses distribusi pada konsumen maka akan memakan waktu yang lama untuk sampai dan butuh tenaga yang banyak untuk sampai pada tangan konsumen. Perbedaan dalam pembangunan tentunya akan menjadi masalah dalam masyarakat

sehingga akan adanya ketimpangan yang muncul akibat ketimpangan. Ketimpangan pembangunan yang muncul akibat perbedaan dalam aspek keberadaan akses yang memudahkan aktivitas masyarakat. Lebih jelasnya sebagai berikut.

Ketimpangan pembangunan pada suatu wilayah terjadi karena muncul secara natural atau alami dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan. Terjadinya ketimpangan akan menyebabkan tingkat kesejahteraan yang berbeda antar wilayah dan memicu kesenjangan sosial yang berakibat memicu *social conflict* wilayah yang timpang. Terdapat beberapa pengaruh antar wilayah yang menyebabkan ketimpangan yaitu 1) sumber daya alam yang berbeda, 2) faktor demografis yang terdapat kondisi tenaga kerja, 3) alokasi dana pembangunan antar wilayah yang baik investasi pemerintah maupun investasiswasta, 4) memfokuskan kegiatan ekonomi wilayah, dan 5) perpindahan atau mobilitas barang dan jasa (Sjafrizal,2012).

Keterkaitan antara ketimpangan pembangunan dan perbedaan sumber daya alam dicirikan oleh perbedaan wilayah, yang dicirikan oleh perbedaan wilayah, dan jika diperlakukan secara bijaksana dengan memperhatikan peraturan yang ada, sumber daya alam yang menjadi potensi di wilayahnya tersebut. ekonomi. Pertambangan menghasilkan prosentase hasil pertambangan yang lebih tinggi, seperti daerah-daerah dengan sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi, yang mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, yang nantinya akan menjadi pembangunan bagi kemajuan masyarakat daerah tersebut. Sebaliknya, jika sumber daya alam suatu daerah memiliki nilai jual yang rendah dan tidak memiliki nilai ekonomi, maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi nantinya. Pertumbuhan ekonomi yang menghambat pertumbuhan suatu wilayah juga akan menghambat perkembangan wilayah tersebut.

Faktor demografis yang masih ada syarat energi kerja. Selain energi kerja faktor demografis mencakup taraf pertumbuhan dan struktur kependudukan, taraf pendidikan dan kesehatan, syarat ketenagakerjaan dan disparitas pada tingkahlaris dan norma pandangan hidup kerja yg dimiliki dalam daerah yg bersangkutan. Kondisi demografis kental kaitannya dengan masyarakat sehingga berdampak terhadap kegiatan kerja di masyarakat. Wilayah dengan kondisi geografis yang lebih tinggi dan lebih unggul maka akan meningkatkan investasi yang memicupara investor untuk menanamkan saham dan modalnya di wilayah yang

bersangkutan sehingga penyediaan lapangan kerja nantinya akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut ikut meningkat sejalan dengan didirikannya pembangunan wilayah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Bagi wilayah yang memiliki etos kerja yang tinggi dan baik akan menyumbang nilai positif terhadap *stakeholder* yang akan menanamkan modal usaha di suatu wilayah. Sebaliknya jika etos kerja yang rendah bukan berarti kinerja dari tenaga juga rendah melainkan ada hal yang di mana tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki atau kurang nyaman hal tersebut akan berdampak pada produktivitas yang dihasilkan sehingga pengambilan keputusan bagi *stakeholder* nantinya akan lebih lama.

Alokasi dana pembangunan antar daerah, baik investasi pemerintah maupun swasta. Salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Daerah dengan keunggulan unik cenderung tumbuh cukup baik, dengan beberapa perbaikan di sektor-sektor yang dipercaya di daerah tersebut.

Investor biasanya tertarik pada bidang yang memiliki keunggulan tersendiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Pertumbuhan pesat tersebut akan dilengkapi dengan pembangunan wilayah, pembangunan pasokan tenaga kerja, dan pencapaian tingkat pendapatan per kapita yang meningkat lebih cepat. Di sisi lain, jika ada sedikit investasi pemerintah atau swasta di suatu daerah, pembangunan tidak akan berhasil dalam hal penciptaan lapangan kerja. Alokasi investasi pemerintah sangat ditentukan oleh sistem yang beroperasi di daerah. Bila dioperasikan secara terpusat, ketimpangan antar daerah cenderung meningkat karena pemerintah cenderung lebih banyak dialokasikan ke pemerintah pusat. Namun, jika pemerintah memiliki otonomi, kesenjangan pembangunan akan jauh lebih kecil karena dana akan dialokasikan ke masing-masing pemerintah daerah. Berbeda dengan investasi swasta yang didorong oleh kekuatan pasar. Kekuatan ini ditunjukkan dalam perannya dalam menarik banyak investasi swasta di wilayah tersebut dan menghasilkan keuntungan di wilayah tersebut. Keunggulan dalam hal ini adalah keunggulan aglomerasi yang disebabkan oleh terkonsentrasinya beberapa kegiatan ekonomi yang terkait dengan masing-masing wilayah.

Memfokuskan kegiatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila pemerintah dapat memfokuskan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. Hal tersebut akan mendorong terhadap proses pembangunan dalam wilayah itu

sendiri. Fokus kegiatan ekonomi dapat dijalankan dengan meningkatkan produktivitas dari hasil sumber daya alam yang menjadi unggulan pada wilayah tersebut, fasilitas transportasi yang baik dan mudah dijangkau, serta kondisi geografis pada wilayah tersebut dengan meningkatkan kualitas yang lebih baik.

Perpindahan atau mobilitas barang dan jasa. Pembangunan yang baik tentunya memiliki mobilitas barang dan jasa yang lancar. Kegiatan mobilitas barang dan jasa berkaitan dengan perdagangan yang ditunjukkan saat proses distribusi barang dan jasa semakin baik proses pengantarannya maka menunjukkan pembangunan yang cukup baik yang dapat dilihat dari akses sarana dari transportasi baik itu darat, laut maupun udara. Ketimpangan akan semakin tinggi jika mobilitasnya rendah begitupun sebaliknya

D. UPAYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Amanah pengembangan pembangunan yang terkandung dalam Pancasila pada sila kelima, dijabarkan dalam Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi *Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh Negara*. Selanjutnya disambung dengan pasal 33 ayat (3) bahwa *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Upaya pemerataan pembangunan yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945 dalam perwujudan mensejahterakan rakyat bukanlah hal yang mudah karena pada faktanya pembangunan belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Sehingga dengan pembangunan berkelanjutan akan memberikan jawaban demi kesejahteraan rakyat dan merealisasikan amanat yang terkandung dalam Pancasila pada sila ke lima.

Ketimpangan pembangunan yang memiliki dampak terhadap kesejahteraan tentunya harus diupayakan pemerataan pembangunan dengan baik dan bijaksana untuk mengatasi masalah dari ketimpangan pembangunan. Pemerintah khususnya memiliki kendali yang tinggi dalam mengupayakan pemerataan dalam pembangunan di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengambil tindakan dalam rangka pemerataan pembangunan dengan mengambil keputusan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Menurutnya gambaran jawaban tersebut yang menjadi pesatnya pembangunan Indonesia dari tahun sebelumnya. Dalam hal peningkatan perekonomian suatu daerah, pemerintah memiliki kewenangan serta berperan aktif menjadi penggerak dalam pembangunan daerah. Karena apabila menunggu pertumbuhan ekonomi naik bukanlah hal yang tepat. Hal tersebut

dikarenakan akan berdampak pada keterbelakangan pembangunan yang akan menjadi ketimpangan di masyarakat.

Pemerintah daerah diharapkan mampu mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan daerah. Karena masyarakat yang tinggal di daerah tersebut yang tahu akan kondisi terkait pembangunan yang kurang dalam kebutuhan masyarakat. Selain hanya mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pemerintah daerah harus tanggap dalam membenahi pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat.

Pemerataan pembangunan yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi batas kesenjangan pendapatan antar seluruh lapisan masyarakat, kesenjangan antarwilayah, serta agar mampu mengentaskan kemiskinan. Pemerataan pembangunan di Indonesia dilakukan dengan sistem pemerintahan yang sentral atau terpusat dengan sistem pemerintahan pembangunan sesuai dengan otonomi daerah yang diserahkan kepada daerah masing-masing. Sehingga akan terbagi menjadi dua model pembangunan yaitu di desa dan kota.

Beberapa upaya dalam pemerataan pembangunan :

1. Percepatan pembangunan secara optimal

Percepatan pembangunan dapat dilihat dari sisi yang menjadi nilai lebih suatu daerah. Dapat diketahui bahwa setiap daerah memiliki nilai yang lebih yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan nilai lebih suatu daerah untuk menjadi pendapatan bagi daerah dan mengencarkan pembangunan. Pembangunan infrastruktur misalnya yang dimana pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur yang mampu memberikan akses antar daerah yang akan menjadi mudah dan cepat.

2. Fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil

Pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil penting untuk dilakukan karena dalam suatu wilayah yang tertinggal dan terpencil sangat sulit dalam menggunakan fasilitas yang memudahkan masyarakat seperti transportasi. Pemerintah dapat mengupayakan dengan pembangunan jalan untuk meratakan pembangunan dengan daerah lainnya sebagai proses pembangunan menjadi lebih baik.

3. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rentan terhadap konflik antar tetangga negara serta tingkat separatisme akan tinggi. Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan lebih untuk memberikan sebuah keamanan dan keterjaminan dalam suatu negara. Dari hal tersebut dapat mengupayakan pembangunan yang mengacu pada pertahanan dan keamanan NKRI yang mampu menghapuskan rasa takut dan cema dari masyarakat terhadap konflik yang terjadi di perbatasan sebagai bentuk perlindungan.

4. Menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan

Penyeimbangan pertumbuhan ekonomi di desa maupun di kota harus dilakukan. Khususnya di desa karena masih berbeda jauh dengan kehidupan kota. Namun, tidak semua yang ada di kota di desa juga harus ada sehingga pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah memiliki dana sendiri yang dapat digunakan untuk membangun fasilitas penting yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan fasilitas yang memadai di setiap daerahnya maka akan menjadi kemudahan bagi masyarakat serta merasa terjamin dalam kemudahan segala aktivitasnya. Supaya pertumbuhan pembangunan lebih cepat maka perlu adanya pengiriman tenaga ahli ke desa untuk memberikan rancang bangun terkait pembangunan yang akan menjadi program unggulan daerah. Seperti contohnya dalam bidang kesehatan bagi daerah yang sulit dijangkau maka pemerintah dapat mendatangkan bidan yang bersedia mengabdikan di tempat yang sulit aksesnya, pemerintah setempat dapat memberikan tunjangan berupa hadiah atau upaya setiap sudah melaksanakan tugasnya guna memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat.

5. Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi

Bagi masyarakat desa kegiatan pada sektor pertanian merupakan komoditi andalan masyarakat desa. Desa memiliki tanah yang mudah untuk ditanami berbagai macam dari produk pertanian. Dalam kegiatan di desa pemerintah dapat memberikan bantuan untuk mencapai produktivitas yang maksimal bagi para petani. Dengan seperti itu pemerintah diharapkan mampu memberikan nilai harga jual untuk hasil pertanian dengan layak dan tidak merugikan petani. Masyarakat desa memiliki taraf hidup untuk menjalankan usahanya dibuat oleh

diri sendiri. Namun, disayangkan karena sering terjadi keterbatasan dalam modal sehingga perlunya pemerintah untuk membiayai modal bagi para pelaku kegiatan ekonomi di desa khususnya dalam bidang produksi. Contoh kebijakan yang dapat diberikan yaitu pemberian kredit usaha rakyat dengan syarat dan cicilan yang mudah agar bisa didapatkan oleh masyarakat yang kurang mampu dalam permodalan

6. Mengoperasionalkan rencana tata ruang

Penataan ruang dan operasional berada pada tingkat organisasi di tingkat daerah dan secara administratif tersusun dalam suatu hierarki yang terdiri dari RTRW nasional, RTRW negara bagian, dan RTRW kabupaten atau kota. Penataan ruang RTRW mengatur beberapa hal, seperti tujuan kota, kebijakan, dan strategi penataan ruang.

7. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat



Sumber : RuangRiau.com

Pemenuhan kebutuhan masyarakat meliputi sandang, pangan, dan papan. Di perkotaan kebutuhan pendidikan termasuk dalam kebutuhan pokok dapat diketahui bahwa hal tersebut tidak menjadi penghalang dalam pemenuhannya karena banyaknya sekolah yang dibangun dari SD sampai dengan perguruan tinggi yang berbeda dengan desa yang didominasi dengan sekolah SD dan SMP saja sehingga membutuhkan akses yang cukup jauh untuk dijangkau bagi siswa yang sudah lulus dan ingin melanjutkan sekolah yang tinggi.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pemerintah berkomitmen dengan memperhatikan besar serta memberikan prioritas utama untuk menjaga kebutuhan pokok rakyat. Pandemi yang masih berlangsung di Indonesia merubah tatanan ekonomi di masyarakat sehingga pemerintah

memberikan bantuan melalui program PKH yang diberikan kepada 10 juta penerima yang perorangnya akan menerima bantuan sebesar Rp 200.000 untuk sembako. Selain itu penggunaan dana desa yang dapat dibuat untuk bantuan sosial bagi desanya masing-masing sebagai pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Tujuan pemerintah memberikan PKH bagi masyarakat menurut Permensos No.1 Tahun 2018 pasal 2 yaitu untuk :

- a. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social.
 - b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
 - c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial,
 - d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan
 - e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan format kepada keluarga penerima manfaat.
8. Pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan Kesehatan

Pemerataan untuk memperoleh pendidikan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meretas kemiskinan yang sudah lama dirasakan. Tidak hanya mengandalkan pemerintah saja, namun peran masyarakat dalam hal pendidikan memiliki perannya sendiri untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Perubahan *mindset* dan kesadaran masyarakat tentang peningkatan kualitas hidup sangat berpengaruh terhadap aksesibilitas pendidikan. Pemerataan perolehan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Undang-Undang No 20 tahun 2003 bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pelayanan kesehatan bertujuan untuk melayani masyarakat dengan memberikan fasilitas sebagai bentuk kesadaran bagi tiap orang agar terwujudnya keberhasilan dalam pembangunan. Layanan kesehatan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berobat dan pemerintah menjalankan program BPJS sebagai upaya semua kalangan masyarakat dapat merasakan layanan yang dibutuhkan.

9. Pemerataan kesempatan kerja



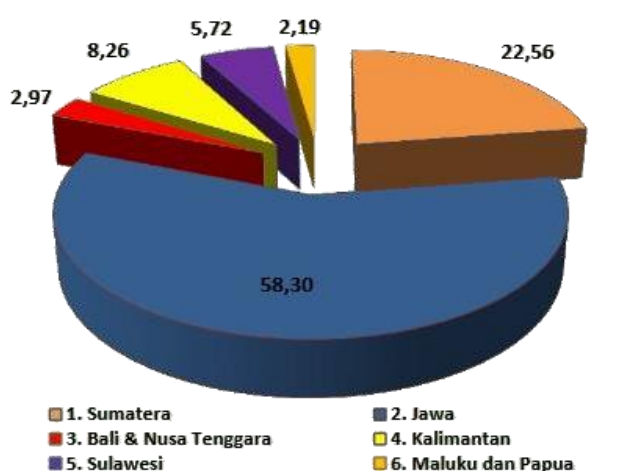
Sumber : GuruPendidikan.com

Kesempatan kerja antara pedesaan dan perkotaan memiliki perbedaan yang sangat jauh sehingga perlu adanya pemerataan dalam kesempatan kerja. Di desa kesempatan kerja terbatas karena masih didominasi oleh pertanian serta lingkungan yang masih asri dan sejuk tidak memungkinkan untuk dibangun sebuah industri sedangkan di perkotaan kesempatan kerja memiliki banyak variasi yang didominasi oleh industri. Pada hal tersebut akan mendorong terjadinya migrasi oleh masyarakat untuk mencari pekerjaan. Perlu adanya pemerataan yang didasari konsep ramah lingkungan supaya tidak mengotori lingkungan desa yang asri dan sejuk. Karena hal tersebut apabila tidak didasari dengan lingkungan sekitar maka terjadinya penolakan dalam pembangunan sehingga perlu adanya koordinasi yang mampu memberikan sebuah solusi dari keadaan lingkungan agar dapat dibuat kesempatan kerja agar masyarakat desa memiliki kemudahan dalam mencari pekerjaan

Pemerataan kesempatan kerja sangat berpengaruh terhadap pembangunan. Kesempatan kerja diberikan kepada masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tersebut akan berimplikasi terhadap pembangunan yang akan membuka kesempatan kerja secara luas dan beragam.

E. TANTANGAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Sejak Indonesia merdeka pemerataan pembangunan di Indonesia belum dapat tercapai secara optimal dikarenakan masih adanya ketimpangan pembangunan di beberapa wilayah terpencil dan ketimpangan yang sangat terlihat yaitu pada , wilayah Indonesia bagian barat dan bagian timur. Ketimpangan ini terjadi di berbagai sektor seperti dalam bidang Pendidikan, Infrastruktur,



Sumber : Badan Pusat Statistika pada triwulan 1 2015

Berdasarkan pada tabel statistika tersebut dapat kita lihat bahwa kesenjangan pembangunan infrastruktur masih didominasi oleh pulau Jawa dengan persentase 58,30%, dilanjutkan oleh pulau Sumatera sebesar 22,56%, pulau Kalimantan 8,26%, pulau Sulawesi 5,72% dan 5,6% sisanya Di pulau-pulau lainnya. Pembangunan bagian barat jauh lebih cepat dibandingkan bagian timur hal ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan sehingga untuk mencapai wilayah timur Indonesia terbilang jauh dan susah untuk dijangkau sehingga dibutuhkan fasilitas yang memadai guna sampai di wilayah tersebut. Wilayah timur yang masih susah untuk dijangkau antara lain seperti Papua, Sulawesi, Maluku dan kepulauan Nusa tenggara. Hal ini merupakan hal yang serius harus disikapi oleh pemerintah sehingga dapat mencapai pemerataan pembangunan yang optimal di Indonesia. Berikut merupakan beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melakukan pemerataan pembangunan :

1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam menunjang perkembangan Indonesia dimasa yang akan datang namun kondisi realitanya SDM Indonesia kini masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yaitu bapak Suharsono monofa selaku Kepala Bappenas menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia Indonesia berada di urutan 50 dari 141 negara hal ini menunjukkan bahwa SDM Indonesia masih tertinggal jauh bahkan masih dibawah negara Malaysia dan Thailand. Sehingga perlu ditingkatkan kembali kualitas sumber daya manusia seperti dalam sektor

pendidikan. Pendidikan merupakan suatu jalur yang dapat digunakan untuk mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bersaing dengan negara lain. Oleh karena itu diperlukan kesadaran individu dengan memiliki niat yang kuat untuk memajukan pembangunan Indonesia. Disamping hal itu meningkatkan kualitas SDM merupakan suatu upaya untuk mengejar ketertinggalan negara Indonesia dengan negara-negara yang sudah maju. Untuk melakukan pemerataan pembangunan khususnya dalam bidang SDM diperlukan perbaikan dalam pembangunan ekonomi dengan kualitas Sumber Daya Manusia. Konsep peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ini sejajar dengan indikator pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan. Dimana rangkaian meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya di seluruh Indonesia.

2. Masih berada dalam sektor informal dengan produktivitas yang rendah

Sektor informal merupakan sekumpulan usaha yang membentuk sektor ekonomi dan kegiatannya berupa memproduksi barang atau jasa untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Sektor informal ini dapat dikatakan sebagai pola kegiatan yang tidak teratur karena mereka dapat melakukannya kapan saja tanpa adanya sekat waktu. Pada sektor ini contohnya seperti tukang becak, supir, pedagang kaki lima, dll Yang sebagai besar berada di kota-kota besar. Sektor informal berbeda dengan sektor formal karena sektor informal menitik beratkan pada kemampuan yang dimiliki seseorang sedangkan Sektor formal menitikberatkan pada latar belakang pendidikan seseorang. Menurut data sebanyak 30-70% tenaga pekerja yang berada di kota bekerja disektor informal. Hal tersebut berpeluang untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian nasional sebagai contoh pedagang kecil dengan modal yang tidak terlalu besar bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain, dengan adanya hal itu dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran yang ada. Kemudian untuk meningkatkan keterampilan individu dapat diikuti pelatihan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pengembangan sumber daya manusia.

Kelompok rentan disini seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, fakir miskin, yatim/piatu, penduduk yang tertinggal, dll. Dapat dikatakan kelompok rentan merupakan kelompok yang mempunyai kehidupan yang

berbeda atau kurang layak dan perlunya bantuan serta perhatian khusus dari pemerintah. Munculnya kelompok rentan disebabkan oleh kondisi/keadaan yang serba terbatas sehingga akan mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Untuk menciptakan pemerataan pembangunan pemerintahan harus memperbaiki layanan dan pemenuhan hak atas kelompok rentan tersebut karena terkadang pada kelompok ini rentan terjadinya diskriminasi sehingga mereka kurang mendapatkan haknya. Seperti yang kita tau kebanyakan kelompok rentan bekerja di sektor informal (non pemerintah) daripada sektor formal (pemerintah).

BAB VI

KONSUMSI, INVESTASI, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH

A. KONSUMSI

1. Pengertian Konsumsi

Ada banyak sekali konsep yang menggambarkan konsumsi yang kita kenal, sehingga tiap individu, kelompok akademik, lembaga pembelajaran hingga pemerintah memiliki penjelesan yang berbeda-beda dalam mengkonsepkan konsumsi. Meski begitu, yang kita ketahui bahwa konsumsi merupakan barang dan jasa yang dibelanjakan oleh seorang dalam rangka pemenuhan kebutuhannya (Dewi, M 2013). Sehingga bila diakumulasikan nilai konsumsi yang dihabiskan dalam pengeluaran barang dan jasa oleh masyarakat di suatu negara, maka dapat dikatakan sebagai konsumsi nasional atau konsumsi negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Keynes, bahwa konsumsi merupakan pengeluaran atas pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan memiliki pengaruh secara menyeluruh atas perilaku perekonomian, dan hal ini merupakan fokus dalam menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara (Persaulian, B 2013). Sehingga secara sederhana, negara yang memiliki tingkat konsumsi tinggi menunjukkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini sejalan bahwa konsumsi sebanding dengan pendapatan. Pengeluaran Konsumsi atau konsumsi adalah bagaimana masyarakat membelanjakan separuh penghasilan terhadap barang tertentu. Sehingga sederhananya nilai konsumsi yang dikeluarkan berhubungan dengan penghasilan dimiliki. Alhasil dalam tiap pendapatan yang dimiliki, maka akan selalu ada nilai konsumsi yang sebanding dengan pendapatan tersebut. (Eko, P. 2009)

Menurut Mankiw (2007) Pengeluaran Konsumsi ini sangat penting dalam suatu analisis berjangka pendek ataupun berjangka panjang. Sebab berperan dalam menunjukkan permintaan agregat serta pertumbuhan ekonomi.

2. Keterkaitan Pendapatan Dengan Konsumsi

Dalam hubungan Konsumsi dengan Pendapatan, terdapat dua konsep umum yang kita kenal yakni APC atau *Average to propensity to Consumption*

dimana dinyatakan bahwa perbandingan antara besarnya konsumsi dengan besarnya pendapatan. Sehingga tertulis:

$$APC = C/Y_d = a/Y_d + b \text{ atau } APC = a/Y_d + MPC$$

MPC atau *Marginal to Propensity to consume* menyatakan bahwa perbandingan kenaikan konsumsi yang terjadi dan kenaikan pendapatan yang ada. Sehingga tertulis $MPC = \frac{\Delta C}{\Delta F}$ (Eko, 2009).

Menurut Keynes, dalam teorinya menjelaskan bahwa tiap pengeluaran konsumsi bervariasi hal ini bergantung pada pendapatan yang siap dipakai (*disposable income*), sehingga dikatakan bahwa konsumsi mengalami kenaikan, namun nilai kenaikan itu tidak lebih tinggi dari kenaikan pendapatan. Persamaan hubungan antara konsumsi dan pendapatan ini yang dikenal sebagai fungsi konsumsi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$C = a + bY_d$$

C dan Y_d menggambarkan Konsumsi serta Pendapatan siap pakai. Variabel a menunjukkan nilai dari APC/MPC yang mana merupakan besarnya nilai pengeluaran konsumsi otonom, yakni pengeluaran yang bergantung atas pendapatan dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar pendapatan. Sehingga nilai APC akan turun ketika pendapatan naik, dikarenakan adanya faktor lainnya diluar pendapatan tadi.. Sedangkan variabel b menunjukkan nilai MPC yang merupakan kenaikan konsumsi atas unit pendapatan, sehingga dirumuskan nilai MPC antar 0 dan 1. (Eko, 2009)

Melalui persamaan tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa bila pendapatan berada ditingkat yang rendah maka nilai konsumsi akan lebih tinggi dari nilai pendapatan itu sendiri, namun bila pendapatan bernilai tinggi, nilai konsumsi tidak lebih besar dari pendapatan itu. Hal ini sejalan dengan pendapatan yang telah diungkap Keynes diatas, bahwa bila pendapatan meningkat, maka nilai konsumsi meningkat namun tidak sebesar peningkatan pendapatan.

Fungsi Konsumsi yang dihasilkan dari persamaan 1.1 itu menghasilkan bentuk linier, yang mana memiliki implikasi bahwa:

- a. MPC bernilai konstan selama rentang pada tingkat pendapatan yang sesuai
- b. APC bernilai lebih besar daripada MPC

- c. Nilai APC akan bernilai kecil pada tingkat pendapatan yang mengalami kenaikan.

Pada kesempatan kali ini, mari kita mencoba hubungan antara konsumsi dan pendapatan ini.

Diketahui bahwa Andia memiliki pekerjaan dan berpendapatan sejumlah Rp 1.000.000,- untuk konsumsinya Andia menghabiskan sejumlah Rp 800.000,- Sebab Andia memiliki kinerja yang baik, pendapatannya bertambah menjadi Rp 1.500.000 dan konsumsi yang Andia habiskan juga meningkat menjadi Rp 1.000.000 atas kondisi Andia, fungsi konsumsi yang ditunjukkan adalah?

Sumber 1 Eko.P, 2009

KONSUMSI :
 $C = a + bY_d$
Atau
 $C = a + bY$

Tabel 1 Rumus Fungsi Konsumsi

C = Konsumsi

Y = Pendapatan Nasional // Y_d = Pendapatan Disposable

$a = (APC - MPC)$

$$APC = C_1 / Y_{d1} \quad MPC = \frac{\Delta C}{\Delta F}$$

$b = MPC$

PEMBAHASAN :

$$C_0 = \text{Rp } 800.000,- \quad Y_{d0} = \text{Rp } 1.000.000,-$$

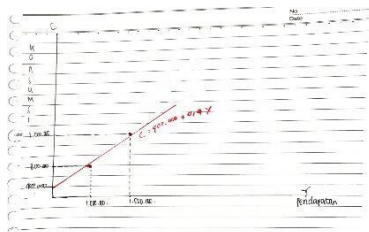
$$C_1 = \text{Rp } 1.000.000,- \quad Y_{d1} = \text{Rp } 1.500.000,-$$

$$\begin{aligned} APC &= C_1 / Y_{d1} \\ &= 1.000.000 / 1.500.000 \\ &= 0,66667 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} MPC &= \frac{\Delta C}{\Delta F} \\ &= \frac{1.000.000 - 800.000}{1.500.000 - 1.000.000} \\ &= 0,4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
C &= a + bY \\
&= (APC-MPC)Y + bY \\
&= (0,66667-0,4) 1.500.000 + 0,4Y \\
&= 400.000 + 0,4Y
\end{aligned}$$

Bila fungsi ini, digambarkan dalam kurva maka akan menjadi sebagai berikut :



Sumber 2 google

Gambar 1 Kurva Fungsi Konsumsi

Dari gambar tersebut dapat kita simpulkan ciri khas dari Kurva Konsumsi:

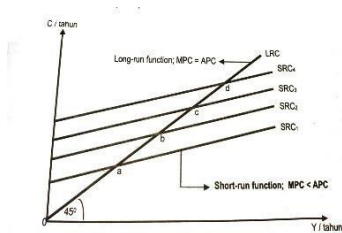
- d. Kurva Konsumsi berslopes positif dengan kemiringan yang terus naik. Menandakan bahwa bila pendapatan meningkat maka konsumsi juga meningkat.
- e. Kurva Konsumsi memotong sumbu C diatas Nol artinya konsumsi akan tetap dilakukan, meski tak berpendapatan. Maka menunjukkan pula bahwa konsumsi tidak dapat nol.

3. Teori Konsumsi

Teori Konsumsi dan Pendapatan yang diungkap oleh Keynes sering digunakan dalam pembahasan mengenai Konsumsi-Pendapatan, meskipun begitu, teori ini dikembangkan kembali oleh para ekonom, melalui studi empiris dan buah pikir, sehingga muncul teori hipotesis yang mendukung dan melengkapi teori Konsumsi oleh Keynes ini. (Eko, 2009).

a. Teori Konsumsi Pendapatan Absolute (Absolute Income)

Melalui Teori ini, nilai Konsumsi ditentukan atas Pendapatan Absolut, sehingga hubungan antara Konsumsi dan Pendapatan adalah fungsi berjangka pendek, yang selanjutnya menjadi fungsi berjangka panjang yang disebabkan oleh pergeseran dari fungsi jangka pendeknya. (Eko, 2009)



Sumber 3Eko.P,2009

Gambar 2 Kurva Teori Konsumsi Pendapatan Abosolute

Menurut Kuznets, (melalui data empiris) meskipun fungsi konsumsi jangka pendek masih berlaku yakni $MPC < APC$, namun secara berkalafungsi konsumsi ini akan terus naik sehingga menghasilkan fungsi jangka panjang hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor salah duanya adalah adanya produk baru dalam perekonomian, sehingga memancing peningkatan konsumsi, lainnya adalah adanya peningkatan kesejahteraan suatu bangsa. Sebab nilai C/Y atau APC dalam jangka panjang bernilai konstan, sehingga fungsinya merupakan garis lurus melewati garis nol. Sehingga MPC dinilai konstan, maka dalam fungsi konsumsi jangka panjang, nilai $MPC =$ nilai APC . (Eko, 2009).

b. Teori Konsumsi Pendapatan Relatif

Menurut James S, melalui bukunya “Income, Saving and The Theory of Consumer Behavior” (1949), dalam (Branson.1989; Soediyono,2001) Mengungkapkan pendapat bahwa Nilai konsumsi ditentukan atas banyak kemungkinan melalui perbandingan dengan nilai pendapatan tertinggi yang pernah diterima. Artinya, walaupun pendapatan menurun, maka konsumsi tidak serta merta menjadi turun, namun mengikuti dengan Pendapatan tertinggi yang sebelumnya pernah dicapai. (Eko, 2009). Hal ini, berimbas pada tabungan yang disisihkan, maksudnya bila pendapatan turun, dan nilai konsumsi tetap, maka mau tidak mau, nilai saving berkurang atau bahkan diambil kembali untuk pemenuhan konsumsiii.

Sumber 4 Eko.P,2009

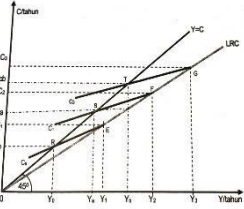
$$C = f(Y_C, Y_{PP})$$

Tabel 2 Rumus Fungsi Konsumsi Teori Pendapatan Relatif

Keterangan :

Y_c : Pendapatan Saat ini

Y_{PP} : Pendapatan tertinggi yang dicapai sebelumnya.



Sumber 5 Eko.P 2009

Gambar 3 Kurva Teori Konsumsi Pendapatan Relatif

Menurut Duesenberry, Keadaan ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial individu. Individu dapat memiliki nilai konsumsi yang tinggi sebab lingkungannya kaya dan mampu menghabiskan konsumsi lebih banyak, ini merupakan bentuk dari Selera Rumah tangga atas pemenuhan Kebutuhan. Selain itu, pengeluaran atas konsumsi ketika pendapatan tertinggi dan ketika sedang mengalami penurunan tidak jauh berbeda, dalam artian nilai konsumsi masih dipengaruhi oleh pendapatan tertinggi, sehingga penurunannya tidak lebih rendah dari menurunnya pendapatan. (Eko, 2009)

c. Teori Fungsi Konsumsi Atas Dasar Pendapatan permanen

Menurut Friedman, nilai konsumsi bergantung atas pendapatan saat ini dan pendapatan di masa depan. Sebab menurut teori ini, pendapatan aktual itu berisi pendapatan saat ini, dan pendapatan masa depan, begitu juga dengan konsumsi, yang dapat diperinci atas konsumsi saat ini, dan konsumsi masa depan. (Eko, 2009)

$$Y = Y_p + Y_t$$

$$C = C_p + C_t$$

Sumber 6Eko.P,2009

Tabel 3 Rumus Teori Konsumsi Pendapatan Permanen

Keterangan

Y = Pendapatan

Y_p = Pendapatan Masa Depan

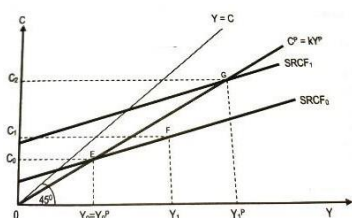
Y_t = Pendapatan Sementara

C = Konsumsi

C_p = Konsumsi Masa Depan
 C_t = Konsumsi Sementara

Menurut Friedman, atas studinya, mengungkapkan bahwa nilai konsumsi suatu individu memiliki hubungan positif dan sebanding dengan pendapatannya. Hal ini tentu saja berbeda dengan teori sebelumnya, sehingga melalui teori sebelumnya bahwa variabel dalam fungsi dapat diimati, dan diukur, Friedman menyatakan bahwa teori ini, baik pendapatan maupun konsumsi permanennya tidak dapat diukur secara langsung. (Soelityo dan Insukindro, 2005. (Eko, 2009))

Meskipun begitu, Friedman mengungkapkan pula bahwa pendapatan sementara dengan pendapatan masa depan tidak memiliki keterkaitan yang berarti. Begitu juga dengan konsumsi sementara dan konsumsi permanen, serta kombinasi kedua variabel tersebut. Perbandingan atas kenaikan konsumsi atas pendapatan sementara adalah nol sehingga mengandung arti bila pendapatan sementara milik individu bernilai positif maka hal tersebut tidak berpengaruh pada konsumsi.



Sumber 7 Eko.P.2009

Gambar 4 Kurva Konsumsi Teori Pendapatan Permanen

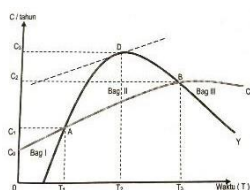
Pada kurva diatas, apabila pendatan masa depan adalah Y_0^p , dan jika pendapatan sementara naik menjadi Y_1 maka konsumsi bergerak naik dari titik E (C_0) ke titik F (C_1) sepanjang kurva $SRCF_0$. namun akan berbeda bila pendapatan masa depan berubah, maka akan menggeser kurva konsumsi jangka pendek ke atas. Hal ini dijelaskan, pada titik pendapatan masa depan Y_0^p yang mengalami kenaikan menjadi Y_1^p maka awal mula kurva $SRCF_0$ bergeser ke $SRCF_1$ dan menunjukkan pergerakan konsumsi yang mulanya ada di titik E menjadi di titik G. Maka melalui kurva tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam teori ini, memiliki dua nilai MPC yakni Nilai MPC untuk pendapatan sementara sebagai fungsi jangka

pendek dan pendapatan masa depan sebagai fungsi janga panjang. (Eko, 2009)

d. Teori FUnksi Ekonomi Atas Sikilus Hidup

Teori ini merupakan kolaborasi dari tiga ekonom pada masanya yakni di tahun 1950-an oleh Arbert Ando, Richard Brumberg dan Franco Modigliani. Modigliani mengungkapkan bahwa pendapatan mengalami naik-turun selama kehidupan individu, sehingga menurutnya konsumsi ini memiliki hubungan positif dengan tabungan yang mana tabungan disini sebagai dasar konsumsi atas pendapatan yang diterima selama hidup atau selama menerima pendapatan. Hal ini diasumsikan bahwa tiap individu akan berusaha untuk menstabilkan tingkat konsumsi sepanjang hidupnya. (Eko, 2009)

Teori ini didukung bahwa tiap individu akan mengalami fase pensiun, dimana pendapatan akan berkurang atau bahkan tidak berpendapatan di masa tersebut, namun tiap individu masih memiliki kebutuhan dna tidak ingin mengalami penurunan konsumsi dibanding sebelum memasuki masa pensiun. Sehingga teori ini secara sederhana menganggap peranan kekayaan yang ditabung adalah dasar dalam melakukan konsumsi. Konsumsi akan bertambah dengan adanya peningkatan nilai kekayaan. Dalam realitasnya, individu akan terus mengumpulkan kekayaan sepanjang hidupnya, tidak hanya saat atau akan pensiun saja, sehingga nilai konsumsi akan dapat dipertahankan dalam waktu lebih lama atau bahkan dapat meningkat.



Sumber 8 Eko.P,2009

Gambar 5 Kurva Konsumsi Teori Siklus Hidup

Dalam teori ini bentuk pendapatan selama hidup dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah bagian muda dimana dimulai usia nol hingga dikatakan cukup dewasa pada dasarnya ketika individu telah memiliki pendapatan sendiri, pada bagian ini individu belum dapat

memaksimalkan savingnya. Di bagian kedua adalah bagian usia produktif, dimana di bagian ini, individu telah memiliki penghasilan stabil dengan nilai pendapatan tertinggi yang pernah dicapai, maka pada bagian ini, individu harus memperbanyak savingnya dalam rangka menjaga nilai konsumsi di hari tua. Sedangkan di bagian ketiga adalah usia tua, dimana pendapatan menurun, saving berkurang. (Eko, 2009)

Dalam kurva, pada bagian pertama tingkat saving ditunjukkan oleh titik A atas pertemuan titik C_1 dan T_1 dan terus meningkat hingga diasumsikan titik D menjadi nilai saving terbesar yang berada pada bagian kedua. Dan akan menurun pada titik B di bagian ketiga. (Eko, 2009)

Teori ini berdasar atas asumsi yang menganggap bahwa tiap individu secara alamiah merencanakan perilaku konsumsi dan tabungannya untuk waktu yang lama dengan tujuan untuk mengalokasikan konsumsi di masa depan agar lebih baik. Karena sebab ini, maka selama hidup, saat muda akan bekerja dan menabung sedang ketika tua akan menikmati hasil atas penyimpanan tersebut. (Mankiw, 2007) (Eko, 2009)

4. Perilaku Konsumen

Seseorang yang melakukan konsumsi biasa kita sebut dengan Konsumen, terdapat banyak pendapat yang mendefinisikan perilaku konsumen. Menurut Sunyoto (2012) perilaku konsumen mengandung arti bahwa aktivitas individu yang terlibat langsung dalam mendapatkan, serta mempergunakan barang maupun jasa. Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk (2000) mengartikan bahwa perilaku konsumen merupakan perilaku yang dimulai dari membeli hingga menghabiskan nilai suatu barang untuk memenuhi kepuasan atas kebutuhan

Dari pernyataan yang ahli di atas atas pengertian dari perilaku Konsumen maka, kita dapat menyimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah perilaku individu dimana ia membeli, menggunakan, hingga menghabiskan nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kepuasan pada tingkat tertentu serta sebagai sarana pemenuhan kebutuhan.

Hal ini sejalan bahwa, dengan definisi konsumsi bahwa konsumen/ individu melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga perilaku konsumen ini dimotivasi oleh kebutuhannya, semakin banyak kebutuhan suatu individu akan menimbulkan keinginan untuk melakukan konsumsi.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen

Tentu saja, selain kebutuhan yang menjadi motivasi utama seseorang melakukan konsumsi, ada faktor lainnya yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan konsumsi. Menurut Kotler dan Keller (2016) ada tiga faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan konsumsi, yakni Budaya, Sosial dan Pribadi (Nugraha, 2021) namun seperti yang kita ketahui bahwa faktor lainnya ialah yang sering kita sebut sebagai faktor internal dan eksternal (P.Sonia, 2020). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

i. Motivasi

Disini motivasi diartikan sebagai keadaan yang mendorong keinginan individu memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu. Biasanya motivasi ini mendukung individu dalam memutuskan sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan atau tujuannya

ii. Persepsi

Persepsi atau selera. Tiap individu memiliki perbedaan dalam selernya, karenanya selera ini bersifat subyektif. Sehingga tiap individu memiliki pertimbangan tersendiri dalam melakukan keputusan untuk memenuhi kebutuhannya.

iii. Belajar

Belajar disini maksudnya adalah tanggapan atas kegiatan konsumsi. Pada dasarnya, konsumen terus belajar atas konsumsi yang telah dilakukannya, baik dirinya sendiri, maupun atas konsumsi orang lain. Semakin baik pembelajaran atau tanggapan atas konsumsi maka, keputusan untuk melakukan konsumsi tersebut semakin besar.

iv. Kepribadian dan Konsep Diri

Konsumen dalam memutuskan untuk melakukan suatu konsumsi tidak lepas atas kepribadian dirinya. Kepribadian diri ini ditentukan atas tiga faktor, yakni pengetahuannya atas konsumsi yang akan dilakukan, perasaan atas menentukan positif maupun negatif dari pengetahuan yang dia miliki untuk memutuskan konsumsi serta dorongan alami tiap konsumen.

b. Faktor Eksternal

1) Kebudayaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebudayaan mempengaruhi konsumen dalam menentukan kegiatan konsumsinya sebab kebudayaan ini telah melekat pada diri individu. Kebudayaan ini ialah nilai serta norma yang menjadi pedoman dalam individu.

2) Kelas Sosial

Semakin tinggi kelas sosial yang dimiliki individu dorongan untuk melakukan konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan maupun kepuasannya akan semakin tinggi. Kelas sosial disini dapat diamati, dalam hal kebiasaan, hobi dan lainnya.

3) Keluarga

Keluarga tak luput dalam mempengaruhi dalam melakukan konsumsi. Keluarga disini memberikan pertimbangan serta sebagai kelompok referensi yang memberikan pertimbangan atas nilai, norma, standar dalam keluarga.

6. Teori Perilaku Konsumen

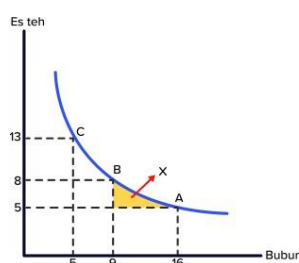
Dalam melakukan konsumsi selain kebutuhan yang menjadi motivasi, rasa puas atau utilitas yang dirasakan oleh konsumen setelah melakukan konsumsi adalah teori konsumen dalam melakukan konsumsi. Rasa puas yang dirasakan oleh tiap individu berbeda sehingga sifatnya adalah subyektif. Utilitas ini muncul setelah melakukan konsumsi atas suatu barang yang sesuai dengan selera, dan preferensi individu tersebut, begitu juga suka atau tidak suka dalam melakukan konsumsi (Macaecchen, 2001)

Meskipun utilitas ini atas dasar selera, namun ahli ekonomi mengasumsikan bahwa selera individu ini cenderung relatif stabil, atau dalam artian mengalami perubahan namun tidak secara terus-menerus. Hal ini berkaitan dengan harga serta permintaan suatu barang maupun jasa, bila selera cenderung berubah secara terus menerus, maka produsen tidak dapat memperkirakan dan menganalisis permintaan atas produknya (Macaechen, 2001)

Rasa puas dalam teori ini, dibagi atas dua rasa puas. Yakni Kepuasan Maksimal (*Total Utility*) adalah keadaan dimana dalam melakukan konsumsinya, konsumen menggunakan barang maupun jasa dengan jumlah yang besar. Sedangkan penambahan kepuasan tiap melakukan konsumsi atas konsumsi sebelumnya (setelah menambah satu unit barang/jasa) disebut dengan Kepuasan Marjinal (*Marginal Utility*).

Titik kepuasan yang dirasakan konsumen disebut titik kepuasan maksimum (*saturation point*). Apabila konsumen telah mencapai titik ini, maka kepuasan totalnya akan menurun. Hal ini sejalan bahwa dasar analisis dari Rasa puas ini adalah marginal utilitasnya. Sehingga semakin banyak barang jumlah barang untuk dikonsumsi dalam waktu tertentu, diasumsikan nilai puasnay akan turun sebab kenikan unit yang dikonsumsi, sehingga dapat dikatakan marginal utilitasnya kan semakin kecil.

Rasa puas ini dapat dinyatakan dalam ordinal maupun kardinal. Ordinal bermaksud bahwa rasa puas diukur secara ranking yang menyatakan konsumsi atas kumpulan barang. Sedangkan Kardinal dimaksudkan bahwa rasa puas dapat diukur melalui angka. Perlu diingat kembali bahwa nilai tingkat kepuasan ini berdasar atas selera, preferensi dan waktu tertentu, sehingga tiap orang memiliki tingkat kepuasan yang berbeda atas kumpulan barang yang sama. Melalui asumsi dasar selera dan preferensi maka kepuasan konsumen dapat digambarkan melalui kurva indifferens (*indifference curves*)



Sumber 9 Google

Gambar 6 Kurva Indifferense

Melalui kurva pada gambar 1.6 kita dapat menyimpulkan bahwa kurva ini menunjukkan kombinasi atas dua barang. Seperti di contoh adalah bubur dan es teh.

Artinya pada titik C memberikan kombinasi dengan kepuasan yang anjlok antara bubur dan es teh yakni 5 bubur dan 13 es teh. Sedangkan pada titik B memberikan kepuasan terbaik dengan kombinasi yang pas yakni 9 bubur dengan es teh. Sedangkan pada titik A mengartikan kepuasan semakin menurun dengan kombinasi 16 bubur dan 5 es teh. Selain itu, kurva ini berslope negatif hal ini sesuai pada dasar rasa puas ata konsumsi suatu barang yang akan menurun tiap menambahkan satu unit berikutnya. Kurva ini juga menunjukkan bahwa garis yang dihasilkan adalah cekung terhadap titik 0,

dimana bergerak dari ujung kiri atas menuju kanan bawah, hal ini sesuai dengan sifat kurva yang bersifat negatif.

7. Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Konsimsi

Dalam kehidupan bermasyarakat kegiatan konsumsi adalah sebuah kegiatan yang paling melekat dalam kehidupan. Adanya konsumsi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu juga untuk memenuhi kepuasan manusia yang tidak ada habisnya. Dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa, setiap orang memiliki pola konsumsi yang berbeda berdasarkan besarnya pendapatan yang diperoleh seseorang. setiap orang pasti memiliki kebutuhan konsumsi yang beragam, oleh karena itu dalam melakukan kegiatan konsumsi masyarakat membuat susunan skala prioritas mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan sekunder. Selain adanya pengaruh dari besarnya pendapatan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besar atau kecilnya konsumsi yang dilakukan masyarakat. Menurut (Luis & Moncayo, 2011) Faktor tersebut dapat digolongkan kedalam tiga bagian:

a. Pengaruh Faktor Ekonomi

1) Besarnya Pendapatan Rumah Tangga

Besarnya penghasilan atau pendapatan masyarakat dapat berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi yang dilakukan. Semakin besar suatu pendapatan seseorang, maka dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa yang dibutuhkan ataupun yang diinginkan juga cenderung lebih banyak. seperti halnya saat pendapatan yang diperoleh menjadi lebih tinggi, seseorang memiliki kemampuan dalam membeli dan mengonsumsi berbagai kebutuhan juga akan menjadi lebih besar dari biasanya sehingga konsumsi juga akan mengalami peningkatan yang lebih cepat. Sedangkan saat pendapatan masyarakat berkurang, maka seseorang akan mencukupi kebutuhannya berdasarkan besarnya pendapatan yang dimiliki. Seseorang akan menentukan kebutuhan prioritas yang sangat penting dan mengurangi pengeluaran yang bersifat konsumtif. Bahkan saat penghasilan masyarakat mengalami penurunan, mereka akan mengganti barang atau jasa yang dikonsumsi menjadi kualitas yang lebih rendah dari yang biasanya

2) Kekayaan Rumah Tangga (Household Wealth)

Saat seseorang memiliki pendapatan yang berlebih maka akan menggunakan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Selain itu juga, masyarakat biasanya menyimpan pendapatannya dalam bentuk aset, baik yang dapat memberikan manfaat dan keuntungan dalam jangka panjang atau yang bersifat untuk memenuhi keinginannya. Biasanya masyarakat menyimpannya dalam bentuk kekayaan riil, seperti halnya untuk membeli tanah, mobil, surat berharga, saham, deposito, dll. Dimana hal tersebut dapat meningkatkan konsumsi karena hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan disposibel. Hal ini dikarenakan saat masyarakat menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito, maka mereka akan mendapatkan bunga yang diperolehnya setiap bulan begitu juga dengan pendapatan dividen. Adanya keuntungan tersebut tentunya akan menambah pendapatan seseorang, sehingga berpotensi dapat meningkatkan pengeluaran konsumsi seseorang.

3) Tingkat Bunga (Interest Rate)

Adanya perubahan tingkat bunga akan mendorong masyarakat untuk lebih hemat dalam mengkonsumsi barang dan jasa, dan banyak yang tertarik memilih untuk menabung. Saat tingkat bunga tinggi, masyarakat yang berpenghasilan rendah dan kekurangan uang saat ingin melakukan konsumsi harus melakukan pinjaman kepada pihak bank atau menggunakan fasilitas kartu kredit, namun karena besarnya bunga yang harus dibayarkan mereka lebih memilih untuk menahan konsumsi yang berlebihan. Selain itu buat orang yang memiliki pendapatan tinggi dan memiliki kelebihan uang, mereka beranggapan bahwa mereka akan lebih baik untuk menabung atau menyimpan uangnya di bank karena akan memberikan keuntungan yang lebih saat tingkat bunga naik. Sehingga mereka akan menunda melakukan konsumsi yang bersifat kurang efektif dan memilih untuk menabung. Adanya hal tersebut dapat mengurangi adanya tingkat konsumtivisme yang berlebihan.

b. Pengaruh Faktor Demografi (Kependudukan)

Dalam hal ini Jumlah Penduduk memiliki pengaruh besar terhadap tingkat konsumsi. Banyaknya penduduk dalam suatu wilayah akan

berpengaruh pada besar atau kecilnya pengeluaran konsumsi seseorang. Suatu wilayah perekonomian yang memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak, maka dalam melakukan pengeluaran untuk membeli atau mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan akan lebih banyak daripada wilayah yang masih memiliki jumlah penduduk tergolong sedikit dan belum ramai. Meskipun di kedua wilayah tersebut memiliki jumlah pendapatan yang sama, namun karena perbedaan tingkat penduduk akan berpengaruh pada harga barang-barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Sehingga konsumsi masyarakat yang berada di wilayah yang padat penduduk akan lebih besar dan bersifat konsumériste.

c. Faktor Non Ekonomi

Sosial Budaya Masyarakat, Adanya perubahan konsumsi seseorang karena meniru gaya hidup orang lain yang dianggap memiliki kebiasaan yang lebih hebat. Perubahan ini biasanya dilakukan seseorang agar mereka juga dianggap memiliki standar atau gaya hidup yang tinggi. Seseorang akan dapat diketahui perubahannya melalui perbedaan dalam perubahan pola makan, gaya berpakaian, atau kebiasaan dalam berbelanja yang biasanya sering berbelanja di pasar tradisional namun karena mengikuti gengsi mereka berbelanja ke pasar swalayan. Selain itu, Setiap orang tentunya memiliki perbedaan selera dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa yang dibutuhkan. Hal tersebut juga akan mempengaruhi pada tingkat pengeluaran konsumsi yang dibutuhkan. Apabila masyarakat memiliki selera konsumsi yang meningkat maka pengeluaran konsumsi juga akan bertambah. Sedangkan saat selernya berkurang maka juga akan menurunkan jumlah konsumsi yang dibutuhkan. Serta, adanya perbedaan Adat istiadat dan Kebiasaan masyarakat antar daerah juga akan mempengaruhi konsumsi. Masyarakat yang berpegang teguh pada adat yang dilakukan orang-orang lebih dahulu seperti halnya mengadakan upacara ritual, pesta, dan berkumpul bersama-sama akan memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi daripada orang-orang daerah lain yang tidak memiliki kebiasaan tersebut.

8. Hubungan Konsumsi Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Konsumsi yang biasa dilakukan oleh masyarakat juga akan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada dalam suatu negara. seperti halnya dapat dilihat apabila konsumsi yang dilakukan masyarakat meningkat maka pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara juga akan mengalami peningkatan. Sedangkan saat konsumsi masyarakat menurun maka pertumbuhan ekonomi juga ikut mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian negara. Besarnya pertumbuhan yang ditandai dengan perubahan output nasional yang semakin meningkat menandakan adanya kemajuan suatu negara (Dr. Vladimir, 1967). Dalam menentukan kondisi perekonomian dalam Suatu daerah dapat menggunakan tolok ukur Produk Domestik Bruto (PDRB) daerah tersebut. Apabila dalam suatu daerah mengalami peningkatan atau penurunan dalam menjalankan kegiatan produksi barang dan jasa, maka dapat menggunakan PDRB sebagai indikator dalam menentukan kemajuan atau peningkatan ekonomi daerah tersebut. Selain menggunakan pertumbuhan ekonomi untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dalam sebuah daerah, maka dapat menggunakan pola pengeluaran konsumsi.

Dalam hal ini, antara konsumsi dan pertumbuhan ekonomi saling memiliki keterkaitan dalam sebuah perekonomian. Adanya peningkatan perekonomian akan meningkatkan konsumsi masyarakat. hal ini berasal dari pertumbuhan ekonomi yang awalnya karena adanya peningkatan penghasilan yang diperoleh masyarakat, yang berarti bahwa adanya peningkatan pendapatan menyebabkan konsumsi masyarakat yang cenderung bertambah karena memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari biasanya sehingga masyarakat cenderung tidak hanya mengonsumsi barang yang dibutuhkan saja, tetapi juga barang pemuas kebutuhan. Sehingga hal tersebut akan dan mendorong adanya pola konsumerisme dan konsumsi yang tinggi. Adanya kenaikan permintaan terhadap daya beli barang dan jasa ini mempercepat kenaikan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. begitu pula sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara mengalami penurunan, maka pendapatan masyarakat juga akan mengalami penurunan. Sehingga banyak masyarakat yang hanya melakukan konsumsi barang dan jasa yang benar benar dibutuhkan, sehingga konsumen akan membatasi adanya konsumsi yang

berlebihan dan kurang bermanfaat. apabila penghasilan masyarakat berkurang, maka daya beli riil masyarakat juga ikut berkurang sehingga akan menekan angka konsumsi yang tinggi. Hal ini juga berakibat pada penurunan permintaan barang dan jasa oleh masyarakat (N et al., 2013).

9. Pendapatan Disposable, Konsumsi Sebelumnya Dan Tingkat Suku Bunga Yang Berkaitan Dengan Konsumsi Di Indonesia

Adanya Pendapatan disposable, konsumsi masyarakat sebelumnya, dan tingkat suku bunga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat konsumsi pada masyarakat. pendapatan disposable akan berpengaruh positif terhadap konsumsi karena konsumsi masyarakat biasanya dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima. Pendapatan yang didapatkan seseorang akan mempengaruhi kemampuan daya beli. Semakin besar pendapatan yang diterima maka daya belinya akan mengalami kenaikan, sedangkan saat pendapatan berkurang maka daya beli masyarakat juga akan menurun. Sehingga dengan adanya pendapatan disposibel ini akan sangat mempengaruhi tingkat konsumsi yang dikeluarkan masyarakat karena bergantung pada permintaan yang dibutuhkan masyarakat.

Selain itu, Konsumsi periode sebelumnya juga memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia. Konsumsi yang dilakukan di periode ini akan bergantung dan didasarkan pada konsumsi yang dikeluarkan pada periode sebelumnya. Hal ini didasarkan pada konsumsi yang dilakukan dari periode tahun sebelum periode ini, apabila mengalami peningkatan maka konsumsi yang dilakukan di periode selanjutnya juga akan mengalami peningkatan. Sedangkan, saat konsumsi periode tahun sebelumnya menurun, maka konsumsi di periode tahun selanjutnya juga akan mengalami penurunan sebab terdapat rasa pesimisme dalam melakukan konsumsi barang dan jasa apabila periode sebelumnya menurun.

Tingkat konsumsi di Indonesia juga dipengaruhi adanya Tingkat suku bunga yang signifikan dan positif. suku bunga yang ada akan mempengaruhi pola konsumsi yang dilakukan masyarakat. hal ini tidak hanya bagi masyarakat yang memiliki penghasilan dan pendapatan yang tinggi saja, tetapi masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah juga akan berpengaruh terhadap kegiatan konsumsi mereka. Bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi, saat suku bunga naik mereka akan lebih memilih untuk menabung dan

mendepositokan uangnya dalam lembaga perbankan. Adanya kenaikan suku bunga ini, menjadikan mereka lebih memilih menyimpan uangnya dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada menggunakan uangnya untuk konsumsi. Hal ini perlu diperhatikan karena kenaikan suku bunga ini juga jarang terjadi, sehingga masyarakat harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, dengan menunda konsumsi yang berlebihan maka juga akan menekan pengeluaran konsumsi. Selanjutnya, kenaikan suku bunga juga akan sedikit berpengaruh pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Biasanya masyarakat ini memiliki sedikit tabungan dan bahkan tidak mempunyai tabungan. Sehingga suku bunga tidak berdampak signifikan pada pola konsumsi mereka. Namun saat mereka ingin mengkonsumsi barang yang berlebih namun tidak memiliki pendapatan yang cukup dan harus menggunakan pinjaman dari bank, saat suku bunganya tinggi mereka akan cenderung menahan untuk melakukan pinjaman karena ini juga akan meningkatkan saat mengembalikan pinjaman. Sehingga mereka akan lebih memilih mengurangi konsumsi daripada membayar biaya bunga yang tinggi. (Dewi et al., 2013).

10. Pengaruh Inflasi Terhadap Konsumsi Di Indonesia

Adanya inflasi dalam negara berdampak signifikan dan negatif terhadap tingkat konsumsi. dimana saat terjadi inflasi dalam suatu negara, maka harga suatu barang barang dan jasa akan meningkat. Sehingga kemampuan daya beli masyarakat akan menurun terhadap permintaan barang dan jasa. Adanya penurunan kemampuan masyarakat dalam melakukan daya beli akan menurunkan tingkat konsumsi yang ada. Masyarakat akan lebih memilih mengurangi penggunaan barang dan jasa yang dibutuhkan karena harga yang terlalu mahal. Sehingga konsumsi juga akan berkurang dari yang biasanya dilakukan. Sedangkan saat terjadi deflasi (penurunan inflasi) maka barang dan jasa memiliki harga yang lebih rendah dari biasanya. Saat terjadi deflasi, permintaan masyarakat naik terhadap pembelian barang dan jasa akan menyebabkan daya beli masyarakat naik sehingga konsumsi mereka akan meningkat. Mereka akan menaikkan jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan saat harga sedang murah dari biasanya, dengan anggapan bahwa hal ini akan bermanfaat dan menguntungkan saat harga barang endah sehingga dengan pengeluaran yang seperti biasanya akan mendapatkan jumlah barang yang

banyak. hal ini akan berpengaruh pada peningkatan konsumsi karena saat barang mereka banyak, maka penggunaan juga akan bertambah (Nur, 2012).

11. Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Penterapan Tenaga Kerja

Peningkatan tenaga kerja dipengaruhi adanya pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menimbulkan dampak yang signifikan dan positif. Setiap orang pasti memiliki anggaran pengeluaran untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan. Besarnya konsumsi yang dilakukan pastinya membutuhkan produksi yang lebih banyak, oleh karena itu agar produksi bisa berjalan lancar membutuhkan banyak tenaga kerja. Adapun pengeluaran konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh pendapatan setiap rumah tangga tersebut. Saat penghasilan atau gaji seseorang meningkat, maka masyarakat juga akan meningkat dalam melakukan konsumsi. Sedangkan saat pendapatan turun, maka konsumsi juga akan menurun. Pendapatan menjadi balas jasa yang diterima atas pekerjaan yang diselesaikannya dalam proses produksi. Adanya hal tersebut saat konsumsi masyarakat meningkat, maka penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat. Hal ini karena setiap proses produksi

12. Penyebab Rendahnya Pengeluaran Konsumsi Perkapita Di Indonesia

Di Indonesia sendiri masih termasuk negara yang memiliki pengeluaran konsumsi yang rendah dalam pengeluaran global. pengeluaran konsumsi yang rendah ini karena adanya pengeluaran per kapita masyarakat di Indonesia yang tergolong sangat minimum dan rendah. Bahkan masyarakat Indonesia juga belum banyak yang makmur dan sejahtera. Selain itu, jumlah penduduk di Indonesia yang banyak menyebabkan banyaknya pengangguran dan kemiskinan yang masih banyak, sehingga konsumsi yang dibutuhkan oleh masyarakat hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berikut beberapa penyebab konsumsi per kapita di Indonesia yang masih rendah:

a. Banyaknya Jumlah Penduduk Miskin

Hingga saat ini, penduduk di suatu daerah Indonesia masih ada yang belum merasakan kesejahteraan dan kemakmuran terhadap hidupnya masih banyak dan bahkan masih ada masyarakat yang jauh berada di bawah angka garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana

masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsinya baik kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan pokok lainnya. sehingga masyarakat untuk memenuhi konsumsinya juga terbatas, sehingga menyebabkan pengeluaran konsumsi di Indonesia tergolong rendah.

b. Banyaknya Jumlah Pengangguran

Banyaknya jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia akan menyebabkan banyaknya pengangguran. Masyarakat yang menjadi pengangguran memiliki pengeluaran untuk mengonsumsi barang dan jasa yang sedikit dan lebih mementingkan membeli kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Tingginya jumlah pengangguran menjadi sebuah masalah baru untuk meningkatkan kemakmuran setiap masyarakat di Indonesia. Dengan adanya pengangguran juga akan memperlihatkan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat Indonesia. pengangguran menyebabkan standar kemakmuran suatu masyarakat rendah karena mereka tidak memiliki penghasilan yang bisa didapatkan dari mata pencahariannya, selain itu juga bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi dalam negara juga ikut menurun karena daya beli masyarakat yang turun, penerimaan pajak oleh pemerintah akan berkurang karena sumber penerimaan negara berkurang akibat objek pajak yang semakin mengecil, serta pendapatan nasional juga akan berkurang karena kurang optimalnya dalam pemakaian faktor produksi (Muslim, 2011).

Sehingga dengan adanya faktor tersebut masyarakat menyebabkan adanya pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga yang ada di Indonesia masih terbatas hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Adanya keterbatasan dalam pendapatannya menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan sekundernya. Sehingga barang dan jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan kebutuhan paling dasar dan penting yang dibutuhkan. Hal ini juga akan menekan jumlah konsumsi masyarakat. hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi fenomena ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan membekali keahlian yang tinggi, sehingga dapat menciptakan lapangan tenaga kerja baru dan dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang menganggur dan miskin. Saat

pendapatan masyarakat meningkat, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Sesuai dengan prinsip yang ada, saat pendapatan meningkat maka konsumsi masyarakat juga akan mengikuti besarnya pendapatan tersebut. Konsumsi tidak selamanya bersifat negatif selama konsumsi tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat. Namun dalam hal ini masyarakat juga harus memperhatikan berbagai aspek konsumsi yang dapat dipertimbangkan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, sehingga masyarakat tidak terjerumus pada aktivitas konsumtivisme yang berlebihan dan kurang efektif.

B. INVESTASI

Ada banyak definisi yang dapat menjelaskan apa itu Investasi. Secara formal investasi adalah bagaimana seorang mengalokasikan dananya saat ini, untuk memperoleh keuntungan secara berkala sehingga dapat dirasakan di masa depan. Dipandang dalam aspek keuangan, investasi bermakna sebagai usaha yang dilakukan oleh individu maupun sebuah lembaga keuangan maupun usaha untuk menjaga hingga menaikkan nilai modal yang dimiliki. Investasi dibagi menjadi dua dalam bentuknya, yakni investasi aset keuangan serta investasi aset riil. Investasi aset keuangan adalah investasi yang dapat diperoleh melalui lembaga keuangan, contohnya perbankan dan pasar modal yang berupa deposito, saham, dan lainnya. Sedangkan investasi aset riil digolongkan atas aset tetap yang termasuk didalamnya adalah benda tidak bergerak, yang memiliki harga yang dapat terus meningkat secara berkala, seperti gedung, emas, dan tanah. (Haryati, 2016).

Pihak yang berkecimpung dalam kegiatan investasi ini disebut investor. Dilihat dari pihak yang melakukan investasi, maka investor terbagi atas dua golongan yaitu, investor individu yang anggotanya terdiri dari berbagai individu yang melakukan aktivitas investasi serta investor institusional yang terdiri atas berbagai perusahaan, seperti perusahaan asuransi, investasi ataupun lembaga dana pensiun.

1. Tujuan Investasi

- a. Mengurangi dampak dari inflasi, karena dengan melakukan investasi orang tersebut akan dapat menghindarkan diri dari resiko penurunan nilai dari harta kekayaan.

- b. Dorongan untuk melakukan hemat pajak, seperti beberapa negara yang melakukan kebijakan yang bersifat mendorong adanya investasi di dalam masyarakat.
 - c. Agar mendapatkan hidup yang layak di masa depan, karena meningkatnya taraf hidup sehingga mempertahankan pendapatannya untuk masa depan.
2. Risiko Investasi
- a. Investasi risiko rendah, seperti deposito serta reksadana tetap.
 - b. Investasi resiko sedang, seperti obligasi syariah, pasar uang, dan reksadana campuran.
 - c. Investasi risiko tinggi, seperti saham serta reksadana saham

3. Proses Invertasi

Sebelum memahami mengenai proses investasi terlebih dahulu memahami tentang proses keputusan investasi. Dasar atas proses pengambilan keputusan untuk melakukan investasi adalah pemahaman investor atas pola pengembalian dan risiko dalam investasi yang diperhitungkan dapat sebanding. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi risiko investasi maka memilikipengembalian yang besar pula dalam perhitungannya.

4. Dasar Keputusan Investasi

a. Return

Return merupakan istilah dalam menyebut tingkat hasil keuntungan dalam investasi. Suatu return yang diharapkan seorang investor pada hasil investasi merupakan bentuk kompensasi atau biaya kesempatan dan risiko penurunan daya beli akibat dari adanya inflasi. Saat investor melakukan investasi untuk dananya dia akan memberikan syarat tingkat pengembalian tertentu. Pada saat periode investasi berakhir, nantinya investor dapat mengetahui tingkat pengembalian apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.

b. Risiko

Risiko merupakan hal yang harus dipertimbangan dari seberapa besar risiko yang ditanggung saat melakukan investasi tersebut. Risiko dapat dipahami sebagai kemungkinan atas pengembalian sesungguhnya yang berbeda dari yang diharapkan sebelumnya. Strategi yang diberikan oleh investor atas risiko bergantung atas dasar preferensi investor terhadap risiko yang diinginkan(Pratiwi & Prijati, 2015).

5. Proses Keputusan Investasi

Proses dalam membuat keputusan untuk melakukan investasi ini merupakan suatu proses membuat keputusan yang saling berkaitan, dalam menjalankan proses ini terdapat lima tahap yang perlu digunakan dalam menentukan keputusan hingga bisa menghasilkan keputusan yang terbaik. Tahap tersebut diantaranya:

a. Penentuan Tujuan Melakukan Investasi

Tahap ini merupakan tahap untuk menentukan tujuan dari investasi yang sudah direncanakan. Berbagai investor tentunya memiliki tujuan berbeda bergantung pada investor yang akan membuat keputusan.

b. Menentukan kebijakan melakukan investasi

Dalam tahap ini digunakan untuk menentukan kebijakan dalam memenuhi tujuan dari investasi yang akan dilakukan. Di tahap ini dimulai dari menentukan keputusan alokasi aset, keputusan yang dilakukan ini berkaitan dengan proses pendistribusian dana yang tersedia di dalam beberapa kelas aset.

c. Melakukan Pemilihan strategi portofolio

Memilih salah satu strategi yang akan digunakan, baik Strategi portofolio aktif atau strategi portofolio pasif. Pemilihan strategi ini harus konsisten dengan dua tahap sebelumnya.

d. Memilih aset dan Membentuk portofolio

Pada tahap ini melakukan pemilihan beberapa aset yang nantinya dimasukkan ke dalam portofolio. Pada tahap ini juga diperlukan adanya evaluasi dari berbagai sekuritas yang masuk dalam portofolio. Adapun Tujuan dilakukannya dari tahap ini untuk mencari kombinasi yang efisien dan efektif dari portofolio tersebut.

e. Melakukan Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses dalam memutuskan berinvestasi, Bila dalam tahap ini telah terlewati dan memiliki hasil yang tidak sesuai harapan, maka proses dalam memutuskan keputusan harus diulang kembali dari tahap awal. (Tandelilin, 2010).

6. Resiko Yang Timbul Dalam Invetasi Yang Ada Pada Sektor Keuangan

a. Interest Risk Rate

Ditimbulkan karena berubahnya tingkat dari suku bunga terutama dalam sistem keuangan konvensional.

b. Business Risk

c. Inflation Risk

Ditimbulkan karena kenaikan harga secara menyeluruh yang nantinya berkaitan dengan kenaikan suku bunga sehingga menyebabkan penurunan daya beli.

Ditimbulkan karena memilih suatu jenis usaha dalam bidang industri.

d. Market Risk

Ada karena perubahan kondisi tren pasar yang berpengaruh terhadap pilihan investasi lainnya.

e. Exchange

Mempunyai kaitan dengan fluktuasi nilai tukar valutas asing yang berpengaruh terhadap return yang diperoleh.

f. Liquidity Risk

Untuk jenis produk keuangan tertentu yang memiliki karakter mudah berpindah tangan.

g. Country Risk

Diakibatkan karena stabilitas dari politik suatu negara. (Haryati, 2016)

7. Contoh Produk Investasi Yang Di Keluarkan Oleh Lembaga Keuangan

a. Deposito Perbankan

Deposito adalah salah satu pilihan untuk berinvestasi dengan aman sebab mendapat perlindungan dari pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Deposito bank merupakan uang yang dialokasikan dari bank kepada individu maupun lembaga usaha yang nantinya dapat ditarik kembali bila dibutuhkan.

b. Asuransi Kesehatan

Asuransi sendiri terdiri dari asuransi syariah dan asuransi konvensional, dimana asuransi syariah memiliki keunggulan dari segi premi yang telah dibayar tidak akan hangus meskipun telah jatuh tempo. Sedangkan asuransi konvensional seluruh premi tidak dapat dipisahkan secara jelas porsinya, karena hal itu, premi yang telah terbayar dapat hangus jika sudah waktunya jatuh tempo tidak terjadi klaim.

c. Dana Pensiun

Dana pensiun merupakan akumulasi dana yang diperoleh dari penghasilan yang dipotong secara rutin yang dialokasikan ke dalam tabungan khusus yang dapat dipergunakan ketika individu telah pensiun.

d. Tabungan bencana

Tabungan ini merupakan tabungan yang memiliki konsep penetapan target yang harus dipenuhi dan jangka waktu tertentu.

8. Bentuk-Bentuk Investasi

a. Real Investment

merupakan investasi nyata yang melibatkan berbagai aset berwujud seperti mesin atau pabrik, tanah, dan lain sebagainya.

b. Financial Investment

Merupakan sebuah investasi yang melibatkan berbagai aset dalam kontrak tertulis seperti saham dan obligasi.(Sandri et al., 2019).

c. Investasi Langsung (Direct Investment)

Seorang pemilik modal yang secara langsung menanamkan modal di perusahaan tanpa menggunakan perantara pihak ketiga. Dalam investasi langsung ini terdiri dari dua bagian yakni:

1) Investasi yang dilakukan melalui pembelian aset keuangan yang tidak dapat dijual belikan, seperti tabungan dan sertifikat deposito.

2) Investasi yang asetnya di perdagangkan di pasar uang. Aset yang ada biasanya mempunyai risiko rendah, serta memiliki jangka waktu pendek.

9. Instrumen Keuangan Yang Diperdagangkan

a. Pasar Modal

Pasar modal adalah pasar keuangan yang dipergunakan dalam jangka waktu yang panjang, atau dikatakan sebagai pasar konkrit, dimana merupakan wadah fisik yang terorganisir dalam tempat yang disebut Bursa Efek. Bursa efek memiliki fungsi sebagai penjaga komunitas pasar serta sebagai wadah dalam menciptaka harga efek yang wajar melalui permintaan dan penawaran.(Pakpahan, 2003).

b. Reksa Dana

Reksadana adalah sebuah wadah bagi masyarakat untuk turut serta berinvestasi dengan menghimpun dana yang nantinya diinvestasikan melalui portofolio efek yang dilakukan oleh manajer investasi. Perusahaan

pengelola reksadana muncul dalam rangka mengkoordinasi para investor yang ingin mengalokasikan dananya melalui berbagai media investasi yang kemudian dikelola secara profesional. Bentuk reksadana yang ada di Indonesia berupa bentuk kontrak investasi kolektif dengan kategori reksadana terbuka.(Reksadana, n.d.).

c. Saham

Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan suatu kepemilikan atas perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak atas klaim dari deviden atau pembagian keuntungan dari suatu perusahaan. Terdapat dua jenis saham yang diperjual belikan lewat bursa saham. Saham merupakan alternatif yang dapat dipilih dalam melakukan investasi. Berinvestasi dengan membeli sejumlah saham dari suatu perusahaan berarti investor telah melakukan investasi dananya dengan harapan akan memperolehkeuntungan dari hasil penjualan kembali.

10. Langkah Memulai Investasi

- a. Menghemat dan menyisihkan uang untuk alokasi dana khusus guna keperluan investasi.
- b. Melakukan sebuah riset terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah investasi pada saham atau produk jasa keuangan.
- c. Cari penyedia solusi keuangan yang tepat, sebaiknya cari penyedia solusi keuangan yang mempunyai reputasi yang baik karena dapat bermanfaat secara maksimal.
- d. Tentukan pilihan cara dalam berinvestasi, seperti memperhatikan jangka waktu yang akan diambil, menentukan profil risiko yang sesuai dengan instrumen yang dipilih.
- e. Rutin melakukan pengecekan portofolio investasi, karena hal ini berguna untuk dapat mengetahui sejauh mana hasil keuntungan investasi didapat. (Sandri et al., 2019).

11. Investasi Memiliki Peran Penting Dalam Ekonomi Makro

- a. Investasi mendorong permintaan untuk barang modal
- b. Investasi mendorong peningkatan penggunaan dari barang modal yang akan meningkatkan kapasitas proses produksi
- c. Investasi akan mendorong modernisasi proses produksi dan mengarah pada efisiensi

- d. Investasi meningkatkan hasil dari produktivitas
- e. Investasi meningkatkan nilai tambah dari suatu produk melalui inovasi dan perbaikan hasil produk yang sudah ada

C. PENGELUARAN PEMERINTAH

1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan biaya yang digunakan dalam rangka pembiayaan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan dalam pembangunan. Pengeluaran Pemerintah juga mencerminkan bagaimana kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah. Pembayaran gaji pegawai pemerintahan, sistem pendidikan, kesehatan rakyat, infastruktur, perbelanjaan angkatan bersenjata, merupakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Belanja pemerintah sendiri terdiri dari:

a. Transfer Payment

Merupakan pembayaran moneter ke sektor swasta. Pertukaran barang dan jasa tidak termasuk dalam *transfer payment*, walaupun nyatanya pemerintah mengeluarkan uang.

b. Current Expeditures

Pembelajaan rutin tujuan operasional.

c. Capital Expenditures

Capital Expenditures ini sangatlah penting dalam peningkatan persediaan modal dalam perekonomian, yang mana mencakup pembelajaan untuk keperluan infrastuktur.

Hakikatnya setiap pengeluaran yang dilakukan oleh suatu negara atau pemerinyah kembali lagi atas landasan prinsip optimalisasi pemanfaaat anggaran guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pengeluaran pemerintah mencakup pengeluaran rutin, administrasi serta pengeluaran lainnya guna memiayai kegiatan-kegiatan pembangunan.

Tugas utama pemerintah terutama di negara berkembang salah satunya adalah mempercepat perkembangan dan pertumbuhan sektor ekonomi. Dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Sebagian besar pengeluaran pemerintah dialokasikan ke pembangunan dan pengembangan seperti pendidikan dan kesehatan, sektor-sektor publik lainnya serta sektor-sektor ekonomi yang potensial.

Pengeluaran Pemerintah dapat dibidang sebagai penggunaan uang dan sumber daya suatu negara dengan tujuan pembiayaan kegiatan pemerintah dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan. Konsep Perhitungan pendapatan nasional (Y) dengan pendekatan pengeluaran adalah sebagai berikut:

Sumber 10 Google

Tabel 4 Rumus Fungsi Pendapatan Nasional Pendekatan Pengeluaran

Y	= Pendapatan Nasional,
C	= Konsumen,
I	= Investasi,
G	= Pemerintah,
X	= Ekspor,
M	= Impor,

Pengeluaran pemerintah sendiri mempunyai dua sifat, yaitu:

a. Sifat Ekhsautif

Pengeluaran pemerintah yang tercantum dalam kontrak prestasinya yang berupa pembelian maupun belanja barang jasa dalam perekonomian dengan tujuan konsumsi ataupun untuk menghasilkan barang.

b. Sifat Transfer

Sifat transfer merupakan pengeluaran pemerintah yang tidak terdapat kanta prestasinya berupa penyimpangan

2. Teori-Teori Pengeluaran pemerintah

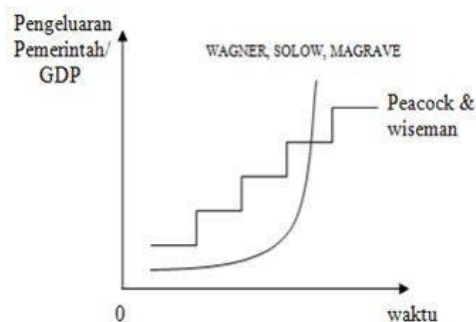
Teori Paacock and wiseman

Dalam teori peacock dan wiseman menjelaskan mengenai pemerintah berusaha untuk memperbesar pengeluaran pemerintah dengan menyandarkan pada penerimaan pajak yang semakin besar. Teori peacock and wiseman mendasarkan teori bahwa masyarakat toleransi terhadap pajak yang mana justru menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memperbesar pajak. Teori peacock dan wiseman adalah sebagai berikut (Mangkoesoebroto)

“Perkembangan ekonomi menimbulkan pembayaran pajak yang semakin tinggi meskipun tarif pajak yang tidak ada perubahan; serta meningkatnya

pajak pemerintah menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran menjadi semakin besar.”

Sumber 11 Google



Gambar 7 Kurva Teori Peacock dan Wiseman

a. Teori Batas Kritis Colin Clark

Teori batas kritis Colin Clark menjelaskan mengenai batas kritis dalam perpajakan. Anggaran belanja pemerintah yang meningkat tidak selalu menjamin toleransi dan pengeluaran pemerintah yang diperkirakan kurang dari 25% dari GNP. Namun apabila dalam kegiatan pemerintah yang diukur dengan pajak dan mendapat penerimaan di atas 25% kemungkinan yang akan terjadi adalah inflasi. Dikemukakan bahwa pajak yang tinggi akan meningkatkan rasa malas dalam perpajakan, yang mana nantinya akan berakibat pada produktifitas yang turun dan meningkatkan penawaran agregat. Inflasi sendiri dapat terjadi apabila keseimbangan baru yang muncul karena adanya kesenjangan antara permintaan dan penawaran agregat.

b. Teori Adolf Wegner

Dalam teori Adolf Wegner menjelaskan tentang bagaimana pengeluaran pemerintah dan kegiatan yang semakin tahun semakin meningkat. Meningkatnya pengeluaran pemerintah keterkaitan pemerintah dalam setiap kegiatan dan kehidupan ekonomi sebagai satu keseluruhan. Dalam suatu perekonomian jika pendapatan perkapita meningkat yang dapat dikatakan aman secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat terutama penyebabnya adalah pemerintah yang harus mengatur hubungan yang timbul di masyarakat, sektor hukum, pendidikan dan sektor lainnya.

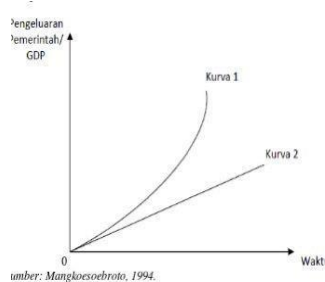
Semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah seiringan dengan meningkatnya fungsi pertahanan dan keamanan, meningkatnya kesejahteraan, perbankan dan pembangunan. Hukum wegner dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{PPkP}{PPK1} < \frac{PkPPn}{PPK2} < \dots < \frac{PkPPn}{PPKn}$$

PPkP : Pengeluaran Pemerintah per-kapita

PPK : Pendapatan per-kapita, yaitu GDP (jumlah penduduk)

1,2,...n : jangka waktu (tahun)



3. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah

Secara umum pengeluaran pemerintah dapat dikatakan sebagai segala macam pengeluaran guna membiayai pembangunan dan sektor-sektor umum lainnya. Jenis pengeluaran pemerintah sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja daerah.

a. Belanja Pemerintah Pusat

1) Pengeluaran Rutin

Yang termasuk dalam pengeluaran rutin adalah belanja pegawai yang termasuk gaji dan pensiunan pegawai, tunjangan tunjangan, belanjeluar negeri dan lain lain. Belanja barang yang pengeluarannya untuk pembayaran dan pembelian peralatan perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang terdiri dari belanja barang dalam negeri dan belanja barang luar negeri. Subsidi atau pengeluaran negara untuk subsidi BBM dan non.

2) Pengeluaran Pembangunan

Pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam sektor pembangunan terdiri dari pembiayaan rupiah berupa tabungan pemerintah dan pinjaman program serta pembiayaan proyek.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah terbagi menjadi dua bagian dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Yang termasuk dalam dana perimbangan sendiri adalah dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum.

Penyebab-penyebab pengeluaran pemerintah meningkat yaitu:

- 1) Meningkatkan Fungsi Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban.
- 2) Meningkatnya fungsi pemerintahan.
- 3) Meningkatnya fungsi perbankan.
- 4) Meningkatnya fungsi Pembangunan.

4. Pengeluaran Negara

Pengeluaran Negara

Pengeluaran negara merupakan dana yang dikeluarkan dari kas negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang merupakan Bendahara Umum Negara Indonesia. Pengeluaran yang digunakan dalam belanja negara seperti belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga hutang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan transfer ke daerah-daerah berupa dana perimbangan, dana khusus dan dana penyesuaian. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 pasal 1 mengenai ketentuan umum pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara bahwasanya anggaran Pendapatan belanja negara merupakan rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh DPR. Penerimaan yang didapatkan akan dimasukkan dalam Kas Negara.

Pengeluaran Negara terjadi ketika kegiatan pemerintah yang dilakukan terus berkaitan dengan fungsi pemerintahan dan memiliki tujuan kemakmuran, keamanan terhadap masyarakat. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak kegiatan pemerintah tentunya pengeluaran negara akan ikut meningkat. Faktor lainnya selain kegiatan pemerintah yang dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah, meningkatnya fungsi pertahanan, kesejahteraan, dan perbankan juga akan meningkatkan pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran negara tentunya berpengaruh terhadap perekonomian, seperti dalam sektor keseimbangan perekonomian. Dalam hal pencapaian target peningkatan PDB, pemerintah mengatur tingkat pengeluaran negara. Seperti mengatur tingkat pengeluaran negara yang meningkat, pemerintah dapat ikut serta dalam pengaturan full employment, yang mana target dari penerimaan bukan untuk membiayai pengeluaran tersebut, melainkan dengan pola defisit anggaran.

5. Anggaran Berimbang

Anggaran berimbang merupakan anggaran dengan jumlah penerimaannya setara dengan jumlah pengeluaran dalam periode tertentu. Dengan kata lain pengeluaran pemerintah sama dengan pemasukan yang didapatkan. Anggaran pemerintah sendiri dikenal juga dengan istilah *balanced budget* yang mana sedang dalam kondisi jumlah pengeluaran pemerintah tentunya tetap sama dengan pendapatan yang didapatkan. Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran tentunya harus dibuat dengan se-efisien mungkin. Mengapa demikian, karena hal ini akan mempengaruhi dalam pemaksimalan penerapan anggaran itu sendiri, sehingga nantinya target dapat dicapai dengan mudah.

Kebijakan anggaran berimbang merupakan kebijakan anggaran yang jumlah penerimaan dari sektor migas, nonmigas, dan pajak sama besarnya dengan pengeluaran pemerintah. Di negara kita ini Indonesia, selama pembangunan Jangka Panjang tahap 1 menggunakan anggaran berimbang dinamis. Yaitu kondisi dimana penerimaan yang didapatkan lebih banyak dan mudah daripada yang sudah direncanakan.

Apabila kebijakan anggaran tidak berimbang, pada tahun tertentu biasanya akan mengalami defisit anggaran dan surplus anggaran. Lain halnya dengan kebijakan anggaran-anggaran dinamis yang anggarannya pasti mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan tahun lalu. Hampir sama dengan kebijakan anggaran berimbang selama pembangunan Jangka Panjang tahap 1 yang menggunakan anggaran berimbang dinamis.

Menurut Undang-Undang yang secara tepat menjelaskan mengenai Pemerintah Daerah, mengemukakan bahwa belanja daerah ialah kewajiban daerah sebagai pengurang kekayaan suatu periode yang sudah ditetapkan. (Hakim & Kumalasari, 2020) Berdasarkan pernyataan tersebut, belanja daerah terbagi

menjadi 2 klasifikasi, yaitu belanja langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

a. Belanja Langsung

Belanja langsung ialah belanja yang anggarannya berkaitan langsung dengan pelaksanaan program guna melakukan program aktivitas yang diselenggarakan oleh pemerintah wilayah serta biayanya sudah dianggarkan pemerintah wilayah seperti belanja pegawai, benda dan jasa, dan belanja modal.

b. Belanja Tidak Langsung

Tidak langsung ialah tidak berkaitan penerapan program semacam terdapatnya belanja dorongan keuangan, belanja tak disangka, pendapatan dan tunjangan yang sudah diresmikan oleh undang-undang.

6. Manfaat Pengeluaran Pemerintah

Dalam zona pengeluaran pemerintah, bisa diklasifikasikan jadi 2 bagian, yakni yang kesatu merupakan pengeluaran teratur yang merupakan pengeluaran guna pemeliharaan yang bisa diselenggarakan dalam tiap hari. Yang kedua yakni pengeluaran pembangunan ialah pengeluaran yang bisa menaikkan modal masyarakat dengan diwujudkan pembangunan fisik maupun non fisik yang bisa menimbulkan aktivitas ekonomi dari masyarakat.

Dalam peningkatan sektor pengeluaran maka dapat menyebabkan semakin meningkatnya penghasilan daerah yang disebabkan naiknya permintaan jenis produk barang dan jasa pada periode ditentukan yang mendorong peningkatan dalam investasi sehingga akan menyebabkan naiknya pada produk pasar.

7. Fungsi Pengeluaran pemerintah

Pada setiap periode tingkatan yang terjadi dalam pemerintah memiliki keputusan final dengan proses yang tak sama serta beberapa kegiatan pemerintahan dibawahnya dapat berpengaruh pemerintahan lebih tinggi di atasnya. Oleh sebab itu, untuk mendalami berbagai peraturan mengenai anggaran bagi pemerintahan maka wajib memahami fungsi yang telah ditetapkan. Fungsi tersebut yaitu yang pertama adalah fungsi pelayanan, dimana fungsi tersebut mengarah pada kegiatan wilayah dan pengabdian warga. Yang kedua yaitu fungsi pengaturan, dimana fungsi tersebut yang merumuskan dan menegakkan pusat perundang-undangan yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu fungsi pembangunan, dimana fungsi tersebut

merupakan fungsi yang mempunyai hubungan langsung serta tak langsung dalam ekonomi pemerintah maupun penyediaan infrastruktur pemerintah dalam peningkatan perekonomian. Yang keempat yaitu fungsi perwakilan, dimana fungsi tersebut yang menyatakan penerimaan pada suatu daerah di luar bidang tanggung jawab pelaksana atau administrator. Yang kelima yaitu fungsi koordinasi, dimana fungsi tersebut merupakan fungsi yang melaksanakan sistem serta persiapan investasi serta tata guna wilayah teritorial.

8. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran ialah bagian berasal kebijakan fiskal, tindakan pemerintah yang mengatur fungsi perekonomian dengan cara memilih tingkat pendapatan untuk anggaran nasional dan daerah. Dalam pembelanjaan publik, dapat berupa subsidi atau pembayaran pribadi kepada berbagai kelompok warga negara. Dalam pengeluaran, juga dapat menyarankan keseimbangan pendapatan berdasarkan 2 jalur terpisah, pertama adalah tingkat pembelian pemerintah untuk membeli barang dan jasa (G) berarti komponen permintaan untuk membeli barang barang dan jasa diidentifikasi selama periode waktu tertentu, dan kedua pajak dan transfer dapat mempengaruhi pengeluaran dan pendapatan (Y). (Raharja & Manarung, 2008)

Berdasarkan uraian di atas dapat diperkuat dengan menggunakan pengaruh pengeluaran publik dengan beberapa aspek, yaitu:

a. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan

Pendidikan ialah kebutuhan primer yang wajib dimiliki oleh setiap manusia dan menjadi dasar pada kehidupan manusia. Pendidikan sebagai bagian terpenting pada pencapaian keberhasilan manusia untuk melakukan aktivitas di setiap harinya. Sebagai akibatnya dapat dikatakan bahwa pendidikan berperan penting pada kehidupan manusia.

Besarnya pengeluaran bagian pembelajaran memastikan besarnya pencapaian. Pada suatu riset tentang keterkaitan zona pembelajaran dengan modal, menyampaikan bahwa meningkatnya pengeluaran zonapembelajaran naiknya ketersediaan modal.

Modal manusia ialah investasi pengetahuan, keahlian, dan kemampuan, serta gagasan yang artinya komponen krusial dalam menunjang kegiatan pembangunan terutama pembangunan ekonomi pada skema manfaat tersebut. Sebagai akibatnya bisa dikatakan bahwa modal manusia wajib

menerima atensi spesifik terutama pada sektor keadaan perekonomian yang sedang bertumbuh pesat, sebab besarnya pengeluaran sektor pendidikan tersebut maka akan memilik besar pencapaian pembangunan.

b. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan

Pengeluaran pada bagian kesehatan ialah bagian yang tak kalah krusial dibandingkan dengan pengeluaran bidang pembelajaran. Kesehatan selaku tema diskusi utama pada ulasan pembangunan yang terjadi di akhir-akhir ini.

Pengeluaran pada bidang kesehatan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian yang terjalin dalam masyarakat. Meningkatnya pengeluaran bidang kesehatan maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kesamaan untuk semakin tinggi.(Puspitasari & Sarfiah, 2019).

Fasilitas kesehatan serta jaminan kesehatan wajib didesain pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. Sehingga, meningkatnya pengeluaran bidang kesehatan maka semakin baik infrastruktur dan jaminan kesehatan warga. Sebagai akibatnya akan berdampak kesehatan membaik serta masyarakat bisa bekerja dengan maksimal. Kamampuan maksimal akan mempengaruhi terhadap kinerja warga dalam mendorong aktivitas perekonomian serta sanggup menaikkan ketentuan perekonomian suatu negeri.

c. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Infrastruktur

Modal pengeluaran zona pembelajaran dan zona kesehatan membutuhkan fasilitas infrastruktur semacam gedung sekolah, gedung training pendidikan, atau bangunan kesehatan seperti rumah sakit maupun puskesmas wilayah. Pada pengeluaran pemerintah dalam sektor infrastruktur mempunyai eksistensi sarana dan prasarana yang memadai serta dapat pula mendukung adanya kelancaran dalam menjalani aktivitas perekonomian.

Beberapa studi penelitian menyampaikan bahwa terjadinya peningkatan pada pengeluaran pemerintah di sektor pengeluaran infrastruktur cenderung dapat mendorong perekonomian yang ada.(Puspitasari & Sarfiah, 2019) Selaku dampaknya, pengeluaran bagian pembelajaran, kesehatan, dan dalam bagian infrastruktur mempunyai kedudukan krusial

dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan perekonomian.

Selain itu, jika pada pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur dapat berjalan dengan baik, terutama pada bidang pembangunan infrastruktur jalanan maka membangkitkan peningkatan pendapatan ekonomi rakyat. Perihal ini muncul sebab aktivitas ekonomi bertambah akibat semakin tingginya dan semakin mudahnya gerak faktor produksi serta aktivitas perdagangan dalam warga. Sehingga pemerintah berupaya guna menaikkan perkembangan ekonomi rakyat hingga pemerintah perlu melakukan pembangunan infrastruktur.

d. Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Akibat pengeluaran memberikan konklusi bahwa teori perkembangan ekonomi ialah proses peningkatan jangka panjang. Untuk dapat mengembangkan perkembangan ekonomi di sebagian negeri, perlu dilakukan pembatasan pengeluaran konsumsi serta banyak berinvestasi di bagian infrastruktur.

Belanja publik untuk infrastruktur, baik berupa listrik, air minum, maupun pembangunan infrastruktur jalan, berdampak positif serta signifikan terhadap perkembangan. Pengeluaran bidang pembelajaran serta kesehatan akhirnya akan bermuara pada perkembangan ekonomi warga. Tetapi, pengeluaran tidak cukup untuk meningkatkan serta menguatkan perkembangan ekonomi masyarakat. Sehingga, perlu didukung penggunaan kebijakan pemerintah mengenai penerapan belanja publik.

e. Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Belanja publik mempengaruhi indeks pembangunan manusia dengan meningkatkan kualitas fasilitas umum dan rantai infrastruktur atau program kepemilikan yang dapat menciptakan produktivitas yang lebih besar bagi penduduk dan bisnis di daerah.

Pada kelompok daerah indeks pembangunan berkualitas tinggi, terlihat kontribusi positif bidang kesehatan dan infrastruktur, proporsi kontribusi yang relatif besar dibandingkan dengan belanja bidang lainnya. (Susanti & Hidayat, 2020). Pada saat yang sama, daerah dengan indeks pembangunan

rendah mempunyai kontribusi positif, sehingga pengeluaran di bidang pendidikan relatif besar dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lainnya, khususnya pengeluaran kesehatan, sektor infrastruktur dan belanja.

f. Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan

Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi pasar modal melalui upah pegawai. Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi pasar modal melalui dampak keputusan bisnis oleh sektor swasta dan sektor rumah tangga. Pengeluaran pemerintah secara tidak langsung dapat mempengaruhi gaji pegawai pemerintah yang dapat menginvestasikan sebagian dari pendapatan kerja mereka dalam surat berharga.

Sebuah indeks harga saham agregat dapat bereaksi langsung terhadap perubahan dalam pengeluaran pemerintah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi positif dan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah terhadap indeks harga saham agregat. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat dari efek tidak langsung melalui keputusan tentang kegiatan di sektor konsumsi publik dengan sektor investasi swasta. Selain itu, adanya keterlambatan waktu antara kebijakan dari sektor pengeluaran pemerintah dengan sektor konsumsi masyarakat dan sektor investasi perusahaan yaitu melalui besaran honor pegawai yang akan diterima oleh rakyat dan besaran pengeluaran yang bertujuan guna memenuhi kebutuhan infrastruktur pembangunan yang tujuan utamanya untuk mempermudah aktivitas pada investasi perusahaan.

g. Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Bagi sebagian riset dan analisis studi tentang dampak pengeluaran pemerintah domestik regional bruto mengungkapkan bahwa adanya pengaruh positif serta tidak signifikan antara sektor pengeluaran pemerintah terhadap sektor produk domestik regional bruto yang menunjukkan bahwa pertumbuhan pada sektor pengeluaran positif dalam peningkatan produksi serta ukuran pasar domestik yang berjalan dengan kurang baik dan kurang maksimal. (Hakim & Kumalasari, 2020)

Pada sektor pengeluaran pemerintah terutama pada bidang pembelanjaan modal dinilai kurang efektif, sebagai akibatnya, tidak bisa menyampaikan

sumbangan yang signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Pada proses tersebut, dampak yang positif pada kenyataannya tidak bisa dimanfaatkan dan dipergunakan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Hal tersebut terjadi karena tingginya anggaran APBD setiap akhir tahun, sehingga hal tersebut berpengaruh serta mengakibatkan tidak signifikan antara sektor pengeluaran pemerintah dengan sektor produk domestik regional bruto.

h. Dampak Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sumber pemasukan utama daerah ialah aspek pendukung dalam memenuhi kewajiban daerah guna dapat membiayai pengeluaran saat ini serta bisa mendanai pembangunan wilayah. Pemasukan wilayah daerah juga berarti sesuatu perlengkapan yang bisa digunakan guna memasukkan uang sebesar-besarnya dalam kas wilayah, bermanfaat untuk mendukung penerapan pembangunan daerah dan dapat membiasakan serta tingkatan keadaan sosial ekonomi dalam pemakaian jasa tersebut.

Pemasukan awal daerah dapat berbentuk pajak wilayah, hasil usaha wilayah, zakat serta pengelolaan harta barang tertentu lainnya, serta pendapatan wilayah lain yang dianggap legal.

Kenaikan yang terjadi pada perkembangan ekonomi suatu wilayah mungkin pula akan menarik investor guna menanamkan modalnya di wilayah, sehingga penerimaan awal daerah khususnya dari pajak wilayah meningkat. Peningkatan pemasukan asli wilayah akan digunakan pemerintah daerah guna membagikan pelayanan publik mencukupi dan optimal, yang berakibat pada kenaikan belanja modal.

Dengan kenaikan belanja modal maka akan meningkatkan belanja guna pembelian barang dan jasa yang bersifat tetap dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan dapat juga meningkatkan aktivitas ekonomi. Meningkatnya kegiatan ekonomi, aliran pemasukan pemerintah melalui pemasukan daerah pula dapat meningkat.

Pemerintah juga berkewajiban menyediakan barang publik sebab swasta bersedia menyediakan barang yang bisa berguna untuk banyak orang. Perihal ini akan membentuk aktivitas pemerintah dari fasilitas sampai pengeluaran untuk aktivitas sosial, pada akhirnya bisa meningkatkan kegiatan ekonomi

warga. Dengan demikian, perihal ini pemerintah wilayah memungut pajak dan memungut daerah sehingga pendapatan awal daerah pula bertambah.

BAB VII

JENIS USAHA DI INDONESIA

A. PERUSAHAAN PERSEORANGAN

Ragam jenis usaha yang berikutnya adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh satu orang dan orang tersebut bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan perseorangan juga diartikan sebagai sebuah perusahaan yang didikan oleh seorang pengusaha atau wirausahawan itu sendiri. Kemudian arti lainnya dari Perusahaan perseorangan adalah suatu badan usaha yang dijalankan oleh individu yang seluruh modalnya dipegang atau ditanggung oleh satu orang dan semua berjalannya perusahaan ditanggung oleh orang tersebut. Perseorangan artinya sendiri dan perusahaan adalah suatu usaha yang dijalankan oleh seseorang untu menghasilkan laba/keuntungan/profit, jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan perseorangan merupakan suatu badan usaha yang dijalankan oleh satu orang untuk menghasilkan laba/keuntungan/profit yang setinggi-tingginya (Hansen, 2021).

Perusahaan perseorangan sebagai suatu badan artinya perusahaan ini juga sama seperti perusahaan lainnya yaitu mempunyai pemimpin dan mempunyai staff atau karyawan. Perusahaan perseorangan merupakan badan usaha yang paling sederhana karena kepemilikannya hanya satu orang saja dibandingkan dengan perusahaan lainnya misalnya PT dan CV yang kepemilikannya bisa dua orang ataulebih, satu orang dalam perusahaan perseorangan ini adalah yang menjalankan usaha itu sendiri yang bisa dibilang sebagai pengusaha. Akan tetapi perusahaan perseorangan juga memiliki karyawan juga staff lainnya sama seperti halnya dengan PT dan CV atau perusahaan yang lainnya, bedannya dalam perusahaan perseorangan ini karyawannya tidak sebanyak perusahaan lainnya mungkin karena faktor produksinya yang lebih sedikit dan mungkin ada beberapa faktor lainnya. Perusahaan perseorangan juga mempunyai kelebihan dan kekurangan yang akan dicantumkan dalam paragraph berikutnya akan tetapi disini akan disinggung sedikit mengenai kelebihan dan kekurangan dari perusahaan perseorangan secara sederhana. Yang pertama yaitu kelebihan dari perusahaan perseorangan adalah semua laba/keuntungan bisa dinikmati sendiri tanpa harus membagi dengan orang

lain berbeda dengan PT dan CV yang keuntungannya harus dibagi dengan penanam modal saham lainnya. Sedangkan untuk kelemahan dari perusahaan perseorangan ini adalah keuntungan yang didapatkan lebih sedikit karena faktor produksi yang juga sedikit tadi dan jika mengalami masalah ditanggung sendiri karena perusahaan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab satu orang yang mempunyai perusahaan tersebut (Sagoro, 2013)

Perusahaan perseorangan bisa dibilang sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian yang lainnya dari BUMD yaitu Persekutuan dan Perseroan Terbatas. Adapun kebaikan perusahaan perseorangan sebagai bentuk badan usaha antara lain:

1. Perusahaan perseorangan mudah didirikan dan mudah dibubarkan, dalam mendirikan sebuah perusahaan perseorangan tidak memerlukan perizinan yang rumit, hanya perlu menyiapkan izin gangguan dan izin usaha.
2. Keuntungan dari perusahaan sepenuhnya dimiliki oleh penguasa atau pemilik perusahaan tersebut.
3. Penguasa atau pemilik memiliki kepuasan dan kebanggaan karena dapat menjalankan perusahaan dengan sendiri.
4. Dalam pengelolaannya perusahaan perseorangan sangat sederhana
5. Perusahaan perseorangan tidak dikenakan pajak yang berganda
6. Pemimpin mendapatkan motivasi untuk menjalankan usaha yang tinggi.
7. Tidak hanya memiliki kelebihan, Perusahaan perseorangan juga memiliki kelemahan dan kekurangan antara lain sebagai berikut:
8. Tanggung jawab dari penguasa perusahaan tidak terbatas atau resiko kerugian tinggi, karena harta perusahaan itu sama dengan harta si penguasa tersebut.
9. Keterbatasan sumber daya modal, karena modal hanya terbatas dari satu orang saja.
10. Kemampuan dalam pengelolaan manajemen perusahaan terbatas.
11. Mendapatkan laba/keuntungan yang kecil, dikarenakan penguasa atau pemilik perusahaan biasanya hanya melakukan kegiatan produksi yang relatif kecil.
12. Pertumbuhan perusahaan perseorangan itu terbatas, artinya perusahaan ini akan mudah kehilangan kesempatan bisnis.
13. Kesenambungan kapasitas kerja para karyawan terbatas, artinya terkadang para karyawan hanya bekerja sekedar untuk mendapatkan keterampilan serta rahasia

teknis saja dari perusahaan tersebut dan tidak berkomitmen terhadap perusahaan tersebut.

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang saja, berbeda dengan perseroan terbatas yang harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Dalam operasionalnya perusahaan perseorangan sering melibatkan orang-orang, baik sebagai pekerja atau karyawan dalam perusahaan tersebut, sedangkan penguasa atau pemilik hanya satu. Pemilik atau penguasa bertanggung jawab dalam menanggung resiko dan mendapatkan keuntungan sendiri, sebaliknya para karyawan atau pekerja adalah oaring yang bekerja dibawah pemilik atau penguasa dengan menerima upah atau gaji.

Perusahaan perseorangan mempunyai karakteristik tersendiri yang membuat berbeda dengan perusahaan lainnya, antara lain: (Tinggi et al., 2022)

1. Lebih mudah didirikan dan dibubarkan karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit.
2. Bisa melibatkan harta pribadi karena perusahaan itu miliknya sendiri.
3. Tidak adanya pajak yang dibebankan kepada perusahaan, adanya yaitu pungutan dan retribusi.
4. Keuntungan sepenuhnya diiliki oleh pemilik atau penguasa sendiri.
5. Relatif sulit dalam mengatur manajemen perusahaan karena diatur sendiri.
6. Keuntungan yang didapat relatif karena faktor produksinya relatif kecil.
7. Jangka waktu di perusahaan perseorangan ini bisa seumur hidup tergantung si pemilik perusahaan tersebut.
8. Dapat dipindah tangankan ke orang lain sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Ciri- Ciri Perusahaan Perorangan

1. Perusahaan ini bertujuan untuk mencari keuntungan, tujuan dari mendirikannya sebuah perusahaan perseorangan adalah untuk memperoleh keuntungan/profit yang sebesar-besarnya.
2. Sama seperti perusahaan lainnya perusahaan perseorangan juga menggunakan modal dan tenaga kerja dalam menjalankan suatu usahanya, modal dan tenaga kerja merupakan unsur yang bersifat wajib dan tetap, sehingga memerlukan modal dan tenaga kerja supaya dapat melakukan kelangsungan suatu perusahaan perseorangan.

3. Berbagai aktivitas operasional perusahaan perseorangan dibawah pimpinan seorang pengusaha atau usahawan.

Perusahaan perseorangan dapat memberikan banyak manfaat baik dari pemilik, karyawan, juga bagi masyarakat. Kali ini terdapat jenis-jenis dan contoh-contoh perusahaan perseorangan di Indonesia. Yang pertama adalah jenis-jenis perusahaan perseorangan ada perusahaan perseorangan berlisensi dan perusahaan perseorangan tanpa izin. Perusahaan perseorangan berlisensi adalah perusahaan perseorangan yang telah memiliki izin untuk menjalankan usahannya dan dapat beroperasi. Dimana izin tersebut didapatkan dari pihak berwenang dengan memperhatikan syarat yang berlaku. Artinya jika sebuah perusahaan sudah berlisensi maka akan banyak sekali manfaat yang akan didapatkan dan juga perusahaan akan semakin aman dengan adanya lisensi dari pihak yang berwenang tersebut. Perusahaan yang sudah memiliki izin atau sudah berlisensi biasanya memiliki sertifikat pendaftaran bisnis, surat izin usaha perdagangan, izin tempat usaha, nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan lain sebagainya. Jenis yang kedua adalah perusahaan perseorangan tanpa izin yaitu perusahaan perseorangan yang tidak atau belum mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau belum berlisensi. Jika suatu perusahaan belum memiliki izin usaha maka akan banyak kemungkinan bahwa usaha tersebut akan mengalami kecemasan, akan tetapi sebagian orang beranggapan bahwa izin itu tidak terlalu penting banginya karena mereka hanya melakukan usaha yang kecil. Tetapi anggapan itu tidak benar karena perusahaan yang baik harus memiliki izin usaha dahulu. Misalnya saja para pedagang kaki lima yang tidak memiliki ijin usaha selalu mendapati razia dari satpol PP karena mereka belum memiliki izin usaha dan sering kali mereka mengganggu ketertipan umum. Berikut ini adalah contoh-contoh perusahaan perseorangan yang terdiri dari perusahaan perseorangan kecil-menengah-besar (*Hukum Perusahaan Oleh Handri Raharjo, S.H - Buku Di Google Play, n.d.*).

1. Perusahaan perseorangan Kecil Menengah

- a. Laundry: Usaha Laundry adalah usaha yang membutuhkan peralatan dan perlengkapan yang cukup banyak. Seperti mesin cuci dan setrika serta sabun dan pewangi. Dan dilakukan untuk menghasilkan keuntungan.
- b. Bengkel: Usaha bengkel yang dimaksud disini adalah usaha bengkel rumahan, yang sering dijumpai di rumah – rumah.

- c. Rumah Makan: Rumah makan yang sering dijumpai pada pinggir-pinggir jalan raya dan juga di daerah pelosok desa.
- d. Salon: bisa berupa salon kecantikan dan juga salon untuk laki-laki yang masih kecil dan belum dikenal luas oleh masyarakat.
- e. Persewaan alat-alat elektronik: ini juga sering kita jumpai di lingkungan sekitar seperti persewaan komputer dan laptop, persewaan kamera.
- f. Foto Copy: perusahaan atau usaha foto kopi juga sering kita jumpai disekitar kita karena banyak sekali dan itu juga termasuk dalam perusahaan perseorangan.
- g. Warnet: Kemudian warnet juga merupakan perusahaan perseorangan karena hanya dimiliki oleh satu orang dan kadang dilakukan dengan memanfaatkan rumah mereka
- h. Cuci motor dan mobil: usaha ini menyewakan jasa pencucian mobil dan motor dengan nominal 10-50 ribu.
- i. Toko Kelontong: Toko kelontong juga termasuk dalam perusahaan perseorangan karena biasanya hanya dimiliki oleh satu orang dan tidak mempunyai banyak karyawannya.

2. Perusahaan Perseorangan Besar.

- a. Perusahaan Blue Bird Group: jenis usaha taksi berarga pertama yang ada di Indonesia untuk mempermudah pelayanan taksi untuk masyarakat umum dan juga sebagai inovasi bagi usaha per taksian.
- b. Perusahaan Kopi Kenangan: Yang didirikan oleh 3 orang yaitu Edward Tirtanarta, James Prananto, dan Cynthia Chaerunnisa pada tahun 2011. Kopi ini dibuat dengan memadukan inovasi teknologi modern dengan kopi dan juga memanfaatkan ojek online dalam distribusinya.
- c. Perusahaan Mayora Indah: Awalnya perusahaan ini adalah usaha biskuit rumahan pada tahun 1948 yang kemudian menjadi kelompok usaha mayora pada tahun 1977. Produk yang paling terkenal adalah permen Kopiko.
- d. Perusahaan Susi Air: Dimiliki oleh ibu menteri perikanan yaitu Susi Pudjiastuti, beliau memiliki usaha penerbagnagan dan pesawat carter yang bernama Susi Air.
- e. Perusahaan Paragon atau Wardah: Perusahaan ini bergerak pada bidang kosmetik yang salah satu mereknya adalah Wardah.

B. PERSEKUTUAN

1. Pengertian

Persekutuan merupakan suatu perserikatan yang terdiri dari beberapa orang antara 2 orang atau lebih yang mendirikan sebuah usaha bersama untuk mencari keuntungan atau laba. salah satu diantara cirinya yaitu hukum dari persekutuan ini terbatas umurnya. Kelangsungan hidup dari persekutuan ini yaitu pada saat adanya sekutu baru masuk, pengunduran diri dari anggota sekutu atau meninggalnya sekutu lama, disolusi sukarela dari sekutu ataupun secara terpaksa maka ini bisa dikatakan berakhir dari kelangsungan hidup persekutuan. Ciri hukum lainnya yaitu persekutuan adalah agensi mutual atau disebut sebagai agensi yang saling menguntungkan. Setiap sekutu itu dianggap sebagai agen untuk seluruh kegiatan persekutuan dengan adanya kekuatan yang mengikat dengan sekutu lainnya melalui aktivitas yang dilakukan atas nama persekutuan.

Modul Akuntansi

(Rina Andriani, 2021) Persekutuan biasa disebut sebagai *partnership* yang berarti usaha bersama. Persekutuan adalah salah satu perusahaan yang dimana dalam pembentukan atau berdirinya ini dilakukan oleh dua orang atau lebih. Selain itu persekutuan juga bisa didirikan dari dua perusahaan yang digabung yang usahanya sudah ada sebelumnya.

Persekutuan (KUHP 1618) perjanjian yang dimana dua pemodal/orang ataupun lebih dari itu yang dimana mereka mengikatkan dirinya untuk memasukan sesuatu ke dalam sebuah persekutuan dan bertujuan untuk membagi sebuah keuntungan.

Untuk lebih jelasnya sebagai contoh Andy, Budi dan Toni membuat sebuah kesepakatan bahwa mereka akan menyewa sebuah game playstation. Untuk itu mereka bertiga sepakat untuk membayar iuran sebesar 50.000 ribu per orang. Setelah selesai menyewa playstation mereka pun pulang kerumahnya masing-masing. Berdasarkan contoh sebelumnya telah terjadi persekutuan, yang dimana telah terjadi kesepakatan diantara mereka dan mereka mencapai apa yang menjadi tujuan mereka yaitu ingin bermain playstation.

2. Ciri-Ciri Persekutuan

- a. Terdiri dari dua pemodal atau lebih pemodal

Dalam pembentukan persekutuan ini terdiri dari dua orang atau lebih pemodal. Dalam hal ini siapa saja bisa menjadi bagian dari persekutuan.

b. Mudah untuk di bentuk

Pada pembentukannya pembuatan persekutuan lebih mudah jika di bandingkan dengan perusahaan lainnya sehingga dalam cirinya ini persekutuan lebih mudah dibentuk.

c. Kelangsungan hidup dari persekutuan terbatas

Akhir dari perusahaan persekutuan adalah pada saat muncul sekutu baru, sekutu lama mengundurkan diri baik secara terpaksa ataupun tidak, sekutu lama meninggal. Yang dimana hal ini akan mengubah komposisi dari perusahaan.

d. Tanggung jawab dalam persekutuan tidak memiliki Batasan

Tanggung jawab yang di tanggung oleh sekutu adalah Bahwa pertanggung jawaban yang ditanggung oleh sekutu tidak hanya dari apa yang telah disetorkan, akan tetapi masuk kedalam kekayaan pribadi.

e. Pembagian keuntungan tergantung kesepakatan

Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan ini maksudnya pada saat pembentukan perusahaan persekutuan harus memuat perjanjian atau kesepakatan mengenai pembagiaankeuntungan.

3. Unsur Persekutuan

Berdasarkan (Eddy Winarso, 2020) dalam membentuk sebuah persekutuan adalah harus memperhatikan unsur pokok persekutuan yaitu :

- a. Gabungan dari Perusahaan dalam membentuk sebuah persekutuan ataupun asosiasi diantara sekutu, dalam pembentukanya harus berdasarkan perjanjian persekutuan.
- b. Kepemilikan dan pengelolaanya dilakukan secara bersama, hal ini menyangkut ; persekutuan dimiliki, dikelola dan menanggung resiko secara bersama-sama, pembagian laba dibagi dengan sama besar.
- c. Tujuan untuk mendapatkan keuntungan yakni persekutuan yang didirikan harus berdasarkan perjanjian persekutuan.

4. Kelebihan Dan Kekurangan Persekutuan

- a. Kelebihan

- 1) Dalam pembentukannya persekutuan lebih mudah.
- 2) Tempat penyatuan pengetahuan dan keterampilan.
- 3) Adanya modal besar yang berasal dari masing-masing anggota ini membuat persekutuan ini dapat memperbanyak dari segi usaha dan juga kemampuan dari finansial yang dimiliki perusahaan ini meningkat.
- 4) Memiliki kemampuan dalam mengajak dan membuat para karyawan untuk bertahan.
- 5) Memiliki keuntungan dalam segi pajak.

b. Kekurangan

- 1) Adanya tanggung jawab yang tidak terbatas, yang dimana jika perusahaan memiliki utang yang besar ini akan menarik harta pribadi dari setiap anggota.
- 2) Memiliki tenggang waktu yang relatif terbatas.
- 3) Sering terjadi perselisihan antara partner satu dengan yang lainnya.
- 4) Dalam pembubarannya terdapat halangan yang dimana ini karena adanya halangan yang dimana adanya kointmen untuk berpartner.

5. Penggolongan Persekutuan

Dalam persekutuan terdapat beberapa golongan yaitu :

a. Persekutuan Perdata

Adanya Persekutuan Perdata telah di atur dalam Pasal 16 -18 KUHPerdata “ Persekutuan perdata merupakan suatu dari jaminan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dan juga memasukan sesuatu kedalam persekutuan, dengan maksud memperoleh kemanfaatan dan membagi keuntungan berdasarkan yang terjadi dalam persekutuan.

Unsur-unsur Persekutuan Perdata

Berdasarkan pengertian dari pasal yang menyebutkan tentang persekutuan terdapat beberapa unsur yaitu :

- 1) Adanya persekutuan terbentuk berdasarkan perjanjian.
- 2) Inbreng atau adanya sesuatu yang harus dimasukan kedalam persekutuan.
- 3) Bertujuan untuk membagi keuntungan.

Ciri-Ciri Persekutuan Perdata

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa persekutuan perdata memiliki ciri-ciri yaitu :

- 1) Persekutuan perdata didirikan berdasarkan perjanjian oleh dua orang atau lebih.
- 2) Adanya sesuatu yang dimasukkan kedalam persekutuan.
- 3) Memiliki tujuan untuk membagi keuntungan.

b. Persekutuan Firma

Berdasarkan pasal 16 KUH Dagang dapat disimpulkan bahwa persekutuan firma adalah sebuah perusahaan yang dijalankan secara bersama yang dimana mereka bergerak dibawah nama yang sama. Mereka disini adalah orang-orang yang mendirikan sebuah persekutuan.

Menurut (Dr. Nyulistiowati Suryanti) Unsur dalam firma adalah :

- 1) Perusahaan merupakan persekutuan perdata.
- 2) Menjalankan perusahaan.
- 3) Adanya nama bersama.
- 4) Setiap sekutu firma adalah pengurus, yang dimana jika sekutu tersebut tidak dilarang untuk mengurus ataupun di pecat.
- 5) Sekutu bertanggung jawab secara renteng.

Jenis Persekutuan Firma

Jenis persekutuan firma berdasarkan buku (Drebin) yang berjudul “*Advanced Accounting*” ada 3 jenis firma yaitu :

- 1) Persekutuan Dagang.
- 2) Persekutuan Umum dan Terbatas.
- 3) Perusahaan Saham Patungan.

Sifat Persekutuan Firma

Berdasarkan dari buku Rina Adriana (Akuntansi Lanjutan 1) persekutuan firma ini memiliki sifat sebagai berikut :

- 1) Keagenan atau perwakilan Bersama

Setiap sekutu dari persekutuan firma adalah seorang agen persekutuan firma atau wakil dari persekutuan firma, hal ini untuk mencapai tujuan dari usahanya. Agen atau wakil sekutu ini dalam bertindak harus sesuai dengan kewenangan-kewenangan atau tidak melewati batas-batas dari kewenangan tersebut. Tindakan dari seorang sekutu harus sesuai dengan terikatnya dengan persekutuan.

2) Umur Terbatas

Pada persekutuan firma terdapat sebuah perjanjian dalam berhubungan dengan yang lainnya, oleh karena itu yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian atau berubahnya setiap hubungan tersebut mengakibatkan persekutuan firma ini berakhir.

3) Tanggung Tak Terbatas

Dalam persekutuan firma tanggung jawab atas keuangan tidak hanya sebatas modal yang disetorkan kepada persekutuan, melainkan sampai dengan harta pribadi yang dimiliki oleh sekutu tersebut.

4) Pemilikan Kepentingan

Kepemilikan harta benda yang diinvestasikan ke dalam persekutuan firma ini menjadikan harta tersebut tidak dimiliki secara terpisah dari setiap masing-masing sekutu, melainkan menjadi milik asosiasi perorangan dalam bentuk persekutuan firma. Pada saat menginvestasikan harta benda ke dalam persekutuan firma akan memperoleh kepentingan yaitu sebagai pemilik sekutu.

5) Partisipasi dalam persekutuan firma

Pada partisipasi ini masing-masing dari sekutu ikut serta dan memperoleh pembagian laba. Pada partisipasi setiap sekutu tentu ada persetujuan terlebih dahulu dalam pembagian laba dalam mendirikan persekutuan firma. Pembagian laba firma ini sebagai bentuk imbalan dari jasa-jasa yang diberikan terhadap persekutuan firma.

c. Persekutuan komanditer

(Eddy Winarso, 2020) mengemukakan bahwa persekutuan komanditer adalah perseroan yang aktif yang dimana aktifnya perseroan ini adalah untuk menjalankan perusahaan yang dimana adanya perusahaan ini dapat berdiri oleh satu orang sekutu atau lebih yang dalam hal ini secara langsung tanggung menanggung. Pada perusahaan ini juga ada satu pihak atau lebih yang dimana pihak ini akan bertindak sebagai pelepas uang kepada pihak yang lainnya. Anggota yang ada dalam persekutuan komanditer ini menyangkut anggota aktif dan anggota pasif.

1) Anggota Aktif

Anggota/sekutu aktif adalah anggota/sekutu yang dimana anggota ini mempunyai tanggung jawab menyeluruh terhadap perusahaan.

2) Anggota Pasif

Anggota/sekutu pasif adalah anggota/sekutu yang tidak memiliki tanggung jawab secara menyeluruh atau terbatas, akan tetapi anggota ini memiliki tanggung jawab pada modal yang di sediakan.

Unsus-Unsur Persekutuan Komanditer

- 1) Merupakan sebuah badan usaha dari persekutuan firma.
- 2) Adanya sekutu aktif dan pasif minimal satu.

Jenis-Jenis Persekutuan Komanditer

Menurut (Abhimantara, 2019) ada beberapa bentuk/jenis dari persekutuan komanditer

- 1) Persekutuan komanditer yang dimana persekutuan ini belum menyatakan bahwa dirinya sebagai persekutuan komanditer yang dimana persekutuan ini masih belum menyatakan kepada pihak ketiga. Dirinya masih merupakan persekutuan firma akan tetapi persekutuannya sudah menjadi persekutuan komanditer. Persekutuan ini disebut sebagai persekutuan diam-diam.
- 2) Berbeda dengan sebelumnya persekutuan kali ini telah menyatakan bahwa dirinya telah menyatakan kepada pihak ketiga bahwa dirinya adalah persekutuan komanditer. Persekutuan ini adalah persekutuan komanditer terang-terangan.
- 3) Persekutuan yang ketiga ini yaitu persekutuan ini secara terang-terangan menyatakan bahwa modal-modal yang dimilikinya adalah modal yang terdiri dari saham. Persekutuan komanditer ini adalah persekutuan komanditer dengan saham.

C. BADAN USAHA MILIK NEGARA

1. Pengertian

Salah satu badan usaha milik negara yang menjalankan peran sebagai salah satu pelaku ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN. Berdasarkan pasal 1 Pasal 19 UU 2003 yaitu mengenai BUMN modal seluruhnya ataupun modalnya pada sebagian besar dimiliki oleh negara ataupun dapat juga dengan penyertaan dari asset negara perseorangan. Adapun kegiatan utama yaitu manajemen, sektor produksi Pada pelayanan publik yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

BUMN atau Badan Usaha Milik Negara juga dapat diartikan sebagai suatu badan usaha milik negara yang dikelola oleh sektor pemerintah. Dengan adanya BUMN sendiri yang merupakan salah satu konsekuensi dari sebuah konsep negara kesejahteraan yang dianut oleh negara Indonesia. Tujuan negara kesejahteraan yaitu untuk melibatkan sektor pemerintah pada semua bidang kehidupan masyarakat yang dapat meliputi pada bidang ekonomi masyarakat (Sumiyati, 2013).

BUMN sendiri memiliki peranan penting dalam sektor ekonomi di Indonesia. Dalam sistem ekonomi sendiri BUMN sendiri memiliki peran sebagai produksi barang maupun jasa/pelayanan yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat seutuhnya. Perusahaan milik negara sendiri sebenarnya tidak seutuhnya milik dan dikendalikan oleh negara. Terdapat jenis BUMN di Indonesia sendiri dapat dikendalikan oleh sektor swasta dengan mempertimbangkan investasi dalam pengembangan bisnisnya. Walaupun, dapat dikalahkan pada sektor swasta sebagian besar modal masih dimiliki oleh negara. Pada pengelolaan dan coordinating BUMN sendiri tetap menjadi tanggung jawab pemerintah bersama dengan Kementerian pemerintah yaitu Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang dipimpin oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Terbentuknya BUMN oleh Undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah negara kemudian disetujui oleh DPR yang selanjutnya akan menjadi produk politik. Oleh sebab itu politik sendiri dapat dikatakan sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari BUMN. BUMN terbentuk dari kerja sama pada sektor ekonomi di Indonesia yang melibatkan produksi sebagai barang maupun jasanya sehingga terwujudnya kesejahteraan pada rakyat. Di berbagai sektor perusahaan BUMN juga hadir seperti sektor pertanian, kehutanan, keuangan, manufaktur dan lainnya.

2. Fungsi Dan Tujuan BUMN

Dengan kehadiran BUMN yang akan memudahkan masyarakat di Indonesia dalam mendapatkan barang ataupun jasa dalam bentuk pelayanan yang tidak disediakan oleh perusahaan *private*. Hal tersebut didasarkan karena, perusahaan di sektor swasta tidak semuanya mampu memenuhi kebutuhan di suatu masyarakat. Dengan adanya badan usaha BUMN ini maka jelas akan memudahkan pemerintah dalam penataan sistem perekonomian yang ada.

BUMN juga sebagai salah satu badan usaha yang mengelola berbagai cabang pada produksi sumber daya alam pada masyarakat. pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. Karena BUMN ini merupakan sebuah badan usaha yang kepemilikannya berada di tangan pemerintah, maka BUMN dalam memenuhi kebutuhan masyarakat juga harus maksimal atau dengan kata lain harus dapat memenuhi kebutuhan dalam skala besar mencakup sebagian besar masyarakat Indonesia. BUMN berfungsi sebagai sektor yang ada untuk memenuhi kebutuhan yang mana kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi oleh perusahaan swasta. Perusahaan swasta dalam menjalankan bisnisnya tentu akan mencari peluang yang paling besar dengan modal yang paling minim. Maka disini BUMN berperan mengambil sektor yang belum terambil oleh perusahaan swasta karena minimnya modal ataupun kurangnya teknologi yang ada. Adanya BUMN juga akan membuka peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu permasalahan penting yang ada di Indonesia, maka adanya BUMN sebagai perusahaan milik negara yang membutuhkan banyak tenaga kerja diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada. Selanjutnya, dengan adanya BUMN perlahan akan membantu mendorong aktivitas masyarakat terhadap berbagai lapangan pekerjaan.

Sebagai badan usaha yang memiliki peran penting bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia, tentu saja BUMN berdiri serta beroperasi dengan senantiasa memegang tujuan-tujuan penting. Tujuan berdirinya BUMN juga tidak dapat terlepas dari landasan filosofis berdirinya BUMN yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 yang maknanya seluruh sumber daya yang ada dan dikuasai oleh negara harus dimanfaatkan untuk memenuhi hajat orang banyak. *Dari ayat tersebut jelas memaparkan bahwa segala sumber kekayaan negara yang dikuasai oleh negara harus senantiasa digunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.*

Selain itu, BUMN juga memiliki beberapa tujuan dasar yang sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003 adalah sebagai berikut.

- a. BUMN hadir untuk turut memberikan subsidi atau sumbangan untuk negara.
- b. BUMN bertujuan guna memperoleh keuntungan.
- c. Menyediakan barang dan jasa guna memenuhi hajat banyak orang.

- d. BUMN menjadi pelopor dalam usaha yang belum dapat terpenuhi oleh perusahaan swasta.
 - e. BUMN turut aktif dalam mendampingi sektor perekonomian kelas menengah ke bawah.
3. Ciri-Ciri BUMN
- a. Dalam permodalan BUMN memiliki modal seluruh atau sebagian berasal dari negara.
 - b. BUMN selalu melayani untuk kepentingan hajat orang banyak, selain untuk memperoleh keuntungan.
 - c. Pengawasan terhadap BUMN akan dilakukan oleh pemerintah.
 - d. Pemerintah memegang kuasa penuh dalam pengelolaan dan pelaksanaan BUMN.
 - e. Pemerintah juga berwenang dalam mengambil kebijakan BUMN.
 - f. Mengelola dana dari pihak lain yaitu bank dan non bank.

Ciri BUMN Atas Dasar Kepemilikan

- a. Pemerintah memiliki kuasa atas BUMN.
- b. Pengawasan terhadap BUMN akan ditangani langsung oleh pemerintah.
- c. Pemerintah memegang kuasa atas pengelolaan dan pelaksanaan BUMN.
- d. Pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
- e. Pemerintah menanggung semua risiko yang terjadi pada BUMN.

Ciri BUMN Atas Dasar Fungsinya

- a. BUMN berperan untuk meningkatkan devisa negara.
- b. Sebagai antisipasi supaya usaha swasta tidak menguasai pasar.
- c. BUMN turut hadir guna memenuhi hajat masyarakat.
- d. Sebagai salah satu stabilator dalam negara.

Ciri BUMN Atas Dasar Permodalan

- a. BUMN mendapatkan modal dari pemerintah
- b. Obligasi menjadi opsi pinjaman dari pemerintah.
- c. Pinjaman luar negeri.

d. Apabila memperoleh keuntungan, maka keuntungan sepenuhnya untuk pemenuhan hajat orang banyak.

4. Peran BUMN Dalam Perekonomian

BUMN yang dipercaya sebagai pelaku utama pada sektor ekonomi sosial serta memiliki peran pada pengelolaan sumber daya potensial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Indonesia sendiri yang merupakan negara yang beruntung karena memiliki sumber daya yang melimpah. Seharusnya, sumber daya yang dimiliki negara tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk masyarakat itu sendiri bukan dikuasai oleh perusahaan swasta. Sehingga kekayaan alam yang dimiliki oleh negara tidak sepenuhnya dinikmati oleh pihak perusahaan private namun masyarakat Indonesia juga mendapatkan manfaatnya. Perusahaan yang praktiknya sangat mengutamakan pada kepentingan masyarakat yaitu perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan. Seperti contohnya bank yang termasuk dalam BUMN antara lain PT BNI (Persero) Tbk, PT BRI (Persero) Tbk, PT BTN (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memiliki tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat disektor keuangan.

Dengan terbentuknya BUMN yang dapat menjadi instrument pemerintah dalam mengatur beberapa kebijakan salah satunya pada bidang ekonomi. Kehadiran BUMN sendiri diharapkan dapat menjadi solusi dalam pemecahan masalah negara. Kerja sama bersama BUMN maka akan menjadikan solusi pada masalah ekonomi yang sedang terjadi sehingga dapat mengimplementasikan langkah-langkah yang dapat merusak kinerja ekonomi negara. Oleh karena itu, dengan adanya BUMN sendiri yang memiliki peran sebagai stabilisator pada ekonomi negara. Keberadaan BUMN yang merupakan pusat perekonomian negara dengan melibatkan potensi yang ada sehingga dapat mendorong sektor swasta berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, BUMN juga dapat menjadi sumber pada penerimaan negara dengan menerapkan bebas pajak.

BUMN jelas memiliki peran besar dalam perekonomian masyarakat Indonesia dan sebagai sarana dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Namun, pada kenyataan di lapangan ternyata masih banyak ditemukan kurang efektifnya kinerja dari BUMN, hal ini dapat terlihat dari keuntungan yang dihasilkan masih rendah dibandingkan dengan modal yang digunakan. Banyak kendala

yang mungkin dihadapi oleh BUMN yang salah satunya adalah belum mampunya BUMN untuk menyediakan produk barang atau jasa dengan kualitas tinggi namun dengan modal yang bisa dibbilang minim, adanya keterbatasan sumber daya alam, dan belum mampunya badan usaha milik negara dalam bersaing di ranah global. Pada sisi lain, perekonomian global semakin berkembang dnegan pesat seiring dnegan kemajuan dan perkembangan teknologi yang tinggi.

Dengan demikian, sangat diperlukan upaya khusus dalam penanganan kendala yang dihadapi oleh BUMN dan untuk terus memajukan kinerja dari BUMN guna memajukan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Indonesia. Salah satu alternatifnya yaitu BUMN harus mampu mengembangkan profesionalisme kerja dan meningkatkan kinerja serta kualitas sumber dayayang ada. Cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan terus membenahi pengelolaan dan pengawasan yang ada pada perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola yang telah ditetapkan. (*good corporate governance*).

D. PERUSAHAAN DAERAH

Prinsip pemerintahan telah ditetapkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa wilayah yang telah dibentuk harus bisa terurus dan teratur dengan sebaik-baiknya (Surya Pradhana, 2019). Pemerintah diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahannya melalui otonomi daerah. Otonomi daerah adalah penyerahan kewenangan pemerintah pusat pada pemerintah daerah dalam mengoordinir sistem pemerintahan suatu daerah. Dengankata lain, daerah mendapat wewenang dalam mengatur urusan daerahnya masing- masing selain yang menjadi urusan pusat yang di mana telah diatur dalam Undang-Undang. Penyelenggaraan pemerintah dalam prinsip desentralisasi ini memberikan kesempatan pada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi ekonomi. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memerlukan sumber keuangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membangunusaha sendiri dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Kegiatan ekonomi tersebut dikenal dengan nama perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah. Badan Usaha Milik Daerah memiliki peraturan bahwa badan usaha yang seluruh atau sebahagian kepemilikannya didirikan, dikelola dan diawasi oleh pemerintah

daerah untuk membantu mendorong perekonomian daerah (Kusumo, 2016). BUMD ini sebagai wujud pasal 3 UUD 1945 terkait strategi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberadaan BUMD ini mempunyai peran strategis dan signifikan untuk membangun ekonomi suatu daerah. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat baik seluruh atau sebagian. UU No. 5 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah membagi Badan Usaha Milik Daerah menjadi dua, yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Perusahaan Umum Daerah merupakan usaha yang tidak terbagi atas saham dan modalnya hanya dimiliki oleh satu daerah. Perusahaan Perseroan Daerah merupakan badan usaha yang mana modalnya terbagi atas saham baik seluruhnya atau minimal 51% saham tersebut dimiliki oleh satu daerah dan berbentuk PT (*Situs Resmi BPKP 2022*, n.d.). BPD, PDAM, perusahaan angkutan kota (bus kota), PDRPH, bank daerah, seperti Bank Jatim, Bank Jateng, dan sebagainya merupakan contoh BUMD. BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) memiliki visi untuk mengedepankan fungsi sosialnya daripada berorientasi pada profit. dengan mengedepankan fungsi sosial tersebut, berdampak pada berkurangnya keuntungan. akibatnya, pemberian kontribusi untuk APBD terbilang minim. Berbeda dengan BUMD yang berbentuk Perseroan, yang di manaperseroan ini lebih mengutamakan keuntungan. akibatnya, sumbangan untuk APBD lebih tinggi. Sehingga, BUMD berbentuk perseroan ini lebih berkontribusi dalam menyumbang APBD daerah (Bako, 2016).

Terdapat beberapa fungsi dan peranan BUMD dalam kegiatan pembangunan ekonomi, yaitu peningkatan proses produksi, memperluas kesempatan kerja, peningkatan pendapatan daerah yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan ekonomi daerah khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Pengelolaan BUMD dari tahun ke tahun perlu dievaluasi dan diperbaiki menjadi kekuatan ekonomi. Pendirian BUMD ini juga didasarkan pada kelayakan usaha dan sesuai kebutuhan daerah tersebut.

Ciri-ciri dari perusahaan daerah dan/atau BUMD, diantaranya yaitu BUMD ini tentunya berdiri dan diawasi oleh pemerintah daerah, pemegang saham merupakan pemerintah, dikuasai absolut oleh pemerintah karena pemerintah sebagai pemegang hak kekayaan. BUMD ini juga tidak hanya untuk mencari laba karena harus dipergunakan untuk seluruh masyarakat atau orientasi sosial. Badan

Usaha Milik Daerah ini sangat berperan dalam menyumbang atau sebagai sumber pendapatan daerah dan negara sehingga keberhasilan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional dapat berpeluang besar.

Dengan berdirinya BUMD, kegiatan ekonomi akan merata dan seimbang karena dilakukan untuk melayani umum yang di mana modal tersebut dari kekayaan negara. Apabila badan usaha tersebut mengalami kerugian, maka jumlah kerugian akan ditanggung oleh pemerintah. Dengan adanya banyak fasilitas dari pemerintah tersebut, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah terkadang kurang efisien karena banyaknya fasilitas menjadikan pegawai kurang disiplin. Akibatnya, badan usaha tersebut sering mengalami kerugian.

Pemerintah daerah mendirikan perusahaan daerah dan/atau BUMD agar dapat meraih PAD. Dengan begitu, pemerintah akan mendapatkan pemasukan bukan hanya dari pajak, tetapi Pendapatan Asli Daerah juga. Selain itu, dengan adanya BUMD dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian nasional.

Pasal 332 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa sumber modal terdiri dari modal daerah, hibah dan bahkan pinjaman serta sumber lainnya seperti revaluasi, agio saham dan kapitalisasi cadangan (Ansari, 2020). Pernyataan modal daerah tersebut diatur dalam Peraturan Daerah untuk dapat dilakukan pendirian BUMD maupun penambahan modal. Pernyataan modal daerah tidak hanya berwujud uang tetapi juga dengan barang milik daerah. Barang



tersebut juga dinyatakan riil

sebesar pada saat barang tersebut akan disertakan modal. Apabila dilakukan pembubaran perusahaan umum daerah, maka pembubaran tersebut juga diatur dalam Peraturan Daerah yang di mana kekayaan tersebut dikembalikan kepada daerah.

Sumber : BPS

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah ini sangat penting dalam meningkatkan perekonomian. Data tersebut menyajikan bahwa jumlah BUMD menurut kepemilikan saham pada tahun 2020 sebesar 132 pada BUMD tingkat provinsi dan 716 pada BUMD tingkat kabupaten atau kota.

Tabel B.2
Table Nilai Aset, Ekuitas dan Laba BUMD menurut Kategori Lapangan Usaha, 2020** (Juta Rupiah)
Asset Value, Equity and Net Profit of ROEs by Industry Category, 2020** (Million Rupiah)

No.	Lapangan Usaha / Industry	Total Aset Asset	Ekuitas Equity	Lab Bersih Net Profit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	1 219 314	892 586	45 114
B	Pertambangan dan Penggalian <i>Mining and Quarrying</i>	4 859 706	3 871 612	784 434
C	Industri Pengolahan <i>Manufacturing</i>	2 837 586	1 738 729	- 335 878
D	Pengadaan Listrik dan Gas <i>Electricity and Gas Supply</i>	1 965 539	1 235 211	37 758
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	38 642 674	32 823 731	1 308 747
F	Konstruksi / <i>Construction</i>	6 219 004	828 941	15 326
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	45 937 378	26 671 533	2 500 510
H	Transportasi dan Pergudangan <i>Transportation and Storage</i>	4 796 448	4 482 768	101 282
I, J	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum; Informasi dan Komunikasi <i>Accommodation and Food Service Activities; Information and Communication</i>	1 603 066	1 498 798	11 607
K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi <i>Financial and Insurance Activities</i>	810 824 692	111 204 422	11 336 306
L	Real Estat / <i>Real Estate Activities</i>	20 268 666	13 172 214	131 430
M, N	Jasa Perusahaan / <i>Business Services</i>	793 197	657 712	- 16 082
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial <i>Human Health and Social Work Activities</i>	694 592	596 870	8 646
R, S	Jasa Lainnya / <i>Other Service Activities</i>	5 691 290	3 004 818	220 139
Jumlah / Total		946 353 153	202 679 947	16 149 340

** Angka Sangat Sementara / *Very Preliminary Figures*

Dari data tersebut, diketahui bahwa dominasi dari indikator aset, ekuitas dan laba bersih terbesar berasal dari keuangan dan asuransi, di mana memiliki aset senilai 810,8 triliun rupiah, ekuitas senilai 111,2 triliun dan laba bersih sebesar 11,3 triliun. hal tersebut menyatakan bahwa kontribusi keuangan terbesar dari badan Usaha Milik Daerah tahun 2020 terletak pada sector keuangan dan asuransi.

Nilai ROA paling tinggi berada pada sektor pertambangan dan pertambangan di mana pada tahun 2020 tersebut mencapai 21,36%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan BUMD tersebut mampu mengatur keuangan atau aset dengan baik yang berdampak pada perolehan laba. sebaliknya sector terendah dari nilai *Return on Asset* (ROA) ini terdapat pada industry pengolahan sebesar -11,84%. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut karena wabah pandemi Covid-19 yang pada akhirnya dapat merosotkan besaran perolehan industri pengolahan. akibat dari hal tersebut, perusahaan mengalami kerugian.

Sumber : BPS

Tabel B.5
Table B.5
Return on Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA) BUMD menurut Lapangan Usaha, 2018 – 2020 (persen)
Return on Equity (ROE) and Return on Asset (ROA) of Regional-Owned Enterprises by Industry, 2018 – 2020 (percent)

Lapangan Usaha Industry	Return on Equity			Return on Asset		
	2018 ¹	2019 ²	2020 ³	2018 ¹	2019 ²	2020 ³
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	-4,76	2,39	5,05	-3,46	1,73	3,70
B Pertambangan dan Penggalian <i>Mining and Quarrying</i>	14,70	63,59	68,44	11,42	25,88	21,36
C Industri Pengolahan <i>Manufacturing</i>	5,75	0,86	-19,32	3,32	0,62	-11,84
D Pengadaan Listrik dan Gas <i>Electricity and Gas Supply</i>	13,76	-0,88	3,06	9,14	-0,60	1,92
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	4,30	4,35	3,99	3,53	3,69	3,39
F Konstruksi / Construction	0,38	-13,60	1,85	0,33	-1,79	0,25
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	6,51	2,50	9,38	5,07	2,04	5,44
H Transportasi dan Pergudangan <i>Transportation and Storage</i>	1,09	1,42	2,26	0,97	1,32	2,11
I,J Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman; Informasi dan Komunikasi <i>Accommodation and Food Service Activities; Information and Communication</i>	13,75	3,84	0,77	13,29	3,60	0,72
K Aktivitas Keuangan dan Asuransi <i>Financial and Insurance Activities</i>	11,39	10,67	10,19	1,63	1,48	1,40
L Real Estat / Real Estate Activities	2,92	3,14	1,00	1,97	2,09	0,65
M,N Jasa Perusahaan / Business Services	-9,93	-5,29	-2,45	-7,12	-4,36	-2,03
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial <i>Human Health and Social Work Activities</i>	-11,73	-2,53	1,45	-10,58	-2,16	1,24
R,S Jasa Lainnya / Other Service Activities	10,35	8,05	7,33	5,19	4,34	3,87
Jumlah / Total	8,92	25,13	24,21	1,82	7,22	5,60

¹ Angka diperbaiki / Revised Figures
² Angka Sementara / Preliminary Figures
³ Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures

E. KOPERASI

1. Konsep Koperasi

Koperasi yaitu badan usaha dimana menganut prinsip bagi hasil yang biasa dikenal dengan sisa hasil usaha. Dalam koperasi terdapat anggota dimana setiap anggota harus menyetorkan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Di Indonesia koperasi juga dikenal sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, Koperasi memiliki beberapa konsep diantaranya yaitu : yang pertama konsep barat, selanjutnya konsep sosialis, serta konsep negara berkembang. (Sattar, 2018)

a. Konsep Koperasi barat

Konsep yang pertamanya ini berarti koperasi yaitu suatu organisasi yang pemiliknya swasta, dimana pembentukannya bersifat sukarela dari individu berkepentingan sama yang maksudnya mendapat keuntungan untuk anggota dan koperasi. Atas dasar kepentingan yang sama ini maka dapat dibentuk suatu badan usaha koperasi. Namun, hal ini juga berarti negative, karena dengan atas dasar kepentingan Bersama ini maka dapat dianggap bahwa koperasi dibentuk atas dasar egoisme suatu kelompok.

b. Konsep Koperasi Sosialis

Hal ini berarti koperasi merupakan suatu badan usaha yang direncanakan serta dikendalikan oleh pemerintah dengan tujuan penunjang perencanaan nasional. karena koperasi menjadi badan yang menunjang perencanaan nasional, maka koperasi juga mempengaruhi kebijakan public. Tak hanya itu, koperasipun menjadi badan pengawas dan pendidikan. Dalam konsep sosialis ini, koperasi lebih ke arah tercapainya cita-cita sosialis komunis.

c. Konsep Koperasi Negara Berkembang

Suatu perpaduan kedua konsep yang telah dibahas. Dimana konsep ini juga memiliki keunikan yaitu adanya campur tangan pemerintah dalam pelaksanaannya. Di negara berkembang, perkembangan koperasi harus disesuaikan dengan perkembangan negara tersebut. Dimana, para anggota secara sukarela dapat berperan aktif. Dalam konsep ini campur tangan dari pemerintahpun sangat dibutuhkan demi perkembangan koperasi itu sendiri.

2. Sejarah Koperasi Di Indonesia

Di Indonesia koperasi telah berdiri sejak tahun 1895. Dimana pada awalnya hanya didirikan suatu Lembaga simpan pinjam yang diperuntukkan bagi para

pegawai negeri asli Indonesia atau dikenal sebagai pribumi. Tujuan dari didirikannya bank simpan pinjam ini yaitu membantu para pribumi untuk lepas dari masalah keuangan di masa itu. Tak lama dari pendirian bank simpan pinjam tersebut, ada orang belanda yang mendirikan suatu Lembaga keuangan yang ditujukan untuk para petani. Dimana Lembaga ini disediakan kredit untuk para petani dengan konsep koperasi. Lembaga keuangan ini berdiri di Purwokerto yang dikenal sebagai nama Bank Simpan Pinjam dan kredit Pertanian Purwokerto. Dimana awalnya atau pada tahun 1895, koperasi ini tidak terkenal di masyarakat Indonesia, maka tahun 1915 pemerintah Indonesia membuat suatu perundang-undangan mengenai koperasi agar rakyat secara jelas mengetahui bentuk dari koperasi ini. Seiring dengan perkembangannya, tanggal 12 Juli 1947 sudah terlaksana kongres seJawa yang membahas mengenai koperasi. Kongres ini menghasilkan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia oleh karena itu pada tanggal 12 Juli kita akan memperingati hari Koperasi. (Sattar, 2018). Pemerintah juga membentuk Peraturan serta Undang-Undang mengenai Koperasi, seperti bentuk usaha koperasi. Dengan adanya peraturan pemerintah serta Undang-Undang mengenai Koperasi ini, maka dapat diketahui bagaimana badan usaha koperasi itu dan bedanya terhadap badan usaha lain.

3. Pengertian Koperasi

Koperasi yaitu badan usaha dimana anggotanya individu ataupun badan hukum, dimana anggota ini terdiri dari setiap individu yang dengan sukarela berkenan menjadi anggota, serta badan hukum koperasi gabung menjadi anggota dan mempunyai ruang lingkup luas. (Sagoro, 2013). Koperasi menjadi salah satu badan usaha yang sudah lama berdiri di Indonesia. Keberadaannya pun sering dijumpai di lingkungan masyarakat. Koperasi hampir sama dengan Lembaga keuangan lainnya, namun koperasi ini memiliki keunikan tersendiri, dimana koperasi memiliki anggota serta memiliki simpanan-simpanan dari anggota. Para anggota secara sukarela menjadi anggota aktif dan menyetorkan simpanan pokok, simpanan wajib serta simpanan sukarela. Koperasi didirikan demi kepentingan rakyat serta untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi masyarakat. (Sugiarto, 2021). Koperasi juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, namun bukan hanya laba yang

menjadi focus tujuan pendirian koperasi. Dalam pelaksanaannya, koperasi ditujukan untuk mensejahterakan anggotanya. Dimana pembentukan koperasi ini juga tidak berdasarkan modal namun kumpulan orang. (Sari, 2019). Dalam perkembangannya, koperasi juga harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi yang terjadi. Apabila dilihat dari istilah, nama koperasi ini dari bahasa Latin yaitu "*coopere*" atau jika pada bahasa Inggris kita kenal dengan sebutan "*cooperation*". Dimana kata tersebut berarti kerja sama, maka dari itu bisa dilihat dari arti kata itu sendiri bahwa koperasi merupakan suatu badan hukum atas dasar kerja sama antar anggota yang memiliki kepentingan yang sama. Dalam pengertian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam koperasi terdapat 5 (lima) hal, yaitu :

a. Badan usaha

Seperti yang sudah dijelaskan serta dibahas pada materi sebelumnya, bahwa koperasi termasuk dalam badan usaha. Dalam praktiknya, koperasi sama seperti badan usaha lainnya yang menginginkan laba. Dimana laba sangat dibutuhkan oleh suatu badan usaha, apabila suatu badan usaha memiliki atau memperoleh laba yang tinggi maka badan usaha tersebut pelaksanaan usahanya berjalan lancar. Dengan laba tinggi maka dapat menarik para investor dan kreditur. Dalam koperasi, memang laba bukan focus utama, namun tetap saja dalam pelaksanaannya pastinya memiliki tujuan memperoleh laba. Dengan adanya laba, maka laba tersebut bisa digunakan untuk kepentingan para anggota atau untuk mensejahterakan anggota.

b. Koperasi yaitu sekumpulan orang dan badan usaha koperasi

Koperasi memang terdiri dari kumpulan orang dengan tujuan yang sama sehingga dibentuk suatu badan usaha, dimana para anggota ini dengan sukarela atau tanpa paksaan menjadi anggota aktif dalam koperasi. Tak hanya kumpulan orang saja, koperasi juga memiliki anggota badan usaha koperasi. Dimana semua badan usaha koperasi ini membentuk atau bergabung yang cakupannya lebih luas. Namun dalam pembentukan ini, ada syarat dalam hal jumlah anggota yang harus dipenuhi sehingga dapat mendirikan koperasi. Yaitu minimal 20 orang. Syarat minimal 20 orang ini apabila ingin mendirikan koperasi primer. Apabila ada koperasi primer maka ada juga yang dikenal dengan koperasi sekunder. Untuk koperasi

sekunder ini, syaratnya yaitu minimal 3 badan usaha koperasi. Tak hanya syarat jumlah anggota saja, namun hal wajib dipenuhi yaitu tujuan dari anggota itu mendirikan koperasi. Tujuan yang dimaksud yaitu semua anggota memiliki kepentingan yang sama dalam hal ekonomi. Syarat pendirian koperasi ini sudah diatur dalam Undang-undang koperasi lebih tepatnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

c. Koperasi Indonesia yaitu koperasi dasarnya prinsip koperasi

Dalam undang-undang telah disebutkan prinsip-prinsip koperasi. Dengan adanya prinsip ini maka menjadikan koperasi Indonesia lebih terarah atau memiliki jati dirinya. Dengan adanya prinsip ini juga bisa dijadikan pembeda antara koperasi dengan badan usaha lainnya. Sehingga prinsip-prinsip koperasi haruslah diterapkan pada pelaksanaan koperasi dengan baik dan penuh tanggung jawab.

d. Koperasi Indonesia yaitu Gerakan ekonomi Rakyat

Seperti yang sudah disebutkan bahwa koperasi juga dikenal sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia dan telah menjadi penunjang perekonomian di Indonesia. Walaupun tujuan dari koperasi untuk mensejahterakan anggotanya, pada praktiknya koperasi juga harus memberikan manfaat untuk masyarakat secara umum.

e. Koperasi Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan

Dengan adanya tujuan yang sama antar anggota pastinya akan membentuk suatu rasa kekeluargaan antar anggota. Dimana asas kekeluargaan ini dapat diartikan dengan adanya rasa keadilan antar anggota koperasi tersebut. Sebagai contoh penentuan keputusan bisa dengan diadakannya musyawarah untuk mufakat, maka di koperasi juga dikenal dengan adanya rapat anggota atau rapat tahunan.

4. Tujuan Dan Fungsi Koperasi

Koperasi memiliki beberapa tujuan, hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang, dimana dijelaskan bahwa tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggota dan masyarakat, tak hanya itu koperasi juga bertujuan untuk memajukan perekonomian Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Tujuan koperasi juga didasarkan pada bagaimana operasional koperasi sebagai badan usaha. (Sattar, 2018). Sebagai contoh koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat, hal ini berarti bahwa memang fokus

dari kegiatan koperasi adalah kesejahteraan anggotanya. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari kegiatan koperasi dapat diukur dari tingkat kesejahteraan anggotanya.

Selanjutnya yaitu fungsi dari koperasi. Untuk fungsi ini juga telah dituangkan di UU no 25 /1992 Tentang Perkoprasian, dimana secara singkatnya fungsi tersebut terdiri dari :

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota. Dimana ini berarti kesejahteraan ekonomi dan sosial
- b. Peningkatan kualitas hidup masyarakat
- c. Memajukan perekonomian yang dimaksudkan sebagai bentuk kekuatanserta ketahanan perekonomian nasional hal ini sejalan dengan koperasi yang disebut Soko Guru Perekonomian Indonesia
- d. Perwujudan dan pengembangan perekonomian nasional yang didasarkan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi.

5. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi ini dapat dijadikan pembeda diantara koperasi dengan badan usaha lainnya dan menjadi jati diri koperasi itu sendiri. Dimana dalam koperasi dikenal prinsip yaitu:

- a. Anggota koperasi sifatnya sukarela serta terbuka.
- b. Dalam koperasi dikenal adanya rapat anggota, dimana pertemuan ini adalah kekuasaan yang paling tinggi dalam hal demokrasi dalam koperasi.
- c. Dalam koperasi juga dikenal dengan pembagian Sisa Hasil Usaha, dimana pembagiannya disesuaikan dengan penyeteran.
- d. Terdapat batasan bunga
- e. Mensejahterakan anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya
- f. Sifatnya terbuka
- g. Adanya swasembada, swakarta
- h. Kemadirian
- i. Pendidikan mengenai perkoprasian
- j. Adanya Kerjasama antar koperasi

6. Keanggotaan Koperasi

Sesuai dengan prinsipnya bahwa dalam hal anggota, koperasi bersifat sukarela dan juga terbuka. Dimana keanggotaan bersifat sukarela ini dapat diartikan

sebagai orang yang menjadi anggota koperasi itu sebenarnya tidak adanya paksaan sedikitpun dari pihak mana saja untuk menjadi anggota koperasi. Sukarela ini juga dapat diartikan bahwa anggota secara sadar ikut bergabung menjadi anggota dari koperasi. Dimana sadar berarti anggota memiliki tujuan atau menyadari bahwa dengan bergabung menjadi anggota koperasi dapat membantu dalam peningkatan kesejahteraan ekonominya. Dengan sikap sukarela ini maka diharapkan anggota juga turut aktif dalam usaha koperasi. Dalam sikap sukarela ini juga dapat dimaknai atau dapat disimpulkan sebagai :

- a. Keanggotaan tidak dapat dipaksakan
 - b. Apabila anggota berkeinginan mengundurkan diri sebagai anggota maka harus sesuai terhadap syarat yang tertuang pada AD/ART Koperasi tersebut.
- Sifat keanggotaan yang kedua yaitu terbuka. Terbuka dalam hal ini berarti bahwa anggota koperasi mencakup semua warga negara Indonesia dan tidak adanya pembatasan. Dimana keanggotaan ini terbuka untuk semua orang yang memiliki persamaan kepentingan dalam hal ekonomi.

7. Bentuk Dan Jenis Koperasi

Bentuk koperasi dibedakan menjadi koperasi primer serta koperasi sekunder. Dimana keduanya memiliki perbedaan dalam hal anggotanya. Koperasi Primer adalah koperasi yang anggotanya individu dengan total minimal 20 orang. Anggota koperasi primer ini dapat diartikan juga sebagai orang perorangan yang dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki tujuan ekonomi yang sama, siap menggunakan jasa koperasi dan memenuhi syarat sesuai yang tertuang dalam AD/ART. Contoh dari koperasi primer yaitu KPRI dan KUD. Sedangkan koperasi sekunder merupakan pendiri atau anggotanya badan hukum koperasi, baik primer maupun sekunder. (Sugiarto, 2021). Koperasi sekunder ini tidak hanya terdiri dari koperasi yang sejenis saja namun juga bisadari koperasi yang jenisnya beda namun dengan kepentingan dan kebutuhan atau aktivitas yang sama. Semua bentuk koperasi ini harus didasarkan pada kesamaan tujuan anggota.

Jenis-jenis koperasi dibagi menjadi 6 yaitu :

- a. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi ini bisa disebut pula koperasi kredit. Sesuai Namanya yaitu simpan pinjam koperasi ini kegiatannya yaitu menghimpun serta

menyalurkan uang dari dan ke anggotanya. Dalam pendirian koperasi ini harus mendapat izin dari Menteri.

b. Koperasi Konsumen

Beranggotakan konsumen dimana kegiatan usahanya menyediakan berbagai kebutuhan atau menjual barang konsumsi untuk para anggotanya.

c. Koperasi Produsen

d. Koperasi produsen dapat diartikan sebagai badan usaha yang anggotanya para pelaku UMKM, dimana yang dilakukan oleh produsen ini yaitu mengadakan barang atau jasa bagi anggota. Contohnya Koperasi Produsen Susu Sapi Perah.

e. Koperasi Pemasaran

kegiatan utamanya menjual barang dan atau jasa kepada anggotanya.

f. Koperasi Jasa

kegiatan utamanya yaitu melakukan kegiatan jasa berupa kegiatan usaha layanan non simpan pinjam contohnya pembiayaan bagi anggota.

g. Koperasi Syariah

Koperasi syariah dasar kegiatannya adalah syariat Islam. Dimana tujuan dari koperasi ini adalah mensejahterakan anggota sesuai prinsip Islam.

8. Sumber Permodalan Koperasi

a. Simpanan Pokok

Setoran dimana harus dibayarkan anggota ke koperasi ketika menjadi anggota.

b. Simpanan Wajib

simpanan yang jumlahnya tetap dan harus dibayar anggota setiap jangka waktu atau periode tertentu.

c. Simpanan Sukarela

Maksud dari simpanan ini yaitu simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu.

d. Dana cadangan

Cara memperolehnya dari sisa hasil usaha.

e. Hibah

Uang atau barang dimana bisa dinilai dengan satuan uang dimana berasal dari pihak lain sebagai pemberian dan sifatnya tidak mengikat.

BAB VIII

EKONOMI KERAKYATAN PEREKONOMIAN INDONESIA

A. KONSEP DAN PENGERTIAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN

1. Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan

Menurut Mubyarto, dkk (2014) Ada banyak orang mengungkapkan pendapat bahwa Indonesia sudah menjadi korban globalisasi besar yang mampu meruntuhkan kehidupan termasuk juga ketahanan nasional. Pengajuan ajaran ekonomi alternatif atau yang sering kita sebut ekonomi pancasila ini terjadi pada tahun 1979. Sedangkan tahun 1981 ekonomi pancasila dijadikan “Polemik Nasional” yang lamanya 6 bulan akan tetapi kemudian dihilangkan. Menurut banyak orang ajaran ekonomi kerakyatan merupakan suatu ajaran yang baru. Sebenarnya konsep ekonomi kerakyatan sendiri ialah suatu ajaran atau konsep lama yaitu Konsep ekonomi pancasila. Tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 yang merupakan asas demokrasi ekonomi yang dimana pada Sidang Tahunan (ST) MPR Tahun 2002 yaitu menjadikan ayat 4 baru. Penjelasan mengenai dasar ekonomi tercantum pasal 33 UUD 1945 yang dimana kegiatan produksi dilakukan oleh semua, yang dimaksud semua yaitu dibawah pemilikan. Pada dasarnya kemakmuran untuk masyarakat sangat dipentingkan dan diutamakan dibanding dengan kemakmuran untuk setiap orang. Pastinya muncul pertanyaan “Mengapa Konsep ekonomi pancasila tidak dipakai ?” Karena pada masa Orde Baru kata “Pancasila” telah dinodai atau dikotori sehingga membuat artinya keliru lalu oleh kepentingan penguasa orde baru dimanfaatkan. Maka dari itu, seluruh konsep atau ajaran pada masa Orde Baru tidak diterima dan untuk ajaran ekonomi pancasila tidak layak untuk disebut lagi.

Perlawanan teori ekonomi Neo-klasik di Indonesia terjadi pada tahun 1979 dengan bentuk yaitu suatu konsep ekonomi pancasila yang dituduh sebagai konsep yang berbau komunis sehingga sangatlah mudah untuk dijadikan lawan pemerintah. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk ikut arahan pemerintah tujuannya agar konsep ekonomi pancasila ini ditolak. Pada masa reformasi tahun 1997-1998 dimana masa menyadarkan bangsa Indonesia mengenai konsep atau ajaran ekonomi pancasila dianggap salah dan sifatnya tidak kerakyatan. Tentunya berpihak terhadap konglomerat yang melakukan

kerjasama dengan pemerintah. Oleh karena itu, terjadilah konsep ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya berasal dari sub-sistem ekonomi Pancasila tetapi pada masa orde baru kata Pancasila disalahgunakan dan lebih memilih untuk menghindarinya. Ekonomi Pancasila mencakup 5 sila yang terdapat dalam Pancasila sedangkan pada sila ke-4 ditekankan untuk ekonomikerakyatan.

2. Pengertian Sistem Ekonomi Kerakyatan

Suatu struktur dan proses ekonomi yang demokratis dan berkeadilan yang mendorong keikutsertaan semua rakyat sebagai pemilik modal dan pengendali jalannya roda perekonomian disebut dengan sistem ekonomi kerakyatan. Menurut Mubyarto, dkk (2014) mengartikan bahwa sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasaskan kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan yang sungguh pada ekonomi rakyat. Semua rakyat dibebaskan dari tindasan oligarki pemilik modal dan rakyat dijadikan subjek perekonomian. Hal tersebut merupakan tujuan dari sistem ekonomi kerakyatan. Pada zaman penjajahan pemihakan serta perlindungan yang difokuskan pada ekonomi kerakyatan. Agar sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial ini berjalan dan tentunya memiliki syarat mutlak diantaranya berdaulat pada bidang politik, lalu mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Dasar sistem ekonomi kerakyatan yaitu sebuah perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama dengan dasar asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945).

Peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan sebagai berikut :

- a. Dalam sebuah perekonomian disusun atas asas kekeluargaan dan menjadikan koperasi sebagai tipe makro dan mikro dalam perekonomian Indonesia.
- b. Pada ayat 2 dalam pasal 33 UUD 1945 yaitu dengan mengembangkan BUMN selaku penggerak di perekonomian Indonesia.

- c. Kemudian, pada ayat 3 pasal 33 UUD 1945 dengan dipastikan manfaat bumi, air, semua kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.
- d. Setiap warga negara memiliki hak yang terpenuhi untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang pantas atau layak.
- e. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Terdapat moral pembangunan yang berdasar pada paradigma pembangunan yang berkeadilan sosial :

- a. Pencegahan kecenderungan disintegrasi sosial
- b. HAM dan masyarakat dihormati.
- c. Terdapat kajian ulang pendidikan dan ajaran ilmu ekonomi dan sosial di sekolah maupun di perguruan tinggi.
- d. Peningkatan partisipasi dan emansipasi rakyat dalam otonomi daerah yang penuh dengan tanggung jawab.
- e. Dalam penyegaran nasionalisme ekonomi bertujuan untuk melawan semua bentuk yang tidak adil dalam sistem dan kebijakan ekonomi.
- f. Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multicultural.

Sebuah strategi pembangunan dengan memberdayakan ekonomi kerakyatan yaitu sebuah strategi yang menyelenggarakan demokrasi ekonomi yakni kegiatan produksi dilakukan oleh masyarakat di bawah pimpinan. Kemudian kemakmuran masyarakat sangat penting dan diutamakan daripada kemakmuran individu. Oleh karena itu, di dalam kemiskinan ini tidak bisa ditoleransi akibatnya untuk tiap kebijakan dan program pembangunan diberikan kepada masyarakat yang harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang kurang mampu atau miskin dan kurang sejahtera. Menurut Dr. Revrison Baswir, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada ada fungsi dari sistem ekonomi kerakyatan yaitu :

- a. Peningkatan peran masyarakat dalam kepemilikan modal nasional.
- b. Pengendalian jalannya roda perekonomian nasional perlu adanya peningkatan dalam peran masyarakat.
- c. Peningkatan gotong royong dalam pelaksanaan perekonomian nasional.

Menurut Inaya, dkk (2022) dalam sistem ekonomi kerakyatan mempunyai kelebihan dan kekurangan yaitu :

- a. Kelebihan Ekonomi Kerakyatan

- 1) Semua rakyat mendapat perlakuan hukum yang adil yang terkait dengan masalah perekonomian.
 - 2) Sistem ekonomi kerakyatan memberikan perhatian lebih kepada masyarakat kecil yang didukung berbagai program operasional yang nyata.
 - 3) Terwujudnya kedaulatan rakyat karena adanya sistem ekonomi kerakyatan.
 - 4) Dapat memberikan rangsangan ekonomi yang lebih produktif serta dapat mampu melahirkan kewirausahaan masyarakat.
 - 5) Kegiatan yang terjadi dalam perekonomian yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi berjalan dengan baik.
 - 6) Kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi saling berhubungan sehingga saling butuh dan dukung satu sama lain.
- b. Kekurangan Ekonomi Kerakyatan
- 1) Terdapat proses pembagian uang kepada masyarakat yang digunakan untuk mendukung usahanya dalam hal ini menimbulkan kesalahan dan kerugian bagi negara maupun untuk masyarakat sendiri.
 - 2) Pemberian uang bantuan membuat masyarakat menjadi bergantung pada keadaan serta mengurangi kemandirian masyarakat dan daya saing usaha masyarakat.
 - 3) Pengetahuan masyarakat mengenai investasi yang rendah membuat roda perekonomian berjalan lambat
 - 4) Pengetahuan tentang manajemen usaha dan pengelolaan yang rendah
 - 5) Serta kurang dukungan pemerintah dalam bidang pendampingan manajemen usaha.

Intinya sistem ekonomi kerakyatan digunakan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dalam sistem ini dapat dikatakan sebagai upaya yaitu kesempatan yang diberikan kepada masyarakat memiliki tujuan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. juga dianggap sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari pasal 33 UUD 1945.

B. EKONOMI KERAKYATAN DALAM PRESPEKTIF AGAMA

1. Ekonomi Kerakyatan Dalam Alqur`an

Menurut Mubyarto, dkk (2014) di dalam Al-Qur`an terdapat banyak hal yang ditemukan tentang ekonomi kerakyatan dibandingkan oleh UUD 1945.

Di kehidupan bernegara pastinya UUD 1945 sangat penting begitu juga dengan

pasal-pasal yang ada di dalamnya. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan ekonomi kerakyatan yang sifatnya umum mengakibatkan banyak arti yang bermunculan tapi arti tersebut tidak dapat masuk dalam kategori bagian UUD 1945. Masyarakat membahas mengenai ekonomi kerakyatan tetapi masyarakat tidak berpikir mengenai unsur pahala dikarenakan dalam orientasi ekonomi kerakyatan yang lebih praktis dan kekinian. Berbeda ketika masyarakat membicarakan tentang istilah keagamaan yakni "Ekonomi Syariah". Dalam istilah tersebut tidak akan menjadi masalah untuk dunia ini. Justru negara di dunia berlomba-lomba untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai pusat. Dengan demikian, tidak akan menjadi masalah ketika istilah ekonomi syariah dipakai di negara yang ada di dunia ini.

Dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu di Surat At-Taubah ayat 60 dan 130 dalam sebuah perekonomian intinya dimulai dari bahan baku. Bahan baku tidak disinggung banyak. Dalam sebuah perekonomian kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi lebih diperhatikan. Maksud dari bahan baku sendiri yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu air, tanaman, tanah, hewan, dan lainnya yang harus dijaga dan dipelihara. Proses sinergi dan konsep ekonomi kerakyatan yang sudah ada untuk saat ini memberikan tujuan agar terlaksana pembauran begitu juga agar saling mengisi dalam asas-asas demokrasi ekonomi dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat.

2. Ekonomi Kerakyatan Menurut Kitab Amsal

Dalam kitab Amsal "Keadilan Personal" diperlukan tujuan yang dimana dapat mengangkat status sosial ekonomi kerakyatan. Hal tersebut yang menjadi gagasan pokok dalam kitab Amsal yang memiliki keterkaitan dengan ekonomi kerakyatan. Sudah jelas berbeda antara kitab Amsal dengan kitab para yang dibuat oleh para nabi di abad ke-8 SM ini dapat dilihat contohnya yaitu seperti Hosea dan Amos. Di dalam kedua kitab ini menerangkan bahwa keadilan dari aspek sosial itu benar-benar patut untuk diperjuangkan yang tujuannya yaitu untuk rakyat miskin yang jumlahnya banyak. Kitab Amsal ini untuk penganut agama bukan Islam. Berdasarkan ideologi konservatif kitab Amsal membahas mengenai kemiskinan adalah pada umumnya orang miskin itu dinilai sebagai orang yang malas, bodoh, tidak mempunyai motivasi untuk berprestasi. Di abad ke-8 Sebelum Masehi para nabi membicarakan tentang kemiskinan menurut ideologi liberal yang artinya orang miskin akan tetap menjadi miskin

sebab orang kaya akan menjadi lebih kaya dari sebelumnya yang disebabkan para penguasa tersebut memberi dukungan kepada orang-orang kaya. Memiliki pandangan berbeda antara kitab Amsal dengan kitab-kitab sebelumnya di abad ke-8 Sebelum Masehi. Oleh karena itu, akan diberikan pengenalan mengenai Kitab Amsal.

3. Penjelasan Mengenai Kitab Amsal Dan Golongan Atas Yang Menjadi Latar Belakang

Pada kitab Amsal 1 hingga 9 hanya salah satu saja boleh diterima asalkan tidak berasal dari masa kerajaan tetapi berasal dari sumber suatu masa dimana sesudah pembuangan yaitu pada abad ke-5 SM. Terlebih khusus yang berasal dari salah satu hubungan serta ditemukan secara langsung yaitu dari kitab Amsal abad ke-8 dan kitab Sirakh yang mulai muncul pada abad ke-3 SM). Mendapatkan peredaksian di akhir kitab ini meskipun secara menyeluruh dijalankan di masa sesudah pembuangan. dan dapat peredaksian pada akhir kitab ini pun dilakukan dari awal abad (ke-3 sampai abad ke-5 SM). Materi yang terdapat di dalam kitab Amsal sudah banyak mulai dari lisan hingga tulisan. Hal sebelumnya untuk peredaksian kitab tersebut sudah tersimpan dari masa sebelum kerajaan.

Di dalam kitab Amsal terdapat bagian-bagian pada masa periode sebelum kerajaan. Yang dulunya merupakan salah satu bentuk materi pendidikan yang dimana dulunya untuk orang tua dalam keluarga yang bertujuan untuk mendidik orang muda agar suatu hari tahu akan hal yang berasal dari nilai-nilai yang etis tradisional serta mampu melakukan salah satu contoh fungsi terhadap masyarakat yang baik. Pada masa kerajaan sudah ada pendidikan di sekolah yang bertujuan untuk mendidik dan memberikan ilmu agar dapat menjadiorang yang profesional tentunya dalam pendidikan. Sayangnya pendidikan di masa tersebut berlaku bagi masyarakat tertentu yaitu masyarakat golongan atasyaitu salah satunya golongan kerajaan. Selain materi yang ada di dalam pendidikan mengenai etika tradisional ada juga materi bagaimana bentuk teknik berbicara langsung di depan umum, bernegosiasi dengan salah satu negara asing dan juga bentuk dasar masalah lain yang ada kaitannya dengan bentuk administrasi.

Perlu dipahami kegiatan pendidik, penulisan, pengumpulan dan peredaksian ini juga dilakukan oleh salah satu dari masyarakat dengan golongan ekonomi ke

atas. Di dalam golongan ini juga mempunyai kualifikasi untuk melaksanakan bentuk kegiatan tersebut. Mungkin saja tidak dibatasi oleh pendidik yang asalnya dari suatu golongan menengah dan bawah. Dalam golongan tersebut sudah pasti memiliki bentuk kesadaran yang lebih besar tentang bentuk masalah dalam masyarakat contohnya seperti adanya ketidakadilan yang berlaku antara golongan miskin dan kaya. Dan terlebih khususnya yang ada kaitannya dengan satu bentuk penyebab kemiskinan tersebut. Kemungkinan tidak dibatasi oleh adanya pendidik yang berasal dari suatu golongan masyarakat yang menengah dan bawah. Sebagai salah satu golongan tersebut pastinya harus memiliki bentuk kesadaran yang tentunya lebih besar mengenai satu bentuk masalah kemasyarakatan seperti ketidakadilan yang berlaku juga diantara golongan yang kaya dan miskin, terkhusus yang berkaitan dengan satu bentuk penyebab kemiskinan untuk mengubah dari bentuk pembebasan kemiskinan tersebut. Pengajaran tentang ekonomi kerakyatan sangat menarik apabila bertumpu pada bagian tersebut. Untuk semua materi pengajaran tentang ekonomi kerakyatan ada pada bagian ini bahkan untuk semua konsep ekonomi kerakyatan juga ada pada bagian ini. Pada Ams 10:1-22:16;24-29 pengajaran ekonomi kerakyatan di seluruh al kitab amsal digambarkan sebagai konsep yang sama.

Dalam alkitab memiliki latar belakang dan motif yang berbeda dengan memberikan suatu konsep tentang kemiskinan dan juga pembebasan kemiskinan. Kitab Amsal ini terdapat konsep khusus dalam pemahaman ekonomi modern yaitu dengan nama kemiskinan tradisional sedangkan pembebasan kemiskinan melewati keadilan personal. Telah disampaikan dalam kitab Amsal bahwa Tuhan menyampaikan kehendak bagi orang nasrani. Dijelaskan dalam kitab tersebut oleh Tuhan bahwa orang nasrani memberikan dukungan pada ekonomi kerakyatan untuk masyarakat Indonesia yang tidak sekadar hanya melewati pembenahan struktural melainkan dari pembinaan moral tujuannya agar golongan orang bawah bisa memperbaiki diri serta peningkatan kemampuan agar golongan atas peduli, berbuat adil, tidak merasa berat ketika dimintai pertolongan.

C. KOPERASI SEBAGAI WUJUD EKONOMI KERAKYATAN

Menurut Mubyarto, dkk (2014) pada kegiatan ekonomi terdapat dua paham yaitu paham kompetitivisme dan paham kooperativisme. Ideologi kebebasan mandiri merupakan dasar dari paham kompetitivisme yang mana paham ini bertujuan untuk bersaing dalam hal efisiensi ekonomi. Sedangkan paham kooperativisme merupakan paham yang memiliki tujuan serta membentuk kekuatan yang bersinergi dan kekuatan yang berlipat ganda. Banyak yang tidak paham atau keliru terhadap struktur ekonomi yaitu dengan menganggapnya sebagai struktur ekonomi yang digunakan sebagai sistem jalan tengah. Terdapat dalam pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Dengan begitu asas kekeluargaan serta kebersamaan digunakan dalam (BUMS) maupun (BUMN). Hal tersebut dapat diartikan jika kita itu tidak berkompetisi dengan saling mematikan melainkan kita harus tetap bekerja sama agar mencapai sebuah kesatuan. Pada tahun 1992 pada Undang-Undang No. 25 yang menjelaskan bahwa koperasi itu merupakan sebuah badan usaha yang digunakan sebagai penggerak ekonomi rakyat yang dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan yang mana kegiatan ini berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi dan anggotanya berdasarkan orang-orang maupun badan hukum koperasi..

Dalam RUU Perkoperasian terdapat sebuah istilah, dimana istilah itu merupakan “saham” bagi penyertaan anggota koperasi. Sedangkan koperasi merupakan “kumpulan orang” bukan “kumpulan modal” seperti halnya pada perusahaan perusahaan perseroan. Saham diartikan sebagai uang jika itu dalam istilah perseroan kapitalistik, sedangkan koperasi bukan didasarkan pada modal uang tetapi dengan mementikan dalam, segi modal sosial meliputi uang, jasa, usaha, partisipasi, serta nilai emansipasi di dalam masyarakat.

Dalam lima tahun terakhir pemerintahan sudah mengklaim jika koperasi sudah berkembang sangat pesat, hal tersebut disampaikan pemerintah dalam hari koperasi nasional. Menurut perbandingan yang sudah dilakukan pemerintah dengan membandingkan tahun 2009 dengan tahun 2013, dengan ditemukan kesimpulan jika jumlah koperasi yang ada di Indonesia meningkat yang awalnya hanya ada 170.411 unitan kini sudah menjadi 34.685.145 unit. Namun, dengan pencapaian kuantitatif ini sudah membuat pemerintah bangga tetapi tidak melihat bagaimana kondisi di lapangan yang sebenarnya. Hal tersebut sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa membandingkan data koefisien yang ada

menurut undang-undang koperasi menyatakan jika hal tersebut dapat dijadikan sarana bagi para anggota dalam kaitannya memenuhi kebutuhan ekonomi serta kebutuhan bersama. Adanya partisipasi dari anggota dalam kegiatan usaha koperasi merupakan hal yang sangatlah penting. Mengingat kesesuaian dari kebutuhan anggota, program serta manajemen ini dapat menentukan keberhasilan dari sebuah partisipasi. Di koperasi para anggota bebas mengutarakan pendapat baik saran maupun kritik. Yang bertujuan untuk membangun kemajuan koperasi.

Terdapat perbedaan gagasan mengenai koperasi antara Indonesia dengan Luarnegeri Awal mula koperasi berkembang di Eropa dan sejarah yang menentukan perkembangan koperasi di eropa. Ekonomi mikro digunakan eropa sebagai gagasan koperasi. Pada saat itu Moh. Hatta mempelajari gagasan tersebut ketika di Eropa. kemudian Moh. Hatta membawa gagasan yang sudah ia pelajari ke Indonesia, yang tadinya gagasan di eropa merupakan gagasan ekonomi mikro namun ketika di bawa oleh Moh Hatta menjadi ekonomi makro. Dengan demikian, koperasi sebagai gagasan yang digunakan dalam menyusun politik perekonomian Indonesia dan baru muncul pasal 33 dalam UUD RI 1945. Menurut Mubyarto, dkk(2014) bahwa salah satu permasalahan yang ada dalam koperasi di Indonesia yang membuat gagasan koperasi ini belum dapat dikatakan telah berkembang cukup jauh. Sejak zaman proklamasi kemerdekaan sampai saat ini kurang lebih tiga atau empat konflik tentang koperasi. Dalam konflik tersebut mempermasalahkan pengertian atau definisi, serta kedudukan koperasi. Mengapa demikian? Karena gagasan koperasi di Indonesia diambil dari Gagasan yang berasal dari Eropa. Namun jika gagasan di Eropa diartikan sebagai level ekonomi mikro namun pada saat dibawa ke Indonesia dan diterapkan di Indonesia Gagasan Ini menjadi gagasan yang membahas pada level ekonomi makro.

Karena level ekonomi mikro bisa dikatakan tidak berhasil, serta level ekonomi makro tidak bekerja akibat dari perekonomian indonesia yang masih menggunakan sistem berdasarkan ekonomi kerakyatan. Maka dari itulah membangun konsensus sangatlah penting bagi keberlangsungan level ekonomi Koperasi yang akan dikembangkan lebih lanjut, baik itu berasal dari kedudukan sistem ekonomi maupun politik yang nantinya akan di bangun oleh pemerintahan Indonesia.

Sekitar tahun 1934 sebagai pendiri bangsa Indonesia Bung Hatta membuat sebuah karya mengenai “Ekonomi Rakyat dalam Bahaya”. Hal tersebut dilakukan bung

hatta untuk menyingkirkan sistem ekonomi kolonial dan merubahnya menjadisistem ekonomi kerakyatan. Pada saat itu Belanda dibantu oleh kaum bangsawan yang berasal dari Indonesia atau biasa disebut dengan aristokrat. Landasan utama melakukan perjuangan kemerdekaan adalah bertujuan sebagai dasar dalam menghilangkan sistem kolonial yang masih melekat. Hal tersebut karena menurut dari sudut pandang bung hatta dapat menjadikan sebuah tantangan baik untuk masa kini maupun bagi masa-masa yang akan datang. Sedangkan bagi para pakar- pakar ekonomi di indonesia hal tersebut dijadikan sebagai acuan dalam menjaga kewaspadaan dari segi ideologis dan akademis akibat dari adanya globalisasi serta pasar bebas yang diterapkan.

Pada akhirnya Indonesia akan kembali kepada koloni asing. Hal ini menjadi pada saat ini dan tahun yang akan datang serta menjadikan situasi yang mencemaskan bagi Indonesia. Sehingga kita harus dapat bisa memerdekakan para pemimpin dari kebodohan. Semangat dalam menegakan kemandirian merupakan dasar agar dapat mencapai sebuah tujuan, tujuan ini juga berdasarkan keyakinan serta keteguhan yang ada pada dalam diri sendiri tanpa harus membuang waktu secara percuma-cuma. Dalam mencari dan mengatasi tantangan ini merupakan tugas dari para pemimpin dan kaum intelegensia untuk merancang dan mengatasi masalah untuk tahun-tahun kedepannya.

D. BADAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA YANG MENGIMPLEMENTASIKAN EKONOMI KERAKYATAN

Salah satu undang-undang yang membahas dan menjelaskan mengenai Perkoprasian adalah UU No. 25 Tahun 1992. Namun, hal tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai penjelasan yang resmi terkait koperasi sebagai sebuah perusahaan. Tetapi ada penjelasan tersirat dalam UU No. 25 tahun 1992 ini yang menyatakan bahwa koperasi merupakan sebuah usaha yang bergerak pada bidang perekonomian. Koperasi berperan dalam pembangunan perekonomian tetapi hal tersebut masih harus tetap diarahkan seperti halnya yang terdapat pada penjelasan umum mengenai koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang perkoperasian. Menerapkan prinsip-prinsip koperasi merupakan tujuan utama koperasi itu diarahkan supaya mencapai kaidah usaha ekonomi yang mapan.

Kementerian Kehakiman Belanda mengatakan bahwa suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan jika pihak yang berkepentingan bertindak secara

tidak terputus dan secara terang-terangan dan di dalam kedudukan tertentu memperoleh laba atau rugi bagi diri sendiri. Molengraff adalah seorang yang berasal dari ahli hukum dan berasal dari Belanda, Molengraff mengatakan bahwa secara yuridis perusahaan mempunyai unsur-unsur minimal enam yaitu:

1. Bersifat tidak terputus
2. Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga)
3. Kualitas tertentu (hal ini dalam lapangan perniagaan)
4. Menyerahkan barang
5. Mengadakan perjanjian perdagangan
6. Memperoleh laba

Pada Undang-Undang No 3 tahun 1982 mengenai wajib daftar perusahaan serta pengertian perusahaan tercantum di dalamnya. Jadi setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus serta yang didirikan bekerja berkedudukan dalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan pengertian perusahaan dalam ketentuan umum Undang Undang No 3 Tahun 1982 yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, pendapatan maupun laba. Terdapat perbedaan arti mengenai Pengusaha dan usaha. Pengusaha disini dijelaskan sebagai pelaku yang menjalankan jenis usaha baik itu perseorangan maupun badan, sedangkan usaha merupakan segala tindakan dalam bidang perekonomian baik itu dalam perbuatan maupun kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan target untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Berdasarkan arti dari pengusaha dan usaha serta apa yang sudah ditegaskan oleh undang-undang diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa koperasi termasuk kedalam badan usaha yang wajib melakukan pendaftaran perusahaan.

Bentuk perusahaan untuk saat ini diatur dalam peraturan perundang-undanganyakni :

1. Tentang perseroan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHP Perdata) Buku III, Bab VII, Pasal 1618-1652
2. Tentang jenis perseroan yaitu Perseroan Firma dan Komanditer dijelaskan dalam KUH Dagang, Bab III
3. Tentang PT dijelaskan pada undang-undang tahun 2007
4. Tentang Perkoperasian yaitu undang-undang nomor 25 tahun 1992
5. Lalu peraturan perundang-undangan lainnya.
 - a. Perusahaan negara

- b. Perum
- c. Perusahaan perseroan
- d. Perusahaan Jawatan
- e. Perusahaan Industri dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 mengenai Perindustrian.

Dengan resolusi yang sudah dijelaskan di atas merupakan sebagai hukum yang mengatur mengenai asal usul perusahaan. Oleh karena itu, bagian khusus dari beberapa Bab KUH Perdata serta KUH Dagang dan ditambah peraturanperundang-undangan lainnya adalah pengertian hukum perusahaan.

Selama ini pandangan dan penilaian masyarakat mengenai koperasi adalah menganggap dan memandang rendah jika koperasi itu hanyalah pelaku ekonomi yang tertinggal jika dibandingkan dengan pelaku-pelaku ekonomi nasional lainnya. Namun ada benarnya juga ketika membandingkan koperasi ini dengan perusahaan-perusahaan seperti BUMN dan BUMS, dapat dilihat kontrasnya jika koperasi ini belum sepenuhnya modern dan terbilang cukup kecil jika dibanding dengan pelaku ekonomi nasional lainnya. Tetapi banyak juga perusahaan- perusahaan koperasi yang sudah bisa terbilang modern dan berkembang mengikuti teknologi zaman yang kian berkembang, dapat diambil contoh perusahaan koperasi yang sudah terbilang modern ialah koperasi karyawan astra, koperasi swadharma (anggota yang berasal dari karyawan bank BNI) serta contoh yang terakhir ini merupakan gabungan antara koperasi batik yang ada di indonesia. Para pelaku usaha di bidang koperasi yang sudah terbilang cukup maju, merupakan sebuah koperasi yang mana mereka sudah sadar bahwa koperasi ini merupakan sebuah badan usaha yang tujuannya untuk kesejahteraan dari masyarakat sekitar dan anggota dari koperasi itu sendiri. Dengan demikian koperasi-koperasi ini sudah dapat dikatakan sebagai sebuah koperasi yang menjalankan serta menerapkan prinsip-prinsip dari perusahaan koperasi. Keefisienan merupakan tujuan utama agar perusahaan koperasi ini mampu bersaing ketat dengan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya.

Dalam Undang-Undang, koperasi memiliki kedudukan lebih kuat jikadibandingkan dengan badan usaha lainnya hal ini karena status hukum yang melekat dan disahkan oleh Undang-Undang. Badan hukum koperasi dan Perseroan terbatas (PT) merupakan dua alasan yang mendasari jika badan usaha koperasi ini

memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT. Adapun ciri-ciri yang dapat dikatakan sebagai badan hukum yaitu :

- a. Harta kekayaan tersendiri terpisah dari kekayaan pribadi anggota
- b. Anggota koperasi mempunyai tanggung jawab terbatas
- c. Anggota koperasi bersifat persoonlijk atau bersifat pribadi

Ciri-Ciri PT Sebagai Badan Hukum

- a. Anggota dalam PT pemilikan saham diperdagangkan dengan harga riil
- b. Saham dapat dijadikan sebagai warisan
- c. Anggotanya bersifat impersonal

Koperasi merupakan badan hukum, pastinya koperasi bisa mempunyai kekayaan maupun utang karena dapat melakukan perbuatan hukum layaknya manusia. Menurut hukum, koperasi memiliki sebuah kehendak yang berbeda dengan manusia yang memiliki pikiran dan akal. Namun semua pertanggung jawaban itu semua terletak pada koperasinya yang meliputi semua harta bendanya karena kehendak pengurus koperasi merupakan kehendak dari perusahaan koperasi. Dalam membangun suatu badan hukum, tentu harus memperhatikan masalah dari kepastian hukum dengan sebetul-betulnya. Para penentu kebijakan koperasi serta pembuat undang-undang tampaknya terlalu mengabaikan unsur-unsur dari kepastian hukum. Adapun syarat dari pendirian koperasi ialah minimal didirikan oleh 20 orang maupun lebih dari itu tidak masalah bagi pendirian suatu koperasi primer, serta syarat pendirian koperasi sekunder ialah 3 koperasi yang telah memiliki badan hukum semua.

Tidak dijelaskan dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992 mengenai perkoperasian bahwa akta pendirian koperasi harus akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta pendirian koperasi dibuat oleh pendiri koperasi dengan akta dibawah tangan sejak berlakunya undang-undang nomor 25 tahun 1992. Maksud dari akta dibawah tangan yakni akta pendirian tidak dibuat dihadapan pejabat semacam notaris maka tidak ada yang menjamin kebenaran isi akta pendirian tersebut. Hal ini dapat dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan pihak ketiga dan investor yang akan berhubungan dengan koperasi.

Dalam mengesahkan badan hukum koperasi oleh pemerintah tentunya ada syaratnya diantaranya mudah, cepat, dan murah dengan tidak mengabaikan asas kepastian hukum. Tujuan dari ditegakkannya asas kepastian hukum yakni untuk menjaga semua anggota koperasi, koperasi dan masyarakat luas dari perbuatan

penyalahgunaan badan hukum koperasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam syarat tersebut terlihat di dalam tujuannya yang sifatnya perlu untuk melindungi pendirian koperasi supaya tidak bertentangan terhadap kepentingan umum. Dengan demikian, artinya pemerintah akan menyerahkan pengesahan atas dasar ketentuan minimal yakni terpenuhinya semua syarat maka menteri baru berwenang dalam pengesahan akta pendirian. Begitu juga sebaliknya jika dalam pengesahan terjadi penolakan yang harus dilakukan adalah memberikan alasan kepada pemohon dan sifat alasan ini harus ada. Ada beberapa hal apabila koperasi belum dapat pengesahan yaitu sebagai berikut :

1. Ketertiban umum dan kesusilaan tidak ditentang oleh pihak koperasi. Namun di dalam akta bagian anggaran dasar sudah tercantum dasar dan tujuan dari pendirian koperasi.
2. Dalam akta pendirian segala peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam UU No. 25 Tahun 1992 tidak dapat dimuat lagi.
3. Untuk koperasi yang bersangkutan terdapat di wilayah Indonesia
4. Tidak melakukan tindakan serta perbuatan yang berkedok pada kepentingan orang asing, dengan membuktikannya dengan sumber-sumber resmi sesuai dengan SOP.

Dalam segi status hukum, koperasi memiliki kedudukan lebih tinggi jika dibandingkan dengan semua badan usaha yang berjalan pada bidang serupa. Hal tersebut bukan semata-mata hanya diberikan kepada koperasi namun dibalik itu semua ada alasan yang mendasarinya, Diketahui jika Indonesia memiliki 2 jenis badan usaha yang diakui oleh pemerintah sebagai badan hukum yaitu ;

1. Koperasi

Kekayaan pribadi dari pemilik maupun anggotanya itu terpisah dari harta kekayaan yang ada di koperasi. Tanggung jawab sebagai anggota koperasi itu terbatas tergantung dari besarnya modal maupun simpanan yang sudah disetorkan. Tanggung jawab para anggota koperasi hanyalah pada saat menyerahkan jumlah modal yang sudah ditetapkan dalam Anggaran dasar yang sudah disusun.

2. Perseroan Terbatas

Dicerminkan menggunakan kepemilikan berupa saham yang dapat diperdagangkan dengan harga riil.

E. KEBIJAKAN BANK INDOENSIA DALAM MENDORONG EKONOMI KERAKYATAAN

Salah satu sektor yang sangat berdampak dan mempunyai peran penting dari Ekonomi kerakyatan adalah sektor UMKM. Dari berbagai aspek, Peranan UMKM merupakan peranan yang sangat penting dalam mendukung pemulihan ekonomi bagi Indonesia. Pemerintah terus memperbaiki dan mengembangkan aspek dari berbagai sektor dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia. Banyak upaya yang kedepannya akan dilakukan dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan dan mengembangkan pada sektor UMKM, contohnya adalah dengan memberikan bantuan berupa kredit perbankan kepada pelaku usaha pada sektor UMKM.

Tingkat kepatuhan nasabah membuat bank yang memberikan kredit mendapatkan keuntungan, hal tersebut karena kebanyakan nasabah di sektor usaha kecil lebih patuh jika dibandingkan dengan nasabah pada sektor usaha besar. Resiko tetaplah ada di dalam pemberian kredit kepada UMKM, hal tersebut karena banyaknya nasabah yang membuat pemberian kredit ini tidak terkonsentrasi kepada sektor-sektor usaha tertentu. Apalagi kredit yang berasal dari usaha kecil ini terbilang menggunakan nominal yang kecil. Namun keuntungan memberikan kredit kepada UMKM lebih banyak jika dibandingkan dengan resiko yang akan dihadapi.

Pada UU No. 23 Tahun 1999 mengenai perbankan Indonesia telah diberlakukan, kebijakan di dalam UU ini adalah mengenai pengembangan koperasi dan usaha kecil harus di bantu oleh bank Indonesia supaya mengalami sebuah perubahan yang mendasar menjadi lebih baik lagi. Namun KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) tidak mempunyai kesempatan lagi dalam memberikan sebuah bantuan berupa keuangan kepada pelaku usaha UMKM Di Indonesia. Karena hal tersebutlah, bantuan teknis dan pengembangan terhadap suatu kelembagaan menjadi peranan yang mempunyai sifat tidak langsung yang dilakukan oleh Bank Indonesia. sejak tanggal 16 november tahun 1999 terjadi perubahan dalam melakukan pengelolaan kredit yaitu tugas ini dialih tangankan kepada perusahaan- perusahaan BUMN yang ditunjuk langsung oleh pemerintah, pemerintah menunjuk 3 perusahaan yaitu meliputi PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) , PT permodalan Mandani (PNM) serta yang terakhir yaitu PT Bank Tabungan Negara (BTN). Beberapa perusahaan BUMN yang ditunjuk ini tidak semata-mata hanya ditunjuk saja, namun memiliki fungsi tersendiri bagi tiap-tiap perusahaan ini.

Dapat diambil contoh Bank BRI yang bertugas sebagai koordinator dalam melakukan penyaluran SKIM KUT, KKop serta KKPA kepada seluruh masyarakat Indonesia, kemudian PT PNM sebagai koordinator dalam menjalankan kredit lainnya di bidang skim, serta yang terakhir adalah PT BTN yaitu memiliki sebuah fungsi sebagai koordinator dalam penyaluran skim KPRS dan KPRSS.

Sebesar 23 triliun ditetapkan sebagai jumlah KLBI pada tanggal 16 November 1999 ini dalam rangka melakukan program kredit ini dialihkan dalam perjanjian yang telah dilakukan antara Bank Indonesia dengan pihak ketiga yang terkait. Seperti Perusahaan BUMN tadi yaitu PT BRI, PT BTN, dan PT PNM. Baki debit sejumlah 18,7 triliun rupiah serta kelonggaran dalam penarikan 4,3 triliun rupiah merupakan jumlah dari 23 triliun rupiah yang sudah dialokasikan. Namun kebijakan yang dikeluarkan bukan hanya untuk kredit saja melainkan mulai menjurus kepada pengalihan pinjaman yang dananya sendiri merupakan dana luar negeri dan juga adanya bantuan teknis berupa penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang telah ditunjuk.

Namun UMKM tetap mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia, karena Bank Indonesia juga sudah mempertimbangkan peran dari UMKM yang penting dari segala aspek dalam menunjang percepatan pemulihan kegiatan ekonomi. pulihnya fungsi intermedia perbankan merupakan manfaat dari kegiatan dukungan Bank Indonesia yang diberikan kepada UMKM, serta berfungsi dalam menunjang kondisi perbankan itu dalam kondisi yang sehat. Bank Indonesia juga mengeluarkan upaya-upaya dalam mendukung kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui sebuah pilar-pilar utama yang sudah di diskusikan sebagai berikut :

1. Kebijakan kredit perbankan

Dalam kebijakan kredit perbankan serta upaya dalam menciptakan sebuah sistem yang dimana perbankan ini dapat dikatakan sebagai sebuah perbankan yang sehat serta dapat mampu membantu dalam mendorong tercapainya kegiatan UMKM di Indonesia. Bank Indonesia juga telah menerbitkan sebuah sistem-sistem dalam mendukung hal tersebut sebagai berikut :

a. Pengaturan kredit usaha kecil

Pada tahun 2001 yang bertepatan pada tanggal 4 Januari Bank Indonesia sudah melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan kredit usaha kecil (KUK), yang di dalam intinya itu dengan business plannya

masing-masing bank, Bank Indonesia juga tidak mengharuskan tetapi tetap menganjurkan pihak bank yang terkait tetap menyalurkan program-program seperti KUK, tetapi bank harus tetap melakukan pelaporan atas pencapaian dari kredit yang sudah diberikan kepada pelaku UMKM atau usaha kecil.

b. Kerjasama Bank Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan

Melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKM Bank Indonesia sudah menjalin kesepakatan serta menandatangani MoU dengan pemerintah pada tahun 2002 yang kemudian disempurnakan kembali pada tahun 2005. Kesepakatan ini dilakukan Bank Indonesia dengan pemerintah hanya semata-mata bertujuan sebagai pemberdayaan masyarakat kurang mampu agar masyarakat ini mampu mengembangkan usaha dimana usaha ini merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah yang nantinya dapat mendapatkan penghasilan.

c. Menyesuaikan ketentuan perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penetapan pembayaran pokok serta bunga yang ditujukan untuk keperluan kredit sampai dengan 20 miliar rupiah sebagaimana berdasarkan penilaian kualitas Aktiva produktif yang sudah diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam PBI No. 9/6/PBI/2007 tentang perubahan PBI No.8/2/PBI/2006.

d. Memfasilitasi pertemuan antara pemerintah, perbankan dan dunia usaha

Dengan adanya pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank-bank lain, Bank Indonesia dengan pemerintah tentu memberikan dampak yang positif bagi UMKM di Indonesia, tujuannya diadakan pertemuan hanya semata-mata untuk meningkatkan komunikasi, yang nantinya mereka dapat menerbitkan sebuah kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya seperti meningkatkannya akses pelaku UMKM terhadap perbankan melalui sebuah pelatihan-pelatihan mengenai BDS (Business Development Service Provider).

2. Pengembangan kelembagaan

a. Penguatan kelembagaan BPR

Dalam melakukan penguatan terhadap kelembagaan BPR ini bisa dilakukan dengan berbagai tahapan-tahapan seperti berikut;

1) Perkembangan Industri BPR

- 2) strategi pengembangan BPR
- 3) Penguatan kapasitas BPR
- 4) pengembangan BPT di bidang teknologi informasi.

b. Adanya kerjasama antar lembaga keuangan terkait

Industri BPR di harapkan bisa meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan penyaluran pembiayaan terhadap UMKM karena Industri BPR ini telah mengalami penguatan. Oleh sebab itu Bank Indonesia terus menyuarakan agar Bank-bank umum mampu bekerja sama dengan BPE dalam melakukan penyaluran kredit terhadap UMKM.

c. Meningkatkan peran lembaga peminjaman kredit

Bank indonesia telah melakukan seminar mengenai pengembangan lembaga peminjaman kredit yang pesertanya merupakan instansi-instansi terkait, perbankan serta pelaku-pelaku usaha. banyak hal yang bisa di dapat dari seminar itu, salah satu contohnya adalah adanya pemberdayaan dan penguatan terhadap LPK serta didukung oleh hukum-hukum yang telah diterbitkan serta memadai agar terciptanya LPK yang baik.

d. Keputusan-keputusan dalam mendorong pembentukan UMKM center Perbankan.

Keputusan-keputusan dalam mendorong pembentukan UMKM center Perbankan.

Dalam Sarana komunikasi antara bank dengan pelaku-pelaku usaha di bidang UMKM ini telah terjalin komunikasi di dalam lembaga ini. banyak bank yang telah menerapkan dan membentuk UMKM center seperti bank Niaga, BCA, dan Bank Danamon. Bank BRI juga telah merencanakan melakukan pengembangan unit-unit center UMKM dengan membuka kredit berjumlah 100 unit per tahunnya. Serta kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan segmen pasar kredit di dalam usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

e. Melakukan penguatan kelembagaan usaha mikro

Penguatan kelembagaan usaha mikro memang sangat diperlukan, banyak upaya-upaya dari bank indonesia seperti memberikan penguatan serta dasr dari kegiatan LKM melalui prnyusunan RUU keuangan mikro. Disisi lain bank BNI jug telah mengembangkan unit layanan bagi UMKm agar dapat memperluas akses usaha mikro dalam hal permodalan.

f. Pembentukan credit bureau (Biro Kredit)

Bank Indonesia sudah memiliki sebuah sistem dalam sistem informasi debitur yang dapat digunakan sebagai prototipe dari pendirian lembaga biro kredit. Lembaga biro kredit sendiri merupakan sebuah lembaga yang harapannya sendiri itu mampu menghimpun serta menyajikan semua data-data informasi mengenai pihak debitur dari non perbankan serta dari pihak-pihak perbankan. berkaca dari luar negeri yang telah memilikinya di setiap perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

3. Pemberian bantuan teknis

Dalam Kegiatan pelatihan, penelitian, penyediaan informasi serta pendampingan/konsultasi kepada pihak perbankan merupakan target dari bantuan teknis yang fokus bahasannya pada sektor perbankan.

a. pelatihan kepada perbankan

Pemberian latihan kepada staf-staf dari bank umum merupakan sebuah kegiatan yang digagas oleh bank Indonesia yang bertujuan agar dapat mengupgrade skill-skill stafnya sehingga dapat mengetahui profil dan kinerja dari BPR dan nantinya akan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam menyelenggarakan penyaluran kredit terhadap para pelaku usaha di bidang UMKM di tanah air.

b. Pemberdayaan konsultan keuangan/pendamping UMKM mitra Bank (KKMB)

Kesepakatan bersama antara KPK dengan Satgas ini menghasilkan konsultan KKMB yang tujuan dari pembentukannya sendiri adalah memberdayakan konsultan/pendamping yang cakupannya sendiri yang asalnya itu dari pihak pemerintah maupun dari pihak-pihak swasta, selama ini mereka sering berkecimpung dalam pengembangan UMKM.

c. Kegiatan Penelitian

Upaya-upaya dalam mencari bentuk dari pola pembiayaan yang digunakan sebagai bentuk atau model dalam melakukan bantuan teknis supaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam melakukan usaha sebagai pelaku usaha UMKM. Bentuk atau model dalam melakukan bantuan teknis ini sudah tertera dalam kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia. Tujuan dari penelitian yang dilakukan Bank Indonesia ini adalah

sebagai upaya dalam menggali segala potensi yang ada pada sektor usaha UMKM di tiap-tiap daerah yang sangat banyak di Indonesia.

d. Penyediaan sistem ekonomi

SIPUK (Sistem Informasi Pengembangan Usaha Kecil merupakan pengembangan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia yang tujuannya agar dapat memberikan sebuah nilai tambah terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan Bank Indonesia, karena dalam SIPUK ini memberikan sarana dalam menyebarkan hasil-hasil dari penelitian dan informasi-informasi lainnya secara cepat.

e. Memfasilitasi penyelenggaraan bazar intermediasi perbankan

Kebanyakan masyarakat enggan meminta penjelasan dari perbankan jika mengharuskan datang langsung ke Bank terdekat, namun dengan adanya penyelenggara acara yang ditunjukkan supaya informasi mengenai perbankan dengan dunia usaha ini agar dapat dipahami semua orang yang terkhusus kepada masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha.

f. Pengembangan pusat pembinaan lembaga jasa pengembangan usaha (service provide management center)

Dalam melakukan layanan bank menyediakan pendampingan serta konsultasi kepada semua pelaku usaha UMKM sebagai mitra strategis dari bank supaya bantuan-bantuan teknis ini dapat terlaksana seperti yang telah diterbitkan dalam PBI No 8/39/PBI/2005. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah kegiatan ini bertujuan agar dapat diimplementasikan secara maksimal di seluruh daerah di Tanah Air. Sehingga permodalan yang asalnya dari perbankan dapat terus meningkat dan berkembang karena akses dari UMKM.

Jadi potensi dari UMKM ini dapat dimaksimalkan baik itu pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah, Bank Indonesia dan perbankan lainnya apalagi ketika dilakukan bersama-sama maka manfaat yang akan ditimbulkan juga akan banyak. Berbagai upaya-upaya di atas diharapkan dapat mempercepat keluar dari zona krisis ekonomi. Melalui pemberdayaan di sektor UMKM di Indonesia secara tidak langsung juga dapat mengurangi angka jumlah pengangguran, peningkatan pendapatan dari masyarakat, serta yang paling utama adalah upaya dalam pemulihan ekonomi.

Tanggung jawab dalam melakukan pengembangan serta pemberdayaan UMKM bukan hanya tugas dari pemerintah saja, melainkan peran dari swasta juga sangatlah penting, bahkan dari pelaku usaha UMKM itu sendiri, sehingga dari situlah perlu adanya pengembangan secara terus-menerus serta inisiatif-inisiatif dari ide yang kreatif dan inovatif untuk memajukan sektor usaha UMKM. Bank Indonesia akan selalu mendukung semua kebijakan serta inisiatif yang dilakukan dalam upaya pengembangan serta pemberdayaan UMKM walaupun kegiatan tersebut belum dalam dilayani secara maksimal namun setidaknya dengan program tersebut dapat dikembangkan terus-menerus di masa depan nantinya.

F. PERAN NEGARA DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN

Meskipun ekonomi kerakyatan dalam skala nasional belum pernah diterapkan secara langsung, tetapi pergulatan serta aspek pemikiran dan pendapat mengenai isi dari ekonomi kerakyatan dan terus dibahas oleh para ahli dengan membandingkan dengan ekonomi yang sudah diterapkan pada skala nasional. Namun gagasan mengenai ekonomi kerakyatan ini kian terpuruk pada sekitaran tahun 1967an, dan kemudian lahirlah gagasan baru mengenai Ekonomi Pancasila, tetapi ekonomi Pancasila ini juga merupakan suatu konsep kebijaksanaan ekonomi sehingga nantinya dapat mencapai sebuah titik keseimbangan pada perekonomian. Banyak terdapat arahan-arahan dari ekonomi kerakyatan seperti :

1. Berprinsip kepada terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku ekonomi
2. Selalu mempunyai nilai-nilai yang berpegang teguh dari keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, serta yang terpenting adalah menciptakan perilaku yang adil kepada seluruh warga masyarakat Indonesia
3. Mekanisme pasar bertumpu pada prinsip berkeadilan
4. Senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan dari pertumbuhan ekonomi.

Negara yang bertugas sebagai pemrakarsa dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi pada prinsipnya upaya-upaya ini bertujuan sebagai paradigma ekonomi kerakyatan, agar ekonomi kerakyatan ini dapat dilaksanakan serta diterapkan. Ekonomi kerakyatan merupakan dasar dari ekonomi di Indonesia, karena prinsip-prinsipnya ini menjadi langkah awal dalam menentukan kebijakan-kebijakan maupun sistem ekonomi yang akan dipakai.

Visi-misi yang terkandung dalam UU no. 17 tahun 2007 yang isinya mengatur mengenai rencana-rencana dalam melakukan pembangunan jangka panjang terhadap pembangunan nasional di Indonesia pada tahun 2005 sampai dengan 2025. Isi yang paling utama dari peraturan ini adalah tercapainya Indonesia yang mandiri dari segala aspek, maju dalam segala bidang, adil dalam berbagai hukum dan negara yang makmur dalam melaksanakan pembangunan nasional. Visi ini digunakan negara sebagai bahan kerangka serta strategi dasar dalam penjabaran dari semua tujuan negara yang dimana hal tersebut telah dinyatakan di dalam alinea keempat dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan historisnya konsep dari ekonomi kerakyatan ini adalah sebuah gagasan yang sudah direncanakan dalam bidang ekonomi yang sudah dikembangkan sejak zaman pemerintahan Soekarno dan Hatta. Soekarno menyebutkan sebuah istilah terkait ekonomi monopoli yang sedang berhadapan dengan ekonomi rakyat. Namun berbeda dengan Mohammad Hatta yang menyebutkan jika penderitaan serta kesengsaraan rakyat tidak boleh lepas dalam tafsiran ekonomi kerakyatan. Dengan itu semua, konsep dari ekonomi kerakyatan ini tidak dapat dilepaskan dari konsep-konsep kesejahteraan rakyat.

Peran dari negara dalam menjalankan sistem ekonomi kerakyatan ini penerapannya terdapat pada pasal 33. Negara terus mengembangkan dan memberdayakan semua manfaat dari sumberdaya-sumberdaya alam yang terdapat di Indonesia, hal tersebut juga digunakan negara bertujuan hanya semata-mata untuk kemakmuran dari rakyatnya, hal ini juga dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip dari ekonomi kerakyatan. Berdasarkan pada hal itu kewajiban negara dalam mengelola semua sumberdaya alam serta semua cabang-cabang produksi yang penting ini bagi kesejahteraan semua rakyat Indonesia dengan menggunakan sistem ekonomi kerakyatan.

SDA merupakan penyokong serta cikal bakal dari perekonomian Indonesia, Sekarang ini banyak dari warga yang masih tergantung pada hasil alam seperti di pedesaan yang lebih dari 50 % masyarakatnya adalah petani bahkan diantaramereka semua hidup dalam kategori miskin atau kurang mampu. Pembangunan daerah pedesaan merupakan fokus pemerintah guna pemerataan dalam kesejahteraan. Namun seluruh dana yang digunakan bukan hanya buat pembangunan di desa saja melainkan kota juga mendapatkannya. Dalam rangka industrialisasi pembangunan di pedesaan memerlukan dukungan serta perhatian

lebih dari negara maupun pemerintahan agar bisa berkembang lebih lagi dan lagi serta lebih modern dan maju dari periode sebelumnya.

Teknologi sudah menjadi pilihan yang strategis ketika industrialisasi sudah menjadi pilihan serta diterapkan. Dalam penciptaan sebuah struktur untuk mencapai keadaan ekonomi yang lebih baik lagi tentu adanya peran-peran teknologi di dalamnya. Pembangunan fisik maupun non fisik merupakan cakupan yang luas dari kontes arti membangun. Keinginan hidup dengan lebih baik lagi, bebas dari keterbelakangan, serta bertanggung jawab merupakan peningkatan skill atau kemampuan dalam artian non fisik. oleh sebab itu, terdapat tiga unsur pokok dalam dalam strategi pelaksanaan, kegiatannya adalah demokrasi, bersifat populistik serta keadilan sosial yang implementasi dari ketiganya merupakan tugas dari negara agar dapat menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat memenuhi dari ketiga unsur tersebut.

Penggolongan-penggolongan dari status sosial maupun ekonomi dari masyarakat merupakan tujuan jangka pendek dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dalam penggolongan ini tidak membedakan baik itu dari segi ras maupun dari segi-segi yang berdasarkan pada tingkatan penguasaan dari faktor-faktor produksi. Namun jika ada jangka pendek tentu juga terdapat tujuan jangka panjang yaitu mengoreksi sisa-sisa struktur ekonomi yang telah ditinggalkan oleh bangsa kolonial belanda, bukan hanya itu saja tujuan jangka panjangnya ini dapat digunakan sebagai bahan peningkatan kemampuan dari masyarakat-masyarakat indonesia dalam melakukan pengendalian jalannya roda perekonomian yang terus dan terus berjalan di Indonesia. Terdapat pasang surut dalam penerapan ekonomi kerakyatan ini, sehingga dalam pengaplikasiannya sendiri belum dapat dijadikan sebagai barometer dalam menentukan Sistem ekonomi yang ada di Indonesia itu berhasil.

Penerapan dari semua prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan dapat juga digunakan sebagai penguatan dari para pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sesuai yang telah disebutkan dalam ketetapan yang sudah dikeluarkan yaitu TAP MPR No. VI/MPR/1999. Serta di dalam Undang-Undang No 20 tahun 2008 mengatur mengenai pembatasan terhadap pelaku usaha UMKM namun dalam artian berikut ini :

1. Usaha mikro adalah usaha yang sudah terbilang produktif dan kepemilikan dari usaha mikro sendiri adalah perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi semua kriteria-kriteria di bawah ini;
 - a. Memiliki jumlah ekuitas yang maksimalnya di angka 50 juta, dan juga kekayaan tersebut tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha yang dimiliki
 - b. Mempunyai hasil dari penjualan usaha per tahun maksimal di angka 300 juta rupiah.
2. Usaha kecil adalah sebuah usaha di bidang ekonomi yang sudah bisa dibilang produktif dan kepemilikannya berdiri sendiri serta pelakunya adalah perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan salah satu cabang, dan memiliki seperti kriteria di bawah ini;
 - a. Memiliki jumlah ekuitas lebih dari antara 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dan itu semua tidak termasuk dengan tanah dan bangunan di tempat usaha yang dimiliki.
 - b. Mempunyai hasil dari penjualan lebih dari antara 300 juta rupiah sampai dengan 2.5 miliar rupiah per tahunnya.
3. Usaha menengah merupakan sebuah usaha ekonomi produktif dan berdiri sendiri serta pelaku usahanya adalah perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak cabang dari sebuah perusahaan serta memiliki kriteria seperti di bawah ini;
 - a. Mempunyai ekuitas lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan 10 milyar rupiah dan itu semua tidak termasuk dengan tanah dan bangunan dari tempat usaha tersebut
 - b. mempunyai penghasilan tahunan bersih lebih dari 2.5 milyar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah.

Berdasarkan kriteria tersebut patokan dari UMKM adalah modal serta keuntungan sebesar-besarnya. Keikutsertaan rakyat merupakan salah satu dari kriteria dari sistem ekonomi kerakyatan hal tersebut diutarakan oleh tjakrawedaja. dari 8 kriteria sistem ekonomi kerakyatan, hanya koperasi yang menjadikan tantangan terbesar dalam ke 8 kriteria tersebut.

Berdasarkan hal itu semua, pemerintah mempunyai peran yang sangatlah banyak dan besar dalam melakukan penerapan sistem ekonomi kerakyatan hal itu juga telah dikehendaki UUD 1945 dalam Pasal 33. Oleh sebab itulah kerangka

reformasi perekonomian dilakukan secara komprehensif yang dimana perekonomian ini berkaitan dengan seluruh sub-sub sistem dan dapat digunakan serta diperlukan saat melakukan penyelenggaraan dalam bidang perekonomian yang berbasis masyarakat ataupun rakyat.

Formulasi yang diberikan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta konstitusi juga merancang serta mengesahkan sebuah alat yang juga dapat bisa digunakan dalam mengimplementasikan suatu semangat yang bersifat kekeluargaan yang terdapat dalam negara ini terkandung dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) yaitu di dalam pasal tersebut mengandung artian jika hukum itu digunakan sebagai sebuah sarana dalam melakukan pelaksanaannya ketika memberikan posisi yang kuat terhadap negara. Dalam kontes ini pemerintahan Indonesia harus berperan aktif dalam menentukan dan merumuskan serta menetapkan rumusan-rumusan hukum yang dapat berisikan sebuah pelaksanaan dari sistem-sistem ekonomi yang sudah di konsepkan serta yang sudah di amanatkan dalam UUD 1945 pasal 33.

kurang adanya peningkatan kapasitas baik itu dari anggota maupun dari para pengelola koperasi sehingga praktek dari pelaksanaan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan masih kurang dalam praktek pelaksanaannya. Anggotanya turut tidak aktif akibat koperasi dianggap sebagai salah satu bentuk bagian dari badan usaha-usaha seperti halnya PT maupun CV . disisi lain kunci dari keberhasilan dari suatu koperasi merupakan keaktifan dari berbagai anggotanya sendiri. kebanyakan dari koperasi yang tidak itu disebabkan karena salah urus yang diakibatkan oleh anggota yang tidak aktif secara terus menerus ataupun berkelanjutan namun berbalik dengan itu anggota ini hanya aktif pada saat dilakukannya pendirian koperasi yang hasil evaluasi ini merupakan hasil pertimbangan langsung yang dikeluarkan langsung oleh kementerian koperasi dan UMKM Indonesia.

Usaha di Indonesia dalam skala usaha di tempati pada sektor UMKM ini dilakukan secara proporsi. jika dibuat berdasarkan 8 kriteria ekonomi kerakyatan, maka UMKM ini merupakan konsep yang sangat strategis ketika menggunakan pendekatan kerakyatan. sehingga di dalam prespektif ini cara mengatasi semua hambatan-hambatan dalam praktik pelaksanaan ekonomi kerakyatan pemerintah harus terus berperan aktif.

Kementerian Koperasi dan UMKM menggunakan prinsip pembinaan terhadap manajemen secara berkesinambungan dengan bentuk seperti melakukan kegiatan sosialisasi, penelitian, koordinasi, maupun melakukan bimbingan maupun pendampingan kepada para pelaku usaha UMKM agar memiliki keahlian dalam bidang manajer, managerial sehingga mereka dapat berkontribusi aktif dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi, serta pembangunan Indonesia sesuai dengan UUD 1945.

G. UMKM TERSENTUH OLEH PEMERINTAH



Gambar Bakso Aci

Sumber : Gambar ini diambil oleh Ikhsania Rifda

Awal berdirinya Baso Aci Nok Rupe pada tahun 2018 tetapi untuk mulai meminta perizinan pemerintah pada tahun 2020 dan itu sudah sampai ke Dinas Kota Tegal. Hal yang dilakukan untuk meminta perizinan pemerintah yang pertama yaitu mendaftar sebagai seorang pengusaha UMKM melalui Balai Kota Tegal yang berada di kantor pelayanan satu pintu. Kedua mengisi formulir dan jenis-jenis UMKM dan untuk baso aci ini termasuk ke jenis kuliner. Dalam kuliner ini juga dibagi lagi jenisnya yaitu untuk Bakso Aci Nok Rupe ini termasuk ke dalam olahan tepung. Ketiga akan mendapat nomor usaha. Tujuan dari nomor usaha yaitu untuk mendaftar ke Dinas Kesehatan untuk mendapat kelayakan pangan. Cara untuk mendapat kelayakan pangan ke Dinas Kesehatan yaitu hampir

sama dengan meminta perizinan kepada pemerintah. Dengan mengisi formulir di Dinas Kesehatan. Nantinya tempat produksi baso aci ini akan disurvei oleh Dinas Kesehatan untuk dilihat kondisi tempatnya, bagaimana cara produksinya apakah bersih atau kotor. Ketika sudah sesuai dengan kriteria dari Dinas Kesehatan maka akan di accept oleh Dinas Kesehatan lalu akan mendapatkan nomor Dinas Kesehatan. Kemudian nanti mengikuti penyuluhan pangan layak sehat. Dalam penyuluhan pangan layak sehat ini diberi tahu bagaimana cara mengemas makanan yang baik jangan sampai ada benda lain seperti rambut, batu, isi staples, dan lain-lain.

Untuk bisa menjadi pengusaha UMKM di bawah naungan pemerintah yaitu dengan cara sering mencari informasi di media sosial serta mempunyai relasi agar usahanya cepat maju. Ketika sudah di bawah naungan pemerintah nantinya akan mudah untuk memperoleh informasi contohnya ada pelatihan mengenai UMKM boleh diikuti dan akan dibiayai secara gratis, ada program halal dari MUI dapat diikuti juga dan dibiayai secara gratis jika UMKM tersebut bagus. Menurut owner baso ini sedang dalam proses halal MUI diakibatkan terkendala dalam waktu karena banyak orderan sampai akhirnya pendaftaran halal MUI sudah ditutup dan tidak bisa mengikuti.

Baso Aci Nok Rupe pertama kali dikenal dari mulut ke mulut atau dari orang sekitar. Dari orang sekitar ini membeli kemudian meminta review apakah ada rasa yang kurang. Jika tidak ada yang kurang dan enak baru boleh dipromosikan. Semakin berkembangnya usaha ini mencoba cara mempromosikan melalui selebgram dari daerah sendiri yaitu Tegal yang nantinya produk ini akan direview dan produk bisa menjadi terkenal. Ketika sudah dikenal oleh banyak orang bergeser ke luar kota untuk promosi. Semakin banyak orang tahu tentang produk ini maka akan semakin dikenal. Menurut ownernya sendiri produk ini sudah pernah dikirim ke luar kota seperti Yogyakarta, Jakarta, Serang Banten, dan Batam. Cara promosi melalui media sosial seperti instagram, facebook, dan lain-lain merupakan cara yang cepat untuk mempromosikan produk ini.

Produk Baso Aci Nok Rupe masih terkendala dalam produksi. Karena ketika orderan banyak masih ada kendala di SDM maka dari ownernya sendiri masih menerima orang-orang sekitar untuk bekerja. Karena proses produksi Baso Aci Nok Rupe masih manual tanpa menggunakan mesin canggih misalnya dalam produksi bakso, bumbu, pengemasan masih menggunakan tenaga manusia. Produk

ini juga berdampak terhadap masyarakat sekitar Kota Tegal yaitu membuka lapangan pekerjaan baru, menambah penghasilan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Untuk pekerja yang sudah memperoleh ilmu bagaimana cara membuat bakso acinya nantinya dapat digunakan untuk modal usaha dan mempunyai usaha sendiri. Ketika pandemi Covid-19 terjadi owner mengurangi produksi karena banyak orang yang tidak membeli serta banyak yang menganggur sehingga peminatnya berkurang. Berbeda ketika mengikuti binaan dari pemerintah untuk masa pandemi tidak berpengaruh jadi kembali ke awal dan semakin laris.

Pada Januari 2022 bakso aci sempat menurun tetapi sekarang sudah kembali dan sudah mempekerjakan karyawan lagi. Tahun Baso Aci Nok Rupe mengikuti pelatihan dari Dinas Koperasi yang bernama Pelatihan Inkubasi dan mentornya berasal dari BMT ISI Yogyakarta. Dia merupakan penggerak UMKM naik kelas di Provinsi Jawa Tengah. Pemilik dari Baso Aci Nok Rupe ini berhasil tersaring di pelatihan yang sedang dijalankan. Pada awal pertemuan menjelaskan tentang bagaimana skema baso aci ini pada awalnya, lalu targetnya seperti apa. Jadi benar-benar berubah semua diulang lagi dari awal tujuan agar tahu apakah selama ini berjualan memperoleh laba atau rugi. Di dalam pelatihan akan diajarkan bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan, menghitung harga produksi, menghitung keuntungan, menghitung harga jual, serta menghitung persediaan bahan baku dan sisa persediaan. Menurut ownernya sendiri produk baso aci ini sedang proses dimatengin oleh pemerintah agar dapat naik kelas.

Untuk harga Baso Aci Nok Rupe sekitar 15 ribu rupiah dan memiliki varian rasa di dalamnya. Informasi saya melalui wawancara dengan pemilik Baso Aci Nok Rupe dan saya juga sempat membeli produknya juga menurut saya enak, segar, hampir sama dengan baso aci pada umumnya. Baso Aci ini bisa dijadikan sebagai buah tangan karena kemasan yang praktis dan mungkin bisa bertahan lama jika disimpan di kulkas. Untuk nama ownernya sendiri yaitu Ade seorang Ibu Rumah Tangga.

H. UMKM YANG BELUM TERSENTUH OLEH PEMERINTAH



Gambar Tas Rajut

Sumber : Desa Tawangrejo Kec. Winong Kab.Pati

Masyarakat desa godo Yang terletak di Kabupaten Pati sebagian besar dari penduduknya itu berpenghasilan yang berasal dari sektor pertanian, namun terdapat industri kreatif berupa kerajinan yang terbilang seru, sektor kerajinan ini yaitu kerajinan rajut. salah satu contoh dari pengusaha yang berkecimpung pada sektor kerajinan rajut adalah Ibu Dewi Sri Lestari. kelompok usaha kecil ini terus menghasilkan kerajinan rajut sesuai dengan apa yang telah dipesan oleh para pelanggan sebelumnya. Usaha milik ibu dewi ini sudah mampu memberikan peluang usaha kepada warga sekitar dengan sudah adanya 25 warga setempat yang sudah bergabung pada kegiatan usahanya. Banyak juga perusahaan sejenis di desa godo ini. maka dari itulah ketika pemerintah dapat melihat serta memberikan bantuan kepada pelaku usaha serta terus mengembangkannya akan dapat membantu mengembangkan perekonomian dari warga setempat.

Tidak dapat dipungkiri jika kerajinan rajut ini banyak digemari oleh kaum wanita terkhusus kepada para ibu-ibu di desa godo. Namun dengan perkembangan teknologi serta modernisasi kerajinan rajut ini mulai dilirik oleh para remaja terlebih lagi produk-produk yang dapat dipakai oleh pria ini sudah ada dan sudah dikembangkan. namun terdapat permasalahan dari sektor kerajinan rajut ini yaitu lamanya pengerjaan akibat masih dikerjakan secara manual. Bukan hanya itu saja, agar dapat menghasilkan suatu produk yang berkualitas maka juga dibutuhkanlah ketelitian, ketekunan, dan yang terpenting adalah keterampilan maupun skill dalam hal merajut. Tantangan lainnya adalah dalam hal pemasaran, kerajinan ini belum dipasarkan lewat marketplace karena belum ada nya ketrampilan foto dari ibu-ibu ini, sehingga diperlukannya teknik dalam memfoto sebuah produk agar dapat diterima oleh pihak marketplaceny dan dapat menyakinkan calon pembeli.

Perlunya kegiatan pelatihan yang dapat diberikan oleh para warga masyarakat setempat supaya lebih bisa menghasilkan produk yang berkualitas, tau bagaimana cara memasarkan suatu produk. pemerintah juga harus turut mendukung kegiatan ini supaya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi di desaitu, bahkan bisa juga menyebar kepada desa desa lain yang akhirnya pertumbuhan ekonomi di kabupaten pati dapat meningkat.

Ukuran dari keberhasilan pembangunan dari suatu wilayah tidak erat lepas kaitannya mengenai pertumbuhan ekonomi. Adapun cara agar dapat melihat tingkat pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah yaitu dengan menggunakan BPS, dimana didalamnya terdapat PDRB dari tahun ke tahun.

BAB IX

PEMBANGUNAN DAERAH

B. PENGERTIAN PEMBANGUNAN

1. Pengertian Pembangunan

Secara umum, pengertian pembangunan adalah upaya sadar yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik melalui suatu proses yang panjang dalam periode waktu tertentu. Pembangunan adalah suatu orientasi koordinasi dan bisnis tanpa batas. Proses dari pembangunan merupakan bagian dari perubahan sosial ekonomi yang bisa bergerak maju ataupun bergerak sendiri, tergantung kepada orang dan struktur sosialnya. Proses dari pembangunan menghendaki adanya suatu pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan suatu perubahan, baik perubahan struktur ekonomi ke struktur pertanian, industry ataupun jasa dan atau perubahan kelembagaan baik perubahan melalui regulasi maupun reformasi. Rogers (Rochajat, dkk: 2011:3) menyatakan bahwa pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Sedangkan menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89) menyatakan bahwa pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu usaha dari pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa dan negara demi menuju modernitas. Sejalan dengan definisi pembangunan yang disampaikan menurut Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (2013) yang secara sederhana mengartikan sebuah pembangunan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terstruktur dan alami. Berubahnya tingkat kesejahteraan bisa ditentukan oleh definisi ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Pembangunan menekankan pada perubahan alami yang ditentukan oleh siapa yang berperan dalam proses pembangunan tersebut.

Proses dari pembangunan berkaitan dengan bagaimana manusia bisa memanfaatkan sumber daya sebagai solusi untuk memberikan fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Mahayanti Fitriandari and Winata (2021) menyampaikan makna membangun adalah suatu usaha yang dilakukan pada

saat ini dalam kerangka perbaikan atas kondisi masa kini dan lampau yang masih belum sesuai dengan cita-cita kehidupan manusia. Sedangkan menurut Effendi (2022) menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pembangunan itu harus berorientasi pada pembangunan masyarakat baik dari berbagai bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, maupun hukum dengan tujuan utama untuk membangun wawasan dan kesadaran warga tentang cita-cita bangsa dan negara dimasa depan.

Dalam mewujudkan pembangunan pasti dibutuhkan suatu perencanaan untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien. Perencanaan ini sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan memaksimalkan pengalokasian sumber daya baik sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun sumber daya modal. Perencanaan disini juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik lagi dimasa depan yang berkaitan dengan merencanakan berarti sama saja memilih. Proses memilih baik memilih alternatif untuk mencapai kondisi pembangunan yang lebih baik, memilih tujuan dan sasaran dari kegiatan pembangunan, memilih berbagai program yang bisa mendukung pembangunan lebih baik untuk mempertimbangkan waktu pelaksanaan pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, proses pembangunan akan terwujud jika melibatkan, menggerakkan sumber daya manusianya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, serta mengevaluasi hasil dari proses pembangunan tersebut.

2. Pengertian Pembangunan Daerah

Arsyad, 1999 dalam (Santoso, 2013), menyatakan bahwa pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Indonesia, tentunya pemerintah masih mengalami hambatan karena faktor pembangunan ekonomi yang masih bersifat sentral. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan aturan baru yang dimulai tahun 2001 sampai sekarang terkait ketetapan

otonomi daerah dengan tujuan menjadikan pelayan pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Hal tersebut didasarkan asumsi pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai apa yang dibutuhkan dan menampung aspirasi masyarakat daerahnya.

Dalam proses pembangunan daerah tentunya harus mengetahui terlebih dahulu mengenai mobilisasi potensi pembangunan. Daerah dalam hal ini harus memiliki kemampuan mengatur, mengurus, dan mengelola kepentingan serta bisa menampung aspirasi masyarakat yang ada di wilayah daerahnya. Pemberdayaan suatu daerah perlu dilakukan ke semua komponen yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan swasta. Seperti penjelasan sebelumnya berkaitan dengan otonomi daerah, harapannya melalui penerapan otonomi daerah bisa memunculkan pusat kekuatan baru di daerah baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, maupun hukum. Salah satu motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi adalah investasi, untuk bisa mendesak dan memberikan daya Tarik untuk berinvestasi ke daerah, diperlukannya profil mengenai potensi daerah yang memuat informasi peluang usaha yang layak untuk dipertimbangkan oleh pihak investor. Tentunya dalam menampilkan potensi yang unggul bagi daerah bisa menyediakan informasi berupa Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kebijakan Provinsi/Kabupaten/Kota, Visi dan Misi Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Daftar Panjang atau Pendek mengenai Potensi Daerah tersebut. Mobilisasi potensi pembangunan daerah dapat didekati dengan berbagai segi diantaranya:

a. Mobilisasi Dana Pembangunan

Dana pembangunan daerah berkaitan dengan bagaimana mobilisasi dalam ranah Manajemen Pembangunan. Karena dana pembangunan daerah yang digunakan pastinya bersumber dari kegiatan pemerintah seperti pemasukan dari pajak dan pemasukan lain diluar pajak serta tabungan dari masyarakat. Jika sumber pendanaan tersebut masih belum bisa mencukupi sasaran pembangunan daerah maka diupayakan dengan pengadaan sumber dana pembangunan daerah dari luar negeri.

b. Penguatan Kelembagaan

Dalam proses pembangunan daerah diperlukannya dukungan dari kelembagaan. Pembangunan daerah yang merupakan kegiatan kompleks

meliputi berbagai disiplin sector, kepentingan dan kegiatan pasti diperlukan Lembaga-lembaga yang mampu menampung, menyalurkan, dan mengatasi serta bisa mensinergikan aspek pembangunan daerah.

c. Partisipasi Masyarakat

Memasuki tahap pembangunan suatu daerah dalam keadaan negara yang memiliki peran besar sekalipun pasti membutuhkan adanya partisipasi masyarakat untuk menjamin keberhasilan suatu pembangunan. Banyak studi empiris yang membuktikan bahwa salah satu faktor kegagalan suatu pembangunan atau pembangunan tidak mencapai suatu sasaran yang diinginkan karena kurangnya melibatkan partisipasi masyarakat bahkan banyak kasus yang terjadi karena penentangan masyarakat terhadap upaya pembangunan. Hal tersebut terjadi karena beberapa sebab, diantaranya:

- 1) Pembangunan hanya bersifat menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan bagi rakyat banyak bahkan merasa lebih dirugikan;
- 2) Kurangnya sosialisasi terhadap rencana pelaksanaan pembangunan, sehingga menimbulkan kurang pemahamannya masyarakat terhadap hal tersebut yang menimbulkan kesalahpahaman;
- 3) Tata cara pelaksanaan pembangunan yang tidak sepadan dengan apa yang dipahami oleh rakyat;
- 4) Tidak mengikutsertakan rakyat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

d. Pelaksanaan Pembangunan

Dalam melaksanakan proyek pembangunan harus memuat tujuan yang jelas, sasaran yang akan dicapai, cara mengukur keberhasilan, jangka waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, teknis pelaksanaan, kebijakan yang menjamin, biaya yang dibutuhkan, dan badan yang melaksanakan.

e. Koordinasi

Dengan adanya koordinasi diharapkan agar upaya pembangunan yang dilaksanakan dari berbagai sektor atau penyelenggara badan di berbagai daerah dapat menghasilkan suatu sinergi yang baik. Dengan demikian, koordinasi merupakan salah satu upaya untuk menghasilkan suatu pembangunan daerah yang efisien dalam memanfaatkan sumber daya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan.

f. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah haruslah dipantau dan dievaluasi setiap perkembangannya dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya jika diukur dengan sasaran yang akan dicapai. Pemantauan dilakukan dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana dapat diketahui lebih awal dan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi adanya kejadian yang tidak diinginkan. Dengan hasil pemantauan tersebut dihasilkannya sebuah evaluasi supaya proses pembangunan kedepannya dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

g. Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam menentukan strategi pengembangan potensi ekonomi daerah bisa dilaksanakan melalui langkah-langkah diantaranya:

- 1) Mengidentifikasi sektor kegiatan yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya;
- 2) Mengidentifikasi sektor potensi yang rendah dan mencari faktor penyebab yang menjadikan potensi tersebut rendah;
- 3) Mengidentifikasi faktor produksi yang termasuk sumber daya yang digunakan dalam mendukung sektor tersebut;
- 4) Menggunakan model pembobotan terhadap variabel kekuatan dan kelemahan setiap sektor dan subsektor yang ada;
- 5) Menentukan strategi yang akan dipakai untuk pengembangan sektor andalan agar dapat membantu menarik sector lain untuk bisa tumbuh dan berkembang.

3. Teori Pertumbuhan Dan Pembangunan Daerah

Dalam melaksanakan pembangunan daerah ada beberapa teori yang membantu untuk memahami pentingnya pembangunan ekonomi suatu daerah dimana dalam teorinya berfokus tentang bagaimana metode menganalisis perekonomian suatu daerah dan factor-faktor apa saja yang bisa menentukan keberhasilan pertumbuhan suatu daerah. ringkasan dari berbagai teori dapat disajikan sebagai berikut:

Pembangunan daerah = f (sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, entrepreneurship, transportasi, komunikasi, komposisi industry, pasar ekspor,

luas daerah, situasi ekonomi, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat, dan bantuan pembangunan)

a. Teori Ekonomi Neo Klasik

Dalam Teori Ekonomi Neo Klasik ini memberikan dua konsep pokok dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah meliputi keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor produksi. Hal tersebut berarti bahwa sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan jika pencairan modal bisa mengalir tanpa adanya pembatasan.

b. Teori Basis Ekonomi

Dalam teori ini menyatakan bahwa faktor utama dari penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan berhubungan langsung pada permintaan suatu barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan ekonomi industri di daerah yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku yang diekspor maka akan menghasilkan kekayaan untuk daerah tersebut sehingga menciptakan peluang kerja. Pada teori ini menitikberatkan pentingnya bantuan kepada usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional yang berorientasi ekspor yang didirikan di daerah tersebut. Kelemahan dari model teori ini adalah model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan permintaan internal yang menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan pasar secara nasional maupun global. Namun, model teori ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan jenis industri dan sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi daerah.

c. Teori Lokasi

Ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan suatu daerah, yaitu: lokasi, lokasi, dan lokasi. Implementasi tersebut bisa dicontohkan dalam hal perusahaan yang cenderung meminimumkan biaya dengan memilih lokasi yang memaksimalkan peluang untuk strategi mendekati pasar. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi kualitas atau suitability suatu lokasi, diantaranya: biaya tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas pendidikan, dan lainnya. Keterbatasan teori lokasi adalah bahwa teknologi dan

komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi untuk kegiatan produksi dan pendistribusian barang.

d. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi suatu daerah dimana perlunya melakukan perbedaan fungsi antara daerah-daerah yang berbatasan sehingga dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan peranan fungsionalnya dalam sistem ekonomi daerah.

e. Teori Kausasi Kumulatif

Dalam teori ini berkaitan dengan kondisi daerah disekitar kota yang semakin buruk. Artinya kekuatan pasar cenderung bisa memperparah kesenjangan antara daerah tersebut. Daerah yang tergolong maju akan mengalami akumulasi keunggulan kompetitif jika dibandingkan dengan daerah terbelakang.

f. Model Daya Tarik

Dalam teori Daya Tarik ini dinyatakan bahwa suatu masyarakat bisa memperbaiki posisi pasar terhadap kondisi industrialisasi melalui pemasukan subsidi dan insentif.

C. MANAJEMEN PEMBANGUNAN

1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dipandang sebagai suatu perencanaan yang berguna meningkatkan pemakaian sumber daya publik yang ada. Hal itu dibutuhkan karena terbatasnya sumberdaya sehingga dengan adanya perencanaan pembangunan dapat dilakukan program yang dilakukan berdasarkan potensi sumberdaya yang dimiliki. Perencanaan pembangunan daerah ini menjadi penting karena mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi yang lebih efisien dan efektif dengan kata lain peran dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan perekonomian sangat penting. Untuk menciptakan lingkungan sehat seperti kenaikan kesempatan dan pertumbuhan ekonomi. Seperti lingkungan fisik, lingkungan regulasi dan lingkungan attitudinal (Nursini, 2010).

Dasar dari perencanaan pembangunan ini merupakan tujuan yang akan dicapai yang mana telah ditentukan sebelumnya. Jika tujuan sudah tercapai maka akan mengarahkan pada perencanaan pembangunan yang akan

disusun.(Sanjaya) mengatakan bahwa penetapan tujuan, selalu dilakukan sebelum perencanaan ,dilakukan melalui analisis kebutuhan dan dokumen yang lengkap yang menunjukkan langkah selanjutnya yang harus diikuti untuk mencapai tujuan (dalam Kato et al., 2021).

Lincoln Arsyad (dalam Nursini, 2010) mengatakan bahwa terdapat jenis-jenis perencanaan:

- a. Perencanaan didasarkan pada jangka waktu (jangka waktu panjang dengan waktu 10-25 tahun seperti RPJP nasional dan daerah,jangka waktu menengah 5 tahun seperti RPJM nasional dan daerah,jangka waktu pendek 1 tahun seperti RKP nasional dan daerah);
- b. Perencanaan didasarkan perencanaan sifat (komando /perintah dan rangsangan/stimulasi);
- c. Perencanaan didasarkan pada alokasi sumber daya yang berguna (keuangan/moneter dan fisik);
- d. Perencanaan didasarkan pada tingkat fleksibilitas/luwes (indikatif dan imperative)
- e. Perencanaan berdasarkan sistem ekonomi (kapitalis,sosialis,campuran)

Ada 4 tahapan untuk perencanaan pembangunan (Kato et al., 2021) antara lain:

- a. Tahapan menyusun perencanaan pembangunan;
- b. Tahapan dalam menetapkan rencana;
- c. Tahapan untuk mengendalikan pengimplementasian rencana;
- d. Tahapan mengevaluasi pelaksanaan rencana berhasil atau tidak.



Pembangunan dalam perencanaan adalah prinsip untuk melakukan kontrol. Hal itu merupakan tugas pokok dari manajemen pembangunan. Tanpa adanya perencanaan pembangunan maka manajemen pembangunan tidak dapat terlaksana/dicapai dengan baik. Kaitan antara membuat rencana dan pembangunan sangat luas. Hal itu dapat dilihat dari konsep penyusunan rencana incremental, rasional komprehensif, radikal, advokasi, dan transaktif. Karena adanya perluasan perencanaan pembangunan maka perlu adanya manajemen perencanaan pembangunan.

2. Manajemen Pembangunan Daerah

Upaya atau rangkaian dimana adanya perencanaan pertumbuhan yang dilengkapi dengan bantuan penggunaan suatu negara, bangsa, otoritas ke arah modernitas dalam konteks pembangunan negara (Siagian dalam Kato et al., 2021). Kemudian menurut Esman (dalam Kato et al., 2021) manajemen pembangunan merupakan suatu proses dimana untuk menuju perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan memiliki sifat dinamis. Kemudian dalam perkembangannya, memiliki gagasan pembangunan yang memiliki 4 makna yaitu:

- a. Pembangunan adalah proses dimana terdapat kegiatan yang dilakukan terus menerus yang berkesinambungan.
- b. Usaha yang dilakukan secara sadar karena merupakan suatu kebutuhan.
- c. Pertumbuhan dan perubahan diimplementasikan secara berorientasi.
- d. Berhubungan adanya modernisasi, sebagai langkah untuk membuat eksistensi lebih tinggi dari yang sebelumnya.

Kemudian dalam melakukan pendekatan manajemen terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan penyusunan antara lain Visi, Misi, Strategi, dan Aksi pembangunan (Digdowiseiso dalam Kato et al., 2021). Visi ini memiliki arti kemana arah kita akan pergi saat harus pergi. Visinya adalah suatu negara dengan mencakup rakyat didalamnya mandiri dan makmur dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan misinya adalah motif

adanya kita sebagai bangsa. Yaitu sebagai negara bangsa yang berdaulat, merdeka, dan bersatu.

Dalam melakukan manajemen pembangunan Indonesia memiliki dasar yang didasarkan sepenuhnya pada Pancasila dan UUD 1945. Dimana juga mempunyai metode in terkait dengan trilogi pembangunan (pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional) dimana nantinya dapat menyongsong ketahanan nasional. Esmar (dalam Kato et al., 2021) mengatakan bahwa dalam manajemen pembangunan memiliki konsep yaitu sebuah sikap dan ungkapan yang berbeda dari gagasan administrasi manajemen pembangunan, dimana administrasi ini memiliki peran dalam mewujudkan pembangunan, jika terdapat masalah administrasi maka akan berpengaruh dan menimbulkan masalah dalam manajemen pembangunan. (Kartasasmita) berpendapat manajemen pembangunan dalam perkembangannya memiliki dasar teori yang tidak berubah yaitu:

- a. Perencanaan (planning). Dimana hal ini memiliki fungsi agar usaha dalam manajemen dilakukan secara sadar dengan terorganisir.
- b. Penganggaran (budgeting) adalah perencanaan biaya yang dibuat dalam jangka waktu tertentu.
- c. Pelaksanaan (implementation) adalah pelaksanaan proses perencanaan yang sudah dirumuskan secara efektif dan efisien.
- d. Monitoring dan evaluasi. Pemantauan bertujuan untuk melacak kemajuan suatu pelaksanaan pembangunan. Sedangkan evaluasi yaitu penilaian yang dilakukan guna dapat mengetahui apa dan kenapa hal itu terjadi. (Kato et al., 2021).

Dengan adanya Manajemen pembangunan diharapkan mampu mengoptimalkan modal pembangunan suatu wilayah dan mewujudkan kesejahteraan di suatu wilayah (Saksoso dalam Kato et al., 2021). Dapat dikatakan (Nazaruddin) bahwa suatu pembangunan itu telah berhasil dilihat dari tujuan pembangunan nasional telah tercapai secara optimal sesuai keinginan atau tidak dan terdapat perencanaan berbagai aspek kehidupannya yang cukup baik (Abbas dalam Kato et al., 2021).

3. Siklus Manajemen Pembangunan Daerah

Pembangunan merupakan suatu proses untuk melakukan perubahan dengan membawa ke arah yang lebih baik dimana dengan perencanaan yang baik

bertujuan untuk tercapainya sasaran yang sudah direncanakan dan dicitakan. Dalam suatu proses pembangunan terdapat sebuah siklus yang mana merupakan semua rangkaian kegiatan oleh seluruh fungsi manajemen bekerja sama satu sama lain dalam proyek atau program, yang mana nantinya tiap fase akan menuju ke fase selanjutnya. Meski dalam kaitannya dengan kegiatan dan tujuan terpisah, namun untuk pelaksanaan guna pembangunan daerah fungsi manajemen tersebut tidak dapat dipisahkan.

Terdapat langkah berkesinambungan dalam siklus manajemen pembangunan antara lain:

a. **Planing**

Merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam melakukan pembangunan yaitu dengan merencanakan suatu program terlebih dahulu yang ingin dicapai atau target yang akan dicapai suatu perusahaan. Bertujuan untuk mencapai tujuan, target, misi yang ingin dicapai. Perencanaan ini perlu dilakukan agar dalam semua proses kegiatan dalam manajemen pembangunan daerah ini sesuai yang diinginkan dalam perencanaan kita dari awal yang sudah disusun. Namun dalam penyusunan perencanaan tentunya tidak asal-asalan atau dugaan. Akan tetapi dengan beberapa metode, rencana, atau logika dan juga riset lebih lanjut yang mana menjadi landasan dasar planning dan juga untuk pertimbangan risiko yang kemungkinan terjadi dari planning.

b. **Organizing**

Merupakan tahap kedua setelah perencanaan. Membutuhkan peran sosok manajer untuk memimpin dan mengatur staf/karyawan. Manajer ini nantinya bertugas mengkoordinasi SDM serta menyesuaikan dengan bahan material yang ada. Kesimpulannya untuk hal pengorganisasian perlunya penyesuaian dalam membagi tugas untuk SDM. Dimana hal itu bertujuan supaya rencana tercapai sesuai yang diharapkan secara efektif dan efisien.

c. **Actuating**

Dalam hal ini yaitu pengaplikasian perencanaan sudah terorganisir. Dimana setiap individu melaksanakan tugasnya sesuai posisinya dan tanggung jawab individu. Kemudian dalam hal ini ada perlunya seorang manajer memotivasi anak buah (staff) yang mana

bertujuan agar mereka merasa akan dipedulikan sehingga dalam melakukan pekerjaan karyawan melakukan secara maksimal dan ketika pekerjaan dilakukan secara maksimal maka mendekati keberhasilan yang sudah direncanakan.

d. Controlling

Merupakan kegiatan pembandingan antara rencana dan hasil. Dimana hal ini dimaksudkan agar hasilnya tidak berbeda dengan yang direncanakan di awal. Jika terjadi perbedaan, siklus dapat dilanjutkan dengan rencana baru. Jika sudah direncanakan maka perlu diperiksa dahulu agar tidak ada kesalahan yang sama terulang kembali.

Manajemen perencanaan pembangunan daerah merupakan perencanaan untuk suatu daerah, bukan perencanaan dari suatu daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah hal ini dipandang sebagai peningkatan penggunaan sumberdaya publik yang tersedia di daerah dan peningkatan kapasitas sektor swasta untuk menghasilkan sumberdaya swasta bertanggungjawab. Kemudian perlu juga keseimbangan dalam rencana yang matang dalam penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta untuk memastikan pembangunan daerah yang efisien. (Pasaribu) mengatakan bahwa dengan ada elemen berbeda yang berinteraksi satu sama lain (Kato et al., 2021). Dalam melakukan proses manajemen pembangunan terdapat pendekatan dan koordinasi berdasarkan dimensi terdiri antara lain:

- 1) Perencanaan makro, dilakukan dalam skala makro atau secara keseluruhan. Memuat berbagai pertumbuhan ekonomi yang pesat, besar tabungan masyarakat dan pemerintah yang akan tumbuh dan hal hal lainnya secara makro ekonomi. Adanya penelitian ini adalah untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu rencana dengan perhitungan variabel mikroekonomi.
- 2) Perencanaan sektoral, pendekatannya berdasarkan sektor. Sektor adalah kegiatan kegiatan yang memiliki karakteristik dan tujuan yang sama.
- 3) Perencanaan wilayah/regional, pendekatan yang berfokus pada lokasi kegiatan dilakukan.

- 4) Perencanaan mikro, perencanaan dengan skala rinci dalam perencanaan tahunan meliputi penjabaran rencana makro, sektoral, regional dalam program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran.



Pada gambar diatas terlihat bahwa perencanaan makro merupakan perencanaan lebih besar daripada yang lain dan juga menaungi perencanaan sektoral, regional, dan mikro. Dari perencanaan tersebut saling berhubungan dan dapat disampaikan dalam 4 metode yaitu pendekatan rasional, perencanaan partisipatif, perencanaan advokasi, perencanaan komunikatif. Terdapat informasi yang diperlukan untuk melakukan manajemen pembangunan daerah yaitu kondisi pasar, kondisi fisik/lokasional, data kependudukan, karakteristik ekonomi, layanan jasa bagi masyarakat.

D. PEMBANGUNAN INDONESIA

1. Pelaksanaan Pembangunan Di Indonesia

Pembangunan merupakan proses yang dilakukan suatu negara dalam mengembangkan potensi yang dimiliki untuk memperkecil permasalahan di negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia sebenarnya sudah

berlangsung sejak Indonesia merdeka. Dalam hal ini, pembangunan bangsa Indonesia bahkan tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman dalam pembangunan tidak hanya dalam pembangunan ekonomi sebagai proses ekonomi melainkan suatu perubahan dalam hal politik, sosial, budaya. Apabila pembangunan dilakukan tapi tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dan bahkan mengakibatkan kesengsaraan di dalam masyarakat. Pelaksanaan pembangunan pada negara berkembang berbeda dengan teori yang disebutkan oleh para ahli, karena pada negara berkembang masih ada permasalahan yang tidak sederhana sehingga apabila suatu teori bisa dilaksanakan di suatu negara, namun belum tentu bisa digunakan di negara lain. Apabila dalam pembangunan hanya berfokus pada pembangunan ekonomi maka hanya akan berfokus pada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan pembangunan tidak hanya untuk meningkatkan ekonomi, namun memiliki tujuan seperti mencegah kemiskinan, dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, pemerataan pendapatan serta memperluas lapangan kerja. Di Indonesia, dewasa ini masih terdapat ketimpangan pembangunan walaupun pembangunan ekonomi berjalan seperti pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan (Purnamasari,2019)..

Ketidakterataan pembangunan di Indonesia menyebabkan kesenjangan pendapatan, kemiskinan, kesempatan kerja belum dapat ditanggulangi. Oleh karena itu, pembangunan di Indonesia dapat berkaitan dengan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata serta dapat mengembangkan kehidupan masyarakat dan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila (Idris Patarai, 2016). Pembangunan daerah merupakan pemerataan pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengoptimalkan segala potensi daerah yang dinamis dan bertanggung jawab serta memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa (Kato et al., 2021).

Dalam pembangunan daerah berkaitan dengan desentralisasi atau otonomi daerah yang integrasi berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah

harus memahami integrasi nasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam memberdayakan potensi daerah. Potensi suatu daerah berdampak adanya perbedaan sektoral dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menyebabkan perbedaan tingkat pembangunan daerah. Desentralisasi merupakan cita-cita Indonesia merdeka.

Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah, namun pelaksanaan pemerintah Indonesia tidak hanya pada pemerintah daerah apalagi dalam pembangunan. Penyelenggaraan pembangunan di Indonesia tetap mengacu pada program nasional sehingga seringkali menyebabkan permasalahan antara pemerintah daerah yang harus sama dalam mewadahi kelembagaan pemerintah pusat. Permasalahan yang memerlukan analisis sehingga dapat menumbuhkan persamaan antara pembangunan pusat dan daerah.

Melakukan penerapan dan pemahaman secara mendasar mengenai pembangunan nasional merupakan cara mengatasi permasalahan serta strategi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan desentralisasi pemerintah di Indonesia

2. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah

Menurut Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 merupakan rangkaian akhir dari pembangunan jangka panjang tahun 2005. Tujuan dari desentralisasi dan otonomi daerah yaitu sebagai upaya mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayani dengan lebih kuat dan nyata agar meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketentraman bagi masyarakat. Pelaksanaan pemerintah yang selalu patuh pada peraturan yang telah ditentukan sehingga pemerintah daerah melaksanakan tugas, wewenang serta kewajibannya secara baik. Di Indonesia landasan dalam melaksanakan otonomi daerah berdasarkan Undang - Undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Beberapa peran pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah (Siwu,2019).

a. Entreprenur

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menjalankan usaha bisnis seperti dapat mengembangkan seperti BUMD (Badan Usaha Milik

Daerah). Selain itu, pemerintah daerah mengelola secara baik sehingga dapat menguntungkan.

b. Koordinator

Pemerintah daerah menetapkan dan mengusulkan strategi untuk pembangunan di daerahnya sehingga pemerintah dapat melibatkan masyarakat, lembaga pemerintah dalam penyusunan sasaran ekonomi, rencana dan strategi.

c. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan proses pembangunan, prosedur perencanaan dan pengaturan penetapan daerah melalui perilaku atau budaya masyarakat.

d. Simulator

Pemerintah daerah menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan khusus yang mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah dan membuat menetap dengan cara pembangunan kawasan industri, membantu industri kecil melakukan pameran.

Selain itu, pemerintah berkomitmen dalam pembangunan daerah untuk mencapai peningkatan pembangunan pada bidang pertanian. Dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam membentuk perilaku yang berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat (Firdaus, 2020) :

a. Peran pemerintah sebagai regulator

Pemerintah membuat arah dalam penyeimbangan pembangunan dengan menerbitkan peraturan-peraturan dalam tertib administrasi pembangunan.

b. Peran pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah dengan menggerakkan berbagai pihak partisipasi.

c. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah menciptakan kondisi dalam pelaksanaan pembangunan dengan menjembatani berbagai pihak dalam pengoptimalan pembangunan daerah.

d. Peran pemerintah sebagai katalisator

Pemerintah mempercepat pengembangan potensi daerah.

Pada pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam melaksanakan seluruh bidang pembangunan daerah salah satunya bidang hukum yang diamanatkan dalam RPJMN dan RPJMD. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembangunan hukum sesuai dengan setiap kebutuhan daerah. Peran pemerintah tidak hanya pada pembangunan hukum melainkan memperkuat peran pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai bidang. Dalam pembangunan bidang hukum pemerintah daerah berfokus pada tiga agenda yang berkaitan dengan wewenang pemerintah daerah (Ruhmana & Nugraha, 2021).

a. Sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif

Dalam hal ini, pemerintah daerah mendukung dengan regulasi dalam perumusan peraturan daerah mengenai ketentuan pidana serta mendukung dalam pembinaan dan membimbing WBP.

b. Pelaksanaan SPPA

Peran pemerintah daerah dengan mendukung pembangunan LPKS serta memberikan pendamping seperti tenaga pekerja sosial.

c. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin

Pemerintah daerah berpartisipasi aktif dalam penyediaan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu untuk menyewa pengacara atau bantuan hukum lainnya.

Pada pembangunan daerah peran dan wewenang pemerintah sangat penting, tetapi partisipasi masyarakat merupakan hal yang dibutuhkan dalam pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dimana masyarakat dilakukan dengan individu maupun kelompok. Partisipasi masyarakat sendiri dapat terpenuhi dengan adanya faktor pendukung seperti adanya kemauan, kemampuan dan kesempatan berpartisipasi.

3. Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan

Monitoring merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantau kegiatan pembangunan dengan cara mengumpulkan informasi serta memberikan informasi guna mengetahui kemajuan dan kekurangan pembangunan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuan. Evaluasi adalah serangkaian proses untuk menentukan hasil dari pengambilan keputusan dalam rangka menjamin suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan kriteria yang

sudah ada (Kato et al., 2021). Hubungan antara monitoring dan evaluasi sendiri memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga memiliki peran serta fungsi yang penting dalam sebuah kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan pembangunan. Monitoring dan evaluasi memiliki persamaan karena digunakan dalam pengendalian kegiatan pembangunan. Selain itu perbedaan berupa waktu, apa yang akan diukur, siapa yang terlibat serta penggunaan hasilnya (Kato et al., 2021).

Kato (2021) menyatakan bahwa tujuan monitoring dan evaluasi (monev) adalah langkah yang diberikan dalam rangka persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dalam kegiatan sehingga hasil dari evaluasi dan monitoring dapat menjadikan informasi dalam acuan kebijakan dan pengambilan keputusan yang ditinjau dari segi objek dan subjek. Menurut BPKAD Banjar (2018) tujuan dari pelaksanaan monev (monitoring dan evaluasi) pembangunan (Kato et al., 2021):

- a. Mempelajari kegiatan sesuai dengan perencanaan
- b. Mengidentifikasi permasalahan sehingga dapat diatasi
- c. Membandingkan penilaian antara pola kerja dan manajemen untuk mencapai tujuan pembangunan yang baik
- d. Memahami antar kegiatan yang bertujuan memperoleh ukuran kemajuan
- e. Menempatkan kegiatan perubahan lingkungan tanpa menyimpang dari tujuan.

Manfaat monitoring dan evaluasi dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan keterampilan serta pengumpulan informasi atau data sehingga menghasilkan analisis yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mendasari kebijakan yang diambil. Selain tujuan, BPKAD Banjar (2018) menjabarkan manfaat penerapan monitoring dan evaluasi (Kato et al., 2021):

- a. Sebagai alat dalam mendukung perencanaan
Penerapan monitoring dan evaluasi beserta pemilihan serta penggunaan indikator dalam pencapaian tujuan. Pemilihan indikator dilakukan oleh berbagai pihak yang mendukung suksesnya pembangunan.
- b. Sebagai alat mengetahui kemajuan program
Dengan adanya monitoring dan evaluasi kemajuan serta hambatan saat dilakukannya pembangunan dapat atasi pada waktu yang tepat. Hasilnya

dapat diinformasikan sesuai atau tidaknya dengan tujuan, apabila belum memenuhi tujuan maka dilakukan tindak penyesuaian secara cepat dan dapat diperbaiki sesuai dengan implementasi pembangunan.

c. Sebagai alat akuntabilitas program dan advokasi

Monitoring dan evaluasi tidak hanya berfokus pada aktivitas tetapi hasil. Sehingga saat hasil dipublikasi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas pembangunan serta sebagai bahan masukan bagi advokasi.

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dibutuhkan prinsip yang baik agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. BPKAD Banjar menjelaskan beberapa prinsip yang dibutuhkan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan (Kato et al., 2021):

- a. Secara sederhana berdasarkan kapasitas dan sumber daya yang tersedia
- b. Mempunyai tujuan yang jelas
- c. Dilakukan secara tepat waktu
- d. Hasil monitoring dan evaluasi harus akurat dan objektif
- e. Sistem monitoring dan evaluasi bersifat partisipatif dan transparan
- f. Dibuat secara fleksibel
- g. Bersifat action-oriented
- h. Dilakukan secara cost-effective
- i. Terdiri dari ahli yang bertugas mengumpulkan data, menganalisis masalah dan memecahkan masalah

Walaupun pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak selalu dilakukan dengan mudah karena adanya hambatan atau permasalahan. Manik (2011) menjelaskan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai berikut (Kato et al., 2021):

- a. Dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan laporan lainnya belum menjadi kebutuhan dasar dalam perbaikan kerja, serta kualitas pengendalian masih rendah.
- b. Masih rendahnya kemampuan pekerja dalam perencanaan pembangunan
- c. Informasi dan data masih berkualitas rendah
- d. Belum adanya optimal mengenai kinerja audit

- e. Kurang jelasnya mekanisme pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah
- f. Rendahnya kualitas dalam materi pelaporan

Dalam hal ini monitoring dan pengawasan pembangunan di Indonesia diharapkan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Selain itu, dilakukan oleh aparat pemerintah guna pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pada tingkat pemerintah maupun daerah.

A. INDIKATOR PEMBANGUNAN DERAH

1. Indikator Pembangunan Daerah

Dalam pembangunan daerah terdapat beberapa indikator antara lain :

a. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita Baik dari sisi GNP maupun PDB, pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dari segi ekonomi, indikator ini merupakan bagian yang dapat diukur dari kesejahteraan manusia untuk menjelaskan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pendapatan per kapita tampaknya menjadi indikator ekonomi makro yang tidak dapat diabaikan, meskipun dengan beberapa kelemahan. Selama ini pertumbuhan pendapatan nasional dijadikan sebagai tujuan pembangunan negara-negara di Dunia Ketiga. Seolah-olah ada anggapan bahwa peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi) secara otomatis menunjukkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa penggunaan indikator ini akan mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

b. Struktur ekonomi

Peningkatan pendapatan per kapita dianggap mencerminkan perubahan struktural dalam ekonomi dan kelas sosial. Dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan per kapita, maka kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan terus meningkat. Perkembangan sektor industri dan peningkatan tingkat upah akan meningkatkan permintaan produk industri, diikuti oleh

perkembangan investasi dan peningkatan angkatan kerja. Di sisi lain, kontribusi pertanian terhadap pendapatan nasional akan menurun.

c. Urbanisasi

Urbanisasi dapat didefinisikan sebagai peningkatan proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Jika pertumbuhan penduduk perkotaan adalah nol, maka urbanisasi tidak akan terjadi. Menurut pengalaman industrialisasi di negara-negara Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk perkotaan berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Artinya, urbanisasi akan semakin cepat sebagai respon dari proses industrialisasi yang cepat. Di negara maju mayoritas penduduknya tinggal di perkotaan, sedangkan di negara berkembang sebagian besar tinggal di pedesaan. Berdasarkan fenomena tersebut, urbanisasi dijadikan sebagai salah satu indikator pembangunan.

d. Tingkat tabungan

Investasi dan modal diperlukan untuk pengembangan sektor manufaktur / industri selama tahap industrialisasi. Kapital finansial merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi masyarakat, seperti yang terjadi di Eropa pada umumnya di Inggris pada awal pertumbuhan kapitalisme setelah Revolusi Industri. Dalam masyarakat yang produktif, modal usaha ini dapat diperoleh melalui tabungan swasta dan pemerintah.

e. Indeks Kualitas Hidup

IKH atau Physical Quality of Life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kekayaan masyarakat. Indikator ini dibuat sebagai indikator ekonomi makro yang tidak dapat memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat ketika mengukur keberhasilan finansial. Misalnya, pendapatan nasional suatu negara dapat tumbuh dengan mantap tanpa meningkatkan manfaat jaminan sosial. Indikator ini dihitung berdasarkan (1) angka harapan hidup pada usia 1 tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Pada indikator ini, angka harapan hidup dan kematian bayi dapat merepresentasikan status gizi, status kesehatan, dan lingkungan keluarga anak dan ibu yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dapat merepresentasikan jumlah penduduk yang dapat dididik sebagai hasil pembangunan. Variabel ini

merepresentasikan kekayaan masyarakat karena status ekonomi keluarga yang tinggi mempengaruhi status masyarakat.

2. Pembangunan Antar Wilayah Secara Berimbang

Dari perspektif penelitian ilmu pemerintahan, pembangunan daerah yang ideal adalah daerah pembangunan yang seimbang antar wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan, serta antar wilayah barat, tengah dan timur Indonesia. kawasan/pembangunan daerah yang dijelaskan dalam undang- undang nomor. 32 tahun 2004 bertujuan untuk memperbaiki ketidaksetaraan dan ketimpangan pembangunan antar daerah, termasuk antardaerah ketimpangan kewenangan dan pendanaan antara pusat dandaerah. Namun pada kenyataannya, tujuan ideal otonomi daerah adalah amanat undang-undang no. 32 tahun 2004 bukanlah keberhasilan yang optimal. Kondisi sebaliknya hanya terjadi dengan otoritas lebih luas ke wilayah Kabupaten/Kota, tepatnya dalam hal pembangunan daerah atau regional di wilayah tersebut telah terjadi ketimpangan.

Banyak penggunaan lahan yang disalahgunakan, baik wilayah laut dan laut. Milik pribadi atau kolektif kerusakan lebih lanjut terhadap tanah dan lingkungan di daerah tersebut. Seri Hutan ditebang karena penebangan liar bertanggung jawab, banyak daerah pertambangan batu bara dan pasir sungai diregenerasi dan tercemar oleh limbah industri dan penambangan pasir, dan banyak hutan mangrove pesisir yang terkikis karena banyaknya pembangunan hotel/resort dan tempat wisata. Kondisi ini hanya sebagian kecil akibat dari ketidakseimbangan melaksanakan pembangunan daerah. Terjadinya disparitas wilayah disebabkan oleh: beberapa faktor. Rustiadi menjelaskan bahwa elemen kunci disparitas wilayah, yaitu: 1) geografi; 2) sejarah; 3) kebijakan; 4) peraturan Pemerintah; 5) administrasi; 6) sosial budaya; dan 7) ekonomi. Dari sudut pandang kebijakan pemerintah, misalnya, hari ini pembangunan lebih berfokus pada pertumbuhan dalam membangun tiang pertumbuhan tanpa memperhatikan tata kelola ruang teritorial dan peruntukan tanah, yang mengarah pada perbedaan regional cukup signifikan.

Dampak yang paling terlihat adalah penipisan sumber daya yang berlebihan. Atas dasar kondisi tersebut, pemerintah dengan menetapkan kebijakan pembangunan ke depan perlu memperhatikan berbagai aspek termasuk keseimbangan pembangunan daerah. Idealnya, pembangunan daerah

(wilayah / wilayah) keseimbangan adalah pertumbuhan dari berbagai daerah untuk meningkatkan pengembangan kapasitas dan kebutuhan mereka. Itu penting menyiratkan bahwa tidak semua daerah membutuhkan tingkat perkembangan industrialisasi, ekonomi, atau kebutuhan pembangunan yang sama. Bentuk homogen dalam pembangunan antar daerah tidak tepat di sini. Obligasi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam konteks tata kelolayang baik bagaimana mendapatkan pertumbuhan yang optimal dari potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah/daerah berdasarkan kapasitas dan kekuatannya. Keseimbangan antar wilayah sangat penting karena hubungan antar wilayah dapat mengurangi kesenjangan antar daerah, dan pada akhirnya berpotensi meningkatkan pembangunan ekonomi daerah secara global.pemerintah membutuhkan pembangunan daerah yang seimbang dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Pembangunan ekonomi secara simultan dan bertahap;
 - b. Untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat;
 - c. Untuk mengoptimalkan peningkatan kapasitas dan konservasi sumber daya;
 - d. Untuk meningkatkan lapangan kerja;
 - e. Mengurangi beban jaringan Pertanian;
 - f. Mempromosikan desentralisasi;
 - g. Untuk menghindari spiral konflik tak terkendali dan ketidakstabilan politik hancur;
 - h. Untuk membangun ketahanan nasional. Tujuan ideal pembangunan diharapkan bahwa daerah keseimbangan akan tercapai secara bertahap dan akhirnya mencapai kondisi ideal untuk pengembangan daerah. Dalam hal ini, komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat bersama-sama untuk mencapai pembangunan daerah keseimbangan.
- 1) Keterpaduan antar daerah dan antar daerah dalam konteks pembangunan pesisir untuk menciptakan keterpaduan pengelolaan pembangunan sektoral dan daerah perencanaan tata guna lahan pesisir.
 - 2) Pendekatan bottom-up atau mengutamakan peran masyarakat (proses perencanaan partisipatif) dalam melaksanakan pembangunan zona pesisir yang transparan dan akuntabel untuk lebih memenuhi beragam kontribusi dan aspirasi semua pelaku dalam pelaksanaan pembangunan.

- 3) Kerjasama Antar Daerah (antara provinsi, kota yang dikelola pusat dan kota pesisir, antara daerah perkotaan dan pedesaan, dan antara daerah hulu dan hilir) untuk menciptakan sinergi pengembangan wilayah pesisir dengan mempertimbangkan prakarsa, potensi dan kepentingan lokal, serta meminimalkan potensi konflik melintasi daerah.
 - 4) Penegakan hukum yang konsisten – baik PP, Keppres dan Perda untuk menghindari kepentingan sepihak dan untuk membangun pembagian peran yang “seimbang” di antara para pemangku kepentingan (stakeholder).
3. Keterkaitan Desa Dan Kota Dalam Pembangunan

Dalam pembangunan desa-kota teori migrasi dan wilayah mungkin tidak dapat dipisahkan, karena desa dan kota adalah wilayah yang berbeda dan selalu terjadi migrasi desa ke kota. Pembangunan desa merupakan salah satu upaya meningkatkan kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat menjadi lebih adil dan seimbang. Dikotomi desa kota dan hierarki desa kota menyebabkan segala macam masalah baik pembangunan maupun pembangunan daerah-daerah, pendikotomian dalam perencanaan pembangunan desa dan pembangunan kota harus dihindari, bahkan sebaiknya lebih mengedepankan kolaborasi di antara kedua administrasi pemerintahan yang membawahkan desa-kota (Douglass, 1998). Ada juga perbedaan regional desa kota yang berkembang selanjutnya, masalah pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Konsep pembangunan daerah dievaluasi dapat mengatasi basis alternatif masalah. Selain itu, teori migrasi juga dapat digunakan dalam analisis pembangunan desa, konsep dari sangat relevan dengan penggunaannya populasi minimum dan jarak tempuh maksimum, meskipun terdapat beragam motivasi untuk melakukan migrasi, namun alasan ekonomi selalu lebih dominan dibandingkan dengan alasan lainnya. Migrasi juga memiliki asosiasi dengan jarak, dengan tingkat migrasi antar dua titik akan berhubungan terbalik dengan jarak di antara kedua titik tersebut. Para migran yang bersedia bermigrasi jarak jauh umumnya menuju pusat-pusat industri (Grigg, 1977)

Motif utama untuk perkotaan pembangunan desa adalah untuk mendapatkan kehidupan dan mengisi perikehidupan desa. Hal ini umumnya diterima di bermigrasi budaya-budaya baru . Alasan lain mengapa desa ini dipandang sebagai penghambat pembangunan karena dari desa ini kurang dari kedaulatan dan jauh dari pemerintahan kota. Hal ini disebabkan regulasi yang

mengatur hal itu, yang didasarkan pada posisi kedaulatan yang selalu diadakan oleh desa. Data BPS pada bulan Maret 2015 laporan yang mengatakan bahwa jumlah orang-orang miskin Periode Maret 2015 sebanyak 28. 59 juta orang (11.22% dari total penduduk Indonesia), dua Di daerah perkotaan (sebesar 10,65 juta orang) dan di daerah pedesaan (17.94 juta penduduk). Tingkat kemiskinan meningkat sebesar 860 ribu orang di 27.73 juta orang pada periode September 2014.

4. Manajemen Pembangunan Lingkungan Perkotaan

Pembangunan lingkungan perkotaan memerlukan upaya manajemen untuk membantu mewujudkan keinginan maupun tujuan dalam pembangunan atau pengembangan lingkungan perkotaan.

Kota menurut Alan S. Burger “The City” yang diterjemahkan oleh Dyayadi dalam bukunya Tata Kota menurut Islam (dalam Achmad, 2018) adalah permukiman permanen dengan penduduk yang heterogen, dimana kota memiliki berbagai fasilitas yang terintegrasi membentuk suatu sistem sosial dan seterusnya. Secara geografis, menurut Profesor Bintarto (1983) kota didefinisikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan yang dicirikan oleh kepadatan penduduk yang tinggi dan dicirikan oleh strata ekonomi yang heterogen dan pola materialistis atau dapat juga diartikan sebagai lanskap budaya yang disebabkan oleh unsur alam dan non alam dengan gejala – gejala konsentrasi penduduk yang cukup besar dengan gaya hidup yang heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah di belakangnya.

Undang – Undang No. 24 tahun 1992 mendefinisikan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Menurut Surat Keputusan Menteri dalam negeri No. 65 tahun 1995, Manajemen perkotaan adalah pengelolaan sumber daya perkotaan yang berkaitan dengan bidang-bidang tata ruang, lahan, ekonomi, keuangan, lingkungan hidup, pelayanan jasa, investasi, prasarana dan sarana perkotaan. Richard E. Stern menyatakan bahwa manajemen perkotaan setidaknya mencakup empat elemen, yaitu (i) proyek pembangunan perkotaan dalam konteks kawasan perkotaan dan pertimbangan kelembagaan; (ii) fokus pada

sumber daya keuangan daerah untuk memperkuat desentralisasi; (iii) memfokuskan pada alternatif-alternatif penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kota, seperti air bersih, transportasi, listrik, kesehatan dan persampahan; dan (iv) perhatian untuk mencari dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelayanan perkotaan.

5. Strategi Pembangunan Daerah Pesisir Mandiri

Indonesia merupakan negara maritim yang mana banyak daerah yang berada diantara atau batasan daratan dan laut. Berdasarkan Databoks.id Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia mencapai 99.083 km. Hal ini menunjukkan bahwa daerah pesisir di Indonesia sangat luas. Daerah pesisir merupakan daerah pertemuan antara daratan dan laut. Dalam UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Menurut Sugiarto (1976) wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh karakteristik laut seperti pasang surut, angin laut, dan rembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alam, yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, serta yang disebabkan oleh aktivitas manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Berdasarkan pengertian – pengertian daerah pesisir di atas, dapat disimpulkan bahwa daerah pesisir adalah daerah yang berada diantara daratan dan laut yang masih dipengaruhi oleh perubahan proses alam. Namun, tidak hanya itu daerah pesisir juga merupakan titik temu aktifitas ekonomi masyarakat dimana sumber daya disalurkan melalui daerah pesisir.

Daerah pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek – aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Wilayah pesisir memiliki perbedaan dengan wilayah daratan, mulai dari sumber daya alam yang melimpah dan memiliki ekosistem yang lebih beragam. Menurut Dahuri (1996), bahwa potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan secara garis besar terdiri dari tiga kelompok (1) sumberdaya yang dapat pulih (*renewable resources*) (2) sumberdaya tak dapat pulih (*non-renewable resources*) dan (3) jasa-jasa

lingkungan (*environmental service*). Posisi daerah pesisir ini sangat strategis yang mana dapat mempengaruhi sektor lain di daerah sekitar. Oleh karena itu, pembangunan dan penataan yang baik dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk upaya mewujudkan desa pesisir yang mandiri. Kemandirian desa pesisir dapat dicapai dengan partisipasi warga untuk mengambil alih dalam setiap tahapan penataan dan pengembangannya.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pesisir dapat dimulai dengan menggali potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menambah daya tarik. Dalam mengembangkan kemungkinan yang ada, warga dapat membentuk organisasi atau kelompok untuk mengembangkan kemungkinan yang diberikan oleh alam. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang dikembangkan dan menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat. Terwujudnya desapesisir yang mandiri mudah dicapai melalui dorongan dan partisipasi masyarakat yang kuat, peran aktif pemerintah, dan kontribusi pihak swasta. Menurut Sumardjo dan Saharudin (2006) dalam Dahlan (2013) diperlukannya partisipasi masyarakat karena partisipasi berarti : membuat program sukses dengan lebih aman dan lebih cepat, mendekatkan pihak perencana/pengelola dengan kebutuhan kelompok sasaran, media untuk mengasah keterampilan masyarakat, hubungan kekerabatan dan kepercayaan diri, sekaligus mencapai partisipasi aktif sebagai ciri masyarakat modern.

Daerah pesisir bisa sangat mempengaruhi atau menjadi masa depan Indonesia karena luasnya daerah pesisir yang ada di Indonesia. Daerah pesisir ini memiliki potensi yang sangat melimpah namun pada kenyataannya banyak dari populasi masyarakat pesisir yang tergolong miskin. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan "tingkat kemiskinan di wilayah pesisir sebesar 4,19 persen, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dari jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 10,86 juta jiwa, 12,5 persen atau 1,3 juta jiwa di antaranya berada di wilayah pesisir" (saat memimpin Rapat Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Pesisir di Istana Wapres).

Menurut Sudrajat (2013), Masih banyak tantangan yang harus di hadapi dalam pembangunan wilayah pesisir meliputi:

- a. Upaya penanggulangan kemiskinan yang masih banyak menimpa masyarakat nelayan,

- b. Peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir, dan
- c. Pengendalian masalah lingkungan hidup sebagai akibat aktivitas ekonomi di wilayah pesisir maupun wilayah daratan. Ketiga tantangan tersebut meskipun tampak terpisah, tetapi sesungguhnya sangat berkaitan satu sama lain. Ketidak berdayaan menghadapi satu tantangan dapat menyebabkan semakin sulitnya menghadapi tantangan pembangunan yang lainnya.

Oleh karena itu perlunya upaya pengembangan di daerah pesisir. Agar upaya pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik kita perlu merumuskan strategi. Diharapkan nantinya daerah pesisir dapat menjadi daerah pesisir yang mandiri dimana warga ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan pengembangan.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan ekosistem wilayah pesisir (Rahman A., dkk (2018)) yaitu (1) berusaha mengembalikan produktivitas yang hilang akibat perusakan hutan yang gundul melalui kegiatan penanaman kembali secara terus menerus dan melindungi hutan yang tersisa (2) menciptakan teknologi baru untuk pengelolaan kawasan pesisir yang ramah lingkungan (3) Rehabilitasi dan perlindungan kawasan pesisir penting lainnya yang dianggap sama (4) perlunya politisi yang berpotensi sebagai pemimpin daerah untuk mewujudkan undang-undang tentang wilayah pesisir, perikanan dan melembagakan pengelolaan wilayah pesisir sebagai wilayah dengan hak khusus.

6. RpjM Dalam Sistem Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (disingkat RPJM Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhitungkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berubah setiap lima tahun setelah hasil pilkada. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan titik awal dan terpenting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang dibahas setiap tahun karena berkaitan dengan penganggaran. Jika salah dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta kebijakan, akan berimplikasi pada penyusunan dokumen penganggaran. Jika penetapan tujuan dan sasaran dianggap tepat dan benar serta logis, maka derivasi dokumen perencanaan

tahunan termasuk dokumen penganggaran tidak akan sulit. Dengan demikian dokumen perencanaan tahunan hanya mengikuti perencanaan sebelumnya.

Rencana pembangunan jangka menengah lebih bersifat operasional jika dibandingkan dengan rencana pembangunan jangka Panjang. Pada tingkat satuan kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perencanaan pembangunan jangka menengah dituangkan dalam bentuk rencana strategis OPD yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Urutan kegiatan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yaitu (1) Penyiapan Rancangan Awal Rencana Pembangunan; (2) Penyiapan Rancangan Rencana Kerja; (3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan; (4) Dan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan. Jika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilakukan dengan pendekatan perencanaan partisipatif, maka terlebih dahulu dihimpun aspirasi dan keinginan masyarakat mengenai visi dan misi serta arah pembangunan sebelum disusun teks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selanjutnya, rancangan teks tersebut akan didiskusikan dalam Musrenbang untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan pembangunan lalu setelah semua pendapat maupun kritikan yang diperoleh dimasukkan maka naskah final RPJMD dapat disusun.

Kelemahan teknis dalam penyusunan RPJMD, terutama karena para perencana umumnya sangat terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas dibandingkan dengan yang ada di provinsi. Unit-unit yang ada umumnya adalah staf administrasi, sebagian besar tidak memiliki keahlian khusus di bidang perencanaan pembangunan, terutama dalam penyusunan RPJMD.

BAB X

PENDAPATAN NASIONAL

A. PENDAPATAN NASIONAL

Lambang Y merupakan lambang dari pendapatan nasional dimana penemu dari lambang tersebut adalah Sir William Petty yang pertama kalinya, di Inggris tahun 1665. Dulunya namanya bukanlah pendapatan nasional tetapi pendapatan masyarakat dimana nilainya dari pendapatan setahun ditambah dengan penerimaan upah masyarakat. Negara menerima pendapatan yang diperoleh dari keuntungan perusahaan negara, bunga, dan juga sewa dimana dalam hal ini juga termasuk kedalam pengeluaran masyarakat. Sir William Petty memang waktu itu menggunakan sistematika yang spesifik dilanjutkan oleh Gregory King tahun 1696 dimana Gregory menambahkan salah satu unsur dari pendapatan nasional yaitu nilai investasi. (Luis & Moncayo, 2021)

Selain dari Inggris negara yang menghitung pendapatan nasional pada tahun 1600an yaitu negara Perancis yang dilakukan oleh Pierre le Pesant de Boisgullebert tepatnya tahun 1690an. Selanjutnya di lanjutkan oleh Marshall Vauban yang memberikan penyempurnaan dalam perhitungan dan memperluas cakupan pendapatan nasional tahun 1700an. Pada tahun 1800an pendapatan nasional di hitung menggunakan metode pendekatan produksi oleh Francois Quesnay dan beberapa fisiokrat lainnya kemudian dilanjutkan oleh Lavoiser. (Luis & Moncayo, 2021)

Negara yang ketiga yaitu Rusia, dimana pada tahun 1800an BFG Hermann dan AN Radishchev melakukan perhitungan pendapatan negaranya. Kemudian negara keempat yang melakukan perhitungan pendapatan nasional yaitu negara Amerika Serikat. Negara ini melakukan perhitungan pendapatan nasional pada tahun 1843 oleh George Tucker. Kemudian disusul oleh negara-negara lainnya sampai ada 13 negara yang sudah melakukan perhitungan pendapatan nasional. Setelah perang dunia malah menjadi semakin bertambah lagi negara yang menghitung pendapatan nasional negaranya yaitu sejumlah 33 negara tahun 1939. Selanjutnya jumlah negara yang melakukan pendapatan nasional terus meningkat sampai saat ini. Kemudian Keynes membuat teori “The General Theory” yang isinya mengenai pendapatan nasional. (Luis & Moncayo, 2021)

Amerika merupakan pelopor yang memberlakukan perhitungan menggunakan konsep PNB sekitar tahun 1940an serta menerapkan PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar tahun 1990an. Setiap negara memiliki acuan dalam menghitung pendapatan nasional masing-masing. Misalnya saja Amerika mengacu pada SNA, NIPA, sedangkan orang Eropa mengacu pada ESA. (Luis & Moncayo, 2021)

1. Pengertian pendapatan Nasional

Menurut Sir William Petty yang mencetuskan mengenai pendapatan nasional pada tahun 1665, pendapatan nasional merupakan gabungan dari penerimaan yang diperoleh masyarakat dalam satu tahun atau lebih. Banyak ahli ekonomi modern yang menentang pendapat tersebut karena alat ukur suatu kegiatan perekonomian. (Luis & Moncayo, 2021)

2. Pentingnya Pendapatan Nasional

Alat ukur rendah dan tinggi tingkat kemakmuran suatu negara disebut pendapatan nasional. Pendapatan nasional menjadi alat yang penting dalam mengukur seberapa makmurnya kehidupan rakyat suatu negara atau bangsa dimana dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan metode kuantitatif, hasilnya adalah tingkat kemajuan suatu negara dan tingkat kehidupan dapat di tentukan menggunakan pembandingan jumlah penduduk dan jumlah pendapatan nasional. Nama lain dari konsep ini adalah pendapatan perkapita dimana apabila pendapatan perkapita belum bisa menggambarkan tingkat kemajuan dari rakyat. (Luis & Moncayo, 2021).

Suatu negara memerlukan susunan perekonomian untuk kemajuan negaranya. Susunan perekonomian negara dapat kita temukan di pendapatan nasional. Dapat kita lihat dari kontribusi setiap sektornya, dimana setiap sektor perekonomian digunakan dalam penyusunan pendapatan nasional. (Luis & Moncayo, 2021).

3. Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Ada 3 faktor yang dapat menjadi pengaruh terhadap pendapatan nasional:

a. Penawaran dan Permintaan Agregat

Keseluruhan barang dan juga daftar jasa yang dibeli dengan harga variatif dan beragam dalam sektor perekonomian suatu negara disebut dengan penawaran dan permintaan agregat. (Luis & Moncayo, 2021)

b. Konsumsi dan Tabungan

Kita perlu mengetahui apa itu konsumsi dan tabungan. Konsumsi merupakan keseluruhan pengeluaran dimana kita mendapatkan suatu jasa dan barang dalam satu periode perekonomian. Tabungan merupakan salah satu keperluan yang menjadi bagian dari penerimaan yang tidak digunakan. (Luis & Moncayo, 2021)

c. Investasi

Pengertian dari investasi adalah seluruh pengeluaran yang dapat digunakan dalam menciptakan sebuah model baru yang tujuannya adalah menggantikan model lama atau model yang telah rusak dan dapat menambah dalam menyediakan modal yang sudah ada. (Luis & Moncayo, 2021)

4. Jenis-Jenis Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional memiliki beberapa jenis seperti:

a. Produk Domestik Bruto

Produk domestik bruto merupakan seluruh output berupa barang maupun jasa yang diproduksi di dalam wilayah suatu negara (domestik) selama suatu periode. Ketika menghitung PDB seluruh pasar, penting untuk dicatat bahwa tidak boleh ada penghitungan ganda atau ganda. Konsep PDB mencakup barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga suatu negara, baik yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri.

b. Produk Nasional Bruto

Produk Nasional Bruto, atau GNP, adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (di tingkat nasional) selama periode waktu tertentu. Harus ditekankan bahwa penghitungan ganda tidak disarankan ketika menentukan jumlah GNP berdasarkan harga pasar. Output produk dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara di dalam atau diluar negeri, tetapi tidak termasuk dalam output produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara itu, termasuk dalam GNP ini.

c. Produk Nasional Neto

Produk Nasional Neto (PNB) adalah jumlah PNB dikurangi alat-alat produksi pengganti. Penyusutan pada peralatan yang digunakan membuat barang manufaktur seringkali interpretatif dan menyebabkan kekeliruan,

meskipun terhitung rendah. Depresiasi merupakan hilangnya barang lama karena telah digunakan.

d. Pendapatan Nasional Netto

Uang yang diperoleh dari balas jasa yang dihasilkan oleh masyarakat sebagai ganti kepemilikan unsur-unsur produksi dikenal sebagai pendapatan nasional neto (NNI). Besaran NNI yang dapat dihitung dengan mengurangi pajak tidak langsung dan dukungan pemerintah dari NNP. Pajak tidak langsung, seperti pajak penjualan barang, pajak impor barang, pajak ekspor, dan pajak cukai, adalah kontribusi yang diperlukan yang bobotnya dapat diteruskan kepada orang lain. Hibah adalah jenis bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat.

e. Pendapatan perseorangan

Pendapatan pribadi adalah jumlah gaji yang diterima oleh setiap penduduk komunitas, dan dapat juga termasuk gaji yang dihasilkan tanpa melakukan kegiatan lain.

Penghasilan pribadi dapat dihitung dari NNI dikurangi:

- 1) Pajak perusahaan, yaitu pajak yang dibayarkan dari organisasi bisnis kepada pemerintah.
- 2) Laba ditahan, yaitu jumlah laba yang masih ditahan dalam suatu usaha untuk beberapa kepentingan, seperti dalam bentuk peningkatan wilayah usaha.
- 3) Iuran Pensiun adalah besarnya pengeluaran yang diberikan oleh pegawai dan perusahaan dengan maksud untuk memberikan gaji pada saat pegawai mencapai usia tertentu dan tidak bekerja lagi.
- 4) Asuransi adalah suatu bentuk kesepakatan antara dua pihak di mana salah satu pihak harus membayar premi atau pihak lain harus memberikan semua jaminan kepada para kontributor.
- 5) Pendapatan pribadi termasuk pembayaran transfer. Pembayaran transfer adalah pembayaran nasional yang dilakukan kepada beberapa kalangan tertentu dan bukan merupakan kompensasi atas partisipasi mereka dalam produksi tahun berjalan, seperti pembayaran pensiun, tunjangan pengangguran, tunjangan veteran, dan utang publik tambahan, dll.

f. Disposable Income

Disposable income merupakan pendapatan yang bisa digunakan untuk belanja atau digunakan. Pendapatan sekali pakai berasal dari pendapatan perseorangan yang telah dikurangi pajak langsung. Pajak langsung yaitu iuran wajib yang harus dibayarkan yang tidak dapat dihindarkan maupun diserahkan kepada pihak lain oleh wajib pajak kepada pihak ketiga. Contoh pajak penghasilan. (Luis & Moncayo, 2021)

5. Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

Ada beberapa cara perhitungan pendapatan nasional antara lain 3 yaitu:

a. Metode Produksi

Perhitungan yang pertama yakni dengan cara produksi, yang mana pendapatan nasional merupakan keseluruhan jumlah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh keseluruhan sektor ekonomi dalam 1 negara. Perekonomian ini nantinya dapat dibagi bagi ke dalam sektor ekonomi maupun pekerjaan. Hasil dari penjumlahan sektor ekonomi dan pekerjaan yang dapat sebagai tujuan menghitung pendapatan nasional dari waktu ke waktu pada dalam 1 lingkup negara. Pendapatan nasional memiliki perhitungan yakni:

$$\text{Rumus : } (Q_1 + P_1) + (Q_2 + P_2) + (Q_3 + P_3) + \dots + (Q_n + P_n)$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional

P1 = Harga ke 1

Pn = Harga ke n

Q1 = barang ke 1

Qn = barang n

b. Metode Pendapata

Perhitungan kedua adalah menghitung pendapatan yang tercipta, yaitu jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh seluruh sektor ekonomi suatu negara selama periode satu tahun. Masyarakat merupakan entitas ekonomi dengan faktor produksi yang nantinya akan diuntungkan oleh output usaha. Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan tenaga ahli merupakan faktor produksi. Mereka yang memiliki sumber daya alam seperti tanah yang akan disewakan (sewa). Mereka yang memiliki personel akan diberi upah (gaji). Mereka yang memiliki uang akan dapat

memperoleh bunga. Ini juga akan menguntungkan bagi mereka yang memiliki anggota (Profit).

$$\text{Rumus : } Y = w + r + i + p$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

r = Upah, Gaji, dan Lainnya

w = Sewa

i = Bunga

p = Laba

c. Pendekatan Pengeluaran

Perhitungan yang ketiga yakni dalam metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang digunakan oleh semua sebagian perekonomian. Perekonomian di Indonesia juga dibagi menjadi beberapa kelompok yakni menjadi empat sektor yang identik menurut metode pendapatan.

Hasil penghitungan pendapatan nasional dengan tiga metode teoretis harus menghasilkan hasil yang sama, untuk negara yang sama pada tahun yang sama. Jika terdapat perbedaan, nilainya biasanya lebih kecil. Dari ketiga metode tersebut, yang paling sering dan umum digunakan oleh beberapa negara di dunia adalah metode chi atau metode pendekatan. Berdasarkan pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional (Y) merupakan keseluruhan pengeluaran oleh rumah tangga, bisnis dan pemerintah; dan juga perdagangan luar negeri seperti ekspor (X) dan impor (M).

Pelaku ekonomi di sektor rumah tangga adalah perorangan atau rumah tangga. Yang bergerak di bidang usaha adalah industri atau perusahaan. Instansi penegakan di sektor publik adalah pemerintah pusat dari negara yang bersangkutan.

Pengeluaran konsumen oleh pemerintah atau masyarakat umum yang merupakan bagian dari pendapatan yang belum ditabung mencerminkan seluruh pengeluaran sektor rumah tangga. Simbol C, yang merupakan singkatan dari Konsumsi, digunakan untuk menunjukkan total pengeluaran rumah tangga. Nilai investasi perusahaan (investment expenditure) yang

diwakili oleh I digunakan untuk menghitung total pengeluaran sektor usaha. Pengeluaran berulang pemerintah (belanja publik), dilambangkan dengan G, disebut sebagai pengeluaran agregat sektor publik. Akibatnya, berdasarkan Pendekatan Pengeluaran, pendapatan nasional (Y) dapat dihitung sebagai $Y = C + I + G$.

Menurut gambaran ini, perekonomian negara tertutup, artinya tidak ada hubungan dengan pihak luar atau negara lain. Karena ada ekspor (X) dan impor (M) pada saat perekonomian terbuka, maka rumus Y menjadi $Y = C + I + G + (X - M)$. Model ekonomi makro didasarkan pada rumus di atas. Ini digunakan sebagai alat analisis dan dasar kebijakan ekonomi makro oleh akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan pemerintah. (Luis & Moncayo, 2021)

Rumus: $Y = C + I + G + (X - M)$

Keterangan:

Y	= Pendapatan Nasional
C	= Konsumsi Rumah Tangga
I	= Investment
G	= Government Expenditure
X	= Ekspor
M	= Impor

6. Hubungan Antar Konsep Pendapatan Nasional

Konsep pendapatan terkait erat dengan konsep kekayaan. Rumah tangga komersial (RTB), rumah tangga umum (RTP), dan rumah tangga konsumen merupakan sektor-sektor yang terlibat dalam GNP (RTK). GNP tidak termasuk pemotongan. Karena bisnis ini akan digunakan untuk mengganti peralatan produksi yang rusak, pengurangan atau amortisasi ini mewakili sebagian dari uang yang pada akhirnya akan diinvestasikan dalam rumah tangga komersial. Dari NNI, pajak tidak langsung dipotong. Pajak tidak langsung ini dibayarkan kepada rumah tangga umum. Pajak pemerintah dikeluarkan guna membayar kegiatan pemerintah untuk kepentingan rakyat. Pendapatan nasional dikurangi laba ditahan dan laba perusahaan. Sisa pendapatan diakumulasikan untuk rumah tangga komersial dan pajak penghasilan badan diakumulasikan untuk

rumah tangga umum. Pendapatan sekali pakai atau pendapatan siap pakai mendapat keringanan pajak individu yang kemudian dibayarkan ke rumah tangga publik.

Pendapatan sekali pakai atau pendapatan siap pakai dilakukan untuk konsumsi guna memenuhi kebutuhan hidup, selebihnya ditabung. Tabungan ini dibayarkan kepada rumah tangga bisnis untuk digunakan.

GNP umumnya sama dengan GNI dengan GNP, sehingga produk-produk di dalamnya lebih banyak dibeli oleh masyarakat dan pendapatan dari GNI akan dibelanjakan. Ada berbagai jenis produk di GNP dan semuanya akan dibeli oleh orang-orang. Pemasok dari seluruh output GNP terdiri dari empat barang, yaitu:

- a. Kontribusi pembelian barang
- b. Investor membeli properti investasi
- c. Pemerintah
- d. pihak Asing ingin membeli barang yang nantinya akan diekspor

Pendapatan GNI dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan dan pembelian diperoleh seperti dalam GNP, yaitu:

- a. Investasi
- b. Konsumsi
- c. Belanja pemerintah
- d. Perdagangan Luar Negeri

Produk Nasional Bruto (GNP) adalah metrik yang umum digunakan untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara. Akibatnya, PDB setiap negara akan meningkat. GNP mungkin berfluktuasi dari tahun ke tahun karena variasi dalam jumlah pengeluaran yang dibuat atau tingkat harga pasar.

Satu-satunya perbedaan antara GNP dan PDB adalah apa yang dihitung, yang merupakan produksi dalam negeri atau luar negeri. serta apakah aset warga negara asing termasuk dalam perhitungan.

Dalam arti pendapatan warga negara asing di luar negeri diperhitungkan, tetapi bukan pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Sedangkan jika pendapatan orang asing di dalam negeri dimasukkan dalam perhitungan tetapi bukan pendapatan warga negara di luar negeri, maka hasilnya relatif terhadap GNP. Jika nilai PDB melebihi nilai GNP pada tahun atau periode tertentu, statistik

menunjukkan bahwa sejumlah besar modal asing berfungsi di negara tersebut. (Luis & Moncayo, 2021).

E. PENDAPATAN PERKAPITA

1. Pengertian Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata yang diperoleh masyarakat suatu negara. Pendapatan perkapita dapat diperoleh melalui jumlah total pendapatan nasional suatu negara dibagi dengan jumlah masyarakat yang ada di negara tersebut. Dengan begitu dapat mengetahui besaran pendapatan rata – rata yang diperoleh masyarakat setempat atau biasa disebut dengan pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita ini biasa digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada masyarakat, sehingga pendapatan rata – rata yang diperoleh masyarakat bisa dijadikan tolak ukur untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Selain digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada masyarakat, pendapatan perkapita juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengukur seberapa besar kesejahteraan masyarakat dan juga sebagai pembanding kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, semakin tingginya pendapatan perkapita masyarakat maka tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin tinggi dan semakin maju. (Masniadi, 2012).

Pendapatan perkapita dapat digunakan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Dengan hal tersebut secara tidak langsung mengetahui bagaimana suatu pemerintahan di daerah dari mulai memberikan berbagai hak yang wajib diberikan kepada suatu penduduk. Mulai dari hak mendapatkan penghidupan yang layak, hak melanjutkan pendidikan, hak menggunakan fasilitas umum, hak memilih pekerjaan dan lain sebagainya. Berbagai macam hak tersebut juga bisa menjadi faktor kualitas hidup penduduk yang berdampak kepada mayoritas pekerjaan penduduk di suatu daerah dan menghasilkan pendapatan rata – rata masyarakat setempat. Sebagai contoh di suatu daerah dengan jumlah penduduk yang banyak namun mereka pengangguran atau dengan kata lain tidak mempunyai pekerjaan dengan hal tersebut berdampak pada pendapatan perkapita. Maka pentingnya suatu daerah yang sejahtera dengan pendapatan perkapita tinggi akan mampu memiliki kualitas hidup yang lebih baik, diantaranya mulai dari tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, angka harapan hidup dibandingkan dengan daerah yang

kurang sejahtera. Secara umum, pendapatan perkapita tinggi maka berdampak pada standar hidup dan kualitas hidup penduduk yang juga mengikutinya. (Hanum & Sarlia, 2019).

Indikator pendapatan perkapita berkaitan dengan pendapatan nasional yang sama bertujuan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan dalam lingkup negara berbeda dengan pendapatan perkapita yang fokus hasil dari pendapatan suatu daerah. Adanya jumlah penduduk di suatu negara menjadi pembagi untuk pendapatan nasional yang nantinya menghasilkan pendapatan perkapita suatu negara. Pendapatan perkapita yang naik secara terus menerus dalam waktu panjang hal tersebut dapat dikatakan suatu perekonomian negara berkembang. Dengan data pendapatan nasional dari tahun ke tahun berguna untuk memperkirakan perekonomian di masa yang akan datang. Untuk merumuskan perekonomian di masa datang dalam mewujudkan pembangunan menjadi penting terutama bagi seseorang yang ingin melakukan bisnis. (Masniadi, 2012).

Kaitannya pendapatan nasional dengan pendapatan perkapita ialah suatu pendapatan nasional bisa terbentuk karena pendapatan perkapita masyarakat, sebaliknya juga jika tidak ada pendapatan nasional pendapatan perkapita masyarakat pun tidak dapat diketahui, jadi pendapatan nasional dengan pendapatan perkapita saling berhubungan satu sama lain. Pendapatan nasional yang tinggi menyebabkan pendapatan perkapita dalam masyarakat juga tinggi, hal itu menyebabkan tingkat kesejahteraan dalam masyarakat pun terpenuhi. Dengan terpenuhi kesejahteraan masyarakat maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah pun meningkat dan berjalan dengan baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik mempengaruhi pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang berjalan dengan baik, maka kebutuhan negara juga akan tercukupi dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat. (Hanum & Sarlia, 2019)

Pendapatan perkapita dengan berbagai penjelasan detail diatas bahkan berkaitan pada pendapatan nasional suatu negara ternyata digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran penduduk setempat. Selain itu adanya fungsi pendapatan perkapita antara lain mengetahui tingkat kesejahteraan negara dan masyarakat, menganalisis kelancaran aktivitas perekonomian negara, mengetahui perkembangan ekonomi masyarakat dan negara dalam waktu

tertentu, dan dasar pengambilan kebijakan di masa datang. Terdapat juga komponen pendapatan perkapita antara lain pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Tentunya ada berbagai faktor yang menentukan naik turunnya suatu pendapatan perkapita diantaranya mulai dari kualitas sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Unsur penting yang menjadi perbandingan dari tahun ke tahun adanya perhitungan pendapatan perkapita dan manfaatnya. (Thanthirige et al., 2016).

2. Fungsi Pendapatan Perkapita

Terdapat beberapa fungsi pendapatan perkapita bagi suatu negara adalah sebagai berikut.

a. Mengetahui Tingkat Kesejahteraan Negara & Masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa pendapatan perkapita digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan perkapita yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan tersebut dapat kita lihat melalui kebutuhan masyarakat yang terpenuhi baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, akan tetapi paling utama ialah kebutuhan primer masyarakat yang sudah terpenuhi. Dari indikator tersebut menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat sudah terjamin. Selain itu, bisa melihat dari perhitungan pendapatan perkapita bahwa suatu negara sudah makmur atau sejahtera belum.

b. Menganalisis Kelancaran Aktivitas Perekonomian Negara

Pendapatan perkapita tidak hanya digunakan sebagai alat ukur kesejahteraan masyarakat, akan tetapi dengan adanya perhitungan pendapatan perkapita juga dapat menganalisis kelancaran aktivitas perekonomian negara. Karena dengan tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang tinggi dapat dinyatakan bahwa aktivitas perekonomian pada masyarakat berjalan dengan baik. Karena perekonomian yang baik akan mendapat keuntungan yang tinggi, pendapatan yang diperoleh masyarakat pun tinggi, sehingga pendapatan rata – rata masyarakat pun tinggi. Maka dari itu kelancaran aktifitas perekonomian negara disebut berjalan dengan baik, jika pendapatan perkapita masyarakat tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

c. Mengetahui Perkembangan Ekonomi Masyarakat & Negara dalam Waktu Tertentu

Pendapatan perkapita masyarakat setiap tahunnya memiliki perbedaan, terkadang pendapatan perkapita masyarakat naik, tetapi bisa juga pendapatan perkapita masyarakat turun. Pendapatan perkapita yang berubah juga di pengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu negara dan pendapatan nasional yang diperoleh. Sehingga jika perkembangan ekonomi berjalan dengan baik, maka pendapatan perkapita masyarakat tinggi, sehingga jika ingin mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi masyarakat bisa dilihat pendapatan perkapita masyarakat setiap tahunnya. Jadi informasi mengenai pendapatan perkapita masyarakat setiap tahunnya digunakan sebagai analisis dan melihat perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun.

d. Dasar Pengambilan Kebijakan di Masa Mendatang

Pendapatan perkapita bisa digunakan sebagai alat ukur kesejahteraan masyarakat, mengetahui perkembangan ekonomi masyarakat dan negara. Oleh karena itu informasi pendapatan perkapita masyarakat juga bisa digunakan sebagai alat pertimbangan pengambilan kebijakan untuk menanggulangi masalah perekonomian negara. Dengan begitu pengambilan kebijakan bisa diputuskan secara matang dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Jadi masalah perekonomian yang timbul baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang sudah terdapat kebijakan untuk menanggukangi masalah tersebut. Selain itu juga bisa memprediksi masalah ekonomi yang akan datang. Dengan menerapkan kebijakan yang tepat tujuan ekonomi yang telah direncanakan oleh negara pun bisa tercapai. (Azizah et al., 2018)

3. Komponen Pendapatan Perkapita

Terdapat komponen-komponen yang berpengaruh pada perhitungan pendapatan perkapita, selain berpengaruh pada perhitungan pendapatan perkapita komponen ini m juga menentukan besar kecilnya pendaptan perkapita yang diperoleh. Kompenen tersebut antara lain sebagai berikut,

a. Pendapatan Nasional

Komponen yang berpengaruh terhadap pendapatan perkapita adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah dari

keseluruhan pendapatan yang diperoleh negara pada satu periode. Pendapatan nasional memiliki perbandingan yang lurus dengan pendapatan perkapita, karena kedua pendapatan tersebut saling mempengaruhi satusama lain. Semakin tinggi pendapatan nasional yang diperoleh, maka semakin tinggi juga pendapatan perkapita masyarakat. Dan sebaliknya jika pendapatan nasional yang diperoleh mengalami penurunan, maka pendapatan perkapita masyarakat juga akan mengalami penurunan. Sehingga tingkat pendapatan perkapita ditentukan dengan besarnya tingkat pendapatan nasional yang diperoleh.

b. Jumlah Penduduk

Selain total pendapatan nasional yang diperoleh sebagai komponen pendapatan perkapita, jumlah penduduk pada suatu negara juga mempengaruhi seberapa besar tingkat pendapatan perkapita yang diperoleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan semakin banyak jumlah penduduk disuatu negara maka semakin sedikit pendapatan perkapita. Jadi jika jumlah penduduk terus bertambah pada suatu negara dan tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan nasional yang diperoleh maka pendapatan perkapita masyarakat akan mengalami defisit. Sehingga antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk berbanding terbalik. Karena jika tingkat jumlah penduduk pada suatu negara meningkat maka akan menyebabkan penurunan pendapatan perkapita. (Azizah et al., 2018).

4. Faktor Sebagai Penentu Naik Turunya Pendapatan Perkapita

Ada berbagai faktor sebagai penentu naik turunnya pendapatan perkapita sebagai berikut.

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor terpenting dalam peningkatan pendapatan perkapita. Dengan hanya jumlah penduduk yang banyak namun kualitas sumber daya manusia tidak mampu bersaing menjadi hal yang percuma. Sebagai contoh negara Indonesia dengan banyak beragamnya sumber daya alam yang dapat dikelola didukung dengan teknologi semakin canggih, namun sumber daya manusia tidak mampu mengelolanya dengan baik maka akan berdampak pada penghasilan pendapatan perkapita yang menjadi berkurang. Maka hal

seperti inilah menjadi perhatian khusus pemerintah dalam selalu memperbaiki kualitas sumber daya manusia dari tahun ke tahun.

b. Sumber Daya Alam Berpendidikan Tinggi

Mampu memiliki etos kerja yang tinggi, profesionalitas, sikap disiplin tinggi, ketrampilan baik dan lain sebagainya. Faktor pendidikan juga menjadi hal penting dalam menghasilkan mayoritas pekerja di suatu negara yang tentunya berdampak pada penghasilan pendapatan perkapita. Sebagai contoh banyak penduduk dengan berpendidikan tinggi didukung dengan adanya revolusi industri 4.0 yang semakin berkembang pesat digitalisasi maka tidak adanya rasa kecemasan tenaga kerja diganti dengan teknologi karena mampu bersaing dimanapun. Hal tersebut pentingnya memiliki sumber daya manusia dengan kualitas berpendidikan tinggi.

c. Potensi Sumber Daya Alam

Suatu negara mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang tidak diragukan dapat dengan mudah mengelola sumber daya alam yang ada tentu menjadi peluang besar menghasilkan pendapatan perkapita tinggi. Bahkan rugi besar jika suatu negara tidak memanfaatkan hal tersebut dengan sebaik-baiknya karena sumber daya alam yang melimpah menjadi kekuatan besar sebagai penghasil untuk memproduksi barang maupun jasa dan lain sebagainya yang mampu menembuh pasar internasional. Penting kesadaran setiap penduduk untuk menjaga dan merawat sumber daya alam yang sudah ada serta mengembangkan sebijak mungkin.

d. Modal untuk Mengelola Sumber Daya Alam

Pendapatan perkapita akan meningkat jika suatu negara selain adanya kualitas sumber daya manusia dan potensi sumber daya alamnya. Tentu penting didukung dengan modal yang mencukupi untuk mengelola sumber daya alam tersebut yang sangat melimpah. Karena tanpa adanya modal juga menjadi pengaruh penting untuk keberlangsungan memproduksi dan mengembangkan yang nantinya berdampak pada pendapatan perkapita. Sebagai contoh suatu negara kekurangan modal maka secara logika akan menarik investor agar menanamkan modal di suatu negara tersebut, biasanya dengan investor asing yang menanamkan modalnya dengan mendirikan perusahaan hal tersebut tentu tidak baik.

Dengan semakin banyak perusahaan yang dimiliki oleh orang asing maka penduduk negara sendiri hanya menjadi pegawai yang tidak sepatutnya sebagai contoh.

e. Teknologi yang Memadai

Tingkat teknologi juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi pendapatan perkapita. Sudah dijelaskan bahwa sekarang semakin berkembang pesat suatu teknologi kalau dalam suatu negara hanya mempunyai teknologi yang sederhana maka tentu akan sulit untuk bisa bersaing menghasilkan suatu barang maupun jasa dalam jumlah banyak dengan waktu yang relatif cepat. Sebagai contoh suatu perusahaan memproduksi makanan ringan atau snack jika didukung dengan teknologi yang canggih akan menghasilkan jumlah banyak tentu memberikan feedback untuk perusahaan menghasilkan pendapatan meningkat tiap tahunnya karena barang tersebut terjual banyak di berbagai tempat. Sedangkan jika masih menggunakan teknologi sederhana yang mampu memproduksi banyak namun dalam waktu relatif lama maka akan memakan waktu lama yang berakibat kalah saing dengan perusahaan lain yang lebih cepat dalam proses pemasaran ke berbagai tempat.

f. Kebijakan Pemerintah

Suatu negara yang pemerintahannya mempunyai kebijakan sesuai dengan tepat sasaran baik di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lainnya. Jika kebijakan pemerintah tersebut dilaksanakan sesuai tanggung jawab tentu memiliki pengaruh penting untuk pendapatan perkapita secara tidak langsung akan mengalami kenaikan. Aktivitas ekonomi ada kaitannya dengan dinamika politik, jika sering terjadi konflik atau permasalahan yang kompleks akan berpengaruh pada pelaksanaan ekonomi berakibat pada pendapatan perkapita. Memang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dengan menetapkan kebijakan yang sesuai agar stabilitas keamanan terjaga dengan baik.

g. Letak Keadaan Geografis dan Geologis

Letak geografis dan geologis suatu negara menjadi penting dalam pengaruh meningkatnya maupun berkurangnya pendapatan perkapita. Hal tersebut sebagai contoh letak geografis dan geologis berkaitan dengan adanya bencana alam maka jika letaknya tidak baik akan mengakibatkan

berbagai bencana akan terjadi kerusakan – kerusakan yang perlu modal dari pemerintahan untuk memperbaiki berdampak pada berkurangnya pendapatan perkapita. Namun, jika letak geografis dan geologis baik jarang terjadi bencana alam tentu memberikan keuntungan karena meningkatnya pendapatan perkapita. Dengan demikian, pentingnya kesadaran penduduk untuk merawat dan melestarikan alam semesta yang ada. (Azizah et al., 2018).

5. Perhitungan Pendapatan Perkapita

$$IPC = \frac{\sum GNP}{\sum Pop}$$

Keterangan :

IPC (Income Per Capita)	= Pendapatan per kapita
\sum GNP	= Jumlah pendapatan nasional kotor
\sum Pop	= Jumlah penduduk

Manfaat perhitungan pendapatan perkapita sebagai berikut :

- Mampu mengetahui tingkat perbandingan dari tahun ke tahun terkait kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- Bukti sebagai data perbandingan dari suatu negara ke negara lain berkaitan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- Mampu mengetahui tingkat standar hidup dan kualitas hidup penduduk dengan membandingkan ke negara lain
- Dasar pengambilan kebijakan ekonomi yang tentu berkaitan dengan berkurangnya maupun mengalami peningkatan pendapatan perkapita suatu negara.
- Dengan semakin tinggi pendapatan perkapita maka semakin tinggi pula pendapatan nasional di suatu negara. (Hanum & Sarlia, 2019).

BAB XI

PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Yang dimaksud dengan perdagangan adalah pertukaran antara barang dan jasa dengan bentuk uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat dan didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Sedangkan perdagangan internasional adalah transaksi bisnis yang melibatkan antara dua negara atau lebih untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan manfaat masing-masing. Yang dimaksud dengan perdagangan internasional adalah bukan negaranya yang berdagang tetapi penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Penduduk disini dapat dikatakan antara lain warga Negara biasa, sebuah perusahaan, sebuah organisasi nirlaba, ataupun suatu lembaga pemerintahan. Pentingnya perdagangan internasional karena disamping adanya perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi, secara realitanya semua kebutuhan di suatu negara, tidak ada satu negara pun yang mampu dicukup hanya dari hasil internal negara tersebut saja. Hubungan ekonomi internasional dengan perdagangan internasional sangat erat sekali, bahkan tidak dapat dipisahkan. Dimana ekonomi internasional menyediakan landasan teori ekonomi untuk mempelajari dan menganalisis hubungan ekonomi antar Negara, sedangkan perdagangan internasional merupakan aplikasi pelaksanaan perdagangan internasional. (Hidayat et al., 2018).

B. KONSEP DASAR PERDANGANAN INTERNASIONAL

Pertumbuhan ekonomi merupakan wacana yang ditonjolkan dalam perekonomian negara. Penyebab pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam pelaksanaan perekonomian negara, hal tersebut merupakan salah satu indikator pembangunan serta dianggap sebagai pencapaian dari perekonomian negara. Dalam hal ini perdagangan internasional dapat dijadikan sebagai indikator yang mampu menjadi penggerak bagi pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. (Internasional et al., n.d.).

C. PENGERTIAN DAN MANFAAT PERDANGAN INTERNASIONAL

Perdagangan internasional yaitu suatu kegiatan yang berkaitan dengan transaksi dagang yang dilaksanakan oleh individu dengan individu, individu dengan pemerintah ataupun negara satu dengan negara yang lain, biasanya berupa

transaksi barang ataupun jasa yang berguna untuk memenuhi beberapa kebutuhan dalam negeri serta untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang lebih banyak. (mankiw, 2016)

Perdagangan internasional biasanya terjadi karena adanya manfaat yang didapat oleh dua pihak karena perbedaan permintaan serta penawaran suatu barang atau jasa dari dua pihak yang bersangkutan. Perbedaan permintaan dan penawaran tersebut disebabkan adanya perbedaan harga, selera, dan pendapatan yang diperoleh masyarakat. (Internasional et al., n.d.)

1. Manfaat Perdagangan Internasional

a. Sumber Devisa

Salah satu manfaat perdagangan internasional yaitu sebagai sumber devisa. Selain dari Tenaga Kerja Asing (TKA), devisa juga dapat diperoleh dari perdagangan internasional. Dengan melakukan perdagangan internasional, negara dapat memperoleh mata uang asing.

b. Memperluas Lapangan Pekerjaan

Perdagangan internasional seperti ekspor sangat membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga perdagangan internasional dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

c. Meningkatkan Kualitas Konsumsi

Agar bisa bersaing di pasar internasional, industri dalam negeri tentunya akan meningkatkan kualitas barang yang diproduksi. Oleh karena itu, meningkatnya kualitas barang yang diproduksi akan meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat.

d. Menambah Pasar dan Keuntungan

Seperti sekarang ini, adanya perdagangan internasional akan menambah pasar dan keuntungan bagi perusahaan. Jika suatu perusahaan mengalami kelebihan dalam produksi, mereka tidak perlu takut karena bisa dijual ke pasar internasional.

e. Peningkatan Teknologi

Seperti yang dapat kita lihat bahwa di suatu negara berkembang biasanya belum memiliki teknologi yang memadai seperti negara maju. Dengan adanya perdagangan internasional masyarakat akan terdorong mengikuti pelatihan untuk mengejar ketertinggalan teknologi terhadap negara maju.

D. FAKTOR-FAKTOR PENDORONG DARI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. Perbedaan dari Sumber Daya Alam (SDA)

Perdagangan internasional sangat diperlukan oleh suatu negara dikarenakan perbedaan sumber daya alam dari setiap negara sehingga saling membutuhkan.

2. Perbedaan Teknologi

Seperti yang kita ketahui bahwa banyak negara berkembang yang melakukan impor barang dari negara maju karena negara maju memiliki teknologi yang lebih baik dari negara berkembang.

3. Keinginan untuk Meningkatkan Pendapatan Negara

Hal ini biasanya terjadi karena pada suatu negara mengalami kelebihan dalam produksi sehingga mereka memerlukan pasar internasional untuk menjual barang tersebut agar pendapatan negara meningkat.

4. Selera Masyarakat yang Tinggi

Selera masyarakat termasuk ke dalam faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional, hal tersebut karena banyak masyarakat dalam negeri yang lebih menyukai produk buatan luar negeri dengan alasan kualitasnya lebih bagus.

5. Memenuhi Kebutuhan dalam Negeri

Perdagangan internasional diperlukan karena biasanya ada beberapa barang yang masyarakat butuhkan tetapi tidak diproduksi di dalam negeri. (mankiw, 2016).

E. FAKTOR PENGHAMBAT PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. Mata Uang yang Berbeda

Perbedaan mata uang merupakan salah satu hambatan yang sering dihadapi ketika melakukan perdagangan internasional. Tiap-tiap negara pasti memiliki nilai mata uang yang besarnya berbeda. Jika nilai mata uang dari negara pengekspor jauh lebih besar dari pengimpor maka jika seharusnya membayar sesuai dengan nilai mata uang tersebut, negara pengimpor akan merasa terbebani dengan pengeluaran biaya yang cukup besar.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Rendah

Salah satu penyebab suatu negara sulit bersaing di pasar internasional adalah karena sumber daya manusianya yang cukup rendah. Dengan sumber daya

manusianya yang cukup rendah maka akan mempengaruhi kualitas produksinya.

3. Terjadi Perang

Perang menjadi faktor penghambat pelaksanaan perdagangan internasional. Perang akan berakibat pada hubungan dari satu negara dengan negara lain yang ikut serta dalam peperangan menjadi hancur. Selain itu perang juga akan berakibat pada perekonomian suatu negara akan terpuruk karena kas dari suatu negara digunakan untuk memenuhi kebutuhan perang.

4. Munculnya Mafia-mafia Ekonomi

Salah satu faktor penghambat perdagangan internasional adalah pasar gelap, pasar gelap sangat mengganggu perdagangan internasional. Mereka akan melakukan cara apa saja agar mereka mendapatkan barang. Selain itu kadang pasar gelap lebih menguasai perekonomian suatu negara daripada negara itu sendiri. (mankiw, 2016).

F. TEORI PERDANGAN INTERNASIONAL

1. Teori Keunggulan Mutlak

Teori ini dicetuskan oleh Adam Smith. Dalam teori yang dicetusnya, ia menyatakan bahwa jika sebuah negara mampu melakukan produksi barang dengan harga yang lebih rendah dari negara lainnya, maka negara yang berkaitan akan memperoleh keuntungan yang mutlak. Teori ini juga menyatakan bahwa jika satu negara dan negara lain memiliki barang dengan jenis dan harga yang sama maka tidak akan terjadi perdagangan internasional.

2. Teori Keunggulan Komparatif

Dalam teori yang dicetuskan oleh David Ricardo menyatakan bahwa perbedaan keunggulan komparatif antar negara merupakan salah satu penyebab terjadinya perdagangan internasional. Keunggulan komparatif sendiri terjadi apa bila sebuah negara mampu melakukan produksi barang atau jasa dengan jumlah yang banyak tetapi dengan biaya yang lebih sedikit dari negara lain. (Internasional et al., n.d.)

G. DAMPAK POSITIF DAN NEGATID DARI PERDANGAN INTERNASIONAL

1. Dampak Positif

- a. Meningkatkan keharmonisan antar negara

Jika dua negara melakukan perdagangan internasional sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh ke dua negara tersebut, maka akan meningkatkan rasa kepercayaan satu sama lain. Hal tersebut akan menyebabkan meningkatnya keharmonisan antar dua negara tersebut.

b. Menambah lapangan pekerjaan

Seperti manfaat dari perdagangan internasional di atas, salah satu dampak positif dari perdagangan internasional yaitu menambah lapangan pekerjaan. Dengan adanya perdagangan internasional, maka dunia perdagangan membutuhkan banyak tenaga kerja. Dengan dibutuhkannya banyak tenaga kerja berarti lapangan pekerjaan akan semakin luas sehingga akan tercipta sebuah kesejahteraan sosial.

c. Mempermudah masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhannya

Salah satu dampak positif dari perdagangan internasional yaitu mempermudah masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhannya, maksudnya ketika masyarakat membutuhkan suatu produk tetapi produk tersebut tidak ditemukan di negaranya maka melalui perdagangan internasional ia dapat menemukan barang yang ia inginkan dari negara lain.

2. Dampak Negatif

a. Munculnya sifat konsumtif masyarakat

Adanya perdagangan internasional menyebabkan peningkatan terhadap perilaku konsumtif, mengingat masyarakat yang cenderung tertarik dengan barang dari luar negeri dengan alasan barang yang diproduksi dari luar negeri kualitasnya lebih bagus daripada barang yang berasal dari dalam negeri. Hal tersebut harus kita hindari untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara serta agar negara tidak rugi.

b. Ketergantungan kepada negara lain

Seperti penjelasan di atas, ketergantungan kepada negara lain biasanya disebabkan karena barang yang diproduksi dari luar negeri memiliki kualitas yang lebih bagus dari barang yang diproduksi dari dalam negeri. Hal tersebut akan menyebabkan masyarakat ketergantungan kepada negara lain dengan memilih untuk membeli produk yang berasal dari luar negeri daripada dari dalam negeri.

c. Melemahkan rupiah

Dampak negatif yang selanjutnya yaitu perdagangan internasional dapat melemahkan rupiah. Jadi apabila suatu negara sering melakukan kegiatan impor daripada kegiatan ekspor maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap nilai mata uang rupiah. Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat diharap lebih mencintai produk dari negara sendiri daripada produk dari negara lain. (mankiw, 2016)

H. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DARI PERDANGANGAN INTERNASIONAL

1. Kebijakan Kuota

Dalam pelaksanaan perdagangan internasional terdapat kebijakan kuota diterapkan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada produk dari dalam negeri supaya tidak kalah dalam persaingan dengan produk dari luar negeri.

2. Tarif Pajak

Upaya untuk melakukan perlindungan terhadap produk yang berasal dari dalam negeri yaitu dengan menerapkan tarif pajak. Biasanya produk dari luar negeri memiliki tarif pajak dengan nilai yang lebih tinggi dari besarnya tarif pajak produk dalam negeri. Hal ini bertujuan supaya produk dari negara sendiri tidak kalah dalam persaingan dengan produk dari negara lain.

3. Politik Dumping

Politik dumping merupakan suatu kebijakan yang dilaksanakan dengan cara menerapkan harga lebih rendah untuk produk dari luar negeri dan harga lebih rendah untuk penjualan yang dilakukan di dalam negeri. Kebijakan ini termasuk ke dalam diskriminasi harga tingkat internasional dengan tujuan agar perluasan dan penguasaan pasar dapat dilakukan dengan mudah.

4. Larangan Ekspor

Larangan ekspor adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah tetapi hanya dalam waktu tertentu saja. Kebijakan ini diterapkan apabila terjadi kegiatan ekspor yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan pertimbangan ekonomi.

5. Larangan Impor

Larangan impor diterapkan guna melindungi produk dalam negeri, kegiatan impor yang dilakukan secara terus menerus akan menyebabkan rusaknya pasar dalam negeri. Selain itu larangan impor diterapkan untuk menghemat devisa. (Internasional et al., n.d.)

I. PERAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PEREKONOMIAN NEGARA

Ekspor mempunyai peran yang sangat penting sebagai penggerak perekonomian Negara, hal ini dikarenakan ekspor akan memberikan hasil devisa, dan nantinya devisa tersebut akan menghasilkan keuntungan yang akan diperlukan untuk pembiayaan impor dan pembangunan sector-sector lain dalam perekonomian Negara. Secara teoritis, pembangunan sector-sector di perekonomian untuk mengupgrade output maupun produksi, mengembangkan kesempatan kerja, pengembangan pendapatan masyarakat, yang nantinya akan memunculkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan output akan terjadi jika ada perubahan produktivitas dari faktor-faktor produksi dipergunakan, misalnya tenagakerja dan barang modal. Disamping itu, ekspor juga memberikan dampak efek positif terhadap pemindahan tempat sumber daya produksi dan kembali ke dalam skala dari perusahaan pengekspor. Sementara itu, jika Negara melakukan impor akan menjumpai dua problem yang timbul. Yang pertama, jika impor overweight ekspor lalu cadangan devisa akan menyusut, menyusutnya cadangan devisa dapat menjadikan dana bagi pembiayaan proses produksi didalam negeri menipis, dan setelah itu akan memberikan volume production didalam negeri menyusut. Yang kedua, jika separuh besar impor adalah barang konsumsi serta tidak barang modal atau barang pembantu produksi didalam negeri, alkisah ekskalasi impor tidak melimpah artinya untuk perkembangan ekspor. (Hidayat et al., 2018)

J. PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. Pengaruh Ekonomi Perdagangan Internasional
 - a. Pengaruh terhadap konsumsi masyarakat

Barang yang bukan diproduksi atau yang diproduksi barang tertentu didalam negeri yang dapat diterima dari luar negeri, dengan adanya perdagangan luar negeri yang mengakibatkan masyarakat menerima konsumsi barang dalam nilai melimpah dan lebih bermacam dibandingkan pra adanya perdagangan luar negeri. Kuantitas barang yang penuh di pasar menyebabkan price menjadi nisbi lebih ekonomis karena konvensional persaingan. Hal ini menandakan bahwa pendapatan riil masyarakat meningkat karena dengan total uang yang konsisten, masyarakat memperoleh pembelian barang dengan kuantitas yang

lebih banyak. Pengaruh lain dari perdagangan internasional yaitu terjadi efek demonstrasi. (Hidayat et al., 2018)

b. Pengaruh terhadap produksi

1) Dorongan ke arah spesialisasi produksi

Masing-masing Negara akan mengarahkan untuk mendorong perdagangan internasional menuju dikhususkan dalam produksi salah satu produk dimana Negara tersebut memiliki kelebihan berdasarkan perbandingan dan bersaing.

2) Meningkatkan surplus investibel

Peningkatan riil masyarakat hendak menimbulkan Negara tersebut dapat memisahkan dana sumber-sumber ekonomi yang overweight untuk investasi.

3) Vent for surplus

Membuka pasar baru yang lebih luas, sehingga produk yang awal mulanya menganggur akan memperoleh salurannya salah satunya melewati perdagangan internasional.

4) Kenaikan produktivitas dan efisiensi

Ada 3 sumber yang timbul akibat kenaikan produktivitas dan efisiensi:

1) Skala Ekonomis

Dengan adanya perdagangan internasional, perusahaan cenderung untuk memproduksi lebih banyak produk dan nantinya akan menimbulkan biaya produksi per unitnya menjadi semakin rendah.

2) Teknologi Baru

Penciptaan teknologi baru sehingga proses produksi hendak semakin mudah dan cepat yang hendak mengakibatkan biaya produksi menurun.

3) Rangsangan Persaingan

Hal ini hendak mengakibatkan terjadinya efektif untuk perusahaan memperoleh penjualan produk dengan price yang ekonomis, maka dari itu daya saing yang dimiliki lebih ekonomis juga.

4) Pengaruh terhadap distribusi pendapatan masyarakat

Terdapat dua perbedaan pendapat baik dari kelompok Neoklasik maupun kelompok ekonom. Kelompok neoklasik menyebutkan bahwasannya perdagangan luar negeri memiliki dampak lebih

berpacu meratakan distribusi pendapatan didalam negeri dan antar negeri. Sedangkan menurut kelompok ekonom menyatakan bahwa kaum neoklasik bantah dengan sejarah ataupun realita karena perdagangan bebas serta investasi sering digunakan untuk mengasah disparitas baik dari internal distribusi pendapatan antar Negara ataupun distribusi pendapatan antar warga Negara penduduk pada salah satu Negara.

2. Pengaruh Non Ekonomis Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan internasional tidak berdampak pada pengaruh ekonomi saja tetapi pengaruh non ekonomi juga terpengaruhi. Contoh pengaruh perdagangan internasional pada non ekonomi adalah pengaruh kultural, politik, militer, dan lain sebagainya. Contoh konkritnya semisal perdagangan terkait industri, dengan berkembangnya waktu jenis-jenis musik asing semakin lama akan mempengaruhi budaya masyarakat yang berada didalam negeri tersebut.

K. JENIS-JENIS PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. Ekspor

Ekspor terbagi membentuk dua macam :

- a. Ekspor biasa, merupakan pengiriman barang keluar negeri yang ditujukan kepada pembeli dengan menggunakan L/C serta sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Ekpor Tanpa L/C, merupakan merupakan sistem pengiriman dimana eksportir belum menerima L/C karena harus ada ijin khusus darikementrian perindustrian dan perdagangan akan tetapi barang sudah dikirimkan terlebih dahulu kepada pembelinya.

2. Barter

Jenis perdagangan internasional yang ini tidak jauh berbeda dengan perdagangan nasional pada zaman sebelum Indonesia merdeka yakni dengan cara menukarkan langsung antara barang satu dengan yang lainnya yang dibutuhkan oleh Negara tersebut. Jenis barter sendiri terdiri dari :

- a. Barter Langsung adalah sistem barter yang dibantu dengan alat yang dikenal sebagai penyebut nilai mata uang asing, dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara kliring dalam neraca perdagangan antara keduaneegara yang berpartisipasi dalam sistem barter.

- b. Switch Barter, ketika produk dipertukarkan tetapi salah satu negara tidak dapat menggunakan barang tersebut karena alasan tertentu, negara yang mengimpor barang tersebut memiliki opsi dan wewenang untuk mentransfer barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkan.
- c. Counter Purchase, merupakan sistem yang terdapat timbal balik didalamnya yang berhubungan dengan dua Negara. Contohnya Negara X menjual barang kepada Negara Y, maka Negara yang mempunyai sangkut paut dengan Negara Y harus membeli barang dari Negara Y bukan dari Negara X.
- d. Buy Back Barter, merupakan sistem untuk membantu menciptakan kapasitas produksi terutama pada Negara berkembang yang teknologi kurang berkembang daripada Negara yang telah maju, disini Negara maju akan menerapkan alih teknologi yang nantinya hasil produksi dari Negara berkembang akan dibeli kembali oleh Negara.

3. Konsinyasi

Konsinyasi internasional adalah tata cara pengiriman barang yang belum dipesan dari luar negeri. Barang yang dijual di pasar terbuka atau di lelang di bursa perdagangan di negara lain. Eksportir memilih agen yang ahli di salah satu komoditas, dan agen memeriksa kondisi barang yang dilelang, dengan memperhatikan jenis, jumlah, dan kualitas barang. Agen memberikan eksportir harga transaksi untuk produk yang akan dijual setelah memeriksanya. Harga lelang akan ditetapkan oleh panitia lelang berdasarkan situasi harga pasar saat ini dan perkembangan produk yang akan dilelang. Agen akan menggunakan harga yang telah ditentukan sebagai panduan saat membuat kesepakatan. Ketika lelang dimulai, agen berwenang untuk mengiklankan barang dengan harga pembeli, yang mungkin sama atau lebih besar dari harga lelang. Barang-barang yang diperoleh melalui prosedur lelang dapat dijual secara ilegal di luar lelang. Hanya individu yang berpartisipasi dalam komoditas untuk barang tertentu yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pelelangan.

4. Package Deal

Pemerintah, di bawah pendekatan ini, membuat kesepakatan perdagangan dengan salah satu negara yang ingin mengembangkan pasar, khususnya negara-negara sosialis. Perjanjian tersebut menentukan jumlah tertentu komoditas yang akan

diekspor ke negara itu, serta jumlah tertentu barang yang akan diimpor dari negara itu.

5. Penyelundupan (Smuggling)

Yang dimaksud dengan penyelundupan yaitu salah satu transaksi illegal yang bertujuan untuk memindahkan kekayaan dari satu Negara ke Negara yang lain secara diam-diam dan menentang peraturan yang berlaku pada suatu Negara pengekspor.

6. Border Agreement

Border agreement adalah persetujuan tertentu yang ditujukan penduduk yang berbatasan dari Negara satu dengan Negara yang lainnya sehingga mereka saling berhubungan dan diberikan kemudahan serta kebebasan dalam jumlah tertentu dan wajar. Border Agreement dapat terjadi melalui :

- a. (lintas batas laut), model perdagangan yang dilakukan dengan cara penyebrangan laut untuk melakukan transaksi antar Negara.
- b. Overland Border (lintas batas darat), model perdagangan yang dilaksanakan dengan cara setiap warga Negara melakukan transaksi dan korelasi dengan melintasi batas daratan sesuai persetujuan yang berlaku pada masing-masing Negara.

L. PEMBERITAHIAN PABEAN, BEA MASUK DAN BEA KELUAR

1. Pemberitahuan Pabean

Dengan bentuk dan syarat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibuat oleh seseorang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan disebut dengan pemberitahuan pabean. Contoh pemberitahuan pabean adalah pemberitahuan kedatangan alat angkut, pemberitahuan impor sementara, pemberitahuan ekspor barang dan pemberitahuan pemindahan barang dari satu kantor pabean ke kantor pabean lain dalam daerah pabean dan lain-lain. Dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang digunakan untuk melengkapi pemberitahuan pabean, misalnya invoice, bill of lading, packing list, dan manifes. Prinsip pengelolaan pemberitahuan pabean adalah wajib bagi pengangkut, importir, dan eksportir. Karena tidak semua pemilik usaha dapat menyelesaikan sendiri kewajiban kepabeanan atau ketentuan tata cara pelaksanaan kepabeanan, maka importir atau eksportir dapat memberikan kuasa kepada Pengusaha Pengelola Jasa Kepabeanan (PPJK) dalam hal

pengurusan pemberitahuan pabean tidak dapat dilakukan secara mandiri.

(Hidayat et al., 2018)

2. Bea Masuk

Bea masuk merupakan pungutan Negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk digunakan. Bea masuk dibagi menjadi dua kategori antara lain:

- a. Bea masuk yang berlaku umum, dimana besar bea masuk sudah dijelaskan pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).
- b. masuk khusus contohnya berupa bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan. Bea masuk tindakan pengamanan, serta bea masuk pembalasan dan masih banyak yang lainnya.

Jenis-Jenis Bea Masuk

a. Bea masuk berlaku umum

Diatur berdasarkan keputusan hukum agar menghindari kesewenang-wenangan pengenaan tarif, pemungutan bea masuk terhadap barang impor tarif setinggi-tingginya adalah 40% dari nilai pabean.

b. Bea masuk anti dumping

Bea masuk antidumping ini diberlakukan karena dampak dumping yang menyebabkan defisit pada industri dalam negeri yang memproduksi barang yang sama dengan barang tersebut, dan diduga barang tersebut berbahaya bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang yang sama. barang sebagai barang dan menciptakan hambatan pembangunan. Industri di dalam negeri Biaya impor anti-dumping dihitung dengan tarif maksimum berdasarkan selisih antara nilai normal negara penjual dan harga ekspor.

c. Bea masuk imbalan

Tarif impor, di sisi lain, dikenakan pada komoditas impor yang ditemukan disubsidi oleh negara pengekspor. Selisih antara subsidi dan pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk menggantikan subsidi dan biaya penerapan, kewajiban, atau kontribusi untuk memperoleh subsidi dikenakan tarif maksimum selisih antara subsidi dan pungutan yang dikenakan pada saat ekspor. untuk menggantikan subsidi dan biaya aplikasi, kewajiban, atau kontribusi untuk mendapatkan subsidi.

d. Bea masuk tindakan pengamanan

Tarif impor tindakan pengamanan dikenakan pada barang impor apabila terjadi peningkatan yang signifikan terhadap barang impor, baik absolut maupun relatif, dan kekurangan yang cukup besar pada industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis sebagai akibat dari peningkatan barang impor. Tarif impor untuk langkah-langkah keamanan dibatasi pada jumlah yang diperlukan untuk melindungi dari kerugian serius atau mengurangi prospek defisit domestik yang serius.

e. Bea masuk pembalasan

Apabila mendapatkan komoditas impor dari negara yang melakukan praktik ekspor yang diskriminatif, dikenakan bea masuk pembalasan. Bea masuk ini merupakan semacam perlindungan pemerintah terhadap produk- produk buatan dalam negeri.

3. Bea Keluar

Ketika barang-barang dikeluarkan untuk dikirim ke negara lain atau diekspor, pemerintah memungut bea keluar. Bea keluar dikenakan pada sejumlah barang yang terbatas, antara lain Minyak Sawit Mentah (CPO), Biji Kakao dan Konsentrat Mineral, Kayu Olahan dan Kulit (hewani). Tarif bea keluar ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Harga ekspor yang telah dipatenkan oleh Menteri Keuangan atas usul Kementerian Perdagangan, merupakan angka yang digunakan untuk menghitung bea keluar. Berbeda dengan bea masuk yang didasarkan pada nilai transaksi, bea keluar didasarkan pada harga patokan daripada nilai transaksi. Pemberitahuan pabean untuk ekspor dengan menggunakan perhitungan yang dilakukan secara mandiri oleh eksportir. Eksportir menghitung pungutan yang harus dibayar, setelah itu pejabat bea dan cukai meneliti hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen serta menetapkan bea keluar yang harus dibayar. Jika ada kekurangan bea keluar yang harus dibayar, eksportir wajib membayarnya; namun apabila eksportir tidak memenuhinya maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda. Jika ekspor kiriman batal, eksportir harus memberitahukan kepada petugas bea dan cukai. Eksportir yang tidak memberitahukan hal ini dan melanggar ketentuan pemerintah akan dikenakan denda Rp5.000.000 tunai (Lima Juta Rupiah). (Hidayat et al., 2018)

BAB XII

PEMBAYARAN INTERNASIONAL

A. PENGERTIAN SISTEM TRANSAKSI

Pembayaran yang melibatkan perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya atas transaksi yang dilakukan oleh Negara-negara disebut dengan pembayaran internasional. Pada umumnya pembayaran internasional ini dilakukan menggunakan bank. Transaksi-transaksi ekonomi internasional yang berada pada neraca pembayaran internasional pada umumnya berupa pemindahtanganan hak milik atas suatu benda dari orang satu ke tangan orang yang lain.(Ekananda, 2014)

B. CARA DAN ALAT TRANSAKSI INTERNASIONAL

1. Advance Payment / Cash Payment

Pembayaran ini biasanya disebut dengan pembayaran uang dimuka. Sistem pembayaran ini dilakukan dengan cara pembeli melakukan pembayaran kepada pihak penjual/eksportir sebagai syarat pengiriman barang. Pembayaran atas barang yang dipesan biasanya berupa pengiriman uang melalui bank. Kontrak bisnis yang bernuansa internasional sebagai bentuk pembayaran non L/C untuk kontrak bisnis disebut dengan advance payment. Cara pembayaran dengan advance payment mempunyai beberapa variasi diantaranya yaitu dengan payment with order dimana importir akan membayarkan terlebih dahulu sejumlah keseluruhan harga yang telah disepakati mulai dari ongkos angkut, asuransi dan semua biaya yang ditanggung. Dengan demikian maka importir telah menyelesaikan seluruh kewajibannya. Selain payment with order cara pembayaran yang kedua adalah melalui partial payment with order, dimana jika menggunakan sistem ini pembeli akan membayar sebagian kewajibannya saja dan untuk biaya-biaya yang disepakati akan dibayar jika eksportir telah mengirimkan barang/ menyelesaikan kewajibannya. Penagihan sisa pembayaran tersebut biasanya ditagih dengan menggunakan sistem collection. Cara pembayaran dengan advance payment ini sangat beresiko bagi importir yang telah menyelesaikan transaksinya diawal, karena bisa jadi eksportir tidak mengirimkan barangnya tepat waktu sesuai kesepakatan yang telah diperjanjikan ataupun bisa saja eksportir tidak mengirimkan barang

sesuai kualitas yang telah diperjanjikan sebelumnya. Oleh karena itu, kontrak bisnis dengan cara pembayaran advance payment ini tidak disarankan untuk kerjasama bisnis yang berhubungan baru pertama kali transaksi, sebaiknya yang melakukan pembayaran advance payment ini adalah mereka yang telah mempunyai hubungan kerjasama baik.

2. Open Account

Cara pembayaran ini yaitu antonim dari advance payment dimana pada cara ini eksportir mengirimkan barangnya terlebih dahulu tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen, pembayaran ini dilaksanakan terserah dari kebijakan importir. Resiko yang dialami eksportir jika menggunakan metode ini adalah eksportir harus mempunyai modal yang banyak dan jika nantinya importir mengirimkan menggunakan valuta asing lalu efek alterasi kurs membentuk tanggungan eksportir. Jika menggunakan cara pembayaran open account yang tercantum dalam dokumen ekspor nama pemilik barang menggunakan nama importir. Dokumen yang dilakukan dapat melalui bank yang diserahkan oleh eksportir kepada importir, namun hal itu hanya sebatas sebagai kurir saja.

Kelebihan dan kekurangan dengan metode open account adalah jika pada sisi importir, importir akan lebih leluasa untuk melihat barang yang telah dikirimkan eksportir dan memeriksa adakah barang yang cacat, dan spesifikasinya sesuai dengan yang diperjanjikan tersebut, dengan demikian jika barang tidak sesuai dengan perjanjian maka importir mempunyai kesempatan untuk melakukan penolakan atas pengiriman barang dari eksportir. Dan importir juga mempunyai waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan dana yang digunakan untuk pembayaran. Sedangkan kekurangan dari metode open account dirasakan oleh pihak eksportir karena semisalkan barang yang telah dikirimkan kepada importir akan tetapi importir tidak membayar barang tersebut dengan alasan apapun itu dan importir melakukan pembayaran tidak tepat waktu. Oleh karena itu eksportir akan rugi secara sendirinya sebab sudah berinvestasi atas barang tersebut serta biaya-biaya yang ditimbulkan bagi kebutuhan pengiriman barang tersebut.(Ekananda, 2014)

Sama halnya dengan pengiriman advance payment, metode ini dilakukan hanya cocok dengan mereka yang sudah mempunyai hubungan kerjasama

bisnis yang baik. Untuk penjelasan detailnya sudah dijelaskan pada advance payment tersebut.

3. Letter of Credit

Surat yang berisikan tentang permintaan pembeli barang (importir) yang dikeluarkan oleh bank, dimana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh eksportir merupakan pengertian dari Letter of Credit / L/C. Dengan kata lain, letter of credit (L/C) adalah instrumen yang dapat digunakan eksportir untuk menggantikan kredit bank dan memastikan pembayaran. Pembuka (importir), penerbit (bank yang menerbitkan L/C), penerima (eksportir), dan pada kenyataannya pihak ketiga, bank pengkonfirmasi, adalah semua pihak yang terlibat dalam L/C. (bank di negara pengekspor).

a. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari L/C.

- 1) Pembayaran yang dibayarkan kepada eksportir akan dijamin.
- 2) Importir dijamin menerima barang melalui bank yang akan menyerahkan pembayaran sesuai dengan L/C.
- 3) Bank memberikan kredit kepada eksportir dan importir.
- 4) Fasilitas untuk lindung nilai

b. Berikut ini adalah pertimbangan paling kritis untuk L/C:

- 1) Awalnya ditentukan apakah L/C dapat dibatalkan atau tidak dapat diubah.
- 2) Tanggal L/kedaluwarsa C
- 3) Apakah mungkin untuk memenuhi ketentuan L/C melalui transshipment atau pengiriman parsial?
- 4) Tanggal pengiriman

4. Commercial Bills of Exchange

Draft atau trade bills adalah sebutan lain dari commercial bills of exchange. Trade draft adalah surat yang ditulis oleh penjual yang ditujukan kepada pemberi yang berisikan perintah untuk membayar sejumlah uang dengan waktu tertentu di masa datang. Surat perintah tersebut sering disebut dengan wesel. Jenis draft terdapat beberapa yaitu diantaranya ada clean draft, dan documentary draft.

5. Collection

Cara pembayaran penjual adalah dengan meminta bantuan bank dalam menagih tagihan dari pembeli (collection). Eksportir berfungsi sebagai prinsipal, mempercayakan bank dengan mengumpulkan pembayaran dari importir. Bank akan menagih dengan menggunakan dokumen yang telah diamanatkan kepada bank untuk kemudian diserahkan kepada lembaga penagihan. Koleksi tersebut kemudian akan dikirim ke bank pengumpul sesuai dengan arah penagihan. Penagihan ke importir akan ditangani oleh bank pengumpul ini. Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai tata cara pembayaran untuk penagihan, metode pembayaran untuk penagihan dibagimenjadi dua kategori, dokumen lagi pembayaran dan dokumen melawan penerimaan, menurut URC 522.

Perbedaan antara dokumen lagi pembayaran dan dokumen lagi akseptasi adalah bahwa dengan dokumen lagi pembayaran, eksportir menahan dokumen kepemilikan barang dan hanya menyerahkan dokumen ekspor setelah importir membayar, sedangkan dengan dokumen akseptasi, eksportir menyerahkan dokumen ekspor. setelah importir menerima.

6. Konsinyasi

Konsinyasi merupakan cara pembayaran dengan variasi lain pada open account. Perbedaannya dengan open account adalah jika open account importir akan mengirimkan harga barang jika barang telah dikirimkan pada waktu tertentu yang telah disepakati, maka pada konsinyasi pembeli berkewajiban mengirimkan harga pembayaran barang setelah importir berhasil menjual barang kepada pihak ketiga.

Cara pembayaran konsinyasi cukup mempunyai resiko yang besar bagi eksportir karena memungkinkan terjadi wanprestasi sangat besar dalam keadaan tertentu yang sulit untuk dipantau. (Ekananda, 2014)

BAB XIII

KEBIJAKAN FISKAL

A. PENGERTIAN KEBIJAKAN FISKAL

1. Untuk sementara, penggunaan Menurut (Hubbard 2012) kebijakan fiskal merupakan strategi yang diambil pemerintah dalam mengatur struktur perpajakan, tingkat belanja dan transfer pemerintah yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi kondisi ekonomi khususnya makroekonomi. Menurut Zaini Ibrahim kebijakan fiskal sendiri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait pengaturan kinerja ekonomi dilihat dari penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal berhubungan mengenai peraturan pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang dapat mempengaruhi permintaan total dan dapat mempengaruhi harga juga. Inflasi dapat dicegah dengan cara menambah hasil produksi, mempermudah impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum dan mengawasi pendistribusian barang. Dengan begitu, inflasi dapat ditekan dan diminimalisir agar permintaan total turun.
2. Menurut (Rahardja & Manurung, 2008) kebijakan fiskal merupakan pendekatan keuangan yang digunakan oleh otoritas publik untuk menangani ekonomi dari kondisi yang kurang baik ke kondisi yang lebih tinggi dengan berurusan dengan pembayaran dan penggunaan otoritas publik. Dengan cara ini, pengaturan keuangan memiliki kesamaan yang sama dengan strategi terkait uang, hanya saja ada perbedaan dalam instrumen pendekatan. Dalam pengaturan keuangan, otoritas publik berurusan dengan berapa banyak uang tunai yang tersedia untuk digunakan, sedangkan dalam pendekatan moneter, otoritas publik berurusan dengan pembayaran dan konsumsinya.
3. Menurut Rozalinda, pengaturan keuangan merupakan strategi pemerintah terkait dengan bagaimana otoritas publik mengarahkan pendapatan dan konsumsi negara yang akan digunakan untuk menjaga soliditas moneter guna mendukung pembangunan moneter yang kritis. Dari beberapa pengertian pengaturan moneter tersebut, cenderung dianggap bahwa strategi keuangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh otoritas publik yang di dalamnya terdapat beberapa pedoman yang berhubungan dengan pendapatan dan

kegunaan pemerintah untuk mengikuti perekonomian yang ideal dan tertata untuk memperbaiki keadaan.

4. Menurut (Ginting & Silalahi, 2020) kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai kebijaksanaan yang diambil dan dilakukan pemerintah mengenai penerimaan dan pengeluaran uang negara. Kebijakan fiskal sangat urgen dalam pembangunan perekonomian karena kebijakan fiskal akan mempengaruhi inflasi. Dampak dari kebijakan fiskal dalam inflasi yaitu adanya kenaikan pengeluaran pemerintah yang akan memiliki dampak positif terhadap PDB sedangkan jika pajak naik akan berpengaruh pada PDB yang menurun. Kebijakan fiskal masih efektif untuk memajukan pertumbuhan ekonomi jika pengeluaran pemerintah lebih besar terhadap PDB dibandingkan dengan pajak khususnya pada masa resesi. Pengaruh lain pengeluaran pemerintah terhadap penurunan inflasi yaitu adanya dampak multiplier terhadap investasi salah satunya infrastruktur yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin pemerintah. Pengeluaran terhadap infrastruktur dapat memperbaiki distribusi barang dan jasa yang mana akan berpengaruh pada penurunan inflasi. Pemotongan pajak yang dilakukan pemerintah akan berpengaruh pada meningkatnya *disposable income* dan akan mempengaruhi permintaan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 penerimaan negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Hibah. Dalam buku teori ekonomi makro berasumsi bahwa pajak merupakan penerimaan pemerintah. Pajak dapat diinterpretasikan sebagai pemindahan sumber daya dari sektorrumah tangga dan perusahaan ke sektor pemerintah melalui proses pemungutan yang tidak memberikan balas jasa secara langsung. Jika pajak bernilai positif maka dapat menyebabkan pendapatan riil semakin rendah atau harga barang semakin tinggi. Tetapi jika nilainya negatif maka akan meningkatkan pendapatan riil. Pajak sendiri diklasifikasikan menjadi pajak objektif dan pajak subjektif serta pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang dipungut berdasarkan kegiatan ekonomi yang real dilakukan oleh wajib pajak. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut apabila wajib pajak membeli barang atau jasa kena pajak.

b. Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan dari wajib pajak tersebut. Contohnya yaitu Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), Jika wajib pajak memiliki kemampuan yang makin besar maka beban pajak yang dipungut juga akan semakin besar. Salah satu indikator yang digunakan yaitu pendapatan dari wajib pajak itu sendiri.

c. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang beban pajaknya tidak dapat dialihkan kepada wajib pajak yang lain. Jika di Indonesia, contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

d. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang beban pajaknya dapat dialihkan kepada wajib pajak yang lain. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM yang mana jika pajak tersebut dikenakan kepada produsen, maka produsen dapat membebaskan sebagian atau seluruh beban pajaknya kepada konsumen.

Belanja Pemerintah

a. pemerintah adalah pemanfaatan tenaga kerja dan produk serta pendanaan yang dilakukan oleh otoritas publik untuk keperluan manajerial dan perbaikan yang diselesaikan oleh otoritas publik. Dibandingkan dengan penggunaan yang berbeda, pengeluaran pemerintah adalah bagian yang agak kecil namun dampaknya terlihat sangat besar meskipun merupakan bagian dari penugasan, pengangkutan dan soliditas. Pengeluaran pemerintah bergantung pada penilaian yang didapat, pertimbangan politik dan masalah yang dihadapi. Naik turunnya gaji publik akan mempengaruhi naik turunnya belanja pemerintah. Untuk memilih, otoritas publik dalam mengelola penggunaannya memiliki banyak poin menarik. Pengeluaran pemerintah sendiri dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu hipotesis makroekonomi dan hipotesis mikroekonomi. Sesuai (Azwar, 2016) Dalam hipotesis makroekonomi, pengeluaran pemerintah disusun menjadi (Boediono, 1998):

Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan tenaga kerja dan produk,

Pengeluaran pemerintah untuk tingkat upah pekerja,

pengeluaran Pemerintah untuk angsuran pindah.

Sementara itu, secara miniatur, peningkatan belanja pemerintah dimaksudkan untuk mengkaji variabel-variabel yang menyebabkan minat terhadap barang dagangan publik dan unsur-unsur yang mempengaruhi aksesibilitas produk publik. Untuk menentukan berapa banyak produk yang akan diakses, harus ada kolaborasi antara permintaan dan pasokan. Jumlah produk ini akan mendorong minat untuk barang dagangan yang berbeda.

Ada beberapa hal yang dapat dipengaruhi oleh kemajuan pengeluaran pemerintah, khususnya:

sebuah perubahan populer untuk produk public

perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan dalam menciptakan barang dagangan publik dan selanjutnya perubahan dalam campuran variabel penciptaan yang digunakan dalam interaksi penciptaan

5. perubahan sifat barang dagangan public
6. perubahan biaya variabel penciptaan

B. TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL

Tujuan dari kebijakan fiskal sendiri yaitu sebagai pengelola ekonomi dan berpengaruh besar terhadap pengeluaran pemerintah. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal untuk kemajuan ekonomi sebagai berikut :

1. Tingkat harga
Kebijakan fiskal berfungsi untuk memastikan tingkat harga dan kebutuhan biaya berada pada level yang seimbang.
2. Mengontrol Inflasi
Kebijakan fiskal berfungsi sebagai alternatif yang diinginkan sebagai laju inflasi.
3. Meningkatkan laju investasi
Dengan cara memindahkan sektor yang kurang produktif ke sektor yang lebih produktif agar sumber daya dimanfaatkan sebaik mungkin.
4. Mengurangi kesenjangan regional
Permasalahan kesenjangan regional merupakan tanggung jawab dari pemerintah dalam pemeratakan infrastruktur agar mengurangi kesenjangan antar daerah.
5. Meningkatkan industri dan pertanian

6. Kebijakan fiskal sangat mempengaruhi sektor tertentu salah satunya sektor industri dan sektor pertanian.
7. Pertumbuhan ekonomi
Kebijakan fiskal dapat menumbuhkan perekonomian negara agar lebih baik.
8. Meningkatkan kesempatan kerja
Mendapatkan kesejahteraan yang tinggi merupakan impian oleh masyarakat agar bisa memiliki daya beli yang besar. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari kebijakan fiskal. Jika banyak yang menganggur atau kesejahteraan berkurang maka daya belipun akan berkurang. Hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan pemerintah.
9. Mengontrol Konsumsi
Adanya kebijakan fiskal bertujuan untuk mengatur tingkat konsumsi suatu negara agar stabil.
10. Stabilitas Ekonomi
Kebijakan fiskal bertujuan untuk menstabilkan perekonomian akibat fluktuasi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan negara dan efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara. Selain itu, kebijakan fiskal harus dapat menstabilkan harga pasar. Karena hal tersebut akan berakibat pada perekonomian negara yang bersifat fatal, karena ketika harga pasar terus turun maka kemungkinan banyak pengusaha dan UKM gulung tikar dikarenakan kesulitan dalam mendapatkan laba, namun jika harga terus naik maka akan terjadi inflasi. Jika inflasi terjadi dalam jangka yang panjang, akan menurunkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terus berkurang.

C. PERAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENGATASI RESESI EKONOMI DI INDONESIA

Sebuah strategi yang jelas bahwa otoritas publik perlu menggantikan kerabatnya. Melalui strategi moneter, otoritas publik mengatur penggunaan, tugas, konsumsi, dan kewajiban negara menjadi lebih mantap. Untuk menaklukkan keadaan darurat keuangan, benar-benar diperlukan syafaat dari otoritas publik baik di bidang uang maupun moneter. Jadi tugas otoritas publik adalah menjaga kesehatan pasar organik, mencegah persaingan bisnis yang tidak adil dan sindikasi pertukaran untuk melindungi usaha independen, dan memberikan kerangka kerja yang dapat memberdayakan roda ekonomi.

Dalam pemerintahan mayoritas di Indonesia, strategi moneter berperan dalam memberdayakan penggerak perbaikan. Pekerjaan ini sesuai dengan kemampuan APBN, yang merupakan alat untuk mengimbangi dan mempercepat pelaksanaan moneter sehingga pembangunan keuangan, membuat pendudukan dan menjalankan program pemerintah efektif dan mencegah pencemaran. Tugas otoritas publik dalam pendekatan moneter seharusnya membuat pemerintahan mayoritas berfungsi dengan baik. Kerangka berbasis suara itu sendiri dapat memberikan pemerintahan yang bersih tanpa pencemaran dari otoritas dan perangkat negara dan seharusnya bekerja pada kualitas dan sifat negara sehingga sistem aturan mayoritas yang lebih baik dapat dipahami. pengembangan moneter yang lebih baik, pembuatan lingkungan yang membantu untuk latihan bisnis, tingkat usaha yang lebih tinggi, serta pengembangan modal yang dapat membuat pekerjaan, meringankan kebutuhan dan melaksanakan proyek yang sukses dan mahir dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan asumsi otoritas publikdibebaskan dari kekotoran batin. Semua itu bisa terjadi dengan asumsi ada kontrol dari masyarakat pada umumnya melalui pers yang bisa memikirkan peluang artikulasi. Dengan demikian, tugas strategi keuangan dalam mempengaruhi sistem mayoritas di Indonesia tergantung pada standar administrasi yang baik, yaitu:

1. Transparasi
2. Partisipasi
3. Akuntabilitas
4. dan penegakan hukum

Strategi moneter menuju mayoritas aturan pemerintah di Indonesia adalah meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Perekonomian akan dirusak dengan penghentian dengan asumsi tidak ada bagian dari aset dan SDM yang normal. Aset biasa berfungsi sebagai bahan dasar untuk latihan berkreasi dan juga dapat langsung dikonsumsi oleh manusia, seperti udara dan sinar matahari. Untuk sementara, SDM adalah penghibur yang mengawasi aset reguler mentah menjadi barang dagangan setengah jadi atau produk jadi. Dengan adanya pengaturan keuangan, menjadi suatu keselarasan antara aset tetap dan SDM yang ada, karena jika hanya satu saja yang berlaku maka akan menimbulkan isu dan isu baru.

Strategi moneter menuju perbaikan berbasis suara di Indonesia juga berperan dalam upaya peningkatan. Dalam perekonomian, usaha memiliki kemungkinan

yang luar biasa. Usaha juga merupakan salah satu bagian yang dapat memberikan keuntungan bagi otoritas publik dan negara. Banyaknya peluang untuk berkontribusi membuka pintu terbuka yang berharga dan manfaat besar bagi organisasi yang juga akan sangat mempengaruhi negara karena dapat mengurangi perkembangan saat ini. Rencana pengaturan keuangan mendorong usaha untuk terus berkembang agar hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga perbaikan pemerintahan mayoritas harus diakui dengan strategi moneter yang berlaku di negara kita.

D. KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP DUNIA BISNIS DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH(UMKM)

Roda perputaran ekonomi suatu negara berputar pada dunia bisnis, maka dari itu kebijakan fiskal sangat berpengaruh terhadap dunia bisnis. Sebagai seorang pebisnis harus dapat melihat peluang investasi. Dalam dunia bisnis, jual beli akan menjadi buruk jika kebijakan fiskal salah ditetapkan dan akan berpengaruh pada laju inflasi yang semakin parah. UMKM menjadi salah satu pencaharian masyarakat dimana jika daya beli masyarakat menurun maka akan berpengaruh pada kurangnya pendapatan pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya kemajuan dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maka akan menyelamatkan negara dari krisis ekonomi, maka dari itu UMKM merupakan pondasi yang utama pada perekonomian negara. Kebijakan fiskal juga harus berpihak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar terciptanya kesesuaian dan berkelanjutan agar masyarakat dapat sejahtera sesuai dengan salah satu dari tujuan kebijakan fiskal itu sendiri. Selain itu juga agar daya jual dan daya beli dapat stabil.

E. JENIS-JENIS KEBIJAKAN FISKAL

Bentuk kebijakan fiskal di golongkan menjadi dua golongan yakni Penstabilan Otomatis (*automatic stability*) dan Kebijakan Fiskal Diskresioner (*discretionary fiscal policy*). Kebijakan penstabilan otomatis yaitu wujud sistem pajak yang berlaku otomatis dan cenderung dapat berupa bentuk kegiatan ekonomi yang stabil. Contoh kebijakan penstabilan otomatis ini adalah dapat dilakukan terhadap penghasilan dan asuransi seperti yang telah disinggung di depan. Sedangkan policy diskresioner atau policy “aktif” merupakan metode pada suatu pemerintahan dan perpajakan yang dikhususkan untuk membuat perubahan ke atas

sistem yang ada, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi yang dihadapi dalam masyarakat.

1. Penstabilan Otomatis (*Automatic Stability*)

- a. Kebijakan fiskal dengan penstabilan otomatis ini sering terlihat sebagai jenis kebijakan fiskal tanpa kelambanan, (Mankiw, 2003). Karena kebijakan fiskal otomatis ini memang disusun untuk meminimalisasi kelambanan (*inside lags*) yang berkaitan dengan kebijakan stabilitas. Kebijakan yang mendorong atau menekan perekonomian ketika diperlukan tanpa perubahan kebijakan yang disengaja, sehingga penstabilan otomatis dapat disebut sebagai kebijakan fiskal "pasir. Contohnya adalah kebijakan bailout yang dilakukan Presiden AS, WW Bush, untuk mengatasi krisis global 2008, dan mengatasi masalah Bank Indonesia terhadap bank Century yang bermasalah itu.
- b. Dalam perekonomian makro yang modern, instrumen yang ada kebijakan ini pada umumnya dapat dipraktikkan terutama dengan sistem pajak yang dengan sifat progresif, proporsional, serta sistem asuransi. Misalkan, sistem pajak progresif dikerahkan kepada para individu atau perusahaan yang tingkat pendapatannya seperti pajak para artis atau pemilik kendaraan mewah. Selanjutnya, sistem pajak nilai yang proporsional yang dikenakan secara proporsional terhadap tingkat keuntungan perusahaan korporat, misalnya sebesar 15% dari keuntungan perusahaan korporat yang harus diberikan kepada pemerintah. Sedangkan sistem pajak yang regresif dikenakan untuk individu atau perusahaan yang mengalami penurunan, bahkan untuk pendapatan yang sangat rendah tidak perlu dikenakan pajak, sehingga pajak yang bersifat regresif dalam *automatic stability*, tak perlu dilakukan.
- c. Selain itu, asuransi pengangguran atau asuransi jaminan sosial, merupakan salah satu jenis penstabilan otomatis, dikarenakan program ini bisa untuk meminimalisasi besarnya pergerakan turun maupun naiknya pendapatan nasional yang berlaku dalam jangka panjang. Di beberapa negara maju, biasanya para pekerja diwajibkan untuk membayar sejumlah uang tertentu yang muncul di asuransi atau sosial pemerintah tersebut dengan membuat undang-undang yang mewajibkan pekerja yang melakukan pembayaran secara periodik kepada pihak asuransi tersebut.

Sebaliknya, undang-undang tersebut juga memberi hak kepada para pekerja untuk meminta bantuan keuangannya kepada pihak asuransi apabila mereka menganggur atau pensiun.

- d. Bantuan-bantuan kepada para petani berupa penetapan harga dasar minimum hasil-hasil pertanian tertentu sebenarnya juga merupakan contoh penstabilan otomatis. Maksud utama dari kebijakan ini sebenarnya untuk menjamin kestabilan harga hasil-hasil terutama agar dapat menjaga pendapatan petani tidak mengalami penurunan tingkat yang lebih rendah atau menjaga tingkat kondisi inflasi yang rendah dan penurunan yang rendah.
- e. Diharapkan, instrumen sistem perpajakan di atas cenderung dapat mengurangi kegiatan ekonomi mulai dari satu periode kemudian ke periode berikutnya sebagai akibatnya.. Ketika, kegiatan ekonomi sedang mengalami penurunan, maka pajak yang dipungut dari individu dan perusahaan akan berkurang, sebagai akibat menurunnya penghasilan mereka. Kemudian lagi, ketika kegiatan ekonomi masyarakat dalam peningkatan (*booming*), pekerjaan terbuka, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat, maka pajak yang diterima dari masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Keadaan ini akan dapat berlangsung hingga menuju keseimbangan.
- f. Namun demikian, kebijakan *automatic stability* hanya memiliki kapasitas yang lebih terbatas dalam membuat stabilitas ekonomi yang umumnya didambakan oleh setiap masyarakat umum, secara spesifik; mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Dalam masa inflasi tinggi, penstabilan otomatis belum mampu menangani permasalahan inflasi. Begitu pula ketika terjadi pengangguran yang tinggi, maka pada saat itu, dia tidak dapat memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah itu. Kemampuan stabilitas *automatic* hanya mampu membatasi ukuran dampak keseriusan masalah tersebut. Karena, tanpa adanya pengurangan masalah tersebut, maka masalah tersebut diperkirakan akan semakin memperburuk keadaan. Namun, kelemahan ini tidak perlu dipersoalkan, karena ini bukanlah kebijakan fiskal yang utama.

2. Kebijakan Fiskal Diskresioner

- a. Kebijakan fiskal yang sering dimanfaatkan oleh pemerintah guna mengatasi berbagai permasalahan ekonomi disebut sebagai kebijakan fiskal yang bersifat diskresio atau kebijakan fiskal aktif. Diskresioner kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pendapatan pajak dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, sehingga tetap terpenuhinya tingkat pertumbuhan ekonomi dalam keadaan tingkat pekerjaan penuh dan tidak ada inflasi.
- b. Kebijakan diskresioner (*discretionary policy*) ini dapat diartikan sebagai langkah-langkah Pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan untuk (i) mengurangi pergerakan naik-turun pada tingkat kegiatan ekonomi dari masa ke masa (ii) menghasilkan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja tinggi, tidak menghadapi inflasi, dan selalu mengalami peningkatan di bidang ekonomi (memuaskan).
- c. Selanjutnya, kebijakan fiskal yang bersifat diskresioner melalui penambahan atau pengurangan pengeluaran pemerintah maupun penambahan dan pengurangan penerimaan pajak, dapat diklasifikasikan menjadi dua wujud kebijakan fiskal ekspansi atau kebijakan fiskal mengecil dan kebijakan fiskal kontraksi atau mengecil. Jika kebijakan fiskal pemerintah dimanfaatkan agar menambah pengeluarannya, sehingga akan memperluas kegiatan ekonomi masyarakat atau meningkatkan pendapatan nasional, disebut kebijakan ekspansi (*expansionary*). Namun, jika pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajaknya sehingga pendapatan nasional atau kegiatan ekonomi menjadi berkurang disebut kebijakan fiskal kontraksi. Kebijakan ekspansioner yang sering digunakan ketika perekonomian pada tingkat gerakan yang tinggi dan investasi yang rendah. Di sisi lain, kebijakan kontraksioner yang dilakukan ketika perekonomian mengalami masalah inflasi yang tinggi dan defisit neraca pembayaran yang besar.
- d. Pokok kebijakan masalahnya adalah bagaimana pemerintah harus melakukan tindakan fiskal yang aktif (*discretionary*) ketika terjadi inflasi yang tinggi, sementara tidak ada penstabilan yang terlihat. Dengan kata lain, bagaimana pemerintah harus mengatur anggaran belanjanya, sehingga kegiatan ekonomi berada pada tingkat seperti yang diharapkan.

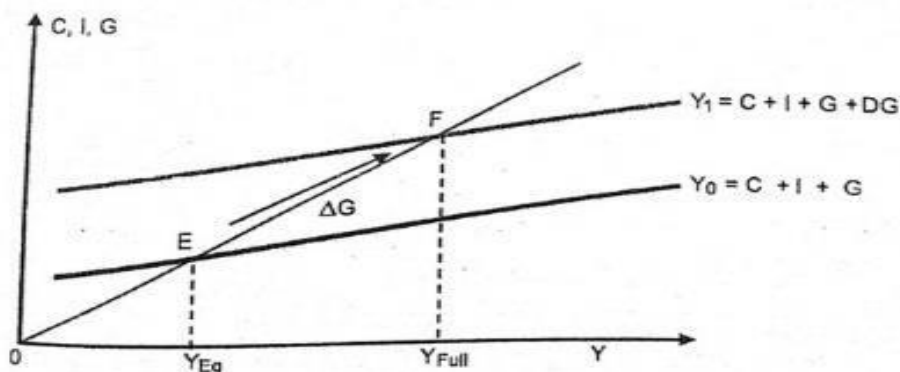
- e. Misal ketika perekonomian belum mencapai pekerjaan penuh di ketahui pendapatan nasional Rp2.000 triliun. Sedangkan, potensi pendapatan nasional maksimum yang dapat dicapai pada tingkat *full employment* adalah Rp2.500 triliun. Jika diketahui besarnya tabungan (MPS) sebesar 0,25Y, dan besarnya pajak yang ditarik secara proposional sebesar 0,20Y. Berapakah pemerintah harus menambah pengeluarannya agar perekonomian mencapai tingkat pekerjaan penuh? Untuk mencapai tingkatpekerjaan penuh yang diperlukan tambahan pendapatan nasional sebesar $\Delta Y = \text{Rp}500$ triliun (Rp2.500-Rp2.000), maka besarnya tambahan pengeluaran pemerintah sebesar ΔG dapat dihitung melalui angka pengganda (multiplier) sebagai berikut :

$$\Delta G = \frac{1}{1 - \text{MPC}(1-t)} = \Delta Y$$

$$\Delta G = \frac{1}{1 - 0,75(1 - 0,20)} = 500 \text{ atau } \Delta G = \frac{1}{1 - 0,25(0,8)} = 500$$

$$\Delta G = \frac{1}{0,2} = 500 \text{ maka } \Delta G = 500 \times 0,2 = 100$$

Jadi untuk mencapai perekonomian dalam kondisi *full employment* diperlukan tambahan pengeluaran pemerintah (ΔG) sebesar Rp100 triliun



Gambar-12.10: Kebijakan Fiskal Dalam Mencapai Keseimbangan Full Employment

Pada prinsipnya kebijakan fiskal juga tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memandang kebijakan moneter agar kebijakan pemerintah antara moneter dan tidak kontradiksi. Karena pada kebijakan dasarnya makro apapun yang dilakukan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

F. MACAM-MACAN KEBIJAKAN FISKAL

Macam-macam kebijakan fiskal lainnya adalah sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoretis

a. Secara teoretis, di Indonesia jenis kebijakan fiskal dibagi menjadi tiga, yaitu kebijakan fiskal fungsional, kebijakan fiskal terencana, dan kebijakan fiskal insidental.

b. Kebijakan Fiskal Fungsional

Kebijakan fiskal fungsional merupakan pengaturan yang diambil untuk bekerja pada sifat ekonomi pada tingkat skala penuh, dengan dampak yang harus ditemukan dalam jangka panjang. Contohnya termasuk pengaturan hibah sekolah, menjalankan bantuan subsidi, dll.

c. Kebijakan Fiskal Disengaja/Terencana

Kebijakan Fiskal disengaja merupakan strategi pengendalian rencana keuangan negara. Kapasitas kebijakan fiskal ini adalah untuk mengelola isu-isu tertentu, seperti pandemi dan keadaan darurat moneter. Contoh kebijakan ini yaitu alokasi APBN untuk bidang kesejahteraan selama pandemi dan pelanggaran biaya bisnis.

d. Kebijakan Fiskal Tak disengaja

Kebijakan fiskal tak disengaja adalah pengaturan melalui keputusan/aturan untuk menjaga kekuatan moneter daerah non-pemerintah, misalnya menetapkan harga eceran yang paling penting.

2. Dari Segi Implementasi

a. Berdasarkan implementasinya kebijakan fiskal terdiri dari dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif.

b. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Yang dimaksud dengan pengaturan keuangan ekspansif adalah pendekatan yang diambil oleh otoritas publik ketika ekonomi melemah dengan memperluas rencana pengeluaran dan mengurangi atau menghilangkan penilaian untuk area tertentu. Kapasitas pengaturan moneter ekspansif adalah untuk memperluas daya beli produk, sehingga organisasi dapat terus memberikan tanpa memberhentikan spesialis.

c. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan berikutnya adalah pengaturan keuangan kontraktif, pendekatan pengurangan pengeluaran pemerintah dan

peningkatan biaya. Kapasitas kebijakan ini adalah untuk mencegah ekspansi dan mengurangi proporsi gini.

3. Dari Segi Neraca Pembayaran

Berdasarkan segi neraca jenis kebijakan fiskal terbagi menjadi empat, yaitu kebijakan fiskal seimbang, kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit, dan kebijakan fiskal dinamis.

a. Kebijakan Fiskal Seimbang

Kebijakan fiskal satu ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan pendapatan dan konsumsi negara. Kapasitas pengaturan fiskal ini adalah untuk menjaga negara dari memiliki banyak kewajiban. Meskipun kedengarannya positif, kebijakan fiskal yang disesuaikan memiliki risiko besar, karena tidak semua negara dapat mengatasi semua masalah penduduknya.

b. Kebijakan Fiskal Surplus

Arti dari strategi keuangan surplus adalah semacam pengaturan fiskal yang diambil ketika membayar lebih dari digunakan. Kapasitas pendekatan moneter surplus adalah untuk mencegah ekspansi.

c. Kebijakan Fiskal Defisit

Berbeda dengan jenis pengaturan keuangan surplus, pendekatan fiskal defisiensi adalah pedoman fiskal untuk mengatasi kekurangan pembayaran dibandingkan dengan penggunaan. Salah satu ilustrasi strategi moneter defisiensi adalah kewajiban yang tidak dikenal.

d. Kebijakan Fiskal Dinamis

Jenis strategi keuangan yang terakhir sejauh pelaksanaannya adalah pedoman fiskal yang dinamis, khususnya pengaturan ekonomi yang memerlukan sejumlah investasi pada saat negara membutuhkannya.

G. INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL

Instrumen kebijakan fiskal adalah bidang yang digunakan oleh otoritas publik untuk menjaga keamanan makroekonomi negara. Wawasan lebih lanjut mengenai instrumen pendekatan keuangan di Indonesia meliputi:

1. Pajak

Tanda utama instrumen pendekatan fiskal adalah pajak dari semua daerah lokal dan asing. Untuk mencapai target strategi keuangan, otoritas publik dapat

mengontrol biaya sebagai penurunan, penambahan, penundaan, dan bahkan berakhir.

2. Pengeluaran Belanja

Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah belanja negara, yang juga dapat dikurangi atau diperluas tergantung pada situasinya. Dalam hal keseimbangan pembayaran angsuran negara kurang, otoritas publik dapat mengurangi pengeluarannya di bidang-bidang tertentu, misalnya menunda pembayaran THR untuk pegawai pemerintah.

3. Obligasi Publik

Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan surat berharga atau perlindungan kewajiban bagi penduduk. Berlawanan dengan kewajiban yang tidak dikenal, sekuritas publik memiliki tingkat kupon atau imbalan komisi ketika otoritas publik mengembalikan uang muka kepada masyarakat umum.

BAB XIV

KEBIJAKAN MONETER

A. PENGERTIAN KEBIJAKAN MONETER

Nopirin dalam bukunya mengemukakan bahwa pendekatan keuangan merupakan salah satu unsur atau penyebab yang secara bersama-sama dapat mempengaruhi pelaksanaan moneter suatu negara. Ada berbagai elemen berbeda yang mungkin dapat mempengaruhi perubahan dalam tindakan keuangan suatu negara, namun kejadian ini berada di luar kendali otoritas publik. Pengaturan terkait uang adalah variabel moneter utama yang dapat dibatasi oleh otoritas publik dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan perputaran keuangan. Biasanya pengaturan keuangan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai negara yang mengelola rekening dengan tujuan untuk mengontrol berapa banyak uang rupiah yang beredar secara lokal dan kredit yang pada akhirnya akan mengubah desain moneter daerah tersebut. Pedoman berapa banyak uang tunai yang tersedia untuk digunakan secara lokal dikelola dengan tujuan akhir untuk menambah atau mengurangi berapa banyak uang tunai yang tersedia untuk digunakan. Pendekatan terkait uang dapat dicirikan menjadi dua, khususnya:

1. Kebijakan Moneter Ekspansif

Khusus pengaturan dengan tujuan akhir untuk membangun arus kas lokal.

2. Kebijakan Moneter Kontraktif

Untuk lebih spesifik pengaturannya dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang kertas atau berapa banyak uang yang beredar secara lokal.

Selain itu, ada juga pemahaman dari berbagai ahli. Berikutnya adalah penilaian dari beberapa spesialis sehubungan dengan pentingnya pendekatan keuangan

1. Muana Nanga

Pengaturan moneter adalah strategi yang dilakukan oleh otoritas publik melalui spesialis moneter saat ini dengan mengendalikan pasokan uang tunai dan biaya pinjaman untuk mempengaruhi tingkat bunga total dan mengurangi kegoyahan keuangan.

2. Boediono Moneter

Pengaturan moneter adalah kegiatan administrasi di mana bank nasional mempengaruhi keadaan skala besar, menyeimbangkan kas tanpa henti pasokan produk, mengontrol ekspansi, membuka pintu bisnis yang luar biasa, dan

kelancaran stok. Atau sebaliknya diselesaikan dengan mengizinkan persediaan barang dagangan. Sirkulasi tercapai.

3. Nazir

Pendekatan moneter adalah kegiatan atau upaya bank nasional untuk mempengaruhi kemajuan faktor moneter (penawaran uang tunai, kurs perdagangan, biaya pembiayaan, biaya pinjaman kredit) untuk mencapai tujuan yang ideal.

4. Perry Warziyo

Strategi moneter adalah pendekatan para ahli moneter atau bank nasional sebagai jumlah moneter untuk mencapai peningkatan pergerakan keuangan, dengan mempertimbangkan siklus bisnis, gagasan ekonomi negara, dan ekonomi penting lainnya. dieksekusi.

B. TUJUAN KEBIJAKAN MONETER

Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah untuk menstabilkan perekonomian. Hal ini dapat diukur dengan keseimbangan kesempatan kerja, stabilitas harga dan neraca pembayaran. Jika transaksi keuangan menjadi tidak stabil, kebijakan moneter dapat memulihkannya (langkah-langkah stabilisasi).

Namun secara umum tujuan kebijakan moneter ada 4. Berikut adalah tujuannya

1. Stabilitor Ekonomi

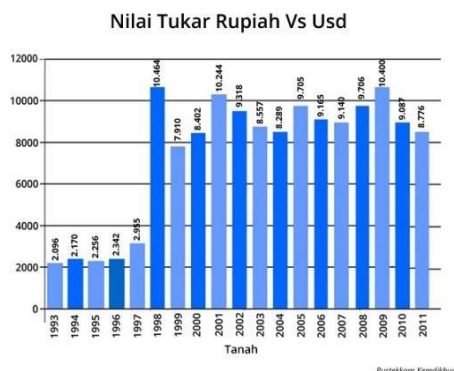
Stabilitas ekonomi adalah keadaan ekonomi yang diharapkan, terkendali dan berkelanjutan. Artinya peningkatan uang beredar akan diimbangi



dengan peningkatan arus barang dan jasa yang tersedia.

Kondisi naik turunnya neraca perdagangan

Grafik di atas menggambarkan kondisi terjadinya surplus dan defisit neraca perdagangan. Surplus neraca perdagangan terjadi pada tahun 2009 – 2011 dan



defisit perdagangan terjadi pada tahun 2012 – 2014.

Grafik di atas menunjukkan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2011. Nilai tukar rupiah terhadap dolar terendah terjadi pada tahun 1998. Saat itu nilai 1 dolar AS = 10.464 rupiah, dan nilai tukar tertinggi adalah rupiah terhadap dolar pada tahun 1993. Saat itu nilai 1 dolar AS = 2,096 rupiah.

2. Menjaga kestabilan harga barang pokok

Kebijakan moneter dapat diterapkan jika tingkat harga berfluktuasi. Ketidakstabilan ini terjadi ketika pasokan uang dan pasokan barang tidak seimbang. Perubahan harga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat, karena harga dapat berfluktuasi secara tidak teratur.



3. Membuka kesempatan kerja baru

Jika jumlah uang dan barang/jasa seimbang maka perekonomian akan stabil. Perusahaan berinvestasi dalam kondisi ekonomi yang stabil. Investasi membuka peluang kerja baru. Adanya kesempatan kerja baru atau perluasan usaha berarti peningkatan kesempatan kerja



Antrian dibursa kerja

4. Memperbaiki sistem neraca pembayaran

Dengan adanya kebijakan moneter membuat banyak perbaikan posisi dalam perdagangan dan neraca pembayaran. Ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar turun, harga barang-barang produksi Indonesia di pasar internasional akan lebih murah, daya saing meningkat, dan jumlah ekspor meningkat. Peningkatan ekspor akan meningkatkan neraca perdagangan dan pembayaran.

Menurut Kasman (1992), Morton dan Wood (1993), Borio (1997, 2001), Ho (2008), semua bank sentral di negara maju berorientasi pasar dengan tepat untuk mencapai posisi short yang lebih kuat. Bank sentral menerapkan kebijakan moneter dengan berbagai metode. Dampak jangka panjang pada suku bunga daripada target investasi. Ho (2008) menunjukkan bahwa di negara berkembang terdapat banyak kesamaan tema di antara bank sentral terkait dengan karakteristik utama dari implementasi kebijakan. Tautkan suku bunga dan denda dan cari alternatif. Bernard (2004) mengusulkan untuk mengklasifikasikan instrumen kebijakan moneter menjadi dua kategori: instrumen regulasi dan manipulasi pasar keuangan. Kategori pertama terkait dengan kekuatan regulasi bank sentral, seperti indikator likuiditas, cadangan wajib, dan peralatan yang ada. Kategori kedua, manipulasi pasar, menyangkut kebijakan bank sentral. Hal ini akan mendukung suku bunga yang terkait dengan kondisi pasar uang dan akan berdampak pada situasi permintaan dan penawaran bank sentral. Ini termasuk transaksi pasar terbuka, metode lelang, dan transaksi fine-tuning.

Nopirin mengatakan bahwa pendekatan keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda, antara lain:

Kegiatan pasar terbuka

Pendekatan ini menggabungkan kesepakatan dan perolehan perlindungan oleh bank nasional. Kegiatan ini mempengaruhi dua hal. Pertama, memperluas proposal untuk bank bisnis yang terhubung dengan bursa. Hal ini karena pada saat membeli proteksi, bank nasional menambah toko pada bank bisnis yang menjual proteksi. Selanjutnya, bank normal dapat membangun pasokan uang tunai (melalui proses pembuatan kredit). Kedua, perlindungan perdagangan mempengaruhi biaya keamanan (dan akibatnya biaya pinjaman). Ini juga mempengaruhi biaya pembiayaan secara keseluruhan.

a. Strategi penurunan harga

Langkah-langkah untuk mengubah biaya pembiayaan yang harus dibayar oleh bank bisnis untuk kredit dari bank nasional. Memperluas batas membangun biaya mendapatkan dari bank nasional, yang menghalangi bank dari pinjaman. Hal ini dapat mengurangi atau mengurangi persediaan kas.

b. Strategi perubahan dasar hukum simpanan kebutuhan

Proporsi kebutuhan menabung dapat mempengaruhi persediaan uang tunai. Ketika proporsi kebutuhan simpanan berkurang, persediaan uang secara umum akan meningkat, dan sebaliknya, ketika proporsi kebutuhan simpanan meningkat, persediaan uang secara umum akan berkurang.

c. Kebutuhan tepi

Item ini digunakan untuk membatasi penggunaan kredit untuk memperoleh perlindungan (biasanya teoretis). Misterinya adalah mengatur penyimpanan uang dasar untuk bertukar perlindungan. Misalnya, ada kebutuhan tepi 80%. H. Jika seseorang memiliki keinginan untuk membeli perlindungan, mereka harus membayar 80% dengan uang asli dan kelebihan 20% dapat diperoleh dari bank.

d. Kualitas etis

Tindakan ini berencana untuk mempengaruhi mentalitas organisasi moneter dan yang terkait dengan bidang moneter menuju cara yang ideal untuk berperilaku spesialis moneter melalui alamat dan distribusi oleh

Gubernur Bank Sentral. Tujuan sementara definitif dari pengaturan keuangan dan moneter adalah untuk menjaga keseimbangan skala besar dalam perekonomian atau keseimbangan ekspansi rendah, pergerakan tinggi dan keseimbangan angsuran. Ada celah panjang antara kegiatan pengaturan keuangan dan pengaruhnya terhadap tiga perspektif yang merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan ekstrem ini. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan target, antara lain, untuk mempercepat pengawasan sebagai tanda prinsip efek pengaturan terkait uang. Sebagaimana ditunjukkan oleh Boediono (1998: 139), ada dua tujuan peralihan.

e. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang stabil menunjukkan bahwa situasi ekonomi mata uang sedang dan pasar organik seimbang. Biaya pinjaman dikendalikan untuk menjaga biaya pinjaman pasar di dalam titik batas yang diinginkan atau diharapkan oleh spesialis moneter (biaya pembiayaan terkecil dan terbesar).

f. Suplai uang

Asumsi yang mendasari pendapat ini adalah bahwa volume distribusi mempengaruhi belanja barang dan jasa atau perilaku masyarakat dalam belanja. Selain itu, perubahan belanja publik menentukan perkembangan harga dan produksi (produk domestik bruto).

C. JENIS-JENIS KEBIJAKAN MONETER

Dalam perekonomian kebijakan moneter merupakan salah satu dari berbagai jenis kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia yang memiliki peran penting untuk mencapai sasaran-sasaran perkembangan ekonomi yang diinginkan. Peran penting kebijakan moneter dalam memenuhi atau mencapai sasaran akhir dari kebijakan moneter tersebut tercermin dalam bagaimana kemampuan- kemampuan kebijakan moneter dalam mempengaruhi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, upaya dalam memperluas kesempatan kerja, dan juga keseimbangan dalam neraca pembayaran. Sebagai salah satu dari kebijakan ekonomi makro, kebijakan moneter dibuat untuk mengelola dan menjaga kestabilan peredaran uang di suatu negara untuk mempertahankan keseimbangan kondisi berbagai aktivitas ekonomi agar tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu

negara dapat berkesinambungan. Di Indonesia, ada dua jenis kebijakan moneter yang dikenal dan digunakan untuk mengambil keputusan terkait peredaran uang, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif.

1. Kebijakan Moneter Ekspansif

Penataan keuangan yang jauh jangkauannya merupakan salah satu jenis strategi keuangan yang ditujukan untuk memperluas dan memberdayakan pergerakan moneter di Indonesia dengan cara memperluas cash supply atau memperluas cash supply. Selain disebut strategi ekspansi, kami juga menyebutnya pengaturan terkait uang. Strategi pembangunan pada dasarnya berencana untuk meningkatkan dan mendukung tindakan keuangan dengan memperluas pasokan uang tunai, melalui perluasan pasokan uang tunai akan mempengaruhi perkembangan moneter melalui bunga total. Konglomerasi pasti dikenal sebagai bunga total adalah salah satu strategi yang digunakan untuk menghitung gaji di setiap tahun ditentukan untuk menyadari dan memahami bagaimana aliran uang keluarga dan pembuat (penggunaan keluarga habis-habisan, usaha bisnis, pengeluaran pemerintah dan impor) . Komponen yang menjadi fokus dari pengaturan oneter ini antara lain pemanfaatan dan usaha bisnis.

Seperti yang mungkin kita ketahui, strategi ekspansi keuangan ini memperluas aliran kas lokal yang tidak dimaksudkan untuk meningkatkan dan memberdayakan pembangunan moneter di negara yang memiliki pertaruhan ekspansi yang tinggi. Dengan ekspansi atau ekspansi uang tunai yang berputar secara lokal, jumlah ekonomi juga berjalan dengan cepat. Dengan demikian, pengaturan ini dapat membangun daya beli individu dan mengurangi jumlah suku cadang ketika ekonomi di suatu negara mengalami penurunan atau kesuraman. Strategi ekstensif ini umumnya dilakukan sebagai media untuk mengurangi jumlah saat ini mengingat semakin banyak jumlah kas yang tersedia akan mempengaruhi pendapatan dan minat masyarakat untuk daya beli, secara tidak langsung hal ini untuk latihan bisnis untuk menciptakan lebih banyak uang. dan membutuhkan lebih banyak pekerjaan. sehingga jumlah jabatan dapat bertambah dan jumlah tenaga kerja dapat berkurang.

Dalam melakukan pendekatan keuangan ekspansif, bank nasional melakukan pengaturan melalui tiga pilihan, yaitu strategi pemotongan biaya

pinjaman, penurunan proporsi yang diperlukan memegang, dan selanjutnya kegiatan pasar terbuka melalui perolehan perlindungan pemerintah.

- a. Suku Bunga kebijakan Bank nasional sebagian besar menetapkan biaya pinjaman fundamental yang biasa disebut dengan approach rate atau strategy rate atau benchmark rate yang dilaporkan secara terbuka. Biaya pembiayaan ini adalah biaya pinjaman yang ditetapkan oleh bank nasional pada saat bank nasional melakukan pertukaran dengan cadangan pinjaman atau pinjaman kredit sementara ke bank bisnis. Dengan demikian, biaya pembiayaan ini secara langsung dapat mempengaruhi biaya pinjaman kredit bank bisnis. Selain dikenal sebagai biaya pinjaman strategi, biaya pembiayaan ini juga disebut biaya pembiayaan patokan atau biaya pinjaman fundamental.
- b. Pada dasarnya biaya pinjaman strategi praktis seperti biaya pinjaman kredit bank di mana keduanya merupakan biaya pembiayaan yang mencerminkan tingkat biaya memperoleh uang tunai, namun keduanya adalah biaya pinjaman yang berbeda. Perbedaan antara kedua biaya pinjaman terletak pada siapa pemegang utang. Dalam biaya pinjaman uang muka bank, bank berperan sebagai penyewa dan pemegang rekening, antara lain, dapat muncul dari orang ke organisasi, misalnya; orang atau orang, organisasi non bank, dan organisasi bank lainnya. Sedangkan biaya pendekatan pinjaman atau biaya pembiayaan referensi, yang berlaku sebagai penyewa adalah bank nasional dan bank bisnis bertindak sebagai pemegang utang. Dimana dalam kurs acuan ini, bank nasional membebaskan biaya pembiayaan yang tentunya sering kita kenal dengan markdown rate untuk uang muka sesaat. Sebagai salah satu alat yang digunakan oleh bank nasional dalam pendekatan terkait uang, strategi ini biaya pinjaman digunakan untuk mempengaruhi situasi ekonomi karena dengan pengaturan biaya pembiayaan akan benar-benar mempengaruhi latihan moneter, perubahan tingkat ekspansi, dan selanjutnya mempengaruhi tingkat perdagangan tunai.

- c. Rasio Kebutuhan Simpan (Reserve Requirement Ratio) Proporsi simpanan prasyarat (necessity proporsional) yang juga disebut proporsi simpanan uang atau porsi simpanan wajib adalah pedoman bank nasional yang digunakan oleh sebagian besar bank nasional, namun tidak digunakan oleh semua bank nasional di dunia, yang menentukan ukuran dasar penyimpanan yang harus terus diikuti. disimpan atau disimpan oleh bank bisnis di bank dalam catatan keuangan di bank nasional atau di bank jurnal. Dalam memutuskan berapa banyak aset atau uang muka yang disimpan, biasanya tidak ada yang sama atau berubah seperti yang ditunjukkan oleh proporsi kebutuhan menabung yang telah ditetapkan oleh bank nasional. Bank nasional dalam menetapkan prasyarat simpan biasanya berapa banyak aset yang ditetapkan sebagai simpanan ditentukan berdasarkan tingkat simpanan lengkap atau aset luar. Proporsi prasyarat simpanan tersebut dimanfaatkan perbankan nasional sebagai perangkat strategi keuangan untuk mempengaruhi perkembangan pasokan uang tunai dan pengawasan likuiditas.
- d. Dengan ini bank nasional menetapkan penurunan proporsi simpanan yang diperlukan sehingga bank dapat memiliki lebih banyak uang tunai untuk dipinjamkan. Karena bank memiliki lebih banyak uang tunai untuk dipinjamkan, likuiditas dalam perekonomian menjadi lebih longgar, membawa biaya pembiayaan yang lebih rendah. Dengan penurunan biaya pembiayaan ini akan meningkatkan total bunga dan meningkatkan ketegangan inflasi karena biaya pembiayaan yang rendah membawa biaya perolehan yang lebih murah dan mempengaruhi pembeli dan organisasi untuk memiliki pilihan untuk membuat kemajuan baru untuk membelit tenaga kerja dan produk, tindakan ini membawa minat yang diperluas untuk barang dagangan untuk organisasi dan mendesak organisasi untuk membangun kreasi mereka. Oleh karena itu, ketegangan inflasi meluas dengan alasan bahwa hal itu disebabkan oleh perkembangan pasar yang solid, berkurangnya pengangguran karena organisasi memilih lebih banyak pekerja untuk memenuhi

peningkatan jumlah penciptaan dan lebih jauh lagi memperluas biaya penawaran untuk mengimbangi biaya penciptaan

e. Operasi pasar terbuka

Sebagai aparatus pendekatan keuangan, kegiatan pasar terbuka dimanfaatkan oleh bank nasional untuk mengurangi atau meningkatkan perputaran uang tunai dalam suatu perekonomian. Dalam pengaturan keuangan ekspansif ini, bank nasional melakukan kegiatan pasar terbuka dengan membeli proteksi pemerintah dari bank-bank usaha yang mengakibatkan pertukaran proteksi pemerintah dari bank-bank usaha ke bank nasional. Untuk situasi ini bank bisnis mendapatkan ukuran aset tertentu sebagai jenis pembayaran angsuran. Pertukaran perlindungan pembelian atau obligasi pemerintah dari bank bisnis dapat meningkatkan tabungan bank wilayah swasta di sisi sumber daya dari laporan akuntansi. Dengan begitu bank memiliki lebih banyak uang tunai atau keuangan yang dapat dikreditkan. Pada saat persediaan uang tunai dalam siklus moneter, persediaan uang akan berlipat ganda sehingga akan meningkatkan likuiditas dan dapat menekan biaya pinjaman. Dengan demikian, kredit yang dapat diakses atau ditawarkan lebih murah, memperluas keluarga dan organisasi untuk mengajukan uang muka.

2. Kebijakan Moneter Kontraktif

Pendekatan keuangan adalah siklus yang digunakan untuk mengatasi masalah moneter di suatu negara dengan mengendalikan pasokan uang tunai untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya, mengelola tingkat ekspansi, dan membuat kondisi keuangan daerah yang stabil. Dalam menyelesaikan masalah keuangan ini, pendekatan terkait uang diisolasi menjadi dua jenis, yaitu strategi keuangan ekspansif khusus dan pengaturan terkait uang kontraktif. Di atas kita telah berbicara tentang apa itu pendekatan keuangan ekspansif, dan kali ini kita akan membahas apa itu strategi terkait uang kontraktif.

Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy) atau disebut juga dengan tight cash strategy adalah salah satu bentuk pendekatan keuangan yang dilakukan oleh bank nasional dengan alasan bahwa suatu negara mengalami ekspansi atau ekspansi seberapa banyak arus kas lokal yang dapat

menyebabkan kerawanan dan biaya liar dari produk. kebutuhan yang dijual di lookout. Dengan ini kita dapat beralasan bahwa pengaturan keuangan kontraktif adalah strategi keuangan yang dibuat atau dibawa oleh otoritas publik melalui bank nasional sebagai perantara untuk mengurangi berapa banyak uang tunai yang mengalir di daerah untuk menghindari atau mengurangi tingkat ekspansi yang mungkin terjadi.

Langkah perbankan nasional untuk melakukan pendekatan keuangan kontraktif antara lain menaikkan biaya pinjaman, memperbanyak simpanan, menjual afirmasi Bank Indonesia (BI), dan membenahi kondisi kredit.

a. Menaikkan Suku Bunga

Kebijakan moneter kontraktif dilakukan karena meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, dengan dinaiknyannya suku bunga ini diharapkan dapat menekan atau mengurangi minat masyarakat dalam melakukan peminjaman karena bunga yang akan dibayarkan ke bank lebih tinggi dan juga dengan menaikkan suku bunga diharapkan masyarakat lebih tertarik untuk menabung karena dengan naiknya suku bunga maka pendapatan yang akan diterima dari menabung di bank akan menjadi lebih tinggi. Dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk menabung dan menurunnya minat masyarakat melakukan peminjaman bank sentral akan dengan mudah mengatasi masalah inflasi ini karena jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat menurun atau berkurang.

b. Menaikkan Cadangan Kas

Untuk menurunkan inflasi yang terjadi, pemerintah melalui bank sentral melakukan berbagai upaya salah satunya menaikkan cadangan kas. Menaikkan cadangan kas merupakan salah satu cara untuk mengurangi jumlah peredaran uang yang ada di masyarakat karena dengan menaikkan cadangan kas, uang yang berhenti di bank menjadi lebih banyak sehingga secara tidak langsung jumlah uang yang beredar di masyarakat juga ikut menurun jumlahnya.

c. Menjual Sertifikasi Bank Indonesia (BI)

Upaya pemerintah dalam menurunkan atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat antara lain adalah dengan menjual sertifikasi Bank Indonesia (BI), dalam hal ini masyarakat

mempergunakan dana atau uang tunai yang mereka miliki untuk membeli sertifikasi Bank Indonesia untuk tujuan berinvestasi dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dengan masyarakat menginvestasikan dana yang mereka miliki dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI) maka uang atau dana yang beredar dimasyarakat juga akan berkurang atau menurun, yang harapannya dengan menurunnya jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat menurunkan tingkat inflasi dan inflasi dapat segera teratasi.

d. Memperketat Syarat Kredit

Jumlah uang yang beredar di masyarakat salah satu penyebabnya adalah karena tingginya tingkat minat masyarakat terhadap peminjaman dana kepada pihak perbankan. Maka dari itu, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat pemerintah juga melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang sangat berpotensi sebagai penyebab meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, yaitu peminjaman dana. Upaya pencegahan dan penanggulangan agar minat masyarakat untuk melakukan peminjaman dana pada perbankan dapat berkurang adalah dengan memperketat syarat kredit. Ketika syarat untuk mengajukan pinjaman atau kredit lebih diperketat, masyarakat akan kesulitan dalam melakukan peminjaman dana, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan mengalami penurunan. Salah satu upaya memperketat syarat kredit yang dilakukan oleh pemerintah antara lain seperti meningkatkan syarat kondisi keuangan debitur, dan meningkatkan jaminan peminjaman.

D. INSTRUMEN-INSTRUMEN KEBJAKAM MONETER

Kebijakan ekonomi moneter merupakan kebijakan ekonomi yang mengatur tingkat pertumbuhan dan peredaran uang dalam suatu negara. Tingkat penurunan dan peningkatan inflasi dan pengangguran menjadi fokus utama atau variabel makroekonomi utama kebijakan ekonomi moneter ini. Kebijakan moneter diburumuskan dan dipertanggungjawabkan oleh bank sentral atau badan negara pengatur keuangan. Untuk melakukan kebijakan moneter dengan tujuan mengatur jumlah peredaran uang di masyarakat agar stabilitas harga di pasar tetap terjaga,

pemerintah dapat menjalankan dengan instrumen-instrumen kebijakan moneter. Instrumen-instrumen kebijakan moneter ini baik instrumen secara langsung maupun instrumen tidak langsung. Berikut penjelasan mengenai beberapa instrumen utama kebijakan moneter;

- a. Suku Bunga Rabat (Discount Rate)
- b. Rebate rate atau markdown rate merupakan salah satu strategi yang dilakukan bank nasional terkait dengan naik turunnya biaya pinjaman bank. Kenaikan atau pengurangan biaya pembiayaan bank digunakan oleh otoritas publik untuk mengontrol berapa banyak uang tunai yang mengalir secara lokal, misalnya, memperluas atau memperluas berapa banyak uang tunai yang tersedia untuk digunakan atau mengurangi berapa banyak uang tunai yang tersedia untuk digunakan untuk tujuan tertentu, menggabungkan pengendalian tingkat ekspansi waspada, mendorong pendapatan dalam menyimpan atau menempatkan sumber daya ke dalam masyarakat, menjaga soliditas nilai uang, dll.

Dalam menjalankan instrumen ini, bank nasional akan menambah atau mengurangi nilai biaya pinjaman bank. Jika bank nasional menaikkan biaya pinjaman bank, perputaran uang lokal akan berkurang karena dengan biaya pinjaman bank yang tinggi, orang akan lebih suka menyimpan uang mereka atau menyetor uang mereka di bank. Lagi pula, jika bank nasional menurunkan biaya pembiayaan bank, kas lokal akan meningkat karena dengan pengurangan biaya pinjaman bank, individu yang membutuhkan subsidi akan lebih tertarik untuk mendapatkan aset dari bank. Dengan demikian, harta atau kas yang semula berada di tempat penyimpanan bank akan berputar-putar secara lokal karena adanya pertukaran. Demikian pula, pendapatan individu dalam menabung di bank juga akan berkurang karena dengan biaya pembiayaan yang rendah, manfaat yang akan diperoleh dari menabung di bank juga akan sedikit.

- c. Operasi Pasar Terbuka (OPT)

Instrumen pengaturan keuangan berikut adalah instrumen aktivitas pasar terbuka. Instrumen kegiatan pasar terbuka sangat mungkin menjadi instrumen utama karena sifatnya yang adaptif dimana dalam mengontrol berapa banyak kas yang tersedia untuk digunakan,

komponen yang dibantu oleh otoritas publik melalui tugas pasar terbuka adalah dengan menjual (open market selling) atau membeli (pembelian pasar terbuka) perlindungan. - Perlindungan pemerintah.

d. Penjualan Pasar Terbuka (*Open Market Selling*)

Penjualan pasar terbuka dilakukan oleh bank nasional ketika ada kelebihan uang tunai lokal. Penjualan pasar terbuka atau gerakan menjual perlindungan yang dimiliki pemerintah diselesaikan oleh otoritas publik untuk mengurangi berapa banyak uang tunai yang tersedia untuk digunakan dengan menjual perlindungan yang diklaim pemerintah. Perlindungan pemerintah ditawarkan kepada masyarakat umum, sehingga aset atau uang tunai yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya untuk membeli perlindungan tersebut akan masuk atau diperoleh oleh bank nasional, sehingga berapa banyak uang tunai yang mengalir di daerah akan berkurang. Dengan mengurangi berapa banyak uang yang mengalir secara lokal akan membantu dalam mengatasi masalah ekspansi.

e. Pembelian Pasar Terbuka (*Open Market Buying*)

Pembelian pasar terbuka diselesaikan oleh bank nasional ketika jumlah uang tunai yang beredar di tingkat lokal sedikit, ini diselesaikan oleh otoritas publik dengan membeli kembali perlindungan pemerintah yang tersedia untuk digunakan atau yang telah ditawarkan kepada masyarakat umum. Perluasan jumlah kas yang tersedia untuk digunakan ini dengan alasan bahwa ketika otoritas publik membelikembali perlindungan dari orang-orang pada umumnya, perlindungan tersebut akan ditukar dengan uang tunai, sehingga arus kas lokal akan bertambah atau bertambah.

f. Rasio Cadangan Wajib (Rasio Persyaratan)

Proporsi prasyarat penyimpanan yang juga disebut proporsi simpanan uang adalah pedoman bank nasional yang digunakan oleh sebagian besar bank nasional, namun tidak digunakan oleh semua bank nasional di dunia, yang menentukan ukuran dasar penyimpanan yang harus dimiliki atau dipertahankan. oleh bank bisnis di bank dalam catatan keuangan di bank nasional atau di bank jurnal. Dalam memutuskan berapa banyak aset atau kredit simpanan uang, biasanya tidak ada yang

sama atau berubah sesuai dengan proporsi kebutuhan simpan yang telah ditetapkan oleh bank nasional. Bank nasional dalam menetapkan kebutuhan simpanan umumnya berapa banyak aset yang ditetapkan sebagai simpanan ditentukan berdasarkan tingkat simpanan mutlak atau aset pihak luar. Proporsi prasyarat hold dimanfaatkan perbankan nasional sebagai perangkat strategi keuangan untuk mempengaruhi perkembangan pasokan kas dan pengawasan likuiditas. Kapanpun otoritas publik perlu mengurangi berapa banyak uang tunai yang tersedia untuk digunakan, otoritas publik akan memperluas ukuran dasar aset atau bank menyimpan uang tunai dengan tujuan bahwa lebih sedikit uang tunai akan disalurkan. Di sisi lain, untuk membangun berapa banyak uang tunai yang tersedia untuk digunakan, otoritas publik akan mengurangi simpanan bank wajib, sehingga lebih banyak uang tunai yang dapat dimiliki secara lokal oleh bank.

g. Imbauan Moral

Instrumen pengaturan keuangan sebagai permintaan moral adalah instrumen yang dilakukan oleh bank nasional untuk mengontrol berapa banyak uang tunai yang mengalir secara lokal melalui bank nasional yang memberikan permintaan kepada bank bisnis untuk membuat langkah-langkah tertentu, misalnya, menurunkan atau memperbesar biaya pinjaman di muka. Panggilan ini disampaikan langsung oleh bank nasional kepada para pemimpin bank bisnis dalam pertemuan yang baru-baru ini diadakan antara bank nasional dan para pemimpin bank bisnis. Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen pendekatan keuangan lain selain 4 instrumen tersebut, antara lain kredit langsung, penjaminan kemajuan impor, kantor cerukan, intersesi rupiah, dan autentikasi wadiah Bank Indonesia.

h. Pengawasan Kredit Selektif (*Selective credit control*)

Instrumen ini merupakan instrumen terakhir yang juga dibuat oleh bank sentral terkait dengan kebijakan moneter di mana instrumen ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan keputusan pemerintah dalam pemberian suatu kredit. Bank sentral dapat menentukan apakah pinjaman ini masuk dalam kategori prioritas atau masuk dalam kategori bukan prioritas. Pada kredit selektif ini ada dua jenis kredit yaitu kredit

ketat dan kredit longgar. sesuai dengan namanya, kredit ketat merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah perusahaan atau masyarakat yang akan melakukan kredit dengan cara memperketat atau mempersulit syarat-syarat untuk mengajukan kredit. Kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral untuk mengatasi inflasi karena dengan semakin sulit masyarakat mengambil kredit maka jumlah uang yang beredar di masyarakat pun akan berkurang. Sebaliknya kredit longgar merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan kredit yaitu dengan melonggarkan syarat-syarat memperoleh kredit. Kebijakan menambah jumlah uang yang beredar dengan cara kredit longgar ini dilakukan oleh bank sentral untuk mengatasi masalah deflasi.

E. KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA

Adanya kebijakan moneter di Indonesia dilatar belakangi oleh permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998. Permasalahan-permasalahan yang terjadi ini mengakibatkan krisis besar-besaran di Indonesia, di mana pada tahun-tahun itu perekonomian Indonesia anjlok hingga menyebabkan nilai mata uang negara Indonesia merosot kebawah. Tingkat inflasi yang melambung tinggi menyebabkan berbagai kekacauan perekonomian seperti meningkatnya harga barang di pasaran. Selain itu para investor yang semula menanamkan sahamnya di perusahaan-perusahaan Indonesia beramai-ramai mencabut sahamnya dari perusahaan Indonesia dan memilih untuk beralih berinvestasi di perusahaan-perusahaan luar negeri akibat dari anjloknya perekonomian Indonesia pada saat itu. Melambungnya tingkat inflasi, keluarnya para investor menjadikan perekonomian di Indonesia semakin jatuh karena tidak adanya pemasukan yang menyebabkan sistem perbankan bank-bank Indonesia menjadi lemah.

Contoh kebijakan moneter di Indonesia

- a. Pelaksanaan kredit langsung oleh bank Indonesia, kegiatan ini dilakukan oleh bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat yang dilakukan dengan cara bank Indonesia

memberikan kredit secara langsung untuk kegiatan yang harus segera mendapatkan dana. Pemberian kredit secara langsung ini dilakukan oleh bank sentral kepada bank-bank umum lain atau sektor lain dan juga berbagai proyek yang benar-benar membutuhkan dana secara mendesak dan kegiatan yang akan dilakukan harus segera dibiayai.

b. Penyedia fasilitas overdraft

Fasilitas overdraft merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh kebijakan moneter di mana bank sentral dapat memberikan bantuan pinjaman jangka pendek kepada bank-bank umum yang mengalami kesulitan pinjaman jangka pendek. Namun, dalam memberikan pinjaman jangka pendek ini bank sentral menetapkan suku bunga pinjaman yang cukup tinggi. Tingginya suku bunga pinjaman yang ditetapkan oleh bank sentral ini bertujuan agar bank sentral tetap mampu mengontrol peredaran uang dan mampu menjaga kestabilan peredaran uang.

c. Penerbitan surat utang negara

kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menerbitkan surat utang negara dan menghimpun atau mengumpulkan uang tunai yang beredar di masyarakat.

d. Program investasi rupiah

kebijakan moneter yang dilakukan di Indoensia yang selanjutnya adalah program investasi rupiah, program ini merupakan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indoensia sebagai program yang mendukung salah satu instrumen kebijakan moneter yaitu instrumen pasar terbuka. Di mana kebijakan investasi rupiah ini dilakukan oleh Bank Indonesia melalui proses pinjam meminjam dana di pasar uang antar bank secara langsung selama tujuh hari.

F. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN DARI KEBIJAKAN MONETER

a. Kelebihan

- 1) Dapat mengarahkan berapa banyak kas yang mengalir secara lokal.
- 2) Dapat mengatur biaya pinjaman dan kredit bank.
- 3) Mudah berubah dengan cepat karena tidak ada aktivitas yang kacau
- 4) Semua orang bisa mengumpulkan emas atau perak.

5) Uang yang mengalir dapat langsung ditukar dengan emas, yang dapat digunakan sebagai jaminan.

b. Kekurangan

- 1) Tidak selalu mempengaruhi dana cadangan dan usaha individu.
- 2) Kurangnya kepercayaan individu terhadap uang tunai
- 3) Mewajibkan otoritas publik untuk secara konsisten menyaring soliditas moneter.
- 4) Memalsukan uang sangatlah sederhana.

Uang tunai yang berputar-putar secara lokal tidak dapat diperdagangkan untuk keamanan yang disimpan di bank-bank

G. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN DARI KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam kebijakan moneter dan bekerja sama untuk mengatasi deflasi-inflasi. Adapun kelebihan dari kebijakan fiskal antara lain :

c. Kelebihan

- 1) Lebih mudah mengontrol pendapatan dan pengeluaran pemerintah
- 2) Lebih efektif daripada kebijakan moneter
- 3) Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang lebih baik
- 4) Mampu menstabilkan model ekonomi negara
- 5) Membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien

d. Kekurangan

- 1) Kaku dan tidak fleksibel ketika melalui birokrasi yang kompleks yakni APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)

Menimbulkan pandangan negative public terhadap pemerintah tentang peningkatan besaran pajak yang dikenakan.

BAB XV

OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA

A. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Perdagangan
3. Pasar Komoditas
4. Kebijakan Moneter
5. Kebijakan Fiskal
6. Pasar Finansial

B. PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA

7. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian global menunjukkan tren positif di paruh kedua tahun 2021, bersama dengan peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai negara. Kuat pemulihan dari dua ekonomi terbesar-Amerika Serikat dan China serta pengembangan vaksinasi di berbagai belahan dunia telah memberikan kontribusi untuk lebih kuat indikator makroekonomi dan meningkatkan kepercayaan diri dalam populasi dunia. Namun, pemulihan belum merata, dan beberapa kelompok dari negara-negara yang telah mengalami dalam melaksanakan pemulihan ekonomi program dan masalah mengakses vaksin.

Munculnya varian baru dari COVID-19 adalah faktor yang menyebabkan ketidakpastian politik di 2021. Wabah Delta varian sejak Mei 2021, apa penyebab dari masih ombak di berbagai daerah, seperti Asia dan Amerika Utara, dan peningkatan kasus Uni Eropa, membuktikan seberapa cepat kondisi dapat berubah karena penyebaran COVID-19. Di sisi lain, munculnya covid-19 mutasi juga menjadi tantangan adalah kebijakan jangka panjang. Varian baru COVID-19 tidak akan menyebabkan semua masalah yang (VOC) pada 2021, namun akan ada VOC dengan julukan Omicron. Fluktuasi ini meningkatkan waspada terhadap negara-negara di seluruh dunia untuk menghindari dampak jika pra-VOC, yaitu delta menyebar. Pindah ke Google Indeks Mobilitas data menunjukkan peningkatan umum dalam semua kegiatan di luar ruangan di beberapa negara di paruh kedua tahun 2021. Jika anda mencoba untuk berdiri dengan meningkatnya jumlah daerah komersial di Jerman dan Perancis dan zona positif. Namun, orang-orang bergerak kerja dan pemukiman telah

mengalami perubahan yang signifikan. Data ini mencerminkan perubahan dalam kebiasaan kerja, di rumah, tetapi juga membatasi kegiatan mereka dan misi kebijakan.

Berbagai pemerintah sedang mempersiapkan berbagai rencana melarikan diri dalam kasus virus menyebar lebih lanjut dan tingkat vaksinasi yang mulai drop. Beberapa negara telah disesuaikan mobilitas mereka dan sosial kebijakan pembatasan dalam persiapan untuk COVID-19 endemik fase. Selama masa transisi ini, beberapa negara telah mereka melonggarkan kebijakan imigrasi meskipun masih memiliki restrictive langkah-langkah di tempat untuk menyaring yang tidak diinginkan warga negara asing. Beberapa strategi yang diterapkan mencakup pengaturan persyaratan bagi negara asal, jenis perjalanan, titik masuk (bandara, pelabuhan, jalan-jalan), penerapan karantina, dan persyaratan untuk jenis vaksin yang digunakan.

Di tengah tahun 2021, telah ada peningkatan dalam vaksinasi di seluruh dunia. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti strategi pemerintah untuk mempercepat vaksinasi dalam rangka untuk melawan gelombang melanjutkan dan meningkatnya jumlah COVID-19 vaksin yang tersedia, sampai rilis vaksin menggunakan lisensi di negara-negara di Asia Timur. Kesenjangan di tingkat vaksinasi antara negara-negara dengan tinggi dan menengah tingkat pendapatan dan orang-orang dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah adalah pelebaran. Di high-kelompok pendapatan negara, vaksinasi rintangan, lebih disebabkan keengganan dari orang-orang yang akan dieksekusi. Di sisi lain, kelompok negara-negara berpenghasilan rendah dengan kecacatan utama adalah kekurangan pasokan. Organisasi Kesehatan Dunia

memperkirakan bahwa presentase kecil dari negara-negara berkembang akan menerima jumlah yang cukup vaksin pada tahun 2021.

Di satu sisi, kondisi keuangan global masih relatif akomodatif, terutama mengingat kebijakan moneter yang sedang berlangsung dukungan oleh berbagai bank sentral. Meskipun penguatan ekonomi AS, inflasi dan tingkat suku bunga utang mengalami peningkatan. Jadi, negara-negara yang saat ini memiliki akomodatif kebijakan moneter global harus mengantisipasi Federal Reserve kemungkinan kebijakan tapering dalam waktu dekat. Ekspor didorong negara-negara perlu untuk diketahui dari peningkatan inflasi karena tren harga komoditas global, yang diperkirakan akan terus berlanjut sampai awal 2022. Berdasarkan dinamika COVID-19 kasus dan vaksinasi, serta perkembangan ekonomi terkini, Kementerian Urusan Ekonomi percaya bahwa perekonomian akan menunjukkan tanda-tanda perbaikan di 2021. Kementerian Urusan Ekonomi memprediksi bahwa ekonomi global akan berada dalam kondisi yang baik di tahun 2021.

Ekonomi global diproyeksikan tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan karena meningkatnya serapan dari vaksinasi. Lain risiko terbaik adalah aktivitas manufaktur global dan memperluas wilayah tumbuh ($PMI > 50$). Ketika vaksin negara-negara penghasil mencapai target vaksin, hal ini membuka peluang untuk cepat mendistribusikan tambahan vaksin untuk negara-negara lain yang dibutuhkan. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan didukung oleh dampak positif dari penguatan ekonomi di AS dan China, sehingga kemungkinan bahwa tren pemulihan akan diamati di negara-negara lain juga. Pertumbuhan ekonomi global masih dibatasi oleh ketidakpastian yang sedang berlangsung tentang potensi munculnya baru, yang lebih berbahaya bentuk COVID-19. Lainnya potensi risiko normalisasi, kebijakan moneter lebih cepat dari ekspektasi arus modal keluar mungkindalam EM, beberapa negara telah menaikkan suku bunga seperti Rusia, Korea Selatan, Afrika Selatan, prospek stagflasi: nuzul – per iklim dan krisis energi. Kenaikan inflasi ini akibat dari terlalu banyak permintaan dan pasokan cukup, dalam menghadapi yang tak terduga pemulihan ekonomi dan peningkatan harga-harga komoditas yang tidak diimbangi dengan peningkatan yang sesuai dalam produksi.

Di lihat dari neraca perdagangan masih tidak sebgus ekspor

keseimbangan, yang berarti China memasok barang-barang yang lebih daripada membeli. Perlambatan dalam perdagangan internasional dilanjutkan pada awal tahun sebagai akibat dari memburuknya kondisi ekonomi di beberapa negara yang kita perdagangan, serta dimulainya Tahun Baru Cina liburan musim. Tapi untuk tumbuh secara Umum, tingkat aktivitas perdagangan, pada tahun 2021, apa yang bertahap pemulihan ekonomi global. Sejak pertengahan desember tahun 2020, China telah imunisasi warganya. Pada oktober 2021, pemerintah Cina telah diberikan 2,25 miliar dosis vaksin, cukup untuk dua dosis untuk 80.6% dari populasi. Penyebaran COVID-19 di Cina sedang dikendalikan, yang memungkinkan untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Di sisi lain, tingkat vaksinasi di Jepang dipercepat pada semester kedua tahun 2021. Menurut laporan terakhir, pada akhir September 2021, hampir tujuh puluh persen dari populasi telah menerima vaksin dosis 1, dan enam puluh persen dari populasi telah menyelesaikan program vaksinasi. Berita positif ini kemajuan mendukung upaya kami untuk membuka kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun kebangkitan baru-baru ini COVID19 kasus, perekonomian telah perlahan-lahan pulih sejak pemerintah memberlakukan kembali kebijakan-kebijakan restriktif pada bulan Mei dan agustus. Berdasarkan perkembangan terakhir, Kementerian

Ekonomi memprediksi bahwa ekonomi Jepang akan meningkatkan pada tahun 2021 karena kemajuan vaksinasi dan pemulihan ekonomi global. Ekonomi Jepang diperkirakan akan melambat pada tahun 2022, karena rendahnya permintaan terus wabah ekonomi dan pertumbuhan upah masih lemah.

8. Perdagangan

Perdagangan global diperkirakan akan membaik pada tahun 2021. Pergeseran jenis produk yang diperdagangkan akan menahan pertumbuhan. Global perdagangan dalam barang-barang manufaktur mengalami kesulitan karena terbatasnya ketersediaan bahan baku dan rumit rantai pasokan. Produsen menghadapi lebih tinggi biaya pengiriman dan kekurangan dari wadah, sehingga mereka harus menemukan cara untuk menggunakan teknologi digital atau untuk melakukan diversifikasi pemasok dan tempat produksi. Ketidakseimbangan dalam kecepatan pemulihan ekonomi adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan biaya-biaya pengiriman, karena tidak semua dikirim Wadah dapat dengan cepat kembali karena tidak adanya atau cacat pada barang kembali.

Sementara itu, pemulihan layanan perdagangan masih lambat, terutama untuk sektor-sektor yang memerlukan interaksi langsung, seperti perjalanan dan pariwisata. Sebuah survei yang dilakukan oleh Bank Dunia telah menemukan bahwa persentase kecil dari orang-orang yang percaya bahwa perjalanan internasional akan dapat pulih dalam waktu dekat. Kebanyakan ahli setuju bahwa itu akan, setidaknya beberapa tahun sebelum pariwisata internasional kembali ke tingkat sebelumnya. Meskipun tren negatif dalam beberapa sektor jasa, sudah ada perbaikan pada orang lain.

9. Pasar Komoditas

Secara umum, harga komoditas telah meningkat pada tahun 2021. Ini adalah di atas tingkat yang terlihat sebelum pandemi. Peningkatan permintaan minyak di dukung oleh pemulihan ekonomi di beberapa kunci ekonomi, serta berlanjutnya kebijakan membatasi produk minyak mentah oleh OPEC. Komoditas energi adalah kelompok yang terkena dampak pandemi dan pemulihan mereka adalah yang terakhir di antara kelompok komoditas lainnya. Bank dunia memprediksi bahwa global harga minyak bumi akan rata-rata \$70 per barel pada tahun 2021 dan naik ke \$74 pada tahun 2021. Ada beberapa hal untuk menjaga dalam pikiran ketika berpikir tentang kemungkinan dari harga

minyak yang tinggi. Ada kemungkinan bahwa OPEC+ memutuskan untuk meningkatkan produksi minyak lebih cepat dari yang diharapkan. Masalah kedua adalah kemungkinan peningkatan aktivitas pengeboran minyak shale di AS. Logam yang merupakan logam dasar mengalami kenaikan harga tertinggi di antara komoditas lain selama tahun lalu. Penguatan ini kemungkinan akan terus berlanjut seiring pertumbuhan ekonomi di negara-negara lain. Di antara kelompok logam dasar, Bank dunia diperkirakan akan memiliki level tertinggi amplifikasi produk di tahun 2021, diikuti oleh tembaga dan bijih besi. Setelah pemulihan pada tahun 2021, logam dasar harga komoditas akan menormalkan secara umum pada tahun 2022 bersama-sama dengan mengurangi supply-chain interupsi, meskipun diperkirakan bahwa masih pada tingkat pra-pandemi.

10. Kebijakan Moneter

Di negara maju, inflasi mulai meningkat karena peningkatan harga-harga komoditas dan dampak dari gangguan pasokan. Meskipun fakta bahwa sebagian besar negara-negara maju masih dalam tahap awal pemulihan mereka, kebijakan moneter

yang akomodatif masih diperlukan dalam rangka untuk mempertahankan ekonomi ini. Dilema yang dihadapi US adalah bahwa dengan perkembangan permintaan domestik yang meningkat, hal ini telah menyebabkan inflasi, yang berarti bahwa Federal Reserve mungkin akan dibenarkan dalam menaikkan suku bunga. AS tingkat inflasi tahunan di bulan Juli 2021 naik sebesar 0,8% dibandingkan dengan bulan September.

Negara-negara berkembang terus mempertahankan kebijakan moneter yang longgar sikap, sebagian karena dukungan dari kondisi keuangan global. Beberapa Bank Sentral di Emerging markets yang berjuang dengan dilema tentang bagaimana untuk mengendalikan inflasi sementara ada kesenjangan yang besar antara realisasi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Kelompok negara-negara berkembang juga mengalami peningkatan inflasi pada tahun 2021, di samping pemulihan ekonomi global dan kenaikan harga komoditas. Kelompok negara-negara yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi mungkin harus menghadapi tantangan yang sulit dalam memutuskan bagaimana untuk mengencangkan atau mempertahankan kebijakan moneter mereka antara sekarang dan saat ekonomi mereka sepenuhnya pulih.

11. Kebijakan Fiskal

Ketika tingkat utang pemerintah naik tajam, hal ini penting untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dalam rangka untuk mengontrol masa depan risiko fiskal. Namun, dalam kasus dimana ekonomi masih dalam tahap awal pemulihan, kebijakan fiskal tidak dapat segera berhenti, jadi alternatif adalah untuk membuat penyesuaian. Dalam kasus dimana sebuah negara mengalami pemulihan ekonomi yang cepat, tambahan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan tingkat inflasi dan menambah beban utang negara dalam jangka panjang.

12. Pasar Finansial

Pasar finansial global perlu dipersiapkan untuk risiko pembalikan arus modal asing di pasar negara berkembang setelah Federal Reserve mengurangi pembelian obligasi (tapering off) sampai bulan Juni 2022, dan potensi lebih cepat kenaikan suku bunga rencana. Namun, dampak pada pasar finansial diperkirakan tidak akan lebih besar dari tapering-off period yang terjadi di tahun 2013. Secara umum, kondisi keuangan di negara-negara maju masih relatif longgar pada tahun 2021, dengan harapan melanjutkan kebijakan

moneter yang akomodatif dan peningkatan aset penilaian risiko. Di sisi lain, kondisi keuangan dalam kelompok negara-negara berkembang telah mengalami sedikit perubahan, dimana ada pengetatan kebijakan moneter dalam menanggapi tekanan inflasi dari aset tersebut melebihi harga di beberapa negara.

Terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut: Pertama, peningkatan kasus kembali setelah musim panas serta kemunculan varian baru COVID-19 dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi yang telah dibuka di sebagian negara. Kedua, tidak meratanya pemulihan ekonomi terutama di negara berkembang juga turut menjadi perhatian investor di paruh kedua 2021 ini. Ketiga, risiko dari peningkatan inflasi seiring dengan pemulihan ekonomi secara umum dan penguatan harga komoditas termasuk energi. Tekanan inflasi juga dipengaruhi oleh disrupsi rantai suplai dan logistik yang masih berlangsung sejak puncak pandemi hingga saat ini. Meskipun kondisi moneter saat ini masih relatif akomodatif, tekanan inflasi dapat mengubah posisi kebijakan moneter menjadi lebih ketat di masa mendatang.

1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pada tahun saat ini kita sudah menginjak masa milenial dan revolusi industri 4.0 yang sebagian besar menggunakan teknologi di segala aktifitas dan rangkaian dalam setiap sektor, baik sektor perkonomian, sektor manajemen, dan lain-lain. Di Indonesia perkembangan teknologi sudah sangat pesat, bisa dirasakan oleh masyarakat yaitu dengan adanya sistem pembayaran yang menggunakan digital, tabungan, perpajakan dan simpan-pinjam dengan berbasis aplikasi digital juga. Perubahan ini mampu mendorong perekonomian Indonesia terus berkembang dan semakin berjalan menyusul negara-negara lain. Selain perkembangan teknologi yang semakin pesat, disisi lain pada era saat ini juga terjadinya pandemi Covid-19. Pandemi ini selain mempengaruhi kesehatan masyarakat juga menyebabkan penurunan di segala sektor bahkan pada sektor perekonomian di seluruh dunia. Penurunan ini sangat memberikan efek cukup besar pada tatanan negara, termasuk Indonesia. Pada beberapa negara termasuk Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif (minus). Jika perekonomian negara mengalami minus itu menandakan bahwa ekonomi pada tahun tersebut lebih kecil di bandingkan dengan tahun

sebelumnya. itu artinya pada saat terjadinya pandemi tersebut perkembangan Indonesia mengalami penurunan yang drastis pada tahun sebelumnya.

Menurut data perekonomian Indonesia pada tahun 2020 masa dimana pandemi tersebut bermula, Indonesia memiliki angka pengangguran dan juga kemiskinan yang semakin melonjak. Pemberlakuan lockdown dan pembatasan berkegiatan membuat interaksi sosial antara masyarakat dan bahkan pada sektor perdagangan internasional ikut menurun, dan menyebabkan kebutuhan dan aktivitas domestik turun. Pendapatan masyarakat mengalami penurunan dikarenakan aktivitas dalam perusahaan tersebut mengalami pemberhentian dan pengurangan produksi. Bahkan ada banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada seluruh buruh dan tenaga kerja lainnya.

Memasuki pergantian tahun ikut membuat peralihan pada masa pandemi menjadi normal kembali. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa perekonomian pada tahun 2021 lalu mengalami peningkatan sebesar 3,69% yang dimana jika dibandingkan tahun 2020 lebih tinggi. Pertumbuhan yang mengalami peningkatan tertinggi berada pada bidang jasa kesehatan dan bidang sosial yang mencapai 10,46%. Kemudian pada tahun 2022 menurut Ekonom Bank Mandiri menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 5,17% year on year (yoy), yang dibandingkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup drastis.

Masa peralihan ini membuat berbagai sektor mengalami kebangkitan kembali, yang awal mengalami keterpurukan namun seiring berjalannya waktu bisa kembali normal dan meningkat.

2. Inflasi

Inflasi merupakan permasalahan yang terbilang klasik dan sudah tidak asing terjadi pada sebuah negara. Proses terjadinya inflasi ini adalah ketika meningkatnya jumlah dan biaya produksi yang tidak sebanding dengan tingginya permintaan produk tersebut, kemudian persebaran uang yang beredar tidak terkontrol dengan baik mampu menjadi faktor pendorong dari inflasi ini. Tinggi rendahnya laju inflasi akan menjadi stimulator bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Dan, 1999). Ketika tingkat inflasi yang terbilang normal dan stabil akan memberikan keuntungan bagi pengusaha di dalam negeri dan juga keuntungan bagi negara itu sendiri, yaitu dengan

menggencarkan investor untuk melakukan investasi ke dalam negara dan nantinya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. Namun jika hal tersebut di luar kendali dan menciptakan presentase inflasi yang semakin meningkat akan memberikan efek boomerang bagi proses pertumbuhan ekonomi di kemudian hari. Dampak yang akan tercipta adalah menurunnya minat investor untuk menanamkan modal mereka pada negara, kemudian mengurangi daya minat beli masyarakat yang dimana akan menurunkan pendapatan masyarakat dan memberikan efek sengsara bagi masyarakat dan juga negara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2022 (Januari-Maret) mencapai 1,20% dan sedangkan tingkat inflasi tahun 2021 ke tahun 2022 mencapai 2,64%. Dari data tersebut menggambarkan secara jelas adanya peningkatan terkait inflasi tersebut. Hal tersebut didasari oleh seluruh pengeluaran yang terjadi pada tahun tersebut mengalami peningkatan inflasi juga.

Di masa pandemi seperti saat ini kita mengalami berbagai penurunan di segala sektor dengan itu juga pemerintah dan masyarakat dituntut untuk bisa bertahan seimbang dengan inflasi agar tidak mengalami inflasi tersebut. Berbagai upaya bisa dilakukan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah memanfaatkan teknologi dan juga UMKM setempat. Upaya ini di berlakukan guna menstabilkan dan mengendalikan daya beli masyarakat dan sebagai upaya menstabilkan jumlah permintaan produksi.

Pada tahun 2022 salah satu upaya dalam bentuk langkah strategis yang dikeluarkan oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) meliputi 5 langkah, diantaranya adalah memperkuat pengaturan dan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan upaya pemulihan ekonomi nasional, menanggulangi efek dari *upside risks* diantaranya adalah keseimbangan kebijakan likuiditas global dan juga meningkatkan harga komoditas dunia terhadap daya beli masyarakat, menjaga kestabilan inflasi pada sektor bahan pangan bergejolak, memperkuat sinergi komunikasi kebijakan, dan memperkuat pengaturan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam upaya pengontrolan inflasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). (Limanseto, 2022)

3. Kondisi Moneter

Peraturan Moneter merupakan Pengaturan dan strategi yang di berlakukan oleh Bank Indonesia (BI) dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang di inginkan (Eka Mulia Nurul Al Amin, 2020). Didalam kebijakan moner diberlakukan 2 macam

kebijakan diantaranya, kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Pengaturan moneter yang ditunjukkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dengan melalui peningkatan jumlah uang yang beredar bisa dinamakan pengaturan ekspansif. Sedangkan kebijakan moneter yang ditunjukkan untuk menghambat kegiatan perekonomian dengan melakukan penurunan jumlah uang yang beredar bisa dikatakan kebijakan kontraktif (Eka Mulia Nurul Al Amin, 2020).

Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang di selenggarakan oleh Bnak Indonesia (BI) pada maret 2022 mengeluarkan keputusan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) dengan jumlah 3,50%, kemudian pada suku bunga Deposit Facility berjumlah 2,75% dan Suku Bunga Lending Facility 4,25%. Keputusan yang telah di tetapkan tersebut guna menjaga keseimbangan nilai tukar dan juga mendukung kemajuan pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank sentral sebagai upaya tersebut diantara lain mengikuti perkembangan pasar dan fundamental ekonomi maka, diberlakukan perkokohan pada peraturan nilai tukar rupiah untuk menjaga kestabilan nilai tukar berjalan, diberlakukan kembali kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK), memperhatikan anggaran dana dalam rangka menyambut bulan ramadhan, diberikan dorongan kesiapan pada Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), memberhasilkan 6 target jalur keuangan presidensi Indonesia pada G20 2022 dengan memperluas kerja sama dengan bank negara lain dengan berpegang teguh dalam kebijakan Internasional. (Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, 2022)

4. Kondisi Fiskal

Pada masa pandemi seperti saat ini segala aktivitas masyarakat sangat terbatas, interaksi dan juga perekonomian berhenti seketika, karena pemerintah menerapkan pembatasan tersebut guna mengurangi pandemi Covid-19. Pandemi yang disebabkan oleh Covid-19 ini menyebabkan krisis kesehatan dan membuat menurunnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan melihat kasus ini dan berbagai dampaknya, pemerintah dituntut untuk menyeimbangkan kebijakan sebagai bentuk pemulihan kesehatan dan juga perekonomian Indonesia.

Melihat kondisi negara Indonesia yang seperti ini tentunya pemerintah tidak

akan berdiam diri dan berlarut pada keadaan. Berbagai macam cara dan juga upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kondisi saat ini salah satunya pada kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran merupakan bentuk orientasi antara pendapatan dengan biaya sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah ditargetkan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan sesuai rencana sebelumnya (Lativa, 2021). Pada saat ini Indonesia menerapkan kebijakan yang komprehensif pada bidang fiskal guna menghadapi pandemi pada masa saat ini. Pemerintah memberlakukan refocusing kegiatan dan juga realokasi anggaran sebagai kebijakan yang diterapkan pada bidang fiskal.

Dari berbagai sumber dana APBN yang masuk ke dalam keuangan pemerintahan nantinya akan direalokasi dan juga akan dilakukan refocusing terhadap sumber dana tersebut. Kemudian dari pemasukan negara melalui pajak merupakan salah satu anggaran yang mampu melanjutkan pembangunan. Dengan begitu pajak dalam negara bernilai sangat penting dalam mendukung prosesnya pembangunan negara dan juga dalam perekonomian negara. Beberapa fungsi

dalam perekonomian di antaranya adalah salah satu dana yang mampu mendanai segala kebutuhan dan pengeluaran yang di perlukan oleh negara, pajak menjadi pengatur berjalannya pertumbuhan ekonomi negara. Dengan contoh ketika negara ingin mendatangkan investor dan memperbanyak investor untuk menanamkan modal maka pemerintah memberlakukan penurunan pajak yang akan menjadi daya tarik bagi investor, pajak juga mampu mengendalikan inflasi negara dengan mengatur peredaran uang yang beredar di masyarakat, kemudian pajak juga berfungsi sebagai pendukung pembangunan yang memberikan peluang dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat nantinya.

5. Kondoso Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran Indonesia (NPI) adalah bentuk gambaran yang memperlihatkan bagaimana proses ekonomi antara penduduk Indonesiadengan yang bukan pada kurun waktu tertentu. Transaksi ini mencakup beberapa unsur yaitu antara lain transaksi berjalan, transaksi keuangan, dan transaksi modal. Gambaran transaksi ini sangat penting dalam proses perekonomian yang mampu memperlihatkan bagaimana keadaan pendapatan domestik bruto (PDB) dan juga proses uang yang beredar di masyarakat (Luis & Moncayo, n.d.).

Menurut Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa neraca pembayaran Indonesia ada tahun 2021 mendapatkan surplus mencapai US\$13,5M atausestara dengan Rp193T. Yang dimana dalam pencapaian di tahun 2021 mengalami peningkatan yang tinggi di dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya menghasilkan surplus sekitar US\$2,6M. Hal ini menggambarkan bahwa neraca pembayaran pada tahun berjalan tetap dalam kondisi baik dan mampu menompang ketahanan eksternal.

Terjadinya surplus pada tahun berjalan didasari oleh berjalannya kinerja ekspor yang mampu dipengaruhi oleh surplus neraca permintaan global dan komoditas ekspor khusus nya pada sektor emas hitam. Sejalan dengan pembaruan kegiatan ekonomi domestik dan kokoh nya ekspor, impor yang terus bertambah maka mampu menahan surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan (Komunikasi, 2022)

6. Perkembangan Investasi

Menurut Kementerian Inverstasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan terkait data investasi periode Juli-September tahun 2021

berjumlah Rp 216,7T dan investasi pada periode Januari-September mencapai Rp 659,4T. Pada pandemi seperti sekarang pemberlakuan PPKM guna melakukan pengurangan penyebaran Covid-19 membuat iklim investasi optimis kembali dan diharapkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tetap positif.

Dimasa pandemi seperti ini perkembangan investasi berjalan tidak menentu dalam artian ada masa dimana mengalami penurunan dan mengalami kenaikan atau bahkan seimbang. Dengan keadaan seperti itu pemerintah memberlakukan kebijakan pajak yang sebagaimana dalam penjelasan kebijakan fiskal yang telah di sampaikan. Dengan pemberlakuan penurunan pajak dan menstabilkan kondisi maka para investor mampu tertarik untuk menanamkan modal mereka ke dalam negara.

C. TANTANGAN DAN PELUANG

1. Deifinisi Tantangan dan Peluang

Tantangan merupakan sebuah gabungan yang berasal dari kata “Tantang”. Berdasarkan atas asal kata dari tantangan tersebut memengaruhi definisi tantangan yang dapat dilihat dari segala sudut pandang dan kata benda maupun kata sifat. Tantangan diartikan sebagai sebuah nomina atau kata benda yang dapat diartikan sebagai dapat memiliki arti positif maupun negatif.

Tantangan diartikan kata benda apabila di dalamnya menyatakan sebuah benda, tempat, nama seseorang, atau segala unsur yang dapat di bendakan. Maka dari itu tantangan sebagai arti nomina atau kata benda merupakan suatu kegiatan, sikap, objek tertanggulangi bahkan tindakan yang memotivasi diri yang dapat memengaruhi diri sendiri atau bentuk ajakan yang bersifat negatif dan positif dalam kehidupan individu maupun lingkungan.

Dalam pembahasan Outlook perekonomian Indonesia, Tantangan diartikan sebagai hal atau objek yang bersifat positif yang akan memengaruhi perkembangan dari perekonomian di Indonesia. Tantangan tersebut dapat dipandang dari sisi eksternal maupun internal perekonomian Indonesia. Tantangan ini juga dapat diartikan sebagai suatu usaha pengendalian yang akan memberikan dampak yang dapat dirasakan baik secara global maupun domestik. Tantangan ini nantinya bertujuan dalam memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi yang di mana memengaruhi sektor perekonomian Indonesia.

Peluang Tidak berbeda dari pandangan tantangan sebelumnya, peluang juga dapat di definisikan sebagai sesuatu yang memiliki arti luas dan berbeda-beda berdasarkan atas pandangan masing-masing. Peluang dapat diartikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Peluang dalam ilmu statistika maupun matematika di definisikan sebagai sebuah probabilitas atau suatu kemungkinan munculnya sebuah kejadian dalam satu waktu.

Sedangkan pengertian peluang dalam dunia usaha di definisikan sebagai suatu kesempatan yang dimiliki setiap individu/kelompok/badan usaha dalam memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Definisi peluang dalam artian usaha memiliki sebuah asal kata dasar. Kata peluang berasal dari sebuah kata bahasa inggris yaitu *opportunity* yang memiliki arti sebagai sebuah momen atau kejadian dalam mendapatkan kesempatan yang muncul. Tidak kalah dengan pengertian peluang sebagai usaha dan ilmu statistika/matematika, peluang juga dapat di definisikan secara umum. Berdasarkan atas pengertian secara umum, peluang diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan maupun kepercayaan atas suatu kejadian yang terjadi maupun akan terjadi berdasarkan sesuatu yang berlaku.

2. Peluang dan Tantangan dalam Outlook Perekonomian Indonesia

Atas tantangan yang terjadi di tahun 2020 mengakibatkan munculnya sebuah Peluang dalam perekonomian di Indonesia. Di mana pada tahun 2020 ini Indonesia memiliki sebuah makna yang berbunyi “Indonesia akan Semakin Terbuka, Tapi Tidak terlalu Terbuka”. Dalam konteks perekonomian Indonesia dengan pembahasan perdagangan internasional, dapat dilihat dari aspek peluang dalam pengembangan sisi nasional, regional bahkan global sekali pun. Pada tahun 2020 ini akan menciptakan sebuah tujuan di mana omnibus law ditetapkan akan selesai dan hal tersebut nantinya akan memengaruhi peluang yang terhadap investasi asing yang akan berinvestasi ke indonesia menjadi lebih cepat karena meningkatnya tingkat kelancaran investor asing keindonesia.

Pada tingkat regional, Sektor persaingan pasar bebas di dalam ASEAN dan APEC akan terjadi sebuah kemajuan yang tinggi sehingga akan membuka sebuah peluang di sektor perdagangan di antara kawasan ASEAN dan APEC. Hal ini akan memengaruhi peluang bagi industri seperti kayu, furniture, dan rotan di Indonesia karena di akibatkan terjadinya sebuah perang dagang antara

AS-China dan Brexit.

Dalam tingkat Keterbukaan Global, peluang yang tercipta atas luasnya peningkatan penduduk dalam lingkup penggunaan internet yang akan membuka tingkat peluang *business* menggunakan internet (*e-business*) serta membuka sebuah perantara atau distributor dalam lingkup perdagangan internasional untuk kawasan- kawasan yang baru. Hal tersebut dikatakan terbuka namun tidak terlalu terbuka karena kemajuan regulasi atas pasar bebas ASEAN dan APEC masih di tahap berjalan dan parsial, walaupun lingkup pasar bebas APEC ditargetkan pada tahun 2020 sedangkan pasar bebas ASEAN masih memiliki waktu untuk memenuhi target sampai tahun 2025.

Peluang Dan Tantangan Dari Perekonomian Indonesia Atas Tahun 2020

a. Bentuk Peluang Keterbukaan Perekonomian Indonesia

1) Keterbukaan Nasional : Omnibus law Rampung awal tahun 2020

Omnibus Law adalah sebuah Undang-undang yang di tetapkan untuk mengendalikan investasi di dalam negeri. Maksudnya dengan Omnibus law ini bertujuan agar dapat mengarahkan kepada apabila adanya reduksi atas signifikan suatu hambatan-hambatan investasi di Indonesia. Adanya Omnibus law ditujukan akan membawa dampak positif bagi investasi di indonesia agar dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Omnibus law berisikan sebuah kebijakan perundang-undangan yang mencakup penyederhanaan birokrasi, Penciptaan lapangan kerja yang luas, serta penetapan zona ekonomi bersamaan dengan aspek pendukung seperti aktivitas litbang.

Mengutip jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNSIQ, Omnibus law akan memengaruhi peningkatan investasi di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data yang ada pada 2019 sebagai periode kuarterpertama mengalami sebuah peningkatan sebesar 5,3% dibanding tahun sebelumnya 2018 atas kegiatan investasi di indonesia. Berdasarkan hal itu kita dapat melihat akan ada hal positif dari omnibus law sebagai peluang investasi di indonesia.

Peningkatan atas kuarter tersebut dikatakan sebagai suatu hal yang sejalan dengan kenaikan indeks *Ease of Doing Business*

(EoDB) yang terjadi oleh Indonesia yaitu terjadi perubahan peningkatan sebanyak 36 peringkat dalam ranking yang ditetapkan oleh World Bank tahun 2016 (BKPM, 2009).

Tujuan atas peluang lapangan kerja di Indonesia harus segera dilaksanakan. Apabila tidak segera dilakukan maka *window of opportunity* Indonesia atas peningkatan lapangan kerja tidak akan pernah terjadi. Hal ini dikarenakan atas *window of opportunity* Indonesia berjalan searah dengan dividen atas demografi yang semakin menyempit. Selain program omnibus law dalam hal investasi, pemerintah menetapkan sebuah program legislasi nasional di tahun 2020 yang nanti harapannya juga akan menciptakan sebuah peluang bukan tantangan bagi pelaku usaha Indonesia. Program legislasi nasional tahun 2020 ini berisikan sebuah rancangan undang-undang (RUU) seperti RUU keuangan negara, RUU bea materai dan RUU cukai.

2) Ketebukaan Regional : Progress of MEA Infrastructure

Progress yang terjadi di dalam infrastruktur MEA akan dapat memicu perdagangan bebas yang ada di kawasan ASEAN pada tahun 2025. akan ada sebuah rancangan aksi pada MEA yang ditetapkan pada tahun 2015-2025 guna menyelesaikan sejumlah pencapaian target sebelum MEA 2025 (ASEAN, 2005). Menurut kementerian luar negeri RI 2009, sudah ada pencapaian sebesar 67% target di tahun 2017 telah tercapai dari target yang sudah ditentukan.

Dalam jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNSIQ menjelaskan adanya beberapa rancangan aksi yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2020 yaitu:

- 1) Penyelesaian atas implementasi yang menyimpang pada perdagangan dari NTM untuk mengejar sebuah tujuan reduksi biaya dan waktu melakukan bisnis di kawasan ASEAN dengan pendekatan yang regional yang efektif dan responsif.
- 2) Pembentukan perencanaan yang bersifat berskala event pencocokan UMKM dengan investor.

- 3) Penyelesaian atas reduksi kecelakaan pada lalu lintas hingga persentase 50%
- 4) Pengembangan SDM di bidang infrastruktur terstandar di ASEAN sebagai bentuk penyelesaian kerangka pendidikan di Indonesia
- 5) Menciptakan sebuah lingkungan investasi yang lebih menarik dengan mempermudah dan menyederhanakan aturan serta prosedur dari investasi dalam negeri di sektor jasa sebagai bentuk penyelesaian negosiasi ATISA (*ASEAN Trade in Services Agreement*).
- 6) Merevisi sebuah undang-undang mengenai penggunaan elektronik dalam melakukan transaksi elektronik dengan disesuaikan berdasarkan konteks MEA.
- 7) Penyelesaian atas bidang kesehatan yang berdasarkan atas standar kompetensi dan praktik pelayanan kesehatan ASEAN serta menjalankan sebuah mekanisme kesehatan dengan mobilitas lintas negara ASEAN.
- 8) Mengadakan sebuah praktik berkelanjutan secara sosial dan lingkungan dengan menyertakan penguatan sumber daya manusia sebagai bentuk penguatan perdagangan investasi di bidang mineral.
- 9) Melakukan bentuk pengembangan dalam memperluas UMKM sebagai aktivitas dari pemanfaatan e-commerce.
- 10) Melakukan sebuah pengembangan program pembiayaan untuk pelaku usaha mikro.
- 11) Bentuk kerja sama akademis di perguruan tinggi sebagai penyedia pengembangan program UMKM lokal dengan perusahaan besar.
- 12) Penyelesaian atas kasus transaksi dagang yang bermasalah di lintas negara sebagai bentuk penyelidikan dan pengambilan keputusan.

b. Business as Usual : Trend Ekonomi makro

Mengutip dari jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

UNSIQ, perkembangan perekonomian Indonesia dalam 5 tahun terakhir relatif lebih rendah daripada tahun 2010-2014. Pada produk komoditas telah teridentifikasi sebuah peluang di tingkat level internasional yaitu pada produk nikel dan kepala sawit:

- 1) Kenaikan peningkatan atas kepercayaan PDB yaitu dalam pertumbuhan jangka pendek terhadap jasa keuangan dan asuransi serta jangka panjang dalam sektor perdagangan.

Dalam konteks pertumbuhan produk domestik bruto menurut (kementerian perindustrian RI, 2019) lapangan usaha dalam produk domestik bruto di bidang industri cenderung terjadi sebuah peningkatan di tahun 2014-2018 hanya di sektor perdagangan. Akan tetapi pernyataan kenaikan atas perdagangan ini tidak meyakinkan, karena persentase determinasi hanya sebesar 5,1%. Sedangkan kenaikan akan dapat dikatakan meyakinkan apabila persentase berada di 59% maka dari itu PDB akan diyakini naik sebesar 5,24% per tahun dibandingkan persentase di tahun 2018.

- 2) Logistik tetap menjadi primadona

Pertumbuhan di sektor logistik akan mencapai peningkatan sebanyak 8% di tahun 2019. Hal ini dapat diasumsikan karena pada kuartal ketika mencapai 6,63% (Asosiasi Logistik Indonesia, 2019). Ada beberapa alasan mengapa pada sektor logistik selalu mengalami peningkatan, yaitu:

- a. Penurunan pembiayaan logistik yang menurun secara signifikan karena dipengaruhi oleh konektivitas antara darat dan laut
 - b. Permintaan logistik yang meningkat atas permintaan logistik yang semakin besar seiring dengan penetrasi internet ke berbagai wilayah, serta gabungan antara e-commerce yang memerlukan aktivitas logistik yang tinggi.
- 3) Commodity Prices

Pada masa 2009-2014 masa jabatan presiden Susilo

Bambang Yudhoyono, pertumbuhan lebih besar ditopang dengan harga komoditas. Akan tetapi terbukti bahwa harga komoditas ini tidak berlanjut sejak tahun 2015. terjadinya sebuah penurunan yang cukup besar di tahun 2018 di komoditas bahan tambang dan batu bara, akan tetapi di komoditas nikel justru terjadi peningkatan yang cukup tinggi karena telah konsisten terhadap terbangun dan kebutuhan global yang besar atas baterai *lithium ion*.

4) Big Data Era

Pemerintah akan mulai melakukan sebuah sensus penduduk. Nantinya di tahun 2020, pemerintah akan memakai one data sebagai peluang untuk menciptakan sebuah Big Data kepada masyarakat agar dapat melakukan sensus penduduk. Dengan adanya big data ini akan menghasilkan sebuah data yang akurat serta dalam jumlah yang besar sebagai peluang untuk pelaku usaha untuk merumuskan sebuah strategi segmentasi pasar.

Peluang Dan Tantangan Dari Perekonomian Indonesia Atas Tahun 2021

Sebuah tantangan tersendiri yang dimulai di tahun 2021, yaitu terjadinya sebuah permasalahan biologi yang sangat memengaruhi sistem perekonomian Indonesia. Sebuah virus yang dianggap sangat mematikan di tahun 2021. Virus yang memengaruhi demografi atau jumlah penduduk karena dampak kematian yang disebabkan oleh virus. Virus yang diidentifikasi oleh pakar kesehatan sebagai virus covid-19. permasalahan kesehatan ini sudah mulai ada sejak 4 bulan terakhir di tahun 2019. akan tetapi membawa dampak yang sangat mengejutkan khususnya di sektor perekonomian. Bukan hanya bersifat nasional, dampak virus tersebut juga memengaruhi perekonomian di luar negeri. Anjloknya tingkat pendapatan yang dihasilkan dari sektor perekonomian mengakibatkan seluruh negara harus bisa mencari solusi atas permasalahan yang ditimbulkan wabah ini.

Vaksinasi merupakan program kebijakan pemerintah yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Vaksinasi disebut sebagai game charge atau pengendalian atas pandemi covid-19. dengan adanya

program vaksinasi diharapkan akan memberikan dampak yang baik yang dapat dirasakan secara domestik maupun global. Vaksinasi juga dilakukan sebagai bentuk pemulihan perekonomian di Indonesia agar dapat kembali bangkit.

a. Tantangan

1) Ketidakseimbangan pemulihan global

Program vaksinasi yang diterapkan oleh kebijakan internasional WHO (world health organization) yang kemudian di implementasikan oleh pemerintah Indonesia memberikan sebuah dampak positif yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang pulih kembali, namun pemulihan ini tidak terlaksana secara menyeluruh atau tidak seimbang. Negara-negara maju yang telah pulih dari dampak pandemi mulai merancang sebuah strategi baru untuk mengubah arah kebijakan dan mengurangi stimulus yang dikeluarkan akibat pandemi.

Bahkan negara-negara berkembang masih di tahap berjuang untuk pulih akibat pandemi ini. Faktor penghambat pemulihan perekonomian terhadap negara-negara berkembang dikarenakan cakupan atas program vaksinasi yang belum merata. Selain itu perlu didukung dengan adanya stimulus dari kebijakan fiskal dan moneter sebagai penunjang.

2) Kenaikan Minyak Global

Memasuki masa kuartal terakhir di tahun 2021, tepatnya di bulan oktober harga minyak meningkat hingga pada level harga tertinggi. Penguatan atas masalah kenaikan harga minyak tersebut diakibatkan oleh krisis pemasokan energi global namun tidak searah dengan permintaan atas minyak yang justru semakin meningkat.

Menurut data The International Energy Agency (IEA) peningkatan atas permintaan minyak diakibatkan untuk digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Menurut IEA, lonjakan atas permintaan harga minyak secara global di tahun 2022 akan meningkat yaitu sebanyak 210 barel per hari. Maka dari itu kenaikan harga minyak ini menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia yang masih di tahap pemulihan atas dampak pandemi.

3) Ketimpangan Pemulihan daya Beli Masyarakat

Ketimpangan atas daya beli masyarakat diakibatkan oleh ketidakpastian ekonomi atas mata pencaharian masyarakat. Terjadinya sebuah pemulihan yang tidak merata antara golongan atas, menengah, dan bawah. Hal ini dikarenakan pada golongan menengah ke bawah, masyarakat akan menunggu pemulihan atas pendapatan yang mereka terima dahulu sehingga pemulihan terhadap tingkat konsumsi masyarakat bergerak lambat.

b. Peluang

1) Penurunan Level PPKM

Tingkat penurunan level PPKM di sejumlah wilayah Indonesia memiliki hasil yang berdampak baik dalam pemulihan perekonomian di Indonesia. Penurunan level ini dilihat dari indikator vaksinasi dan penurunan kasus aktif wabah. Penurunan level PPKM juga diharuskan agar warga negara tetap melakukan protokol kesehatan. Penurunan level PPKM membuka kembali kegiatan ekonomi di sektor pasar. Dengan adanya penurunan ini diharapkan agar membantu pelaku PPKM agar dapat bangkit dari dampak pandemi.

2) Perkembangan UMKM Melalui Meudahan Akses

UMKM merupakan sebuah sektor yang ada di Indonesia. Di mana selama pandemi ini berlangsung UMKM merupakan salah satu sektor yang paling berdampak. Maka dari itu pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap UMKM dengan memberikan bantuan untuk mendapatkan mendapatkan sebuah akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, restrukturisasi kredit, pelayanan dan perangkat digital serta pendampingan. UMKM merupakan salah satu sektor yang dapat membantu pemulihan perekonomian. Maka dari itu UMKM dengan didukung oleh kemudahan akses diharapkan menjadi titik fokus agar pemulihan perekonomian berjalan dengan cepat. Melalui kemudahan akses nantinya UMKM akan mudah dijangkau sehingga memengaruhi peningkatan konsumsi.

3) Presidensi G20

Presidensi G20 merupakan forum representasi perekonomian dunia yang diikuti oleh 20 negara dengan tujuan agar dapat mendukung pemulihan domestik. Pada tahun 2022 mendatang, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah dari presidensi G20. Forum ini dilaksanakan berdasarkan dengan finance track dan sherpa track dilakukan di beberapa lokasi di Indonesia agar nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di lokasi terselenggaranya acara.

Peluang Dan Tantangan Dari Perekonomian Indonesia Atas Tahun 2022

a. Ekonomi Biru dalam pertahanan ekonomi Kelautan

Menurut pasal 14 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang kelautan mengatur bahwa pemerintahan baik pusat maupun daerah diharuskan dalam melakukan aktivitas pengelolaan laut dengan semaksimal mungkin sebagai bentuk pemanfaatan dan pengusaha sumber daya ke laut demi meningkatkan kemakmuran rakyat melalui ekonomi biru. Maka dari itu ekonomi biru merupakan sebuah model pengembangan ekonomi yang akan mendukung pembangunan ekonomi dalam mengintegrasikan pembangunan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan lingkungan. Menurut kementerian kemaritiman (2017), potensi yang ada di darat, laut, dan udara harus disinergikan sehingga nantinya menjadi sebuah kekuatan bagi Indonesia.

b. Pengembangan Teknologi Energi Di Masa Depan Atas Permintaan Dan Penyediaan Energi Baru Terbarukan.

Pengembangan teknologi atas energi di masa depan akan melibatkan sebuah energi alternatif yang dapat mengurangi penggunaan BBM yang akan digunakan untuk transportasi maupun sektor industri. Dalam hal ini dapat dilihat dari prospek penggunaan biodiesel sebagai pengganti solar, pengembangan CNG sebagai substitusi dari bahan bensin dan bioetanol yang digunakan dalam mengembangkan perkebunan dengan energi berbasis kelapa sawit.

D. PROYEKSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2022

Sejak adanya pandemi COVID-19 kegiatan perekonomian di Indonesia dan seluruh negara lain yang terdampak pandemi sempat mengalami penurunan yang

signifikan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk segera mengentaskan masalah pandemi. Salah satu program yang dibuat pemerintah untuk mengatasi pandemi ini yaitu program vaksinasi secara masif yang diperuntukkan untuk semua kalangan. Dengan melaksanakan program vaksinasi ini jumlah pasien COVID-19 menurun dan kegiatan perekonomian mulai beroperasi lebih lancar, sehingga program vaksinasi ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dan 2022. Faktor pendorong pertumbuhan di tahun 2021 dan 2022 lainnya yakni implementasi UU Cipta Kerja pada sektor lapangan usaha dalam bentuk perizinan berbasis OSS RBA atau berbasis resiko. Implementasi ini mendorong pertumbuhan investasi di tahun 2021 dan 2022. Selain faktor-faktor diatas terdapat salah satu faktor eksternal yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dan 2022, faktor tersebut adalah penguatan kegiatan ekspor komoditas dan ekspor manufaktur golongan besi dan baja. Bab ini akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 dari dua sisi sudut pandang, yakni dari sisi pengeluaran pemerintah dan dari sisi lapangan usaha.

1. Perekonomian Tahun 2022 dari Sisi Pengeluaran

Jika dilihat dari sisi pengeluaran (Demand Side), pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 didorong oleh kegiatan ekspor dan impor yang diiringi pulihnya kegiatan perekonomian global secara bertahap. Motor penggerak perekonomian di Indonesia untuk menjaga konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah dan investasi yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PC-PEN serta Program Penanganan COVID-19. Program-program tersebut terus menjaga proses pemulihan ekonomi nasional agar kegiatan perekonomian dapat berjalan secara optimal.

a. Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi salah satu komponen yang menyumbangkan kontribusi terbesar terhadap PDB dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga sempat mengalami keterlambatan di tahun 2020 akibat pandemi, namun di awal tahun 2021 kegiatan konsumsi rumah tangga mulai menunjukkan perbaikan. Menurut Kemenko Perekonomian konsumsi rumah tangga di tahun 2021 secara keseluruhan komponen mengalami pertumbuhan dengan kisaran nilai 2,3% sampai 2,6% lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2020 yang berada di angka -

2,6%. Pertumbuhan tersebut terjadi sebagai hasil pengendalian pandemi yang semakin efektif dan program vaksinasi yang semakin tersebar luas. Bantuan-bantuan yang disalurkan pemerintah untuk masyarakat juga meningkatkan kegiatan konsumsi rumah tangga. Memasuki tahun baru 2022. Kemenko Perekonomian memperkirakan konsumsi rumah tangga akan mengalami pertumbuhan dengan kisaran angka 5,0%. Mengingat kondisi pandemi yang semakin membaik dan tertangani, pertumbuhan pun ikut membaik. Melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah diharapkan dapat mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Persiapan transisi dari pandemi ke endemi juga telah dipersiapkan oleh pemerintah agar masyarakat mendapatkan kepastian dan rasa aman. Dan konsumsi rumah tangga diharapkan tetap menjadi komponen utama yang mendukung perbaikan kinerja ekonomi yang didukung dengan program-program perlindungan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

b. Pengeluaran Pemerintah

Komponen lain yang tidak kalah penting dengan konsumsi rumah tangga untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional yaitu komponen pengeluaran pemerintah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pengeluaran pemerintah telah berkontribusi mencapai 9,14% terhadap PDB nasional. Berdasarkan APBN 2022 belanja negara diproyeksikan mencapai Rp 2.708,7 triliun atau sebesar 15,1% terhadap PDB. Belanja negara ini diarahkan untuk menguatkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, menguatkan spending better, dan meningkatkan kualitas belanja daerah. Dalam APBN bidang-bidang yang diprioritaskan antara lain anggaran untuk kesehatan, anggaran perlindungan sosial, anggaran bidang pendidikan, pembangunan infrastruktur, anggaran untuk mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi, anggaran ketahanan pangan, dan anggaran bidang pariwisata. Di tahun 2022 ini Kemenko Perekonomian memproyeksikan komponen pengeluaran pemerintah akan mengalami kenaikan dengan kisaran angka 3,5%, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2021.

c. Ekspor Impor Barang dan Jasa

Kegiatan ekspor menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021. Pada triwulan III-2021 kinerja komponen

ekspor mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Membaiknya perekonomian global dan pulihnya perekonomian negara mitra Indonesia (seperti Amerika Serikat dan Tiongkok) menjadi salah satu pendorong pulihnya kegiatan ekspor. Kemenko Perekonomian memproyeksikan kegiatan ekspor barang dan jasa akan mengalami peningkatan sekitar 6,7% di tahun 2022. Terbatasnya peningkatan kegiatan ekspor tersebut akibat adanya downside risk terutama indikasi perlambatan perekonomian Tiongkok dan negara mitra lainnya, namun pemerintah akan tetap mendorong kegiatan ekspor dengan berbagai kebijakan. Selain ekspor, impor juga menjadi kegiatan ekonomi yang mendorong pembentukan PDB di sisi pengeluaran. Kontribusi impor dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni sebesar 18,89% terhadap PDB nasional. Kegiatan impor sempat mengalami kontraksi di tahun 2020 dan pada tahun 2021 sudah mulai mengalami perbaikan. Pertumbuhan kegiatan impor diproyeksikan oleh Kemenko Perekonomian akan tumbuh berkisar di angka 17,30% sampai 18,00% di tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 impor akan tetap tumbuh namun melambat jika dibandingkan dengan tahun 2021.

2. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Lapangan Usaha

Pemulihan ekonomi terus digencarkan agar keadaan kembali normal. Di tahun 2021 semua sektor lapangan usaha terjadi pemulihan. Sektor-sektor yang sempat terhambat pandemi seperti sektor jasa kesehatan sosial dan kegiatan sosial, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor lainnya secara bertahap mengalami pemulihan. Kinerja ekspor komoditas dan hasil manufaktur serta kinerja impor akan terus meningkat jika pemulihan ekonomi global terus berlanjut. Di tahun 2022 diperkirakan PDB agregat mencapai nilai 5,2% dan semua sektor diperkirakan tidak ada yang negatif/terjadi penurunan.

a. Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor yang menopang pertumbuhan nasional. Sejak dahulu masyarakat telah menggantungkan hidup mereka dengan hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan. Namun sejak terjadi pandemi sektor ini sempat mengalami penurunan. Program dan

kebijakan dikeluarkan pemerintah agar sektor ini dapat kembali pulih, seperti program bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. Pada tahun 2021 BPS mencatat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mulai terjadi pemulihan, akan tetapi masih dibawah tingkatan normal sebelum pandemi. Pada tahun 2021 pemulihan sektor ini belum stabil dan pada triwulan I sektor ini mengalami kenaikan mencapai 3,38% namun saat triwulan II terjadi penurunan yang cukup tajam, sektor ini hanya tumbuh sebesar 0,43%. Berlanjut lagi padatriwulan III sektor ini mengalami kenaikan kembali yakni sebesar 1,31%. Kenaikan ini didorong oleh subs sektor tanaman perkebunan (kelapa sawit, kopi, kakao, dan tebu) yang tumbuh sebesar 8,43%. Triwulan IV kinerja sektor ini juga mengalami kenaikan meskipun lambat, karena faktor musiman untuk sub sektor tanaman pangan. Program padat karya infrastruktur pertanian yang mencakup pengembangan jaringan irigasi tersier, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan dan lain lain dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian. Kemenko juga mengadakan koordinasi untuk menyediakan dan melaksanakan kartu tani untuk pupuk bersubsidi. Didalam APBN anggaran ketahanan pangan dianggarkan sebesar Rp 76,9 triliun, anggaran ini mencakup untuk peningkatan produktivitas dan pendapatan petani dan nelayan, penyediaan sarana prasarana pertanian, perkebunan, dan perikanan, penguatan sistem pangan berkelanjutan serta diarahkan untuk yang lainnya. Dengan anggaran yang besar tersebut diperkirakan sektor pertanian, perhutanan, dan perikanan di tahun 2022 akan mengalami kenaikan.

b. Pertambangan dan Penggalian

Lagi-lagi akibat pandemi sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan di tahun 2020. Kebijakan yang dilakukan pemerintah mampu mendorong pemulihan ekonomi sehingga sektor ini pun ikut mengalami pemulihan secara bertahap. Kinerja sektor pertambangan pada triwulan II 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,22%. Kenaikan ini didorong oleh beberapa subsektor seperti subsektor pertambangan biji logam, subsektor pertambangan batubara dan lignit, meningkatnya produksi emas dan tembaga di Papua,

kemudian subsektor pertambangan lainnya seperti kerikil, tanah liat, batu hias, dan batu bangunan yang mengalami kenaikan. Hanya saja kenaikan tersebut tidak terjadi pada subsektor pertambangan minyak bumi, gas, dan panas bumi. Sektor tersebut mengalami kontraksi sebesar 5,06% karena faktor penurunan hasil produksi secara alamiah. Pada triwulan III 2021 kinerja sektor ini kembali mengalami kenaikan sebesar 7,78% yang didorong oleh meningkatnya hasil produksi beberapa komoditas pertambangan seperti tembaga, emas, batubara, lignit, kerikil, tanah liat, batu mulia, batu kapur, dan dolomit. Namun subsektor minyak, gas dan panas bumi masih mengalami penurunan. Sektor pertambangan dan penggalian ini diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,72% di tahun 2022 secara bertahap seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan global. Penanganan pandemi saat ini semakin terkendali sehingga menumbuhkan optimisme pasar yang kemudian akan memperbaiki permintaan akan komoditas pertambangan. Berbagai kebijakan dan program dilakukan untuk meningkatkan hasil subsektor migas nasional, seperti memonitori dan mendorong percepatan proyek- proyek migas baru

(proyek JTB, lapangan MDA dan MDH, tangguh train), melaksanakan program KKKS melalui peningkatan aktivitas pengeboran, pengerjaan ulang dan perawatan sumur, upaya memanfaatkan teknologi produksi Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk menahan penurunan produksi migas. Upaya peningkatan subsektor migas akan terus dilakukan, pemerintah berupaya meningkatkan hasil produksi migas dengan melaksanakan program-program seperti pengeboran secara rutin, peningkatan recovery factor lapangan eksisting, memperbaiki investasi di sektor pertambangan dan lain-lain. Pemulihan hasil migas ini tentu harus dilaksanakan, karena seperti yang kita ketahui saat ini harga bahan baku kendaraan naik.

c. Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan berkontribusi cukup besar terhadap PDB nasional. Pada tahun 2020 sektor ini mengalami penurunan karena pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas masyarakat. Seiring dengan pulihnya keadaan sektor industri pengolahan pun ikut mengalami pemulihan secara bertahap. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai ekspor di tahun 2021 yakni sebesar USD 186,32 Miliar. Subsektor industri pengolahan yang mendorong kontribusi terbesar nilai ekspor yakni industri makanan dan minuman, industri bahan kimia, industri logam dasar. Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar sektor ini mengalami peningkatan kinerja industri yang berorientasi ekspor. Upaya tersebut seperti kebijakan industri pengolahan difokuskan pada 5 sub sektor yakni industri kimia, industri tekstil, industri makanan dan minuman, industri elektronik, dan industri otomotif. Sejak awal tahun 2021 industri telah mengalami peningkatan secara bertahap. Namun pada Juni- Juli PDB industri pengolahan kembali terjadi penurunan karena adanya varian baru virus COVID-19 yakni varian delta yang mengakibatkan pembatasan kembali mobilitas masyarakat yang kemudian menyebabkan berkurangnya transaksi ekonomi. Untuk menciptakan kestabilan kondisi perekonomian pemerintah berupaya untuk melaksanakan vaksinasi secara agresif agar mencapai target herd immunity. Dan untuk meningkatkan produktivitas di sektor manufaktur, pemerintah

melanjutkan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin operasional mobilitas kegiatan industri yang mana kebijakan ini mengatur pelaksanaan aktivitas industri dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Untuk memperkuat sektor industri pengolahan ini pemerintah membuat kebijakan substitusi impor 35% di tahun 2022 dan kebijakan kewajiban untuk berbelanja produk dalam negeri. Pemerintah yakin dan optimis bahwa pertumbuhan PDB industri pengolahan di tahun 2022 akan berada pada kisaran angka 3,26%.

E. PROYEKSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2022

F. PROGRAM STRATEGIS DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah direncanakan Pemerintah Indonesia dari awal tahun hingga tahun 2021 dinilai telah menunjukkan hasil yang baik. Pada triwulan II tahun 2021 PDB Indonesia mencapai angka 7,07% yoy bahkan melebihi triwulan II tahun 2019. Selanjutnya pertumbuhan mengalami perlambatan pada triwulan III tahun 2021, akan tetapi tetap pada arah yang positif pada angka 3,51% yoy. Saat adanya varian delta covid-19 pemulihan ekonomi sempat tertahan karena varian delta tingkat penularan dan risiko fatalitasnya tinggi. Namun karena upaya Indonesia dalam mengendalikan kasus aktif covid-19 relatif lebih cepat dan terkendali dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya sehingga aktivitas konsumsi dan produksi kembali meningkat dan meneruskan tren pemulihan ekonomi yang semakin membaik. Dengan peningkatan jumlah kasus covid-19, pemerintah memberi anggaran tambahan untuk kebutuhan vaksinasi, penanganan kesehatan, mempertahankan dan meningkatkan pagu anggaran dari Rp 695,2 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 699,43 triliun pada triwulan 1 tahun 2021.

Untuk menjaga daya beli masyarakat dan sebagai dukungan bagi dunia usaha di tengah pelaksanaan PPKM darurat pada pertengahan bulan juli guna menekan kasus covid-19, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran PEN dengan meningkatkan pagu menjadi Rp 744,77 triliun. Sejumlah Rp 456,35 triliun (61,3%) pagu telah direalisasikan hingga 5 November 2021.

1. Rencana PEN Tahun 2022

Pada tahun 2022 telah direncanakan alokasi anggaran PEN sejumlah Rp 321,2 triliun dengan rincian sebagai berikut, alokasi anggaran pada bidang kesehatan

Rp 77,05 triliun, bidang perlindungan sosial Rp 126,54 triliun, program prioritas Rp 90,4 triliun dan bidang UMKM Rp 27,48 triliun. Akan tetapi alokasi ini bersifat fleksibel dan responsif melihat kondisi covid-19 di Indonesia. Strategi penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dilakukan melalui kolaborasi setiap unsur. Yang disini termasuk juga kementerian perekonomian yang turut mendukung upaya penguatan dengan melalui berbagai program strategis kementerian.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020, pemerintah menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Dengan berbagai tujuan yang ditegaskan dalam program PEN dimana yang paling utama terlaksanakannya program PEN adalah usaha untuk menaungi, menjamin, menyelamatkan, memperkuat, dan mengembangkan kinerja ekonomi para pelaku usaha atau yang sedang merintis usaha selama pandemic covid-

19. Dengan harapan agar dapat mempertahankan eksistensi UMKM juga membangkitkan kemampuan UMKM dalam melakukan perannya terhadap keberlangsungan perekonomian Indonesia.

2. Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra disertai Dukungan Penjaminan dalam Rangka Pemulihan Ekonomi

Pemerintah menempatkan dana di bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM. Dengan harapan, dana

tersebut dapat tersalurkan dan dikembangkan ekosistem UMKM dan koperasi serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp 10 triliun di BTN dan memindahkan dana pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) namun tidak lagi melakukan penempatan di BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Dikarenakan ketiga bank tersebut tidak mengajukan permohonan penempatan kembali. Namun pemerintah memastikan bahwa subsidi bunga dan penjaminan kredit modal usaha tetap diberikan sebagai dukungan kepada dunia usaha.

3. Pinjaman PEN Daerah

Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintah melanjutkan pemberian pinjaman PEN daerah. Alokasi PEN daerah di tahun 2021 bersumber dari APBN dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

4. Stabilisasi Harga Pangan

Pada oktober 2021 bahan makanan mengalami inflasi sebesar 0,03%, sedangkan pada periode januari sampai dengan Oktober 2021 mengalami deflasi sebesar 0,06%. Jika dibandingkan dengan 2020, inflasi bahan makanan sebesar 3,16% (yoy). Upaya melakukan koordinasi pasokan dan harga pangan dengan juga melakukan pengendalian harga pangan diluar musim panen, kementerian perekonomian memprediksi bahwa inflasi bahan makanan dapat terjaga sepanjang tahun 2021 yang telah ditargetkan yaitu berada pada kisaran angka 4 %.

5. Pengembangan Kawasan Hortikultura Berorientasi Ekspor

Kawasan sentra produksi komoditas hortikultura daerah berorientasi ekspor yang saat ini telah dikembangkan di 7 lokasi yaitu : Kabupaten Tanggamus-Lampung, Kabupaten Blitar-Jawa Timur, Kabupaten Jembrana-Bali, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Bener, dan Kabupaten Garut. Pada tahun 2017 telah dilakukan ekspor pisang mas ke Singapura.

6. Penyediaan Vaksin Covis-19



Ketersediaan vaksin di dalam negeri diperoleh melalui kerja sama BUMN dengan perusahaan penyedia vaksin dari luar negeri. Pemerintah memiliki rencana memberikan vaksin kepada anak usia 3-11 tahun.

7. Restrukturisasi BUMN

Melalui Penerbitan Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2021 tentang penambahn PMN ke dalam modal saham PT PLN yang berasal dari inbreng saham PT EMI Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1991 dalam rangka pembentukan holding BUMN Industri Pertahanan; Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2012 untuk perpanjangan pengembalian saham negara pada PT Nindya Karya. Restrukturisasi BUMN akan terus dilanjutkan setidaknya sampai dengan triwulan II tahun 2022. Pada tahun 2023 BUMN akan diarahkan untuk bersaing dengan swasta dan melakukan spesialisasi BUMN dengan tujuan komersial dan soisal.

8. Jartu Pra Kerja

Program kartu prakerja yang didesain program semi bansos meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Dengan kemudahan yang dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan tanpa perantara merupakan perlindungan sosial yang ideal selama pandemi covid-19 dengan metode delivery bantuan yang berbasis digital. Karena semakin banyaknya pendaftar kartu prakerja pemerintah meningkatkan alokasi anggaran program sebesar 11,2 triliun pada semester II tahun 2021. Sepanjang tahun 2021, program pelatihan kartu prakerja dilakukan secara online dikarenakan mengurangi mobilitas masyarakat dan mencegah persebaran virus covid-19. Akan tetapi pada tahun 2022 pemerintah menargetkan program pelatihan offline atau tatap muka.

9. Badan Usaha Penanaman Modal (BUPM)

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 sebagai upaya memberikan sentiment positif kepada dunia usaha dan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja melalui penyederhanaan persyaratan investasi dan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Pemerintah melakukan upaya-upaya yang diantaranya:

- a. mengurangi jumlah bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tertentu.
- b. menyusun daftar usaha yang menjadi prioritas Pemerintah;
- c. memberikan perlindungan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk berkembang.
- d. memberikan fasilitas pada bidang usaha rintisan berbasis teknologi.

10. Percepatan Pembangunan Proyek Strategis nasional

Dalam masa pemulihan kondisi ekonomi karena akibat adanya covid-19, maka dilakukan reprioritisasi proyek strategis nasional yang sedang berjalan dengan tujuan agar dana yang tersedia kembali optimal dan efektif.



Jika diakumulasikan saat ini telah diselesaikan 30 proyek dari total 208 proyek yang direncanakan.

11. Preogram Padat Karya Infrastruktur

Sebagai dampak dari pandemi covid-19 pemerintah terus berupaya menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat, yang salah satunya

12. dengan melalui program padat karya infrastruktur. Program ini diadakan dengan tujuan untuk pemberdayaan petani dan masyarakat lokal, penciptaan lapangan kerja di pedesaan maupun di perkotaan dengan memperkerjakan tenaga kerja lokal yang kehilangan penghasilan akibat dampak pandemic covid-19, serta menggerakkan ekonomi daerah. Program padat karya infrastruktur pertanian

dilaksanakan dengan tujuan mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan oleh tanam dan penanaman padi.

13. Dukungan Penanganan Covid-19 dalam Forum ASEAN

Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih responsif dan tepat sasaran, serta mendukung penciptaan lapangan kerja dan transformasi ekonomi. Indonesia menginisiasi ASEAN pada bulan November 2021 untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif di ASEAN. Indonesia juga mendorong program-program ASEAN untuk pemulihan ekonomi.

14. Peningkatan Kerja sama Ekonomi RI-PEA

Pada bulan November 2021 telah terjadi pertemuan bilateral dalam rangka meningkatkan perdagangan investasi termasuk industry pertahanan. Dalam pertemuan ini membahas 3 kerja sama prioritas, diantaranya terkait pembangunan ibukota baru, transisi energi dan perdagangan.

G. SINERGI MENJAGA PEMULIHAN EKONOMI BEKELANJUTAN

Dalam menjaga dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, peran kita sangatlah penting untuk melaksanakan tujuan yang mulia ini, terutama pelaku UMKM. Menurut Onny Widjanarko selaku Kepala departemen Komunikasi, ada tiga hal penting yang dapat mendorong bangkitnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setelah melalui masa keterpurukan akibat Pandemi Covid-19. Kunci dari hal tersebut adalah Kreativitas, Digitalisasi dan Sinergi agar UMKM memiliki nilai lebih dalam perekonomian nasional seperti sekarang ini.

Kreativitas sangat dibutuhkan saat ini agar UMKM memiliki nilai tambah dan keunikan tersendiri yang belum tentu orang lain memiliki keunikan tersebut. Hal tersebut akan lebih sempurna apabila dibarengi dengan Digitalisasi yang dapat memasarkan produk ke dalam platform digital

Adapun beberapa bentuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kreatif yang sudah ada di Indonesia diantaranya seperti :

1. Industri rumahan di Sukoharjo, Jawa Tengah yang melakukan inovasi membuat produk – produk kebutuhan pada masa pandemic seperti masker dari kain batik. Disamping untuk terhindar dari virus COvid-19, masker ini juga dapat menjadi sebagai media pengenalan budaya Indonesia secara lebih luas, yaitu kain batik.
2. Seorang pedagang kecil yang memotret produk produknya untuk diunggah ke skun media social dan marketplace nya agar produk tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas, sehingga produk tersebut dapat terjual dan diakui keberadaannya.

Dengan adanya UMKM ini, dapat membantu masyarakat yang mengalami

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan hilangnya penghasilan karena usahanya terdampak pandemi Covid-19. Potensi daya serap tenaga kerja yang besar menjadikan UMKM memiliki peran yang strategis bagi Produk Domestik Bruto (PDB). Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 menunjukkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 61,41% dengan serapan tenaga kerja hampir 98% dari total keseluruhan tenaga kerja nasional. Kondisi tersebut tentunya mendorong Bank Indonesia secara aktif untuk terus mendorong pengembangan sektor UMKM sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi nasional untuk masa depan, sekaligus mendukung upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdampak pandemic Covid-19. Pemerintah pun tak kalah pedulinya, mereka mengeluarkan kebijakan untuk mendorong tumbuhnya kembali UMKM melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi usaha mikro dan pemerintah berupa hibah, dan kepada pengusaha berupa insentif pajak.

Bank Indonesia (BI) pun menyediakan likuiditas bagi perbankan bagi restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan. Selain menyediakan likuiditas, BI juga memberikan jasa giro GWM kepada semua Bank di Indonesia. Adapun langkah – langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional adalah sebagai berikut

1. Menerapkan kembali kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar
2. operasi moneter yang berguna untuk memperkuat stance/pendirian kebijakan moneter akomodatif
3. Memperkuat dan mempercepat langkah – langkah pendalaman pasar uang maupun pasar valuta asing melalui pengembangan infrastruktur sarana penyelenggara transaksi berbasis system elektronik (Electronic Trading Platform/ETP) yang sekarang ini marang digunakan oleh masyarakat ketika berbelanja, dan lembaga – lembaga sentral kliring, novasi, dan transaksi (Central Counterparty/CCP)
4. Memperkuat implementasi kebijakan untuk mendukung dan mendorong UMKM melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan digitalisasi berjalan sesuai dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)
5. Memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital melalui penggunaan

instrumen pembayaran digital, kolaborasi bank, fintech, dan e-commerce untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Selain adanya Kreativitas dalam UMKM, hal yang tak kalah penting dalam keberlangsungan dilakukannya UMKM adalah Digitalisasi. Bank Indonesia mendorong sektor UMKM menjadi sumber mata pencaharian baru dan kekuatan utama dalam mensukseskan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan digitalisasi di semua sektor, terlebih kondisi pandemic Covid-19 yang menuntut adanya perkembangan bisnis baru yang serba cepat, mudah, praktis dan murah melalui platform digital. Dengan adanya peluang tersebut, BI meluncurkan 3 (tiga) program terobosan untuk mendukung UMKM melek digital, yaitu:

1. Program Onboarding UMKM

Program ini dilakukan secara terintegrasi yang berupa pembinaan untuk UMKM di setiap daerah agar setiap UMKM dapat menyesuaikan produknya dengan karakteristik dan tahapan usaha dari aspek kelembagaan dan SDM, produksi, keuangan, serta pemasarannya sebagai langkah awal untuk memasuki pasar daring (online).

2. Mengembangkan QRIS (Quick Response Indonesian Standard)

Program ini bertujuan agar dapat mempermudah pembayaran digital bagi konsumen serta dapat diawasi oleh regulator agar pembayaran menjadi lebih mudah dan aman.

3. Mengembangkan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SI-APIK) untuk kebutuhan pencatatan arus keuangan setiap UMKM.

System ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha dan dapat membantu aktivitas bisnis karena SI-APIK tersebut dapat membuat neraca, laporan keuangan, dan laba rugi dengan mudah melalui gawai saja.

Hasil dari siaran pers yang telah dilakukan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Nomor. 1/KSSK/Pers/2022 pada 2 Februari 2022 di Jakarta, yakni sebagai berikut :

1. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan IV 2021, dalam kondisi yang semakin membaik sekarang ini seiring dengan menurunnya kasus penularan Covid-19 di Indonesia, sehingga mendorong aktivitas ekonomi yang semakin meningkat. Hal ini tentunya memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan perekonomian tanah air.

2. Mulai pulih dan terkendalinya aktivitas – aktivitas masyarakat yang sebelumnya sangat terbatas dari dampak virus Covid 19, sehingga dapat memulihkan perekonomian nasional secara keberlanjutan. Menurunnya kasus harian Covid-19 di Indonesia yang semakin rendah, mendorong pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga mendukung keberlanjutan pemulihan aktivitas perekonomian di negeri ini.
3. Disamping menurunnya kasus Covid-19 yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, ternyata masih ada juga risiko yang mungkin saja terjadi dan kita perlu mewaspadainya, baik dari segi domestik maupun global. Potensi risiko dari sisi domestic yang mungkin terjadi adalah kembalinya kenaikan kasus Covid-19 yang mulai mereda, dikarenakan masyarakat tidak mematuhi protocol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Walaupun virus sudah perlahan menghilang, tapi tidak menutup kemungkinan penyakit tersebut dapat tertular kembali apabila pengidapnya tidak mematuhi protocol kesehatan yang ada. Sementara itu, potensi risiko yang mungkin terjadi dari segi global seperti gangguan rantai pasokan dalam situasi dimana peningkatan permintaan yang terus meningkat menyebabkan peningkatan tekanan inflasi, terutama karena naiknya harga energy dan berlanjutnya ketidak pastian di pasar keuangan global yang bekerja sama dengan The Fed untuk mempercepat suatu kebijakan normalisasi untuk menghadapi tekanan meningkatnya inflasi di Amerika Serikat pada bulan Desember 2021 sebesar 7,0% dan meningkatnya ketegangan Geopolitik di Wilayah Laut Baltik.
4. Peningkatan pembiayaan dunia usaha yang diterbitkan pada bulan Februari 2021 yang berperan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi berupa Paket Kebijakan Terpadu KSSK. Dalam rangka mendukung kebutuhan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dari dampak virus Covid- 19, Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk melakukan bauran kebijakan fiscal dan moneter, seperti dukungan pembelian SBN oleh Bank Indonesia. Bahkan pada tahun 2021, realisasi pembelian SBN oleh Bank Indonesia mencapai angka Rp358,32 triliun yang terdiri dari pembelian SBN di pasar perdana melalui acara lelang Rp143,32 triliun dan privateplacement sebesar Rp215 triliun. Tujuan dari bauran kebijakan tersebut adalah untuk menjaga komitmen dan kredibilitas pasar SBN secara berkesinambungan, baik dari sisi APBN maupun neraca Bank Indonesia agar pemilihan ini dapat terwujud secara berkesinambungan dalam jangka

menengah – panjang.

Bank Indonesia menetapkan kebijakan suku bunga yang rendah, stabilisasi nilai tukar rupiah, serta injeksi likuiditas atau yang disebut dengan quantitative easing. Sedangkan OJK mengeluarkan kebijakan berupa restrukturisasi kredit / pembiayaan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga menetapkan kebijakan berupa menetapkan tingkat bunga penjaminan yang rendah dan memberikan relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan perbankan. Sinergi kebijakan di lingkungan KSSK bertujuan agar suku bunga menjadi lebih efisien di sector jasa keuangan. Dan dengan dukungan dari berbagai kebijakan, pemulihan ekonomi sudah semakin beragam di berbagai sector, meskipun kecepatan pemulihannya masih sangat tergantung pada aktivitas usaha dan dampak dari pandemic pada sector yang terkait.

5. Dukungan yang diberikan oleh KSSK terhadap sector perbankan menjadi bagian dari kebijakan dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian melalui intermediasi perbankan. Pemerintah menerapkan program penjaminan kredit dalam upaya memberikan keyakinan kepada perbankan untuk meningkatkan partisipasinya dalam menjaga dan mendorong kinerja dunia usaha melalui penyaluran kredit. Program ini telah diterapkan sejak tahun 2020 semenjak pandemi dan dilakukan kalibrasi kriteria pada tahun 2021 yang berfokus pada penjaminan kredit korporasi.

Dalam menyukseskan dan turut mendukung kinerja perbankan yang sekaligus mendorong intermediasi, Pemerintah menempatkan dana di perbankan yang memberikan multiplier effect terhadap penyaluran kredit hingga Rp458,22 triliun bagi 5,49 debitur per 17 Desember 2021.

6. KSSK juga ikut berperan dalam mendorong aktivitas ekspor yang memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia di masa pandemi ini. Untuk meningkatkan daya saing ekspor, pemerintah memberikan fasilitas kapabeanan melalui pemberian insentif penangguhan Bea Masuk (BM) dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sama sekali untuk Kawasan Berikat (KB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
7. Peran UMKM pun sangat penting dalam rangka pemulihan perekonomian negeri ini, karena dengan adanya UMKM ini dapat menyerap tenaga kerja sehingga angka pengangguran di negeri ini semakin berkurang.

8. Selama tahun 2021, Bank Indonesia (BI) memberikan arahan kepada seluruh instrument bauran kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional berupa suku bunga kebijakan moneter yang rendah, dan kebijakan makroprudensial akomodatif.
9. Bank Indonesia (BI) juga turut berperan penting dalam mendorong kinerja ekspor untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui fasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan Local Currency Settlement (LCS) yang bekerja sama dengan instansi terkait, Perpanjangan batas waktu pengajuan pembebasan Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE) hingga 31 Desember 2022 dalam rangka mengurangi dampak pandemi pada eksportir, memanfaatkan kondisi peningkatan permintaan negara mitra dagang dan kenaikan harga komoditas dunia.
10. BI terus mendorong inklusi ekonomi dan keuangan serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan perekonomian nasional melalui penyempurnaan kebijakan rasio kredit UMKM menjadi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) pada Agustus 2021. Kebijakan ini lebih banyak memberikan opsi yang lebih luas bagi Perbankan, seperti perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif dan model bisnis lainnya.
11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan selalu memperkuat ketahanan dalam sector jasa keuangan untuk menghadapi normalisasi kebijakan negara maju serta meningkatkan peran sector jasa keuangan untuk menjaga momentum akselerasi pemulihan perekonomian nasional.
12. OJK memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit pembiayaan hingga 2023 untuk menjaga stabilitas system keuangan yang mana OJK juga telah memberikan pelonggaran ATMR bagi kredit pembiayaan sector property kesehatan, kendaraan bermotor, serta secara khusus untuk sector kesehatan diberikan pelonggaran Batas Maksimum Penyaluran Kredit (BMPK).
13. Untuk masa yang akan datang, OJK berkomitmen untuk selalu memperkuat kebijakan dalam menjawab berbagai tantangan global maupun domestik yang terjadi, termasuk melalui peningkatan peran sector jasa keuangan untuk mendukung percepatan pemulihan perekonomian nasional, terkhusus pada sektor – sektor prioritas dan menciptakan sumber – sumber pertumbuhan perekonomian yang baru.

14. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dukungan melalui kebijakan peningkatan akses keuangan UMKM agar mencapai target penyaluran pembiayaan sebesar 30% kepada UMKM di tahun 2024 yang didukung oleh peran Tim Percepatan Akses Keuangan daerah dengan perluasan dan percepatan penyerapan KUR Klaster. Bukan hanya itu saja, OJK juga menetapkan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan yang telah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 3,1 juta debitur, dan diperpanjang hingga tahun 2023.
15. Sebagai bagian dari KSSK, LPS terus berpartisipasi menjaga stabilitas system keuangan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui program penjaminan simpanan.
16. LPS juga akan terus mengevaluasi kinerja TBP agar berada di tingkat yang tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan perkembangan SSK.
17. LPS memberikan keringanan untuk Perbankan selama masa pandemi berlangsung melalui relaksasi denda pembayaran keterlambatan pembayaran premi penjaminan dan batas waktu penyampaian laporan
18. Sinergi kebijakan KSSK yang bersifat adaptif dan terus dikalibrasi menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19, perkembangan sektor keuangan, serta kondisi perekonomian global maupun domestik. Pada masa awal pandemic, perspektif kebijakan lebih mengacu kepada daya beli masyarakat dan mendukung ketahanan dunia usaha. Memasuki tahun kedua pandemic, dilakukan kalibrasi kebijakan yang mulai diarahkan pada upaya menjaga momentum pemulihan yang dilanjutkan dengan upaya untuk mendorong percepatan pemulihan perekonomian nasional.
19. KSSK akan berkontribusi untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia 2022. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai focal point di Finance Track yang didukung OJK dan LPS akan mengawal setiap agenda pembahasan prioritas Finance Track, yaitu upaya penanganan dampak pandemic Covid-19 dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat lagi di masa yang akan datang, penguatan system pembayaran di era digital, pengembangan biaya keberlanjutan, peningkatan sistem keuangan yang inklusif, perpajakan internasional, infrastruktur, serta penguatan arsitektur kesehatan global.

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, S. Pergeseran Struktural Sektor Industri. 29-31.
- Anonim. (2013). Landasan Teori Pertumbuhan Ekonomi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Clarisa Tiara, S. yanti. (2022). Tampilan Penyebab Sistem Ekonomi Pancasila tidak Menjamin Negara tersebut dapat Maju. *Pusdansi.Org*, 2(1), 1–10.
<http://pusdansi.org/index.php/pusdansi/article/view/67/67>
- Dr. Vladimir, V. F. (1967). 濟無No Title No Title No Title. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, 1(69), 5–24.
- DwicaHYo, S. (2013). Pertumbuhan Ekonomi di Era Orde Baru. 10(2), 177-179. Harsasto, P. Politik Indonesia Paska Orba: Siapkah Untuk Perubahan yang Lebih Baik. 36-39.
- Haryo Aswicahyono, D. C. (n.d.). Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016. 1-12.
- Ida Bagus Gede Udiyana, I. G. (2008). Struktur dan Sistem Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru. 6(1), 42-50.
- Lenggono, P. S., Purwandaya, B., & Agus Salim, L. (2016). *Sistem Ekonomi Pancasila*.
- Lincoln arsyad, Wahyudi, D., Malisa, M., Fakhrudin, Rofii;, A. M., Ardyan, P. S., Nuraini, Mahrita, Mintarti, S., Fitriadi, Investasi, D. T., Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Arsyad, L., Statistik, B. P., Timur, P. K., Dan, L. T. I-, Ii-, P. T., Sebesar, I-, Wongso, F., ... Wihastuti, L. (2017). Data dan Statistik. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12(1), 13–34.
http://eprints.undip.ac.id/50636/1/07_RESTYARANI%0Ahttp://repository.unika.ac.id/id/eprint/14757%0Ahttp://repository.ut.ac.id/3975/1/ESPA4324-M1.pdf%0Ahttp://www.moe.gov.my/my/Data-dan-Statistik-%0Ahttps://www.pairtradinglab.com/database
- M. Andri Alfarabi, M. H. (2014). Perubahan Struktur Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. 1(3), 173-177.
- Pratama, A. R. (2018). Sistem Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD 1945. *Veritas et Justitia*, 4(2), 304–332. <https://doi.org/10.25123/vej.3067>
- La, K. O., & Ja, a S. a R. (2009). *Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan*. 1–83.
- Gie. (2020). *Mengenal Macam-macam Sistem Ekonomi untuk Keberlangsungan Bisnis*. Accurate.id.

- Ibnu. (2020). *Sistem Ekonomi Indonesia: Pengertian, Sejarah, dan Karakteristiknya*. Accurate.id.
- Nur, Azizah. (2021). *Resume Sistem Ekonomi Sosialis*. OSF Preprints.
- Bonaraja, Lora, Nainggolan, Robert, Muhammad, Marulam, Erniati, Muhammad, Ismail, & Andi. (2020). *Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan Ekonomi Sumber Daya Alam (J. Simarmata (ed.))*.
- Kusuma, S. (2016). Analisis Struktur Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 507–516.
- Putri, R., Paud, P., & Medan, B. (2017). Kompetensi dan Peran Guru dalam Pembelajaran. *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, 293–297.
- Utami, S. N. (2021). *Peran IPTEK dalam Menunjang Kegiatan Ekonomi*. Kompas.com.
- Arifianto, W. & Setiyono, I. (2015). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi pembangunan. Ed. 5*. Yogyakarta : STIM YKPN.
- Firdaus, P. (2020). Pengembangan Wilayah Perbatasan sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Sol Justicia*, 3(1), 74-82.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2021*. Jakarta: BPS.
- <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli/>.
- Umiyati, E. (2014). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Pulau Sumatera. <https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/view/2207/7697>.
- Marpaun, Z. S., & Miranti, D. (2011). Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan di Daerah.
- Nurlina, N., & Chaira, T. M. I. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Distribusi Pendapatan di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 174-182.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. (2016). *Laporan Analisis Evaluasi Hukum dalam Rangka Pemerataan Pembangunan Antarwilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia Fokus Akses Pangan*, 6-7. https://www.bphn.go.id/data/documents/kawasan_timur.pdf.
- D, A. A. F. M., & Marhaeni, A. A. I. N. (2017). Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Kerja Serta Pertumbuhan Ekonomi Bali. *E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 10(2), 535–564.

- Dewi, E., Amar, S., & Sofyan, E. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(2), 176–193.
- Dr. Vladimir, V. F. (1967). Pertumbuhan Ekonomi. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Luis, F., & Moncayo, G. (2011). Analisis Faktor- Faktor yang Memengaruhi Konsumsi di Indonesia Menggunakan Error Connestion Model (ECM).
- Muslim, A. (2011). Peranan Konsumsi dalam Perekonomian Indonesia dan Kaitannya dengan Ekonomi Islam. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(2), 70–82.
- N, N., Sentosa, S., & Idris, I. (2013). Analisis Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 2(3), 7088.
- Nur, E. M. (2012). Konsumsi dan Inflasi Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1), 55–77.
- Dewi, M., & Ayu, I. G. (2015). Pengaruh Pendapatan pada Konsumsi di Indonesia: Pengembangan Model Teoritis dan Pemilihan Model Empiris. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 24-33.
- Parsaulian, B., Aimon, H., & Anis, A. (2013). Analisis Konsumsi Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(2).
- Nugraha, J. P., Alfiah, D., Sinulingga, G., Rojiati, U., Saloom, G., Johannes, R., ... & Beribe, M. F. B. (2021). *Teori Perilaku Konsumen*. Penerbit NEM.
- Handoko, T. H., & Swasta, B. (2008). *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: BPFE.
- Sonia Saxena Davita, P. (2020). *Teori Perilaku Konsumen..*
- Sugiyanto, C. *Teori Kepuasan dan Perilaku Konsumen*.
- Eko, P. (2009). *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset .
- Hakim, A., & Kumalasari, R. (2020). Analisis Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau. 4(2), 12–24.
- Haryati, M. (2016). Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 66–78.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>
- Pakpahan, K. (2003). Strategi Investasi di Pasar Modal. *The Winners*, 4(2), 138.
<https://doi.org/10.21512/tw.v4i2.3838>
- Pratiwi, I., & Prijati. (2015). Pengaruh Faktor Demografi terhadap Jenis Investasi dan Perilaku Investor Pasar Modal Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 4(2), 1–15.
- Puspitasari, J. M., & Sarfiah, S. N. (2019). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, Sektor Infrastruktur terhadap Pertumbuhan

- Ekonomi di Indonesia (Periode Tahun 2010-2017). *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 1(1), 23–41.
- Raharja, P., & Manarung, M. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi) Edisi ketiga*. Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia.
- Reksadana, I. (n.d.). *Konsep dasar investasi reksadana*. 95.
- Sandri, S. H., Samsiah, S., Misral, M., Bakaruddin, B., Rahmayanti, S., & Ardi, H. A. (2019). Investasi Saham bagi Pemula. *Jurnal Pengabdian Untukmu Negeri*, 3(1), 40–45. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v3i1.1105>
- Susanti, E., & Hidayat, N. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur. *Eco-Build Journal*, 4(2), 25–34.
- Tandelilin, E. (2010). Dasar-dasar Manajemen Investasi. *Manajemen Investasi*, 1–34.
- Dr. Nyulistiowati Suryanti, S. M. (n.d.). *Ruang Lingkup Hukum Perusahaan*.
- Drebin , A. (n.d.). *Advanced Accounting*.
- Eddy Winarso, S. M. (2020). *Akuntansi Keuangan Lanjutan 1*. Bogor: Bypass.
- Mubarok, A. (2017). *Akuntansi Keuangan Lanjutan 1*. Pamulang: UNPAM PRESS.
- Rina Andriani, S. M. (2021). *Akuntansi Keuangan Lanjutan 1*. Sleman: CV Budi Utama.
- Sagoro, E. M. (2020). Bentuk Badan Usaha. *Bentuk Badan Usaha*, 6-7.
- Situs Resmi BPKP 2022. (n.d.). <https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2291/14.125-reviu-literatur->
- Surya Pradhana, R. (2019). Wewenang Kepala Daerah dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah The Authority Of The District Head In To Manage. <https://doi.org/10.25216/peratun.222019.235-258>
- Statistik, B. P. (2014). *Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2013*. Jakarta: BPS.
- Sumiyati, Y. (2013). Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(3), 460-481.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara. (n.d.).
- Sari, K. (2019). *Mengenal Koperasi (A. Feryanto (ed.))*. Cempaka Putih.
- Sattar. (2018). *Buku Ajar Ekonomi Koperasi (1st ed.)*. Penerbit Deepublish.
- Sugiarto, R. T. (2021). *Arti, Fungsi dan Peran Koperasi*. HIKAM PUSTAKA.
- Tinggi, S., Hukum, I., Bima, M., & Info, A. (2022). Eksistensi Usaha Perseorangan Pasca Lahirnya UU Cipta Kerja. 6(2), 2486–2493.

- Abhimantara, I. B. (2019). Kedudukan Komanditer (Commanditaire Venootschap) sebagai Corporate Guarantee). 2, 361. doi:10.20473/ntr.v2i3.16227
- Hosein, Zainal. Peran Negara dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945. 23(3), 503-528.
- Saly, Jeane. (2008). Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Ekonomi Kerakyatan.
- Mubyarto. (2014). *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta : Lembaga Suluh nusantara bekerja sama dengan American Institute For Indonesian Studies (AIFIS).
- Andy Pike, A. R.-P. (2017). *Local and Regional Development*. New York: Routledge.
- Aos, K. (2021). Pembangunan Wilayah Secara Berimbang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 47-53.
- Benjamin Higgins, D. J. (2017). *Regional Development Theories & Their Application*. New York: Routledge.
- Daerah, B. P. (2017). *Teori dan Indikator Pembangunan. Indikator Pembangunan*, 1.
- Douglass, M. (1998). A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural-Urban Linkages: an Agenda for Policy Reserach with Reference to Indonesia. *Third World Planning Review*, 1-34.
- DR. Muhammad Idris Patarai, M. (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Makassar: De La Macca.
- Dr. Ridwan, S. M. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Bandung: Alfabeta CV.
- Grigg, D. (1977). Laws of Migration. *Journal of Historical Geography*, 41-54.
- Iskandar Kato, A. F. (2021). *Manajemen Pembangunan Daerah*. Yayasan Kita Menulis.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Teori dan Apikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nursini. (2012). Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah. *Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Teori Aplikasi*, 1-251.
- Siwu, H. F. (2019). Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 1-11.
- Azizah, E. W., Sudarti, & Kusuma, H. (2018). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 167–180.
- Ekananda, M. (2014). *Sistem Pembayaran dan Neraca Pembayaran Internasional*. Modul 1, 1–76. <http://repository.ut.ac.id/3979/1/ESPA4420-M1.pdf>

- Hanum, N., & Sarlia, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Konsumsi di Provinsi Aceh. *Samudra Ekonomika*, 3(1), 84–92.
- Hidayat, R., Poernomo, E., & Waluyo, M. (2018). *Bisnis Ekspor dan Impor*. CV. Selemba Papyrus, 2. <http://eprints.upnjatim.ac.id/7881/>
- Internasional, P. E., Kompetensi, A., Kerjasama, M., Internasional, E., Sistem, M., & Internasional, P. (n.d.). Pembelajaran 3. Ekonomi Internasional. *Ekonomi Internasional A.*, 113–158.
- Luis, F., & Moncayo, G. (2021). *Pendapatan Nasional*.
- Mankiw, Gregory. (2016). *Perdagangan Internasional dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. 191020700149.
- Masniadi, R. (2012). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tabungan, dan Investasi terhadap Tingkat Pendapatan per Kapita Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 69. <https://doi.org/10.22219/jep.v10i1.3718>
- Thanthirige, P., Shanaka, R., Of, A., Contributing, F., Time, T. O., Of, O., Shehzad, A., & Keluarga, D. D. (2016). Analisis Hubungan Laju. 3, 23–40.
- Masrufah, L. (2022). Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Perekonomian: Pengertian, Jenis, Instrumen, Contoh dari Kebijakan Moneter dan Fiskal. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 38-55.
- Warjiyo, P. (2017). *Kebijakan Moneter di Indonesia (Vol. 6)*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Fauziyah, F. (2015). Kebijakan Moneter dalam Mengatasi Inflasi di Indonesia. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1).
- Ginting, R., & Silalahi, D. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 3(2), 157.
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi) Edisi Ketiga*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014*. Jakarta.
- Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 152.
- Helianny, I. (2021). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. *Prosiding Seminar Stiami*, 17.

- Redaksi OCBC NISP. (2021). *Kebijakan Fiskal: Pengertian, Tujuan, Instrumen, Contoh Kebijakan Fiskal*.
- Prasetyo, P. E. (2009;2011). *Fundamental Makro Ekonomi; sebuah Pengetahuan Tingkat Dasar dan Menengah serta Advance untuk Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Beta Offset Yogyakarta.
- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). *Strategi Kebijakan Fiskal terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid*
- Mangala, G. D. (2020). Analisis Perkembangan dan Proyeksi Perekonomian. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), 146-152.
- Indonesia Dari Tahun 2014–2020 Setelah Adanya Pandemi Corona. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1-5.
- Priyarsono, D. S., Tambunan, M., & Firdaus, M. (2012). Perkembangan Konsumsi dan Penyediaan Energi dalam Perekonomian Indonesia. *IJAE (Jurnal Ilmu Ekonomi Pertanian Indonesia)*, 1(02).
- Dan, S. P. (1999). Inflasi Di Indonesia . 1(1), 54–67.
- Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. (2022). *Tinjau Kebijakan Moneter Maret 2022*. Bank Indonesia.
[https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Tinjauan-Kebijakan-Moneter-Maret-2022.aspx#:~:text=Rapat Dewan Gubernur \(RDG\) Bank,Facility sebesar 4%2C25%25](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Tinjauan-Kebijakan-Moneter-Maret-2022.aspx#:~:text=Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank,Facility sebesar 4%2C25%25).
- Eka Mulia Nurul Al Amin. (2020). *Kebijakan Moneter di Indonesia*. In Google Buku (Issue 6).
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=KEBIJAKAN+PEMERINTAH+MEMPERTAHANKAN+BI+7-DAY+REVERSE+REPO+RATE+SEBESAR+4%2C50%25&btnG=
- Komunikasi, D. (2022). *Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan IV 2021 Tetap Baik, Ketahanan Eksternal Terjaga*. Bank Indonesia.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_245822.aspx
- Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia pada Masa Pandemi COVID- 19 dalam Meningkatkan Perekonomian. *Ekonomi*, 2021(3), 15.
- Limanseto, H. (2022). *Mitigasi Tantangan dan Risiko Pencapaian Inflasi Tahun 2022*. Pemerintah dan Bank Indonesia Perkuat Koordinasi dan Sinergi Kebijakan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3903/mitigasi-tantangan-dan-risiko-pencapaian-inflasi-tahun-2022-pemerintah-dan-bank-indonesia-perkuat-koordinasi->

dan-sinergi-kebijakan

- Luis, F., & Moncayo, G. (n.d.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. 3, 5.
- Soleha, Arin Ramadhiani. (2020). Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekombis*, 6(2).
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *Buku Outlook Perekonomian Indonesia Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan*.
- Indonesia, B. (2020). *Bersinergi Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional*. Jakarta: Bicara.
- Keuangan, K. S. (2022). *Sinergi Memperketat Pemulihan Ekonomi dan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (p. 6)*. Jakarta: Komite Stabilitas Sistem Keuangan (Kssk).
- Parasasti, Mayang Agnezta. (2022) Kebijakan Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Perspektif Ekonomi. *Strategi Pertahanan Laut*, 7(2), 159-173.
- Widodo, Ulfa Puspa Wanti, and Mutiara Rachma Ardhiani. "Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 2112-2126.
- Sugiyono, Agus. (2016). Outlook energi Indonesia 2015-2035: Prospek energi baru terbarukan. *Jurnal Energi dan Lingkungan*, 12, 87-96

